



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RPJMD SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025-2029**

2025



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025**



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pada Kabupaten Bangli.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dimasa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Bangli untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang Pembangunan Daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan ada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

16. Strategi adalah langkah berisikan Program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai Sasaran RPJMD Semesta Berencana.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
 - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 3

- (1) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
 - c. BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

RKPD Semesta Berencana tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



† DEWA BAGUS RIANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(3,44/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757). Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik; dan
5. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*).

Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi: (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
1.4 Maksud Dan Tujuan.....	I-8
1.4.1 Maksud.....	I-8
1.4.2 Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika RPJMD Kabupaten Bangli	I-10

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	II-1
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	II-14
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-17
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-23
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-28
2.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-31
2.1.7 Demografi.....	II-32
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-38
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-38
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua	II-44
2.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata.....	II-47
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-49
2.2.5 Beragama Malahat dan Berkebudayaan Maju	II-51
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	II-52
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-56
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-56
2.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-58
2.3.3 Transformasi Digital	II-64
2.3.4 Integrasi Ekonomi dan Global.....	II-65
2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-70
2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro	II-75
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-77
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	II-77
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II-79
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.....	II-80
2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Daerah	II-84
2.5 Standar Pelayanan Minimal.....	II-104

2.6	Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli	II-108
2.7	Arahan Pembangunan Wilayah Kabupaten Bangli	II-116
2.7.1	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangli	II-116
2.7.2	Highlight Intervensi Pembangunan di Kabupaten Bangli	II-117
2.7.3	Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali di Kabupaten Bangli	II-121
2.8	BUMD Pendukung Pembangunan Kabupaten Bangli	II-121
2.9	Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	II-125
2.9.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020 - 2024	II-126
2.9.2	Neraca Daerah Kabupaten Bangli	II-148
2.10	Proyeksi Keuangan Daerah	II-152
2.10.1	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 - 2030	II-152
2.11	Permasalahan dan Isu Strategis	II-157
2.11.1	Permasalahan Pembangunan	II-157
2.11.2	Isu Strategis	II-159

BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1	Visi Pembangunan Jangka Menengah	III-2
3.2	Misi Pembangunan Jangka Menengah	III-13
3.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah	III-20
3.4	Strategi Pembangunan Jangka Menengah	III-28
3.5	Arah Kebijakan	III-44
3.6	Program Prioritas Daerah	III-50

BAB 4 PROGRAM PRANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-23

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Masing – Masing Kecamatan di Kabupaten Bangli	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Produksi Buah Jeruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	II-5
Tabel 2.3	Jumlah Produksi Kopi Arabika Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	II-6
Tabel 2.4	Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik yang Datang Ke Obyek Wisata di Kabupaten Bangli	II-7
Tabel 2.5	Komposisi dan Luas Kawasan Lindung Kabupaten Bangli.....	II-11
Tabel 2.6	Perhitungan Koefisien Limpasan di Tiap – Tiap Kecamatan di Kabupaten Bangli	II-18
Tabel 2.7	Daya Dukung Pangan Kabupaten Bangli Berdasarkan Kecamatan.....	II-19
Tabel 2.8	Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Bangli.....	II-19
Tabel 2.9	Daya Tampung Kabupaten Bangli Berdasarkan Kecamatan.....	II-21
Tabel 2.10	DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Bangli	II-22
Tabel 2.11	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli 2019 - 2024	II-25
Tabel 2.12	Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024	II-26
Tabel 2.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	II-29
Tabel 2.14	Persentase Sampah Dikelola di Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024.....	II-31
Tabel 2.15	Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali	II-32
Tabel 2.16	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020 - 2025	II-33
Tabel 2.17	Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024	II-34
Tabel 2.18	Pertumbuhan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2025.....	II-34
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2016 - 2024	II-36
Tabel 2.20	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus	II-37
Tabel 2.21	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025 - 2029	II-38
Tabel 2.22	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024	II-40
Tabel 2.23	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2012 - 2024.....	II-42
Tabel 2.24	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangli Tahun 2019 - 2024	II-43
Tabel 2.25	Usia Harapan Hidup Saat Lahir di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024	II-44
Tabel 2.26	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bangli Tahun 2024	II-45
Tabel 2.27	Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Bangli 2019 - 2024	II-46
Tabel 2.28	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Bangli 2019 - 2024	II-47
Tabel 2.29	Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali	II-48
Tabel 2.30	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali	II-48
Tabel 2.31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2023 - 2024	II-49

Tabel 2.32	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan di Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024.....	II-50
Tabel 2.33	Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Dalam Urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024..	II-51
Tabel 2.34	Tabel Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024	II-53
Tabel 2.35	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024	II-54
Tabel 2.36	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2024.....	II-55
Tabel 2.37	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024	II-57
Tabel 2.38	Nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangli Tahun 2024 Berdasarkan Lapangan Usaha (Dalam Milyar Rupiah)	II-60
Tabel 2.39	Jumlah UMKM Di Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2023	II-61
Tabel 2.40	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangli Tahun 2019 - 2024.....	II-62
Tabel 2.41	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024.....	II-64
Tabel 2.42	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Bangli.....	II-65
Tabel 2.43	Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama Tahun 2024.....	II-66
Tabel 2.44	Impor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama Tahun 2024.....	II-67
Tabel 2.45	Jumlah Investor (PMDN/PMA) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.46	Perkembangan Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2.47	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya Di Provinsi Bali Tahun 2024.....	II-81
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bangli.....	II-85
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024	II-105
Tabel 2.50	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2026 dan 2030	II-117
Tabel 2.51	Sasaran Pembangunan di Kabupaten Bangli	II-117
Tabel 2.52	Daftar Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, Tahun 2025-2030	II-121
Tabel 2.53	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.54	Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %).....	II-128
Tabel 2.55	Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %).....	II-130
Tabel 2.56	Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)	II-132
Tabel 2.57	Perkembangan Komposisi Struktur Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)	II-133
Tabel 2.58	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.59	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Daerah Kabupaten	

	Bangli Tahun 2020-2024.....	II-135
Tabel 2.60	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.61	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Modal Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.62	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024.....	II-140
Tabel 2.63	Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Transfer Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.64	Perkembangan Struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.65	Perkembangan Struktur Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-143
Tabel 2.66	Perkembangan Struktur Pembiayaan Netto Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.67	Perkembangan Struktur Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024.....	II-145
Tabel 2.68	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Bangli	II-146
Tabel 2.69	Neraca Daerah Kabupaten Bangli Tahun anggaran 2020-2024.....	II-149
Tabel 2.70	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2030	II-154
Tabel 2.71	Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Bangli	II-157
Tabel 2.72	Identifikasi potensi dan permasalahan daerah Kabupaten Bangli	II-160
Tabel 2.73	Perumusan Isu-isu Strategis Kabupaten Bangli	II-170
Tabel 3.1	Keselarasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya.	III-8
Tabel 3.2	Keselarasan Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.....	III-15
Tabel 3.3	Keselarasan Misi dan Bidang Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.....	III-17
Tabel 3.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	III-19
Tabel 3.5	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	III-20
Tabel 3.6	Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli.....	III-22
Tabel 3.7	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli	III-29
Tabel 3.8	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangli	III-45
Tabel 3.9	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli	III-51
Tabel 3.10	Target Kinerja dan Pagu Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli.....	III-63
Tabel 4.1	Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2030	IV-3
Tabel 4.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangli Tahun 2025-2030	IV-24
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2030	IV-25

Tabel 4.4	Penetapan Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025-2030	IV-49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterikatan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangli dengan Dokumen Pembangunan Lainnya	I-8
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangli.	II-3
Gambar 2.2	Jumlah Produksi Buah Jeruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	II-5
Gambar 2.3	Jumlah Produksi Kopi Arabika Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	II-6
Gambar 2.4	Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik Yang Datang Ke Obyek Wisata di Kabupaten Bangli	II-8
Gambar 2.5	Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik Yang Datang Ke Obyek Wisata di Kabupaten Bangli	II-9
Gambar 2.6	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli Tahun 2019 - 2024.....	II-25
Gambar 2.7	Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024	II-27
Gambar 2.8	Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Bangli Tahun 2021 - 2024	II-28
Gambar 2.9	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024.....	II-30
Gambar 2.10	Grafik Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025	II-33
Gambar 2.11	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Terhadap Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Pada Triwulan III Tahun 2024	II-39
Gambar 2.12	Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024	II-40
Gambar 2.13	Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2021 - 2024	II-42
Gambar 2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2019 - 2024	II-43
Gambar 2.15	Grafik Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2024.....	II-54
Gambar 2.16	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangli (Dalam Milyar Rp)....	II-59
Gambar 2.17	Perbandingan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangli Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 (Dalam Milyar Rupiah).....	II-61
Gambar 2.18	Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bangli Tahun 2019 - 2024.....	II-63
Gambar 2.19	Grafik Perkembangan Jumlah Investor (PMDN/PMA) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	II-69
Gambar 2.20	Grafik Perkembangan Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024.....	II-70
Gambar 2.21	Perkembangan Indeks Infrastruktur dan Persentase Sarana Prasarana Publik Dalam Keadaan Baik Kabupaten Bangli	II-74
Gambar 2.22	Perkembangan Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 - 2024	II-72
Gambar 2.23	Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Bangli	II-73
Gambar 2.24	Perkembangan Cakupan Pelayanan Telekomunikasi di Kabupaten	

Bangli.....	II-74
Gambar 2.25 Perkembangan Permukiman Layak Huni di Kabupaten Bangli	II-75
Gambar 2.26 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Bali, 2023 - 2024	II-75
Gambar 2.27 Perkembangan Inflasi Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, dan Kota Denpasar, 2024.	II-76
Gambar 2.28 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangli Tahun 2022 - 2024.	II-78
Gambar 2.29 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024.	II-126
Gambar 2.30 Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024 (Dalam%).....	II-128
Gambar 2.31 Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam%)	II-130
Gambar 2.32 Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024 (Dalam%).....	II-132
Gambar 2.33 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024	II-133
Gambar 2.34 Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024 (Dalam%).....	II-136
Gambar 2.35 Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024	II-138
Gambar 2.36 Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Modal Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024 (Dalam%).....	II-139
Gambar 2.37 Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024 (Dalam%).....	II-140
Gambar 2.38 Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Transfer Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024 (Dalam%).....	II-141
Gambar 2.39 Perkembangan Struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024	II-143
Gambar 2.40 Perkembangan Struktur Pembiayaan Netto Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024	II-144
Gambar 2.41 Perkembangan Struktur Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Bangli Tahun 2020 - 2024.....	II-141

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD disusun sebagai bentuk pengejawantahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangli.

Kabupaten Bangli baru saja melewati tahapan pemilihan kepala daerah dan saat ini telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati baru yang akan menjalankan pemerintahan untuk periode 2025-2030. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, RPJMD disusun untuk menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan yang konkret dan dapat diimplementasikan secara sistematis. RPJMD ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan partisipatif.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa setiap daerah wajib menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyusunan dan evaluasi RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki keselarasan dalam melaksanakan program pembangunan.
3. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah dengan memastikan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli.
4. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Bali.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kabupaten Bangli sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pesisir, memiliki tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan daerah. Potensi unggulan di sektor pertanian, kehutanan, pariwisata alam, serta pelestarian budaya dan adat istiadat harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah. Oleh karena itu, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 harus dirancang dengan memperhatikan pembangunan berbasis potensi lokal, keseimbangan antara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, RPJMD ini akan menjadi pedoman utama dalam mengakselerasi pembangunan Kabupaten Bangli menuju arah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus tetap memegang teguh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali. Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun sektor akademik dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bangli yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. RPJMD disusun sebagai dokumen strategis

lima tahunan yang harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bangli.

Hubungan antar dokumen perencanaan ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kebijakan pembangunan, sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak optimal dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Berikut adalah hubungan antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi arah pembangunan nasional dalam 20 tahun ke depan. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 harus mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan, ekonomi inklusif, penguatan daya saing daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang merupakan pedoman pembangunan lima tahunan di tingkat nasional. RPJMN menetapkan prioritas pembangunan nasional yang harus diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah, seperti:

- Pembangunan ekonomi berbasis keunggulan daerah, termasuk penguatan sektor pertanian dan pariwisata berkelanjutan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.
- Pembangunan infrastruktur strategis, termasuk transportasi dan konektivitas antarwilayah.
- Pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, yang relevan bagi Bangli sebagai kabupaten dengan ekosistem hutan dan danau yang perlu dijaga.

Dengan demikian, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli harus selaras dengan sasaran nasional dalam RPJMN, sehingga program pembangunan daerah dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

RPJPN juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan berbasis keunggulan daerah, yang sejalan dengan upaya Kabupaten Bangli dalam mengoptimalkan sektor pertanian, pariwisata alam, dan ekonomi berbasis budaya sebagai sektor unggulan.

3. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045

RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 merupakan dokumen yang mengatur arah pembangunan Bali dalam jangka panjang, dengan menitikberatkan pada pembangunan berbasis kearifan lokal, pelestarian budaya, dan keseimbangan lingkungan serta ekonomi.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 harus mendukung sasaran strategis dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, terutama dalam aspek:

- Pelestarian budaya dan adat Bali sebagai identitas daerah.
- Penguatan ekonomi berbasis desa adat, pertanian, dan pariwisata spiritual.
- Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam, khususnya kawasan hutan dan danau.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli berperan dalam menerjemahkan arah pembangunan jangka panjang provinsi ke dalam kebijakan daerah yang lebih spesifik dan operasional.

4. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2029, yang mengarahkan prioritas pembangunan lima tahunan di tingkat provinsi. Beberapa aspek utama yang harus diselaraskan meliputi:

- Penguatan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam yang berkelanjutan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif dan UMKM.
- Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar kabupaten/kota di Bali.
- Pelestarian lingkungan, khususnya perlindungan kawasan hutan dan sumber daya air.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah dapat mendukung visi pembangunan Bali yang lebih luas.

5. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045

RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari implementasi tahap awal RPJPD, sehingga harus memastikan pencapaian sasaran strategis jangka panjang pembangunan daerah.

Aspek utama dalam RPJPD yang menjadi acuan RPJMD meliputi:

- Pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya.
- Penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan sektor pertanian yang lebih modern.
- Pelestarian lingkungan sebagai aset utama pembangunan daerah.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 harus memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan daerah, agar arah pembangunan jangka panjang dapat tercapai secara optimal.

6. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

Hubungan antara RPJMD dan RKPD meliputi:

- RKPD menjabarkan prioritas tahunan pembangunan daerah, yang ditetapkan dalam RPJMD.
- Menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun program kerja dan penganggaran tahunan.
- Mekanisme evaluasi dan penyesuaian strategi pembangunan daerah, sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Dengan demikian, RPJMD memberikan arah strategis jangka menengah, sementara RKPD memastikan implementasi program secara tahunan.

7. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangli adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang dan pola pengembangan wilayah. Hubungan antara RPJMD dan RTRW meliputi:

- Kesesuaian antara kebijakan pembangunan dengan zonasi tata ruang yang telah ditetapkan.
- Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis tata ruang.
- Pemanfaatan lahan yang mendukung pengembangan sektor unggulan daerah.

RPJMD harus memastikan bahwa pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan tata ruang, untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

8. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD adalah dokumen yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. KLHS memastikan bahwa setiap kebijakan dalam RPJMD:

- Tidak merusak keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.
- Memperhatikan dampak lingkungan dari program pembangunan daerah.
- Menetapkan indikator pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

9. Hubungan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2045

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tidak

hanya menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tetapi juga secara substantif dan filosofis sejalan dan selaras dengan arah pembangunan Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan dalam Perda No. 4 Tahun 2023 mengamanatkan transformasi jangka panjang Bali menuju Pulau yang hijau, tangguh, berdaya saing, spiritual, dan berdaulat secara budaya dan ekonomi, dengan landasan Tri Hita Karana dan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Bangli berperan sebagai dokumen turunan operasional yang menjabarkan visi besar tersebut ke dalam program, sasaran, dan indikator kinerja daerah selama lima tahun ke depan.

Secara khusus, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 selaras dengan enam bidang prioritas dalam Haluan 100 Tahun Bali Masa Depan, seperti:

- Pembangunan manusia unggul berbasis budaya dan spiritualitas,
- Transformasi ekonomi daerah melalui diversifikasi dan kedaulatan pangan,
- Penguatan desa adat dan komunitas lokal, serta
- Pelestarian lingkungan dan tata ruang berlandaskan keseimbangan ekosistem.

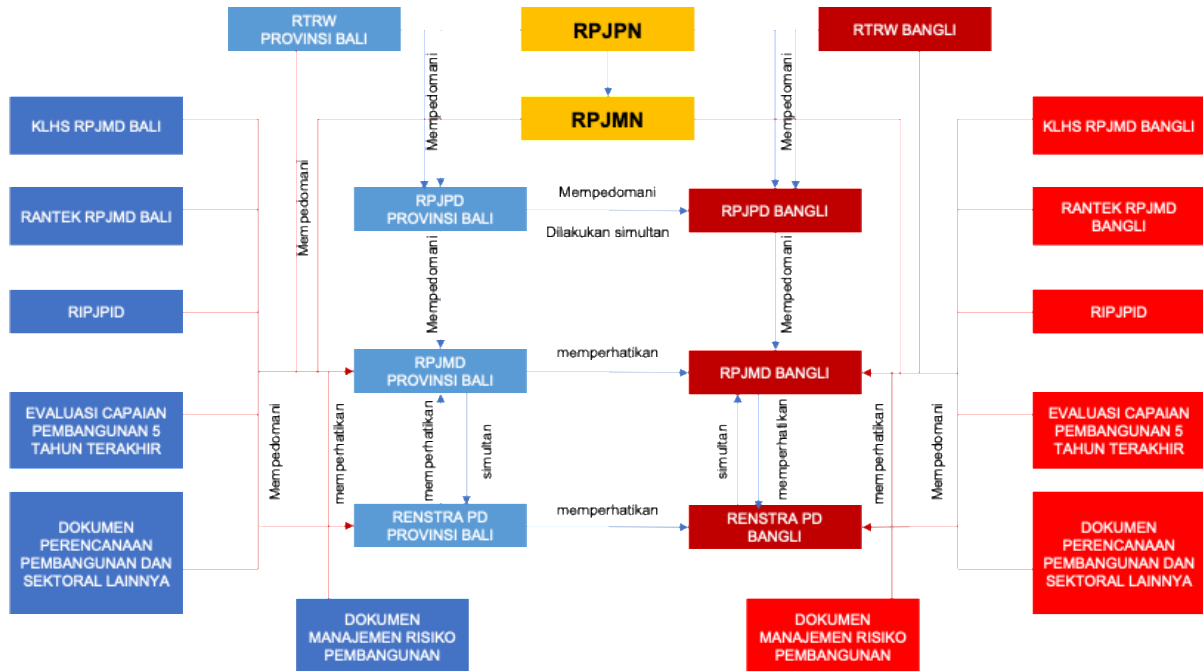
Dengan pendekatan semesta berencana dan semangat kolaboratif “pesaJE NGayaH”, RPJMD Bangli memperkuat posisi daerah sebagai bagian integral dari orkestrasi pembangunan Bali dalam jangka panjang, sekaligus mempertegas peran Bangli sebagai poros penguat spiritualitas, kearifan agraris, dan ketahanan budaya di Bali Tengah.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Keselarasan ini penting untuk memastikan efektivitas pembangunan, sehingga kebijakan daerah dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bangli.

Keterkaitan penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1.

Keterkaitan Dokumen RPJMD Semesta berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Penyesuaian Terhadap Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Th.2025-2029

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025-2029

1.4.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 ini adalah untuk memastikan kesinambungan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Bangli guna mewujudkan pembangunan yang terencana, sistematis dan terintegrasi sesuai dengan amanat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi:

1. Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
2. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga program kerja setiap Perangkat Daerah memiliki keterpaduan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi terhadap kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
4. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan sebagai referensi dalam memahami arah kebijakan pembangunan daerah dan mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD juga berfungsi untuk:

- Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode 2025-2029.
- Memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah terarah, berkesinambungan, dan dapat diukur hasilnya.
- Menciptakan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
- Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga alat strategis dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Bangli secara lebih terukur dan akuntabel.

1.4.2. Tujuan

Tujuan utama penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 adalah untuk menyediakan kerangka perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan terukur dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, tujuan penyusunan RPJMD ini meliputi:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Bangli selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan serta tantangan pembangunan daerah guna menentukan kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengatasi isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Bangli.
3. Menjabarkan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan RPJPD, RPJMD Provinsi Bali, dan RPJMN, sehingga kebijakan pembangunan daerah memiliki kesinambungan dengan perencanaan pembangunan yang lebih luas.
4. Menetapkan indikator kinerja pembangunan daerah yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam mengukur efektivitas dan dampak dari kebijakan pembangunan yang diterapkan.
5. Menjamin keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga alokasi anggaran dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
6. Mendorong pembangunan daerah yang berbasis potensi unggulan Kabupaten Bangli, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sosial dan budaya.
7. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, DPRD, masyarakat, serta sektor swasta, guna mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kolaborasi multi-stakeholder.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan daerah yang strategis, terukur, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025-2029

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 memuat substansi sebagai berikut:

- **BAB 1 PENDAHULUAN:**

Bagian ini membuka dokumen RPJMD dengan memberikan pengantar yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- **BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH:**

Bagian ini menyajikan informasi komprehensif tentang:

1. kondisi wilayah secara keseluruhan. Ini mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.
2. Situasi keuangan daerah, termasuk sumber-sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran selama tahun 2020-2024. Analisis keuangan ini mencakup data historis dan proyeksi pendapatan serta pengeluaran untuk tahun anggaran 2025-2029.
3. permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi oleh daerah, mencakup tantangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Analisis ini menjadi dasar perumusan tujuan, dan sasaran pembangunan dalam RPJMD.

- **BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bagian ini memuat:

1. Visi dan Misi pembangunan yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan selama tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran dilengkapi dengan target capaian selama periode tahun 2025-2029.
2. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029, dan Program-Program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.
3. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

- **BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat:

1. Daftar program Perangkat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
2. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.
3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan

4. Target penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

▪ **BAB 5 PENUTUP**

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Letak Geografis dan Batas Administrasi Kabupaten Bangli

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043, Kabupaten Bangli terletak pada 8° 18' 48.027" Lintang Selatan dan 115° 20' 47.299" Bujur Timur. Secara fisik, wilayah bagian selatan Kabupaten Bangli merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak tertinggi wilayah ini adalah Puncak Penulisan, dimana terdapat Gunung Batur dengan kepundannya. Kabupaten yang sangat terkenal dengan komoditas jeruk Kintamani ini berbatasan langsung dengan lima kabupaten lainnya mulai dari Klungkung, Buleleng, Karangasem, Gianyar, dan Badung.

Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan dan 72 desa/kelurahan yaitu: Kecamatan Susut (9 Desa), Kecamatan Bangli (4 Kelurahan dan 5 Desa), Kecamatan Tembuku (6 Desa) dan Kecamatan Kintamani (48 Desa) dan sebanyak 170 desa adat serta 361 banjar adat. Berikut adalah rincian pembagian administratif masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangli.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bangli

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Adat	Jumlah Banjar Adat
1	Bangli	5.066,84	9	25	68
2	Susut	5.742,79	9	47	53
3	Tembuku	4.924,84	6	37	62
4	Kintamani	36.973,79	48	61	178
Total		52.676	72	170	361

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bangli, 2024

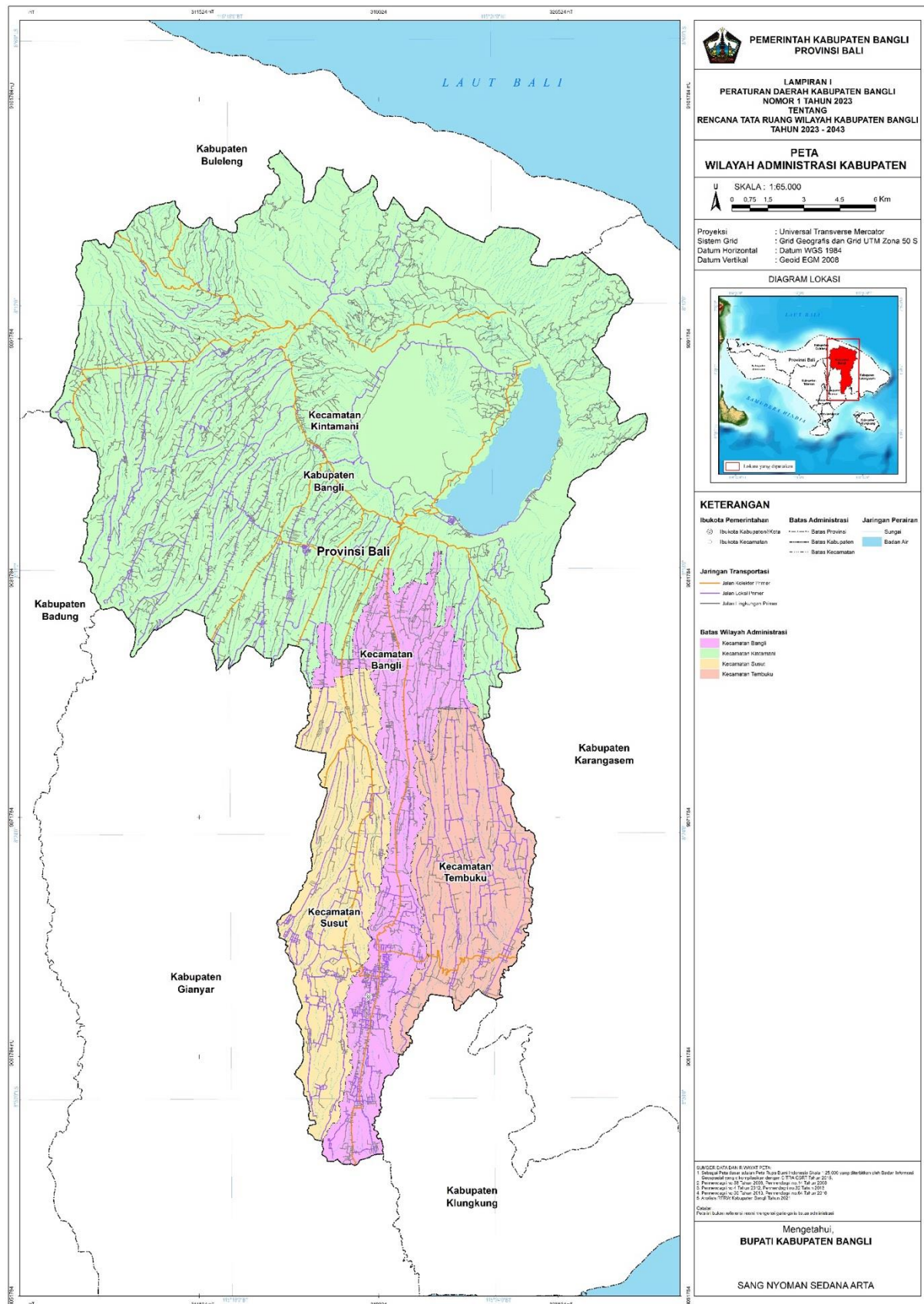
Luas wilayah Kabupaten Bangli berdasarkan RTRW Bangli Tahun 2023-2043 adalah 52.676 Ha. Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli, meliputi Kelurahan Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Bangli yaitu:

Sebelah Utara	: Kabupaten Buleleng
Sebelah Timur	: Kabupaten Karangasem
Sebelah Selatan	: Kabupaten Klungkung
Sebelah Barat	: Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung

Batas-batas wilayah administrasi (batas daerah) Kabupaten Bangli dengan kabupaten sekitarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah utara dengan Kabupaten Buleleng berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
- 2) Batas sebelah timur dengan Kabupaten Karangasem berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
- 3) Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Klungkung berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali
- 4) Batas sebelah barat dengan Kabupaten Gianyar berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
- 5) Batas sebelah barat dengan Kabupaten Badung berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangli



B. Peran Strategis Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli memiliki potensi pertanian dan potensi wisata alam yang sangat diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Hal ini didukung oleh kondisi topografi Kabupaten Bangli yang berada pada ketinggian antara 100-2.200 mdpl, dengan puncak tertinggi adalah puncak penulisan. Variasi ketinggian ini menyebabkan Kabupaten Bangli memiliki perbedaan suhu yang cukup beragam.

Kecamatan Kintamani merupakan kawasan yang sebagian besar berada di atas 1.000 mdpl sehingga memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan Kecamatan lainnya di Kabupaten Bangli. Selain itu Kabupaten Bangli juga di dukung dengan keberadaan Kaldera Batur memberikan Kabupaten Bangli berbagai peran strategis yang besar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bangli maupun Provinsi Bali pada umumnya.

1) Peran Perekonomian

Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten dengan penghasilan hasil pertanian dan perkebunan terbesar di Provinsi Bali. hal ini didukung dengan kondisi iklim serta tanah subur yang dapat mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Salah satu produk unggulan yang ada di Kabupaten Bangli yaitu Jeruk. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Bali mengenai jumlah produksi jeruk di Provinsi Bali, Kabupaten Bangli menempati posisi sebagai salah satu daerah dengan produksi jeruk terbesar di Provinsi Bali. Pada Tahun 2021, Kabupaten Bangli tercatat memiliki produksi buah jeruk sebesar 104.528 Ton. Meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 87.011 Ton dan kembali menurun di Tahun 2023 menjadi 73.063 Ton. Pada Tahun 2024 produksi buah jeruk kembali mengalami peningkatan menjadi 83.799 Ton.

Meskipun sempat mengalami tren penurunan produksi dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Bangli tetap menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap total produksi jeruk di Bali. Pada tahun 2021, Bangli merupakan daerah dengan produksi jeruk tertinggi kedua setelah Kabupaten Gianyar. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Bangli menjadi produsen jeruk terbesar di Provinsi Bali.

Secara keseluruhan, produksi jeruk di Provinsi Bali mengalami tren penurunan dari 241.617 ton pada 2021 menjadi 135.071 ton pada 2022, 131.164 ton pada 2023 hingga pada tahun 2024 menjadi 123.386 Ton. Penurunan ini juga terjadi di Kabupaten Bangli, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, ketersediaan lahan produktif, atau perubahan pola tanam petani.

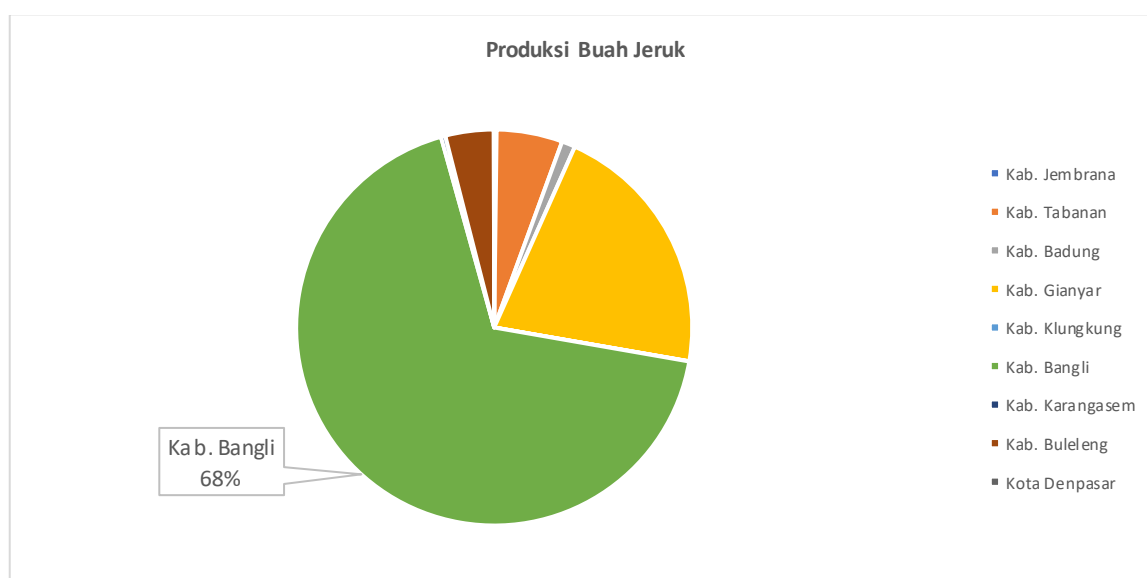
Meskipun demikian, Kabupaten Bangli tetap memiliki potensi besar sebagai sentra produksi jeruk di Bali. Langkah-langkah seperti peningkatan teknik budidaya, diversifikasi varietas jeruk unggulan, serta dukungan dari pemerintah dan sektor terkait dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan produksi buah jeruk di wilayah ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Produksi Buah Jeruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten kota	Produksi Buah Jeruk Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	138	97	116	154	242
Kab. Tabanan	123	1.340	429	2.700	6.638
Kab. Badung	3.217	3.307	2.659	1.861	1.362
Kab. Gianyar	351.295	126.101	39.654	45.237	25.974
Kab. Klungkung	42	313	91	3	19
Kab. Bangli	131.587	104.528	87.011	73.063	83.799
Kab. Karangasem	420	386	418	433	442
Kab. Buleleng	3.560	5.521	4.657	7.686	4.867
Kota Denpasar	11	23	36	28	43
Provinsi Bali	490.393	241.617	135.071	131.164	123.386

Sumber: Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST, BPS Provinsi Bali

Gambar 2.2.
Jumlah Produksi Buah Jeruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024



Sumber: Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST, BPS Provinsi Bali

Selain Jeruk, Kabupaten Bangli juga merupakan salah satu produsen terbesar Kopi Arabika di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Bali, Pada Tahun 2021, produksi Kopi Arabika di Kabupaten Bangli mencapai 2.173 Ton, namun sempat mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 menjadi 1.960 Ton dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2.164 Ton.

Meskipun terjadi tren penurunan produksi dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Bangli tetap menjadi penghasil kopi arabika terbesar di Bali, mengungguli daerah lain seperti Kabupaten Buleleng yang juga memiliki produksi kopi arabika cukup tinggi.

Sebagai daerah yang memiliki karakteristik topografi dataran tinggi, Kabupaten Bangli memiliki kondisi yang sangat mendukung untuk budidaya kopi arabika berkualitas. Namun, tren penurunan produksi ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan para petani kopi untuk meningkatkan produktivitas, baik melalui peremajaan tanaman, penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien, maupun peningkatan akses pasar bagi petani kopi arabika di Bangli.

Dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta jumlah produksi, kopi arabika dari Kabupaten Bangli berpotensi semakin dikenal di pasar nasional maupun internasional sebagai salah satu produk unggulan dari Bali.

Tabel 2.3.

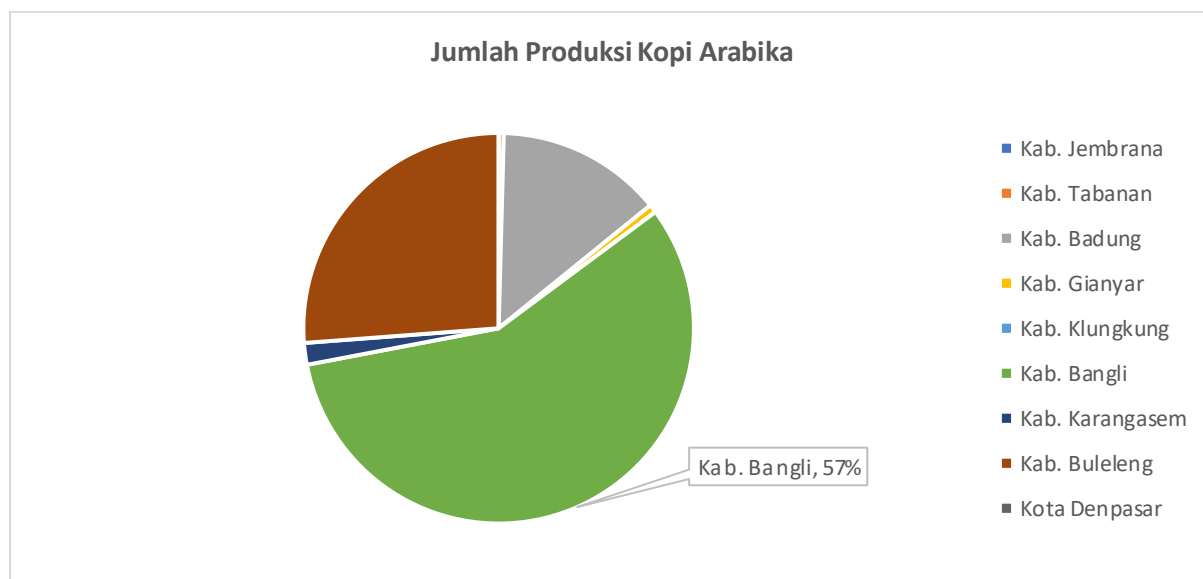
Jumlah Produksi Kopi Arabika Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Produksi Kopi Arabika Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	-	-	-	-	-
Kab. Tabanan	24	32	23	23	16
Kab. Badung	568	562	561	460	520
Kab. Gianyar	24	26	21	28	26
Kab. Klungkung	0	-	-	-	-
Kab. Bangli	2.249	2.173	2.082	1.960	2.164
Kab. Karangasem	73	77	70	65	68
Kab. Buleleng	1.252	1.114	1.135	1.107	992
Kota Denpasar	-	-	-	-	-
Provinsi Bali	4.189	3.983	3.892	3.644	3.786

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Gambar 2.3.

Jumlah Produksi Kopi Arabika Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

2) Peran Pariwisata

Daya tarik wisata merupakan komponen utama dalam sistem kepariwisataan yang memunculkan permintaan untuk perjalanan wisata. Kabupaten Bangli memiliki peran strategis dalam sektor pariwisata di Provinsi Bali dikarenakan keunggulan alam, budaya dan sejarah yang dimiliki. Dengan letak geografis di dataran tinggi serta keberadaan Kaldera Batur yang telah diakui sebagai bagian dari Global Geopark Network UNESCO, Kabupaten Bangli menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan asing dan domestik. Selain memiliki daya tarik wisata alam, Kabupaten Bangli juga memiliki daya tarik wisata Budaya seperti Desa Penglipuran dan Desa Trunyan yang sering menjadi tujuan destinasi wisata di Bali. Hal ini menyebabkan sektor pariwisata sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali pada umumnya.

Menurut BPS Kabupaten Bangli, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangli pada Tahun 2024 mencapai 1.637.819 wisatawan yang terdiri dari 461.851 wisatawan asing dan 1.175.968 wisatawan domestik. Dalam rentang waktu Tahun 2020 sampai tahun 2024, sektor pariwisata di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021 sektor pariwisata di Kabupaten Bangli mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan Pandemi COVID-19. Jika dilihat dari jumlah kunjungan yang ada pada Tahun 2020 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bangli hanya berjumlah 194.445 wisatawan dan menurun kembali di Tahun 2021 menjadi 170.213 wisatawan. Jumlah kunjungan ini sangat jauh menurun jika dilihat dari jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya.

Sektor pariwisata di Kabupaten Bangli kembali mengalami peningkatan setelah Pandemi COVID-19 berakhir pada Tahun 2022 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.161.901 wisatawan dan meningkat pesat pada tahun 2023 sebanyak 3.134.196 wisatawan, namun kembali menurun pada tahun 2024 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.637.819 wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Bangli sangat besar. Selain keindahan alam dan kekayaan budaya sektor pariwisata juga didukung dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata. Untuk lebih jelasnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangli dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.

Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik yang Datang ke Obyek Wisata di Kabupaten Bangli Tahun 2024

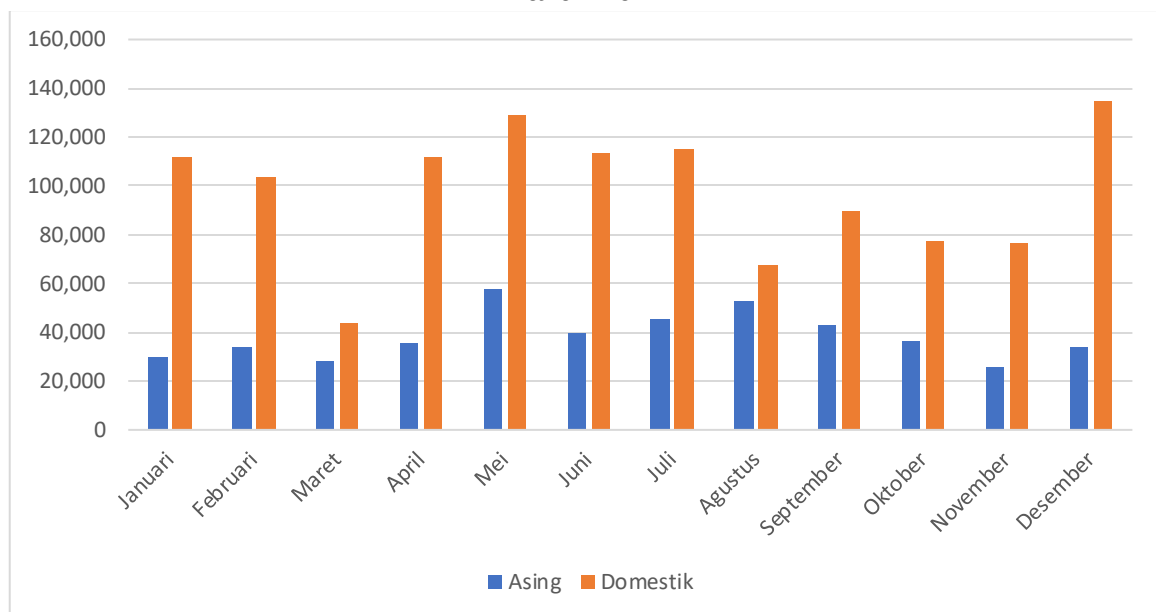
Bulan	Asing	Domestk	Jumlah
Januari	29.538	111.904	141.442
Februari	34.297	103.406	137.703
Maret	28.406	43.589	71.995
April	35.515	112.221	147.736
Mei	57.502	129.412	186.914
Juni	39.488	113.792	153.280

Bulan	Asing	Domestik	Jumlah
Juli	45.068	115.284	160.352
Agustus	52.620	67.343	119.963
September	42.825	89.837	132.662
Oktober	36.669	77.489	114.158
November	25.568	76.509	102.077
Desember	34.355	135.182	169.537
Jumlah Total			
Tahun 2024	461.851	1.175.968	1.637.819
Tahun 2023	894.164	2.240.032	3.134.196
Tahun 2022	237.608	924.293	1.161.901
Tahun 2021	1.268	168.945	170.213
Tahun 2020	122.639	71.806	194.445

Sumber: BPS Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli Dalam Angka 2025

Gambar 2.4.

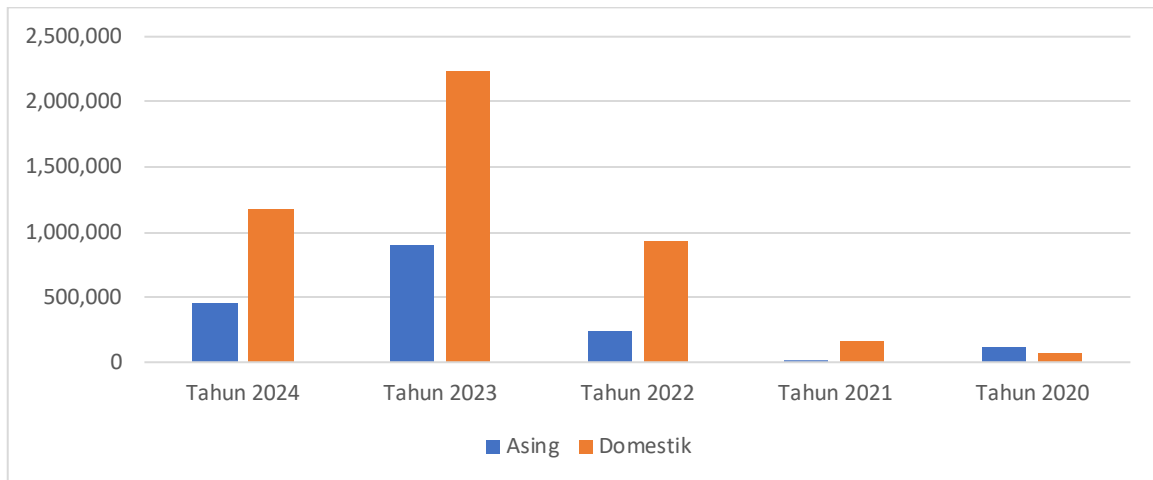
Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik yang Datang ke Obyek Wisata di Kabupaten Bangli Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli Dalam Angka 2025

Gambar 2.5.

Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik yang Datang ke Obyek Wisata di Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli Dalam Angka 2025

3) Peran Lingkungan

Kabupaten Bangli memiliki peran lingkungan yang strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem Bali. Sebagai daerah konservasi, penyedia air, serta pusat mitigasi perubahan iklim, Kabupaten Bangli berkontribusi dalam pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan. Di dalam RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043 kawasan lindung yang berperan sebagai daerah konservasi dan mencegah deforestasi.

Kawasan Lindung yang terdapat di Kabupaten Bangli adalah berupa Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Taman Wisata Alam (TWA), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Total luas Kawasan Lindung adalah 10.962,84 Ha. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Luas kawasan lindung telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau bisa dikatakan luas kawasan lindung merupakan “given” dari pemerintah pusat dan bukan merupakan hasil interpretasi peta citra yang divalidasi melalui survey pengamatan langsung di lapangan. Oleh karenanya luasan kawasan lindung tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat diubah oleh pemerintah daerah dan sudah menjadi hal mutlak untuk ada dalam Rencana Tata Ruang.

Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bangli juga memiliki lahan-lahan enklave dimana berdasarkan interpretasi peta citra diketahui dimanfaatkan sebagai lahan untuk perumahan dan permukiman, lahan untuk pertanian, dan lahan untuk pembangunan kawasan tempat suci. Total lahan-lahan enklave di Kawasan Lindung Kabupaten Bangli adalah 1,507.74 Ha atau 13,75% dari total luas Kawasan Lindung. Deliniasi enklave diklasifikasikan sesuai dengan kelompok-kelompok hutan yang teregistrasi di Kabupaten Bangli. Enklave Penulisan Kintamani (RTK.20) merupakan yang terluas yaitu seluas 1,113.49 Ha atau 10,16% dari total luas Kawasan Lindung Kabupaten Bangli. Artinya Kelompok Hutan Penulisan Kintamani (RTK.20) memiliki pemanfaatan lahan untuk

menunjang aktivitas masyarakat paling luas diantara kelompok hutan lainnya di Kabupaten Bangli.

a) Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, definisi Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bangli berada dalam Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8), Kelompok Hutan Munduk Pengajaran (RTK.5), dan Kelompok Hutan Penulisan Kintamani (RTK.20). Total luas Hutan Lindung di Kabupaten Bangli adalah 6.396,98 Ha atau sebesar 58,22% dari total luasan Kawasan Lindung Kabupaten Bangli. Hutan Lindung dalam Kelompok Hutan Penulisan Kintamani (RTK.20) merupakan yang terluas yaitu 3.996,38 Ha atau 36,45 % dari total luas kawasan lindung Kabupaten Bangli.

b) Kawasan Taman Wisata Alam

Pengertian Taman Wisata Alam (TWA) menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Sedangkan menurut De Alfarian (Joko Untoro dan Paulus), taman wisata alam adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan flora, fauna, maupun alam itu sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

- Adapun kriteria-kriteria untuk penunjukan dan penetapan sebagai kawasan taman wisata alam, yaitu:
- Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik.
- Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.
- Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Taman Wisata Alam memiliki fungsi antara lain:

- Fungsi Pelestarian
Taman wisata alam berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitar kawasan TWA.
- Fungsi Akademis
Taman wisata alam berfungsi sebagai tempat pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Fungsi Pariwisata

Taman wisata alam berfungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem kawasan itu sendiri.

TWA di Kabupaten Bangli masuk ke dalam Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8) dan Kelompok Hutan Gunung Batur Bukit Payang (RTK.7). Secara umum total luas TWA di Kabupaten Bangli adalah sebesar 2.650,64 Ha atau 24,18% dari total luas Kawasan Lindung Kabupaten Bangli. TWA dalam Kelompok Hutan Gunung Batur Bukit Payang (RTK.7) merupakan yang terluas yaitu 2,081.71 Ha atau 18,99% dari total luas Kawasan Hutan Lindung sedangkan TWA dalam Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8) memiliki luas 568.93 Ha atau 5,19% dari total luas Kawasan Lindung Kabupaten Bangli.

c) Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PP 104/2015) adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Bangli merupakan kawasan lindung dengan luasan paling rendah. Luas HPT di Kabupaten Bangli adalah 421,46 Ha atau hanya 3,84% dari total luas Kawasan Lindung Kabupaten Bangli. HPT di Kabupaten Bangli masuk ke dalam Kelompok Hutan Gunung Batur Bukit Payang (RTK.7) seluas 415.54 atau 3,79% dari total kawasan lindung, dan Kelompok Penulisan Kintamani (RTK.20) seluas 5.92 Ha atau 0,05% dari total luas kawasan lindung Kabupaten Bangli.

Detail sebaran dan luas masing-masing kawasan lindung di Kabupaten Bangli termasuk luas lahan enklave pada masing-masing kelompok hutan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5.
Komposisi dan Luas Kawasan Lindung Kabupaten Bangli

No	Fungsi Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Total Kawasan Lindung (%)
A	Enklave	1,507.74	13.75
1	Enklave Gunung Abang Agung (RTK.8)	313.00	2.86
2	Enklave Gunung Batur Bukit Payang (RTK.7)	21.02	0.19
3	Enklave Munduk Pengajaran (RTK.5)	60.22	0.55
4	Enklave Penulisan Kintamani (RTK.20)	1,113.49	10.16
B	Hutan Lindung	6,383.00	58.22
1	Gunung Abang Agung (RTK.8)	1,793.17	16.36
2	Munduk Pengajaran (RTK.5)	593.45	5.41
3	Penulisan Kintamani (RTK.20)	3,996.38	36.45
C	Hutan Produksi Terbatas	421.46	3.84

No	Fungsi Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Total Kawasan Lindung (%)
1	Gunung Batur Bukit Payang (RTK.7)	415.54	3.79
2	Penulisan Kintamani (RTK.20)	5.92	0.05
D	Taman Wisata Alam	2,650.64	24.18
1	Gunung Abang Agung (RTK.8)	568.93	5.19
2	Gunung Batur Bukit Payang (RTK.7)	2,081.71	18.99
	Total Kawasan Lindung	10,962.84	100.00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043

4) Peran Sosial dan Budaya

Selain memiliki daya tarik pariwisata budaya yang khas, Kabupaten Bangli juga berperan sebagai pusat kegiatan upacara keagamaan umat Hindu di Provinsi Bali. Peran ini berkaitan dengan keberadaan Pura Hulun Danu Batur, yang terletak di Kecamatan Kintamani. Pura ini merupakan salah satu Pura Khayangan Jagat yang memiliki fungsi utama dalam pemujaan Dewi Danu. Setiap tahunnya pada saat upacara keagamaan di Pura Hulun Danu Batur ribuan umat Hindu dari berbagai daerah untuk bersembahyang dan memohon keberkahan. Dengan perannya yang sangat penting dalam aspek spiritual dan religius, Kabupaten Bangli tidak hanya menjadi destinasi wisata budaya, tetapi juga menjadi pusat spiritual yang memperkuat harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Bali.

Kabupaten Bangli juga memiliki beberapa Cagar Budaya yang dilindungi dan dijaga kelestariannya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kabupaten Bangli memiliki kekayaan cagar budaya yang begitu banyak. Tidak hanya telah diakui secara lokal, namun ada cagar budaya yang telah diakui oleh dunia.

Kawasan cagar budaya yang terdapat di wilayah kabupaten, meliputi:

- Pura Indrakila di Desa Dausa Kecamatan Kintamani;
- Pura Tuluk Biyu di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
- Pura Ulun Danu Batur di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
- Pura Tegeh Koripan di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani;
- Pura Kehen di Desa Cempaga, Kecamatan Bangli;
- Pura Gede Pusering Jagat di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani;
- Pura Candi Tebing Tambahan, Desa Tambahan, Kecamatan Tembuku;
- Pura Puseh Mangguh, Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani;
- Pura Puncaksari, Desa Batukaaang, Kecamatan Kintamani;
- Pura Puseh, Desa Batukaaang, Kecamatan Kintamani; dan
- Pura Puser Tasik Bangbang, Kecamatan Tembuku.

Sedangkan warisan budaya dunia, sebagaimana dimaksud sebelumnya yakni Pura Hulun danu Batur dan Danau Batur, sebagai bagian dari satu kesatuan Bali Cultural Landscape Subak System. Jalur gunung berapi yang mendominasi lanskap Bali dipadukan dengan iklim tropis basah menjadikan tanah subur dan ideal untuk budidaya tanaman. Air dari sungai-sungai dialirkan melalui kanal-kanal irigasi untuk mengairi lahan, sehingga budidaya tanaman dapat dilakukan baik di tanah datar maupun pegunungan.

Padi, dimana air membuatnya tetap lestari, dan subak, sebuah sistem kerjasama sosial yang mengendalikan air tersebut secara bersama, membentuk sebuah lanskap selama ribuan tahun lamanya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keagamaan di Bali. Padi dilihat sebagai 'Hadiah dari Tuhan' dan sistem subak merupakan bagian dari budaya pura di Bali. Air dari sumber air dan kanal-kanal mengalir melalui pura tersebut dan menuju lahan-lahan persawahan. Pura air menjadi fokus dari kerjasama pengelolaan sumber air yang dilakukan oleh sekelompok subak. Sejak abad ke-11, jaringan pura air mampu mengelola ekologi dari teras sawah dalam skala hingga membentuk daerah aliran sungai. Hal tersebut menjawab masalah khas yang terjadi pada wilayah populasi padat di pulau dengan banyak gunung berapi seperti Bali.

Sistem subak secara keseluruhan memberikan contoh penerapan filosofi Tri Hita Karana yang menggabungkan semangat Ketuhanan, manusia, dan alam menjadi satu. Pura air menggiatkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam melalui keterlibatan masyarakat secara aktif dalam ritual yang menekankan ketergantungan hidup umat manusia terhadap alam.

Di Bali, terdapat 1.200 kelompok air, dan sekitar 50 hingga 400 petani mengelola suplai air dari satu sumber. Warisan Budaya Bali ini terdiri dari lima situs yang menjadi simbol dari keterkaitan alam, agama, dan komponen budaya dari sistem subak yang masih berfungsi dengan penuh hingga sekarang, dimana para petani masih menanam padi lokal Bali tanpa bantuan pupuk kimiawi maupun pestisida, serta menjadi tempat dimana seluruh situs lanskap dilihat sebagai sesuatu yang sangat sakral.

Situs-situs tersebut ialah: Pura Luhur Ulun Danu Batur di tepi Danau Batur dimana kawahnya dianggap sebagai sumber utama dari seluruh mata air dan sungai, Lanskap Subak Daerah Aliran Sungai Pakerisan yang dikenal sebagai sistem pengairan tertua di Bali, Lanskap Subak Catur Angga Batukaru dimana teras sawahnya disebut dalam dokumen kuno abad ke-10 yang membuatnya menjadi salah satu yang tertua dan menjadi bukti utama dari arsitektur klasik Bali, serta Pura Luhur Taman Ayun yang merupakan pura air dengan arsitektur klasik paling besar dan terkemuka di wilayahnya dan menjadi bukti perluasan sistem subak dibawah Kerajaan Bali kuno di abad ke-19.

Komponen subak merupakan sebuah 'hutan' yang melindungi persediaan air, lanskap teras subak, sawah yang terhubung dengan sistem kanal, saluran air, dan bendung, pedesaan, serta seluruh pura dengan berbagai fungsi dan ukuran yang

menandai baik sumber air maupun salurannya yang melalui pura-pura tersebut untuk mengairi lahan subak dibawahnya.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Karakteristik Bentang Alam

Kabupaten Bangli, dengan luas total wilayah sekitar 52,708,26 Ha merupakan bagian integral dari ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Bali-Lombok. Sebagian besar wilayah sekitar 74,64% atau seluas 39.340,10 Ha memiliki karakteristik ekoregion kompleks pegunungan vulkanik Bali-Lombok. Wilayah ini ditandai dengan topografi yang bergelombang hingga curam, serta didominasi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi. Bagian lain dari Kabupaten Bangli, sekitar 25,36% atau seluas 13.368,16 Ha, memiliki karakteristik ekoregion kompleks perbukitan vulkanik Bali-Lombok. Wilayah ini cenderung lebih datar daripada bagian pegunungan, namun tetap mempertahankan sebagian besar ciri khas flora dan fauna ekoregion tersebut. Kedua karakteristik ekoregion ini memberikan Kabupaten Bangli kekayaan alam yang luar biasa dan keindahan alam yang memukau.

Kedua karakteristik ekoregion ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang menarik. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang masih asri, serta berbagai kegiatan outdoor seperti hiking, trekking, dan bird watching. Keberadaan gunung berapi seperti Gunung Batur juga menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang tertarik dengan geologi dan keunikan alam. Dengan potensi alam yang begitu besar, upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem menjadi sangat penting. Pemerintah dan masyarakat setempat perlu bekerja sama untuk menjaga kelestarian alam Kabupaten Bangli, sehingga keindahan dan kekayaan alamnya tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Jika ditinjau dari jenis ekoregion, Kabupaten Bangli hanya terdiri dari ekoregion darat, dikarenakan posisi Kabupaten Bangli tidak berbatasan langsung dengan laut. Kabupaten Bangli adalah bagian dari ekoregion kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok, yang memiliki beragam karakteristik ekosistem yang unik. Wilayah ini terdiri dari beberapa tipe ekosistem darat yang mencakup danau pegunungan, dataran fluviovulkanik, pegunungan kerucut vulkanik dengan berbagai ketinggian lereng, perbukitan vulkanik, dan tebing kaldera.

Danau pegunungan, dengan luas sekitar 1.444,89 Ha (2,74%), merupakan salah satu elemen penting dalam ekoregion ini. Danau-danau ini sering kali terbentuk di kawah-kawah bekas letusan gunung berapi, seperti Danau Batur yang terkenal. Danau-danau ini bukan hanya memberikan keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memainkan peran penting dalam ekosistem lokal. Dataran fluviovulkanik, dengan luas sekitar 2.447,10 Ha (4,64%), adalah area dataran rendah yang terbentuk oleh material aluvial yang diendapkan oleh sungai-sungai yang berasal dari aktivitas vulkanik. Tanah yang subur di daerah ini sering kali dimanfaatkan untuk pertanian. Pegunungan kerucut vulkanik dengan berbagai ketinggian lereng, terbagi menjadi lereng atas, tengah, dan bawah, seluas 30.053,43 Ha (57,29%). Lereng-leng ini memiliki karakteristik berbeda-beda tergantung pada ketinggiannya, dengan flora

dan fauna yang beragam. Perbukitan vulkanik, seluas 1.372,69 Ha (2,60%), terbentuk oleh material campuran batuan beku luar dan piroklastik. Wilayah ini cenderung memiliki kemiringan yang lebih landai dibandingkan dengan pegunungan kerucut vulkanik. Tebing kaldera, seluas 4.115,33 Ha (7,81%), adalah sisa dinding kawah gunung berapi purba yang erosi oleh aktivitas alam. Tebing-tebing ini sering kali menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang unik.

Keseluruhan ekosistem darat di Kabupaten Bangli memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keanekaragaman hayati regional dan menyediakan layanan ekosistem yang penting bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, pelestarian ekosistem ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia di wilayah ini.

B. Karakteristik Vegetasi Alam

Kabupaten Bangli memiliki kondisi vegetasi alami yang sangat beragam, mencakup beberapa jenis vegetasi yang khas untuk ekoregion kompleks Pegunungan Vulkanik Bali-Lombok. Vegetasi ini mencakup hutan pamah, hutan pegunungan atas dan bawah, serta vegetasi terna tepian danau pegunungan.

Hutan pamah, dengan variasi jenis seperti non-dipterokarpa, monsun malar hijau, dan monsun merangas, merupakan bagian penting dari ekosistem Kabupaten Bangli. Hutan pamah non-dipterokarpa, seluas 16.349,98 Ha (31,02%), terdiri dari pepohonan yang tumbuh dengan rapat namun tidak termasuk pohon-pohon jenis dipterokarpa yang dominan di hutan tropis. Sementara itu, hutan pamah monsun malar hijau, seluas 5.309,43 Ha (10,07%), ditandai oleh keberadaan vegetasi hijau sepanjang tahun, yang umumnya ditemukan di daerah dengan curah hujan tinggi. Vegetasi hutan pegunungan atas monsun, seluas 673,44 Ha (1,28%), terletak di ketinggian yang lebih tinggi dan sering kali terkena langsung oleh angin muson. Di wilayah ini, tumbuhan biasanya lebih kecil dan lebih tahan terhadap kondisi cuaca yang keras. Hutan pegunungan bawah, seluas 12.944,95 Ha (24,56%), merupakan vegetasi yang tumbuh di lereng gunung pada ketinggian yang lebih rendah. Vegetasi ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan penting untuk menjaga kesuburan tanah serta mengatur aliran air. Vegetasi terna tepian danau pegunungan, seluas 1.444,89 Ha (2,74%), terdapat di sekitar danau-danau pegunungan seperti Danau Batur. Vegetasi ini sering kali meliputi tanaman air dan tumbuhan paludikola yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem danau.

Keanekaragaman vegetasi alami di Kabupaten Bangli memberikan ciri khas yang unik bagi ekoregion ini. Pelestarian vegetasi alami menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah ini.

C. Sumber Daya dan Daya Tarik Wisata

Sumber daya yang dimaksudkan disini tentunya sumber daya pariwisata yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Bangli. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya alam berupa keindahan alam Gunung Batur dan Danau Batur. Keindahan alam Gunung Batur dan Danau Batur sudah terkenal hingga ke mancanegara yang menjadikan kawasan di

sekitar di sekitar gunung dan Danau Batur ramai dikunjungi wisatawan. Selain itu, batuan alam peninggalan letusan Gunung Batur yang berada di sekitar kaki gunung memberikan nilai tambah keindahan dan menjadi penarik wisatawan untuk berkunjung.

Sumber daya budaya juga terdapat di wilayah Geopark Batur dan kawasan di sekitarnya. Terdapat museum Geopark Batur yang dapat menjadi wisata edukasi tentang konsep geopark, geologi dan sejarah perkembangan kawasan di sekitar batur. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kawasan Gunung Batur dan sekitarnya juga dapat menjadi daya tarik tersendiri, mengingat merupakan masyarakat tradisional sebagai masyarakat Bali Aga (Bali Mula) yang sampai sekarang masih tampak ciri-ciri dan aspek-aspek budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kehidupan beragama masyarakat di Kawasan Gunung Batur terutama prosesi upacara di Pura Ulundanu Batur dan Pura Jati dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan berkunjung. Sedangkan sumber daya buatan yang terdapat di wilayah perencanaan seperti pemandian air panas serta fasilitas wisata seperti coffee shop, restaurant dan penginapan.

1) Kegiatan Wisata yang Sudah Berkembang

Keindahan alam Gunung Batur dan Danau Batur menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke wilayah perencanaan DTW Batur tengah dan kawasan sekitarnya. Kegiatan Wisata yang sudah berkembang yaitu:

- a. Pendakian Gunung Batur;
- b. Jeep Adventur;
- c. Camping;
- d. Geotrekking;
- e. Mengunjungi Situs alam dan budaya;
- f. Spiritual;
- g. Kuliner;
- h. Natural Hot Spring;

2) Fasilitas Pariwisata

Fasilitas pariwisata yang ada di wilayah Geopark Batur meliputi akomodasi wisata berupa hotel, villa, dan penginapan, fasilitas pariwisata makan dan minum seperti restaurant, rumah makan dan coffee shop, serta fasilitas pariwisata berupa pusat informasi wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat, berdampak pada semakin meningkatnya fasilitas pariwisata terutama fasilitas akomodasi dan fasilitas makan minum.

jumlah hotel, pondok wisata, villa dan campground yang berkembang di wilayah perencanaan dan sekitarnya berjumlah 229 buah. Untuk fasilitas makan dan minum berjumlah 70 buah. Sebaran utama terdapat di sekitar jalan raya penelokan, toya bungkah dan kedisan. Sedangkan untuk pusat informasi pariwisata berjumlah 3 buah. Pusat informasi tersebut meliputi Tourist Information Centre Batur Caldera Exploration yang terdapat di Songan A, Tourist Information

Centre Bubung Desa Pinggan, dan FP2GB yang terdapat di Jalan Pendakian Gunung Batur, Batur Tengah, Kintamani.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kapasitas DDDTLH dilakukan dengan dua metode perhitungan yaitu Metode Supply dan Demand serta Metode Jasa Ekosistem. Metode perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang digunakan adalah perbandingan ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Daya dukung ini terdiri dari:

A. Daya Dukung Air

Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah dinyatakan sebagai supply, sedangkan kebutuhan air di wilayah tersebut dinyatakan sebagai demand. Idealnya, nilai demand tidak melebihi kemampuan supply. Jika nilai demand lebih besar dari supply, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian.

Perhitungan daya dukung air pada kajian ini mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Pada peraturan tersebut, dijelaskan metode perhitungan daya dukung air dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan suatu wilayah, baik pada keadaan surplus ataupun defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di wilayah tersebut tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya. Guna mencapai kondisi surplus, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata kelola air harus dilestarikan.

Penghitungan daya dukung air di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu. Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien limpasan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, keempat Kecamatan yang ditampilkan dalam tabel menunjukkan kondisi surplus air, dengan ketersediaan air yang jauh melebihi kebutuhan air per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli memiliki daya dukung air yang sangat baik, dengan pasokan air yang mencukupi atau bahkan melebihi kebutuhan penduduknya.

Tabel 2.6.

Perhitungan Koefisien Limpasan di Tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Bangli

No	Kecamatan	Koefisien Limpasan	Curah Hujan Rata-rata Tahunan (RI)	Luas wilayah (ha)	Ketersediaan air (Sa) (m3/Th)	Kebutuhan air/kapita (m3/Th)	Kondisi
1	Susut	0,80	319,92	5.066,84	12.907.299,58	3.026.664,01	Surplus
2	Bangli	0,84	319,92	5742,79	15.503.862,17	3.341.801,63	Surplus
3	Tembuku	0,93	319,92	4.924,84	14.669.018,69	2.696.854,37	Surplus
4	Kintamani	0,49	319,92	36.973,79	55.169.989,21	6.781.085,18	Surplus
Jumlah					98.250.169,64	15.846.405,20	Surplus

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

B. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan fungsi dari persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian terhadap satuan luas dan waktu. Semakin besar persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian di suatu wilayah, semakin besar pula daya dukung pangan di wilayah tersebut. Perhitungan daya dukung pangan suatu wilayah dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap swasembada pangan wilayah tersebut, sejalan dengan kemampuan suatu daerah dalam swasembada pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketahanan Pangan, yaitu Diversifikasi Pangan.

Adapun nilai kebutuhan fisik minimum (KFM) adalah sebesar 2.600 kalori/kapita, atau setara dengan 265 kg beras/orang/tahun. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui klasifikasi suatu wilayah berdasarkan daya dukung pangannya, yaitu:

- 1) Kelas I ($> 2,466$), yaitu wilayah dengan swasembada pangan baik dan telah mampu memberikan kehidupan layak bagi penduduknya.
- 2) Kelas II ($1 \leq 2,466$), yaitu wilayah dengan swasembada pangan baik, tetapi belum mampu memberikan kehidupan layak bagi penduduknya.
- 3) Kelas III (< 1), yaitu wilayah dengan swasembada pangan yang masih buruk.

Dengan menggunakan persamaan di atas, diperoleh data daya dukung pangan Kabupaten Bangli berdasarkan wilayah kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah dengan visualisasi spasial pada kedua gambar di bawah. Mengacu kepada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bangli secara umum tergolong baik dalam hal swasembada pangan dan telah mampu memenuhi kebutuhan minimum penduduknya, pangan yang dimaksud terdiri dari beras dan umbi-umbian, namun jika hanya ditinjau dari ketersediaan beras, kebutuhan minimum terhadap pangan masih tergolong defisit untuk di Kabupaten Bangli.

Tabel 2.7.
Daya Dukung Pangan Kabupaten Bangli Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produksi Tanaman Pangan (ha/tahun)	Ketersediaan Beras (ton/tahun)	Kebutuhan beras (ton/tahun)	Daya Dukung Pangan (%)
1	Bangli	680,29	4.224,58	594.882,81	15.322,76	356,46
2	Kintamani	364,76	1.911,34	198.071,22	32.738,70	224,57
3	Susut	874,42	5.263,99	676.977,77	13.877,79	427,86
4	Tembuku	653,02	3.415,30	414.711,34	12.365,56	205,91
	Kabupaten Bangli	2.572,48	14.815,20	1.884.643,14	74.304,80	303,70

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

C. Daya Dukung Fungsi Lahan

Daya dukung fungsi lindung (DDL) dilihat dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah. Dalam perhitungan daya dukung fungsi lahan, seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung dengan koefisien yang berbeda. Berikut hasil perhitungan luas guna lahan fungsi lindung Kabupaten Bangli dengan data yang diperoleh dari RTRW Kabupaten Bangli.

Tabel 2.8.
Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Bangli

Tutupan Lahan	Luas (ha)	Koefisien Lindung	Luas Lahan/LGL (ha)
Hamparan pasir alami	30,43	1,00	30,43
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	421,46	0,68	286,59
Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	6.382,96	0,68	4.340,41
Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang	2.650,11	0,68	1.802,07
Kebun campuran	14.778,91	0,54	7.980,61
Ladang/tegalan holtikultura	19.477,62	0,21	4.090,30
Permukiman pedesaan	2.994,48	0,18	539,01
Permukiman perkotaan	1.815,17	0,18	326,73
Sawah dengan padi terus menerus	2.519,06	0,46	1.158,77
Jumlah	51.070,20		20.554,92

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Daya Dukung Fungsi Lahan Kabupaten Bangli termasuk kategori sedang dengan nilai 0,40. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$DDL = \frac{20.554,92}{51.070,20} + 0,40$$

D. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun (DDLB) ditinjau dari koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. Nilai daya dukung lahan terbangun dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.

$$DDLB = \frac{\alpha \times LW}{LTb}$$

Dimana:

$$LTb = LB + LTp$$

Keterangan :

DDLB = Daya dukung lahan terbangun

LW = Luas wilayah (Ha)

α = Koefisien luas lahan terbangun maksimal yaitu 70% untuk lahan perkotaan sesuai UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 sehingga 30% wajib digunakan untuk RTH, sedangkan untuk pedesaan menggunakan asumsi 50% (untuk kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung)

LTb = Luas lahan terbangun (Ha)

LB = Luas lahan bangunan (Ha)

LTp = Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase, dan lainnya (Ha), dapat diasumsikan 20% dari luas bangunan.

Hasil Perhitungan:

DDLB < 1 = Daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk

DDLB 1-3 = Daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang

DDLB > 3 = Daya dukung lahan permukiman baik

Berdasarkan data tutupan lahan dalam RTRW Kabupaten Bangli, luas terbangun di Kabupaten Bangli adalah 4.809,65 Ha. Diasumsikan luas lahan untuk infrastruktur adalah 20% dari luas bangunan maka luasnya mencapai 961,93 Ha. Jika rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perkotaan dan pedesaan), maka perhitungan daya dukung lahan terbangun adalah sebagai berikut.

$$DDLB = \frac{60\% \times 51.070,20}{4.809,65 + 961,93} = 5,31$$

DDLB Kabupaten Bangli secara keseluruhan adalah 5,31 yang termasuk dalam daya dukung lahan bangunan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif cukup untuk pengembangan

pembangunan. Meskipun demikian, pengembangan pembangunan harus tetap memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan lainnya.

E. Daya Tampung Lahan

Analisis daya tampung dilakukan untuk menghitung jumlah kegiatan dan penduduk yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah. Semakin berkembang pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, semakin banyak pula lahan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan penduduk, misalnya untuk keperluan pemukiman. Dalam menganalisa daya tampung suatu wilayah, Sesuai dengan Modul Terapan PU Nomor 20 Tahun 2007, diasumsikan bahwa setiap penduduk harus memiliki ruang untuk melakukan aktivitasnya sebesar 100 m²/jiwa atau 0,01 Ha/jiwa dan untuk perumahan diasumsikan setiap rumah dihuni oleh 5 jiwa. Selanjutnya, daya tampung dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Daya Tampung} = \frac{\text{Luas Wilayah Permukiman}}{0,01} \times 100$$

Jumlah penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2021 adalah sebesar 256.911 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, 2022) dan diproyeksikan akan mencapai 361.790 jiwa pada tahun 2045. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan diatas, diketahui bahwa nilai daya tampungnya adalah sebesar 4.809,64 jiwa. Jika dilakukan komparasi antara nilai daya tampung tersebut dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangli, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, luas lahan yang tersedia di Kabupaten Bangli masih dapat menampung kegiatan penduduk hingga tahun 2045. Rincian hasil perhitungan daya tampung lahan Kabupaten Bangli berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.

Daya Tampung Kabupaten Bangli Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Luas Permukiman (ha)	DT (jiwa)	GAP	
		2021	2045			2021	2045
1	Susut	48.684	69.102	785,79	78.759	29.895	9.477
2	Bangli	53.753	76.297	976,06	97.606	43.853	21.309
3	Tembuku	43.379	61.572	971,19	97.119	53.740	35.547
4	Kintamani	109.074	154.819	2.076,60	207.660	98.586	52.841
	Jumlah	254.890	361.790	4.809,64	480.964	226.074	119.174

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

F. Kinerja Jasa / Layanan Ekosistem

Jasa ekosistem dapat diartikan sebagai suatu proses lingkungan untuk menghasilkan sumber daya alam yang bermanfaat dalam rangka menunjang kehidupan manusia. Jasa ekosistem terbagi menjadi empat klasifikasi dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah, yaitu:

- 1) Layanan Penyedia (Provisioning Services), yaitu jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti sumber daya genetika, makanan, air, dll.
- 2) Layanan Pengaturan (Regulating Services), yaitu manfaat yang didapat dari pengaturan ekosistem, seperti aturan pengendalian banjir, erosi, dampak perubahan iklim, dll.
- 3) Layanan Kultural (Cultural Services), yaitu manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti kekayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, serta nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- 4) Layanan Pendukung (Supporting Services), yaitu jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, oksigen, nutrisi, air, dll.

Kondisi jasa ekosistem di Kabupaten Bangli berdasarkan grafik pada gambar diatas menunjukkan bahwa luasan terbesar ketersediaan jasa ekosistem Kabupaten Bangli berada di ekoregion lereng gunung api yang terletak di Gunung Batur. Luasan terbesar jasa ekosistem mencapai 3.462,39 Ha dengan jenis jasa ekosistem berupa produksi primer luasan kedua adalah ekoregion kaki gunung api seluas 1.255,24 Ha, dilanjutkan ekoregion dataran fluvio gunung api seluas 1.242,12 Ha dan ekoregion kerucut gunung api seluas 203,39 Ha. Penjabaran lebih detail mengenai kondisi Jasa Ekosistem Kabupaten Bangli dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10.
DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Bangli

Klasifikasi Layanan Ekosistem		Luas DDDLH									
		Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
		%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Fungsi Penyediaan (Provisioning)											
1	Pangan	16,15	8.512,38	26,40	13.914,98	28,30	14.916,44	16,08	8.475,49	13,03	6.867,89
2	Air Bersih	0,80	421,67	7,30	3.847,70	10,88	5.734,66	37,88	19.965,89	43,18	22.759,43
3	Serat	28,23	14.879,54	48,50	25.563,51	22,95	12.096,55	0,30	158,12	0,00	0,00
4	Energi/Bahan Bakar	33,38	17.594,02	13,23	6.973,30	18,60	9.803,74	32,95	17.367,37	1,90	10.001,46
5	Sumber Daya Genetik	0,80	421,67	29,03	15.301,21	31,08	16.381,73	37,18	19.596,93	1,98	1.043,62
Fungsi Pengaturan (Regulating)											
6	Iklim	2,55	1.344,06	9,50	5.007,28	53,73	28.320,15	21,50	11.332,28	12,73	6.709,76
7	Tata Aliran Air	2,55	1.344,06	15,40	8.117,07	56,78	29.927,75	25,33	13.351,00	0,00	0,00
8	Pengendalian Kebencanaan	3,35	1.765,73	40,23	21.204,53	41,05	21.636,74	15,38	8.106,53	0,00	0,00
9	Pemurnian Air	2,00	1.054,17	38,13	20.097,66	15,10	7.958,95	42,15	22.216,53	2,65	1.396,77
10	Pengolahan Limbah	8,08	4.258,83	26,03	13.719,96	18,05	9.513,84	44,93	23.681,82	2,90	1.528,54
11	Pemeliharaan Kualitas Udara	2,58	1.359,87	56,53	29.795,98	25,25	13.308,84	11,03	5.813,72	4,65	2.450,93
12	Penyerbukan Alami	21,73	11.453,50	39,00	20.556,22	22,43	11.822,46	15,18	8.001,11	1,63	859,14
13	Pengendalian Hama dan Penyakit	0,80	421,67	28,88	15.222,15	22,58	11.901,53	44,85	23.639,65	2,90	1.528,54
Fungsi Budaya (Cultural)											
14	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	12,73	6.709,76	16,13	8.501,84	14,00	7.379,16	21,08	11.110,90	36,05	19.001,33
15	Rekreasi dan Ecotourism	19,90	10.488,94	12,80	6.746,66	36,88	19.438,81	30,35	15.996,96	0,05	26,35
16	Estetika	19,80	10.436,24	18,78	9.898,61	27,68	14.589,65	33,40	17.604,56	0,33	173,94
Fungsi Pendukung (Supporting)											

Klasifikasi Layanan Ekosistem		Luas DDDTLH									
		Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
		%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
17	Pembentukan dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah	0,80	421,67	16,68	8.791,74	34,70	18.289,77	37,15	19.581,12	10,68	5.629,24
18	Pendukung Siklus Hara	6,33	3.336,43	12,75	6.720,30	33,13	17.462,25	36,80	19.396,64	11,00	5.797,91
19	Produksi Primer	13,48	7.105,07	35,38	18.648,18	30,45	16.049,67	19,08	10.056,74	1,63	859,14
20	Biodiversitas	3,35	1.765,73	69,48	36.621,70	11,80	6.219,57	15,38	8.106,53	0,00	0,00
Rata-rata (%)		9,97	5.255,01	28,01	14.763,58	27,77	14.637,08	26,90	14.178,52	7,36	3.879,33

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis ke 20 jasa ekosistem beserta indeks komposit fungsi jasa ekosistem diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil analisis indeks komposit fungsi jasa ekosistem, Kabupaten Bangli memiliki fungsi jasa ekosistem yang sangat tinggi pada sektor pariwisata, sehingga lebih banyak di prioritaskan untuk pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan hidup pada sektor wisata. Sektor wisata mencakup sarana dan prasarana penunjang, beserta daya tarik wisata.
- 2) Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi alternative sektor unggulan di Kabupaten Bangli pada dasarnya tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan fungsi jasa ekosistemnya. Hal yang paling mempengaruhi adalah fungsi jasa ekosistem dalam hal pengendalian hama dan pembentukan lapisan tanah sangat rendah.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan terdapat sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, berikut adalah indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP.

- 1) Rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih

Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecce, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan. Sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari

- 2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan

- 3) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran

Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan

- 4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dengan mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah.

- 5) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan gizi.

- 6) Persentase rumah tangga tanpa akses

Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Peningkatan akses terhadap air bersih dapat mengurangi masalah kesehatan.

- 7) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang berdampak pada masalah gizi.

- 8) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar

Tinggi badan di bawah standar dapat menandakan status gizi pada balita yang merupakan salah satu indikator yang mampu mempengaruhi penyerapan pangan.

- 9) Angka harapan hidup pada saat lahir

Perkiraan lama hidup rata – rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas sepanjang hidupnya, merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan.

Berdasarkan Portal Satu Data Pangan, Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 meningkat hingga 77,35, namun mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 77,19. Penurunan ini harus fokus utama guna mencegah

terjadinya penurunan nilai IKP di tahun berikutnya serta mendorong produktivitas petani agar produksi pangan lebih stabil guna menunjang dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Walau demikian, berdasarkan nilai Indeks Ketahanan Pangan, Kabupaten Bangli termasuk dalam klasifikasi "sangat tahan" pada Indeks Ketahanan Pangan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi penduduknya.

Prestasi Kabupaten Bangli sejalan dengan keberhasilan yang lebih luas di Provinsi Bali, yang telah menjadi provinsi dengan Indeks Ketahanan Pangan terbaik secara nasional. Keberhasilan Provinsi Bali ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi dalam mengelola sektor pertanian dan ketahanan pangan.

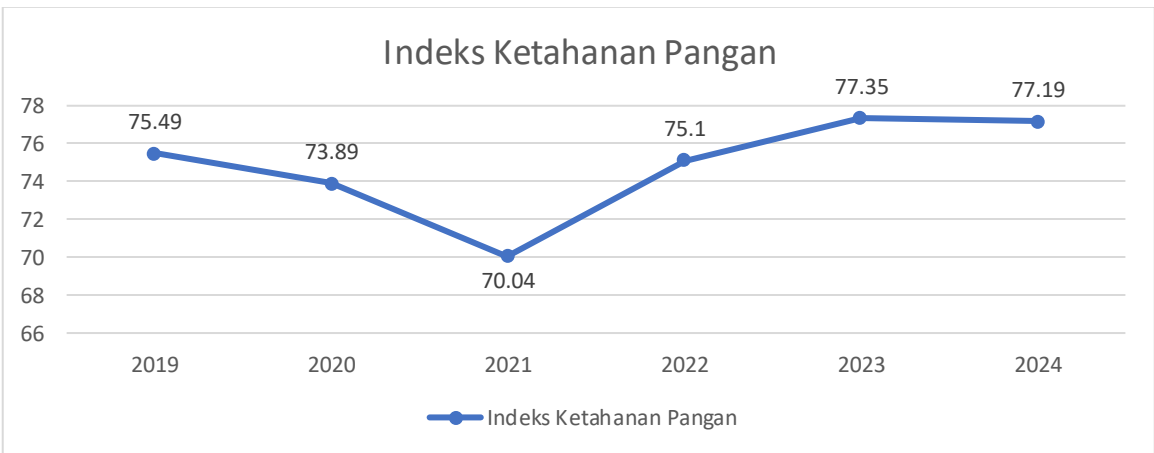
Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali menunjukkan efektivitas program-program pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. Keberhasilan ini juga mencerminkan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, petani, dan masyarakat luas, dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan.

Tabel 2.11.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli 2019-2024

No.	Tahun	Indeks Ketahanan Pangan
1	2019	75,49
2	2020	73,89
3	2021	70,04
4	2022	75,10
5	2023	77,35
6	2024	77,19

Sumber: Portal Satu Data Pangan, Badan Pangan Nasional

Gambar 2.6.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli Tahun 2019-2024



Sumber: Portal Satu Data Pangan, Badan Pangan Nasional

B. Konsumsi Listrik Perkapita

Jumlah pelanggan listrik merupakan salah satu data penting dalam menghitung konsumsi listrik per kapita di suatu daerah. Data ini menggambarkan seberapa banyak unit rumah tangga, bisnis, industri, maupun sektor lainnya yang terlayani oleh jaringan listrik. Semakin besar jumlah pelanggan, semakin besar pula potensi konsumsi listrik secara keseluruhan. Dengan mengetahui total konsumsi listrik yang tercatat dari seluruh pelanggan dan membaginya dengan jumlah penduduk, maka dapat diperoleh angka konsumsi listrik per kapita. Nilai ini menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah, karena konsumsi listrik per kapita umumnya berkorelasi dengan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bangli menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan tercatat sebanyak 64.307 pelanggan dan meningkat secara konsisten setiap tahun hingga mencapai 75.422 pelanggan pada tahun 2024. Kenaikan jumlah pelanggan listrik ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah pelanggan di tingkat Provinsi Bali yang juga meningkat dari 1.528.854 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 1.796.683 pelanggan pada tahun 2024. Data jumlah pelanggan listrik ini menjadi salah satu variabel penting dalam menghitung konsumsi listrik per kapita, di mana total konsumsi listrik dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah pelanggan mengindikasikan adanya perluasan akses layanan listrik sekaligus potensi peningkatan konsumsi listrik di Kabupaten Bangli yang dapat berpengaruh terhadap perhitungan kebutuhan energi dan perencanaan infrastruktur ketenagalistrikan di masa mendatang.

Tabel 2.12.

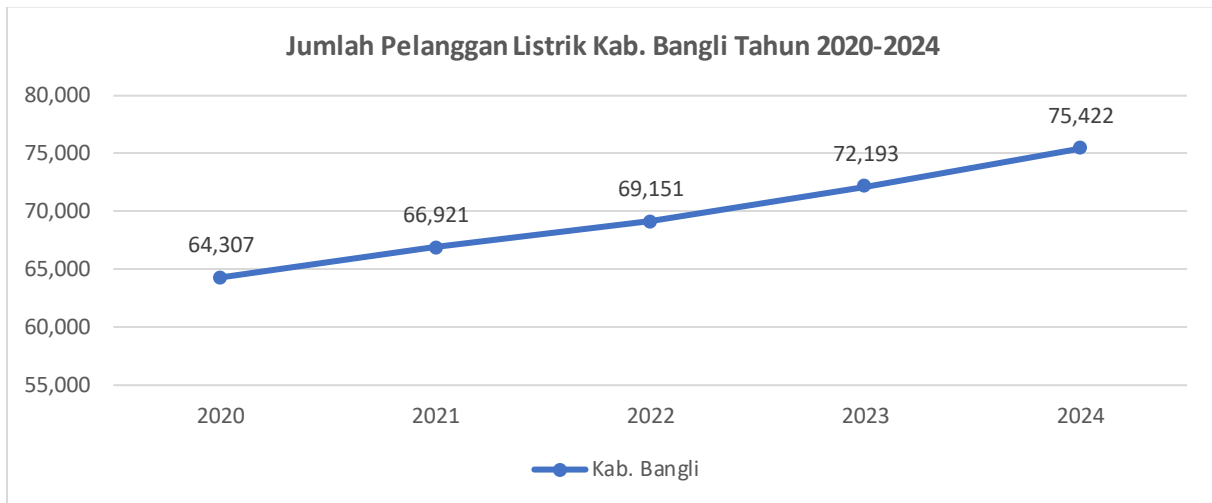
Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Bangli tahun 2020-2024

TAHUN	KABUPATEN BANGLI	PROVINSI BALI
2020	64.307	1.528.854
2021	66.921	1.579.283
2022	69.151	1.630.528
2023	72.193	1.701.512
2024	75.422	1.796.683

Sumber: Olahan data BPS Provinsi Bali

Gambar 2.7.

Grafik Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Olahan data BPS Provinsi Bali

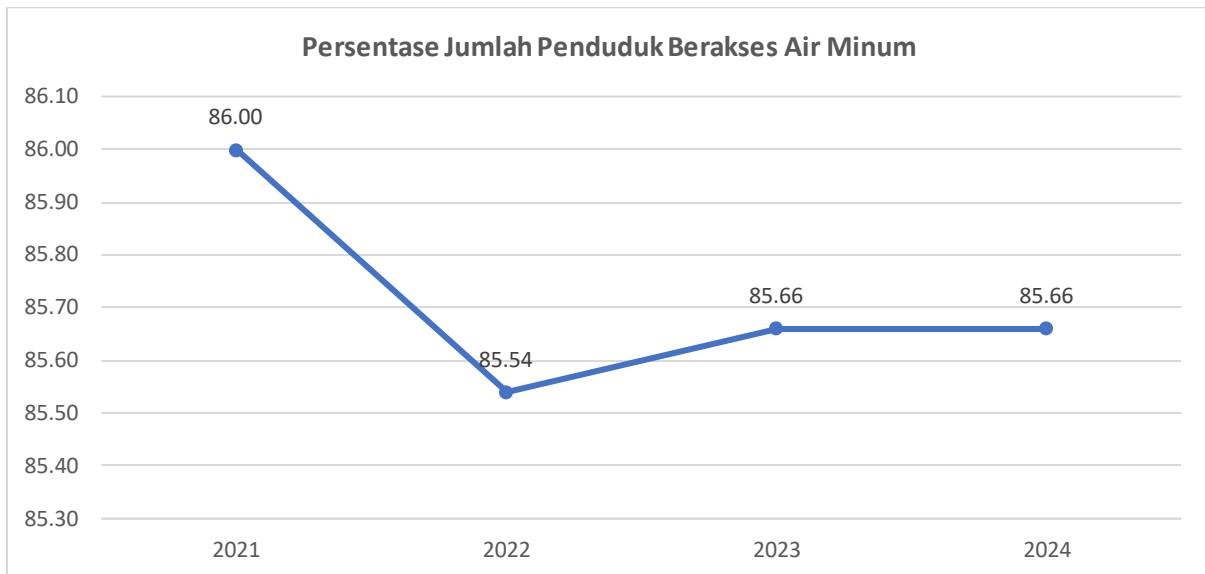
C. Cakupan Pelayanan Air Minum

Air minum layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendorong peningkatan cakupan pelayanan air minum layak hingga mencapai 100%. Upaya ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Bangli dapat menikmati akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Dengan mencapai cakupan 100%, Kabupaten Bangli dapat memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses ke air minum yang aman, yang merupakan fondasi penting untuk kehidupan yang sehat dan produktif.

Pada tahun 2021, sebanyak 86,00% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum. Namun, pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan persentase menjadi 85,54%. Meski demikian, upaya peningkatan akses air minum berhasil ditingkatkan secara signifikan pada tahun 2023, di mana persentase penduduk yang berakses air minum naik menjadi 85,66% dan tetap sama pada tahun 2024 (85,66%). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam penyediaan air minum di Kabupaten Bangli.

Gambar 2.8.

Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Bangli Tahun 2021-2024



Sumber: Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, 2024

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH bertujuan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH bertujuan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu:

- 1) Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS.
- 2) Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter NO_2 , dan SO_2 ,

- 3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) diukur berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan parameter tutupan hutan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan/lahan, dan dengan menambahkan faktor koreksi berupa dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut,
- 4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) diukur dengan parameter TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Berdasarkan **Tabel 2.12**, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bangli mengalami tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 59,79 dan terus meningkat hingga mencapai 68,03 pada tahun 2024. Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bangli.

Jika dilihat berdasarkan masing-masing indikator penyusun IKLH, nilai indeks kualitas udara selalu berada pada kategori tinggi dengan angka di atas 91 setiap tahunnya. Pada tahun 2024, indeks kualitas udara mencapai 92,70, menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Bangli dalam kondisi baik dan relatif stabil. Sebaliknya, indeks kualitas air mengalami fluktuasi. Tahun 2020, indeks kualitas air tercatat 62,00 kemudian menurun menjadi 50,00 di tahun 2021. Setelah itu, indeks ini kembali meningkat dan stabil di angka 56,67 pada tahun 2023 dan 2024.

Indikator kualitas tutupan lahan menjadi komponen dengan nilai terendah dalam IKLH Kabupaten Bangli. Nilainya sempat turun drastis dari 44,10 di tahun 2020 menjadi 34,69 di tahun 2022, meskipun kembali mengalami sedikit perbaikan di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai 41,91 dan 41,13. Secara keseluruhan, peningkatan IKLH Kabupaten Bangli dipengaruhi oleh kualitas udara yang stabil dan membaiknya indeks kualitas air, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek kualitas tutupan lahan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan ke depan.

Tabel 2.13.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	62,00	50,00	51,54	56,67	56,67
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	91,50	91,98	92,00	91,35	92,70
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks		44,10	34,69	41,91	41,13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks	59,79	64,44*	64,24	67,78	68,03

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, 2024

*Data SISKLHK - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

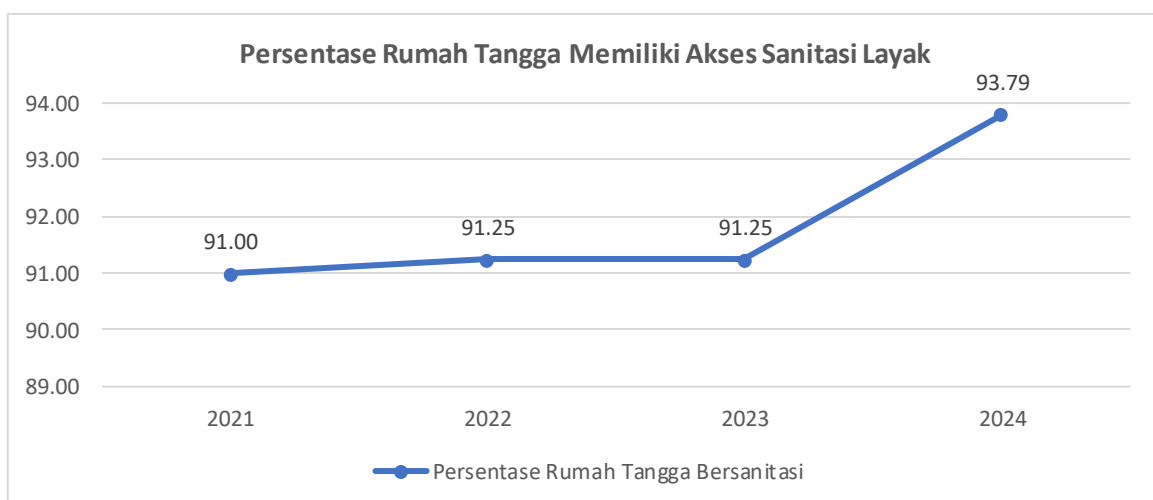
Rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Fasilitas sanitasi ini mencakup toilet yang aman dan bersih, sistem pembuangan limbah yang efektif, serta akses yang memadai terhadap air bersih untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Akses sanitasi layak sangat penting untuk mencegah penyakit menular yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak higienis, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, sanitasi yang baik juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin ke-6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi. Implementasi sanitasi layak dalam rumah tangga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan edukasi tentang pentingnya sanitasi bagi kesehatan.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli tahun 2024, rumah tangga di Kabupaten Bangli yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020, Kabupaten Bangli terdapat 91,00% rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Setelah itu, terjadi peningkatan yang konsisten hingga mencapai 91,25% pada tahun 2022 dan 2023, Kemudian meningkat kembali mencapai 93,79% pada tahun 2024.

Gambar 2.9.

Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Di Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, 2024

C. Pengelolaan Sampah

Data mengenai persampahan di Kabupaten Bangli menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah timbunan sampah mengalami kenaikan yang sedikit dari 39.777,41 ton pada tahun 2020 menjadi 41.557,88 ton pada tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah sampah yang berhasil dikelola juga mengalami peningkatan yang sebanding, dari 27.424,96 ton pada tahun 2020 menjadi 40.047,85 ton pada tahun 2024.

Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan dalam pengurangan sampah, yang mencerminkan upaya dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Pengurangan sampah meningkat dari 7.218,55 ton pada tahun 2020 menjadi 9.204,62 ton pada tahun 2024. Di sisi lain, penanganan sampah juga mengalami peningkatan, dari 21.741,71 ton pada tahun 2020 menjadi 30.843,23 ton pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah

Meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah sampah yang dikelola, persentase sampah yang berhasil dikelola meningkat dalam rentang 68,95% hingga 96,37% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam mengelola sampah di Kabupaten Bangli. Namun, perlu diingat bahwa penanganan sampah yang lebih baik dan pengurangan sampah yang lebih efektif masih menjadi fokus untuk meningkatkan persentase sampah yang dikelola di masa mendatang.

Tabel 2.14.

Persentase Sampah Dikelola di Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Persampahan		Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton)		39.777,41	40.479,96	40.836,05	41.195,36	41.557,88
2	Sampah Dikelola (Ton)		27.424,96	28.960,26	28.967,99	39.168,98	40.047,85
	-	Pengurangan Sampah (Ton)	7.218,55	7.415,83	6.499,87	8.133,21	9.204,62
	-	Penanganan Sampah (Ton)	21.741,71	21.552,16	20.925,09	30.944,70	30.843,23
3	Persentase Sampah Dikelola (%)		68,95	71,54	70,94	94,86	96,37

Sumber: SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (sipsn.menlhk.go.id)

2.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Bangli sebagai bagian dari Pulau Bali rentan akan adanya bencana alam, karena kedudukan Pulau Bali pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Dilihat dari potensi bencana yang ada, beberapa bencana yang berpotensi menimpa Kabupaten Bangli dapat dilihat pada, antara lain: Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor, Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, Kawasan Rawan Bencana Kebakaran, Kawasan Rawan Bencana

Kekeringan, Kawasa Rawan Bencana Angin Siklon Tropis, dan Kawasan Rawan Bencana Banjir.

Kabupaten Bangli mengalami tren penurunan indeks risiko bencana secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IRB Kabupaten Bangli tercatat sebesar 139,46, kemudian menurun menjadi 133,69 pada 2021, 128,65 pada 2022, 125,04 pada 2023, dan terakhir 117,37 pada tahun 2024. Meskipun demikian, seluruh nilai IRB tersebut masih menempatkan Kabupaten Bangli dalam kelas risiko sedang.

Penurunan IRB ini menunjukkan adanya kemungkinan perbaikan dalam aspek mitigasi bencana, pengurangan kerentanan, atau peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Jika tren ini berlanjut, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Bangli dapat masuk ke kategori risiko rendah dalam beberapa tahun mendatang.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Bali, Bangli berada di posisi tengah dalam hal indeks risiko bencana, lebih tinggi dari Kabupaten Badung, Buleleng, dan Kota Denpasar pada 2024, namun lebih rendah dibanding Jembrana, Tabanan, dan Klungkung. Ini menunjukkan bahwa meskipun progres penurunan IRB cukup baik, upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bangli perlu terus ditingkatkan agar dampak bencana dapat diminimalkan lebih lanjut.

Tabel 2.15.

Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana					Kelas Risiko Bencana
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kab Jembrana	160,41	152,62	134,94	150,15	133,06	Sedang
2	Kab Tabanan	153,27	153,27	121,93	136,90	122,13	Sedang
3	Kab Buleleng	102,05	92,45	91,81	91,49	86,02	Sedang
4	Kab Gianyar	129,79	129,79	132,38	129,03	122,96	Sedang
5	Kab Klungkung	133,42	124,22	120,29	126,93	124,33	Sedang
6	Kab Bangli	139,46	133,69	128,65	125,04	117,37	Sedang
7	Kab Karangasem	137,94	123,15	103,27	121,24	110,78	Sedang
8	Kab Badung	101,81	101,81	106,75	102,92	94,74	Sedang
9	Kota Denpasar	106,70	106,70	98,98	98,18	90,13	Sedang

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024, INARisk BNPB melalui situs <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

2.1.7. Demografi

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinamika demografi, seperti pertumbuhan penduduk, struktur usia, distribusi geografis, dan komposisi sosial ekonomi, menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap aspek demografi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, menciptakan strategi yang tepat guna, dan

memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

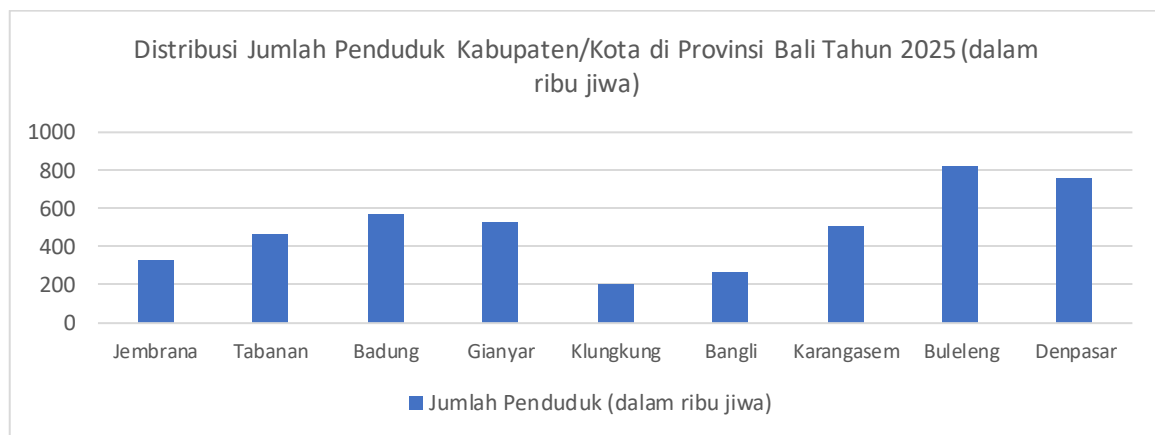
A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Proyeksi jumlah penduduk oleh BPS Provinsi Bali yang ditunjukkan dalam Tabel 2.15, pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Bangli adalah 263,17 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dimana saat itu jumlah penduduk di Kabupaten Bangli adalah 258,7 ribu jiwa.

Apabila dilihat berdasarkan persandingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali maka jumlah penduduk di Kabupaten Bangli merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Klungkung. Pada Gambar 2.10 terlihat bahwa terjadi ketidakmerataan distribusi jumlah penduduk di Provinsi Bali. Jadi, meskipun meningkat jumlahnya namun tidak menyebabkan distribusi penduduk ke Kabupaten Bangli menjadi lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Gambar 2.10.

Grafik Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025



Sumber: Olah Data BPS Provinsi Bali

Tabel 2.16.

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2025

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Jembrana	317,1	319,0	321,2	323,46	325,63	327,71
2	Kab. Tabanan	461,6	463,0	464,5	466,13	467,67	469,13
3	Kab. Badung	548,2	553,0	558,1	563,33	568,55	573,7
4	Kab. Gianyar	515,3	518,0	520,9	524,03	527,12	530,12
5	Kab. Klungkung	206,9	207,0	208,1	208,71	209,31	209,87
6	Kab. Bangli	258,7	259,0	260,4	261,38	262,3	263,17
7	Kab. Karangasem	492,4	495,0	497,5	499,95	502,33	504,61
8	Kab. Buleleng	791,8	796,0	802,8	808,87	814,79	820,48
9	Kota Denpasar	725,3	733,0	741,0	748,4	755,57	762,48
	Provinsi Bali	4.317,4	4.343,5	4.374,3	4.404,26	4.433,26	4.461,27

Sumber: Olah Data BPS Provinsi Bali tahun 2025

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Tabel 2.16, Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangli adalah 498 Jiwa/Km² pada Tahun 2024. Apabila dilihat berdasarkan konteks kewilayahan yang lebih luas, kepadatan penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2024 merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Jembrana diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bangli bukan merupakan wilayah yang menarik untuk menjadi lokasi bermukim bagi masyarakat di Provinsi Bali. Wilayah Bali Selatan yaitu Badung dan Denpasar masih menjadi primadona migrasi penduduk antar kabupaten/kota di Bali. Kepadatan penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Bali ini dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.17.
Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribuk)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km Persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
	Laki	Perempuan	Total				
Jembrana	163,07	162,56	325,6	0,67	7,35	383	100,3
Tabanan	232,82	234,85	467,7	0,33	10,55	551	99,1
Bandung	285	283,54	568,5	0,92	12,82	1426	100,5
Gianyar	262,38	264,74	527,1	0,57	11,89	1447	99,1
Klungkung	104,99	104,32	209,3	0,29	4,72	667	100,6
Bangli	131,95	130,35	262,3	0,34	5,92	498	101,2
Karangasem	251,6	250,73	502,3	0,5	11,33	599	100,3
Buleleng	408,95	405,83	814,8	0,72	18,38	616	100,8
Denpasar	381,68	373,88	755,6	1,03	17,04	6003	102,1
Provinsi Bali	2.222,44	2.210,82	4.433,30	0,66	100	739	100,5

Sumber : BPS Provinsi Bali

Menurut data dari BPS Provinsi Bali sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 2.16 sebelumnya, Rasio Jenis Kelamin penduduk di Kabupaten Bangli pada tahun 2024 adalah 101,2 dimana angka ini lebih besar daripada milik Provinsi Bali (100,5). Apabila disandingkan dengan data kabupaten/kota lainnya maka Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangli merupakan tertinggi kedua setelah Kota Denpasar (102,1). Semakin tinggi Rasio Jenis Kelamin maka semakin tinggi perbedaan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan di wilayah tersebut. Artinya ketimpangan komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Bangli merupakan tertinggi kedua di Bali meskipun ketimpangan ini tidak berdampak signifikan di dunia nyata.

Tabel 2.18.
Pertumbuhan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangli Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuk jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	2020	130,06	128,12
2	2021	130,61	128,73
3	2022	131,09	129,30
4	2023	131,55	129,84

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
5	2024	131,95*	130,35*
6	2025	132,33*	130,84*

Sumber: BPS Kabupaten Bangli

* Hasil Proyeksi Penduduk berdasarkan SPLF2020 2020–2035

(Pertengahan tahun/Juni), BPS Provinsi

Berdasarkan data pertumbuhan rasio jenis kelamin Kabupaten Bangli, terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 130,06 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 128,12 ribu jiwa. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki menjadi 130,61 ribu jiwa dan perempuan 128,73 ribu jiwa. Pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 131,09 ribu jiwa dan perempuan 129,30 ribu jiwa.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 131,55 ribu jiwa, sementara perempuan mencapai 129,84 ribu jiwa. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki diperkirakan akan mencapai 131,95 ribu jiwa dan perempuan 130,35 ribu jiwa serta pada tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bangli diperkirakan 132,33 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 130,84 ribu jiwa penduduk perempuan. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten pada kedua jenis kelamin, dengan laju pertumbuhan yang relatif seimbang.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Data Buku agregat kependudukan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2023 Semester II dan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bangli menunjukkan fluktuasi selama periode tahun 2016 hingga 2023. Pada tahun 2016 jumlah penduduk tercatat sebanyak 263.890 jiwa dan sempat mengalami peningkatan hingga mencapai 267.556 jiwa pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan rata-rata yang relatif rendah, berkisar antara 0,20% hingga 0,62% per tahun. Namun, sejak tahun 2020 jumlah penduduk mulai mengalami penurunan, terutama pada tahun 2021 yang tercatat mengalami laju pertumbuhan negatif sebesar -3,74%, diduga akibat dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk, baik dari sisi angka kelahiran, kematian, maupun mobilitas penduduk.

Setelah tahun 2021, jumlah penduduk kembali menunjukkan tren positif dengan laju pertumbuhan yang bervariasi, meskipun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebesar 258.146 jiwa dan diproyeksikan kembali meningkat menjadi 259.392 jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,48% per tahun. Secara umum, dinamika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli dalam periode ini menggambarkan adanya tekanan eksternal yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk, serta pentingnya pemantauan

berkelanjutan terhadap indikator demografi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.19.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2024

No	Tahun Sensus	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	2016	263.890	
2	2017	265.380	0,56
3	2018	267.031	0,62
4	2019	267.556	0,20
5	2020	265.844	-0,64
6	2021	255.911	-3,74
7	2022	256.631	0,28
8	2023	258.146	0,58
9	2024	259.392	0,48

Sumber: Olahan Data Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2023 Semester II dan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, 2024

Sedangkan berdasarkan data kompilasi hasil sensus dari BPS Provinsi Bali per tanggal 20 Februari 2024, Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi. Pada Sensus tahun 2020 yang lalu diketahui pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli adalah 1,79% dimana angka ini meningkat dari hasil sensus periode sebelumnya yang mencatat angkat pertumbuhan 1,06% namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 0,34%. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli sesuai hasil sensus tahun 2020 tersebut merupakan yang tertinggi selama sensus penduduk pernah dilaksanakan di Kabupaten Bangli sedangkan pada tahun 2024 merupakan yang terendah. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli sempat mengalami perlambatan pada sensus tahun 1980-1990 dimana saat itu tercatat angkanya adalah 0,88% sedangkan pada periode sensus sebelumnya tercatat sebesar 1,56% atau menurun hampir separuhnya.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali terdapat pola pertumbuhan penduduk yang dapat mengindikasikan bagaimana distribusi pembangunan di Bali akan berlangsung. Wilayah Bali selatan seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar telah mengalami peningkatan sejak tahun 2020 dimana pada tahun 2020 ketiga kabupaten mengalami pertumbuhan penduduk paling rendah diantara wilayah lainnya di Bali (dibawah 1% bahkan Kota Denpasar mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 0,81% tiap tahun). Pada tahun 2024 pertumbuhan penduduk tiga kabupaten tersebut kembali meningkat, ini mengindikasikan aktivitas – aktivitas di wilayah tersebut sudah kembali setelah menghadapi fase jenuh akibat ruang-ruang untuk pembangunan semakin berkurang yang berimplikasi pada harga-harga yang meningkat namun disini lainnya daya beli masyarakat tidak turut meningkat. Pada sisi lainnya wilayah kabupaten lain di luar Bali Selatan seperti Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung, Jembrana, dan Bangli memiliki pertumbuhan penduduk di bawah 1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Penduduk Menurut Periode Sensus (%)						
	1961 - 1971	1971 - 1980	1980 - 1990	1990 - 2000	2000 - 2010	2010 - 2020	2021 - 2024
Jembrana	2,91	1,77	0,60	0,63	1,22	1,88	0,67
Tabanan	1,85	0,44	0,19	0,73	1,13	0,90	0,33
Badung	2,60	2,34	1,23	2,33	4,62	0,09	0,92
Gianyar	1,58	1,20	0,96	1,56	1,80	0,90	0,57
Klungkung	0,87	0,66	0,12	0,31	0,94	1,89	0,29
Bangli	1,11	1,56	0,88	0,94	1,06	1,79	0,34
Karangasem	0,23	1,63	0,89	0,49	0,96	2,12	0,50
Buleleng	2,27	1,90	1,04	0,33	1,12	2,33	0,72
Denpasar	-	-	4,05	3,20	4,01	- 0,81	1,03
Provinsi Bali	1,77	1,54	1,18	1,26	2,14	1,01	0,66

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

C. Proyeksi Jumlah Penduduk

Hasil proyeksi penduduk dengan metode geometris, berdasarkan pendekatan optimis, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangli akan mencapai 283.422 jiwa pada tahun 2025, yang merupakan awal periode RPJMD. Proyeksi ini memperkirakan peningkatan signifikan, di mana pada akhir periode RPJMD tahun 2029, jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 304.914 jiwa dan pada tahun 2030 diperkirakan jumlah penduduk di Kabupaten Bangli berjumlah 310.546 jiwa. Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang konsisten selama periode tersebut.

Pertambahan penduduk tertinggi diperkirakan terjadi di Kecamatan Tembuku, dengan pertumbuhan sebesar 10,99% selama periode 2025-2030. Kecamatan ini memiliki laju pertumbuhan penduduk paling tinggi, yaitu 2,11% per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tembuku dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan migrasi masuk, angka kelahiran yang tinggi, dan pengembangan ekonomi yang menarik lebih banyak penduduk.

Kepadatan penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2030 diperkirakan sebesar 589 jiwa/km². Beberapa kecamatan seperti Bangli dan Tembuku diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk di atas 1.000 jiwa per km². Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut akan mengalami tekanan lebih besar pada infrastruktur dan layanan publik. Sebaliknya, Kecamatan Kintamani diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah, yaitu hanya 370 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Kintamani mungkin memiliki kondisi yang lebih luas dan lebih rural dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dengan tekanan yang lebih rendah pada infrastruktur dan layanan publik. Namun, tantangan di Kintamani adalah lebih berfokus pada pengembangan ekonomi dan peningkatan aksesibilitas layanan dasar bagi penduduknya yang lebih tersebar.

Tabel 2.21.

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		Th. 2025	Th. 2026	Th. 2027	Th. 2028	Th. 2029	Th. 2030
1	Susut	51.785	52.429	53.081	53.741	54.409	55.084
2	Bangli	59.714	60.828	61.964	63.121	64.300	65.502
3	Tembuku	47.880	48.889	49.919	50.971	52.045	53.143
4	Kintamani	124.043	126.499	129.002	131.556	134.160	136.816
Kabupaten Bangli		283.422	288.645	293.966	299.389	304.914	310.546

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli sempat mengalami kontraksi (penurunan menjadi minus) akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dan 2021. Secara umum seluruh wilayah di Provinsi Bali mengalami kontraksi pada pertumbuhan ekonominya akibat pembatasan aktivitas pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi, termasuk Kabupaten Bangli pada Tahun 2020 dan 2021. Masing-masing wilayah kabupaten/kota mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda; Kabupaten Badung dan Kota Denpasar mengalami kontraksi yang sangat dalam (-16,55% dan -9,44%) namun pada sisi yang lainnya Kabupaten Bangli menjadi wilayah dengan kontraksi paling rendah yaitu -4,10%.

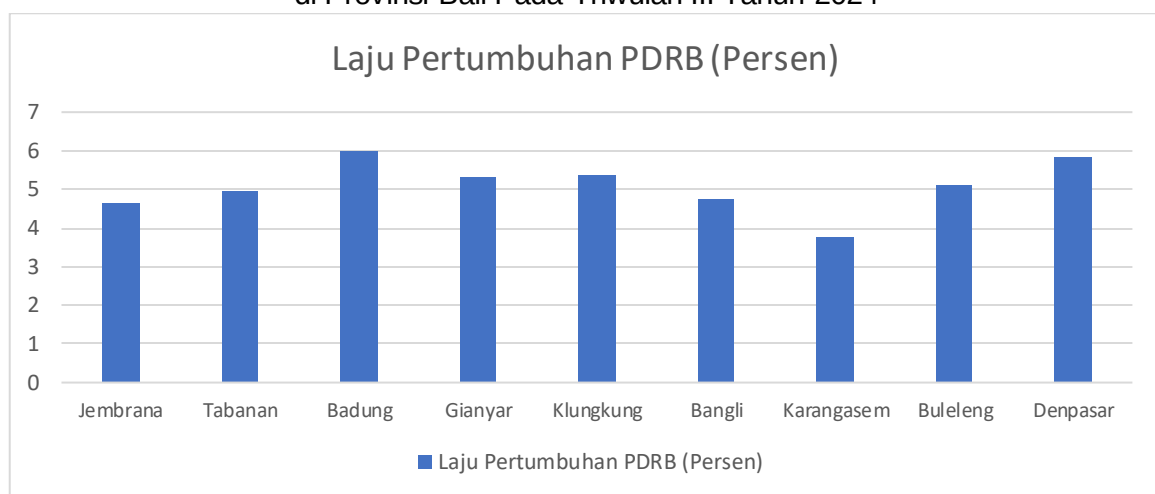
Pada Triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli sudah berubah positif ke angka 4,73%. Kondisi ini sebagai akibat dari sudah terkendalinya Pandemi Covid-19 yang diikuti dengan pembukaan kembali pintu pariwisata dan transportasi Provinsi Bali untuk wisatawan domestik maupun asing. Namun bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, pertumbuhan ekonomi Bangli merupakan yang terendah ketiga pada Triwulan III tahun 2024 setelah Kabupaten Jembrana dan Karangasem. Pada periode ini, pembukaan sektor pariwisata menjadi kunci peningkatan laju pertumbuhan ekonomi karena dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat, mendorong perkembangan UMKM sekitar, hingga pada peningkatan konsumsi produksi pertanian lokal dalam waktu relatif singkat. Sehingga sektor ini sangat sesuai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli pada jangka pendek. Terlebih Kabupaten Bangli memiliki daya tarik wisata seperti Kintamani yang sudah dikenal luas oleh masyarakat lokal, nasional, dan internasional yang membuat pengembangan pariwisata bukan hal yang sulit dilakukan.

Pada era sebelum pandemi Covid-19 (Tahun 2019 dan sebelumnya), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli berada dikisaran angka 5-6%. Saat ini, fokus pembangunan adalah mengembalikan pertumbuhan ekonomi Bangli seperti yang terjadi sebelum pandemi. Pada jangka pendek, pembukaan pintu investasi dan pengembangan pariwisata menjadi salah satu upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli ke angka 5-6% tersebut.

Pada konteks regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli selalu berada di bawah Provinsi Bali kecuali ketika pandemi berlangsung. Apabila dilihat hanya pada sudut pandang kedua wilayah ini saja maka akan terlihat Kabupaten Bangli memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Tapi bila disandingkan data pertumbuhan ekonomi 9 kabupaten/kota di Bali maka akan lebih jelas terlihat bahwa wilayah Bali Selatan (Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar) memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas kabupaten lainnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi di Bali Selatan yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali berada di atas kabupaten di luar Bali Selatan.

Gambar 2.11.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli terhadap Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Bali Pada Triwulan III Tahun 2024



Sumber: Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2024

B. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan di antara penduduk Kabupaten Bangli menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2023 namun kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya Rasio Gini, yang menjadi indikator utama ketimpangan pendapatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan Rasio Gini sebesar 0,3021, Kabupaten Bangli tergolong sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah. Pencapaian ini menandakan adanya perbaikan distribusi pendapatan yang lebih merata di antara penduduk, yang merupakan indikasi positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi daerah.

Rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bangli membawa berbagai manfaat jangka panjang yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dengan distribusi pendapatan yang lebih merata, lebih banyak individu yang dapat berkontribusi secara produktif dalam perekonomian. Ini berarti bahwa potensi ekonomi dari

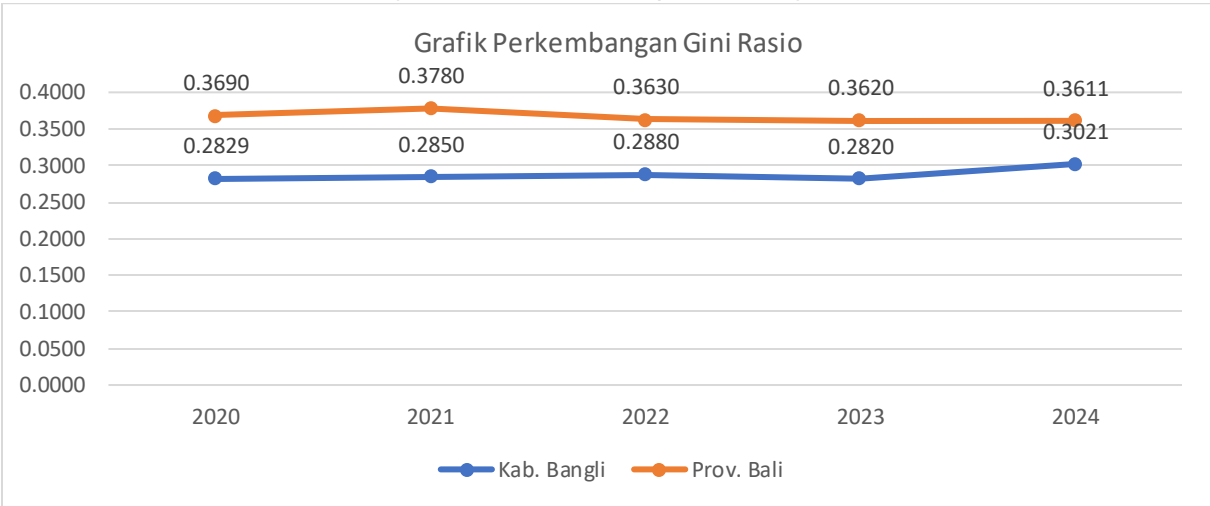
berbagai lapisan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan produktivitas keseluruhan daerah.

Selain itu, daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah cenderung lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi atau bencana. Ketika pendapatan didistribusikan lebih merata, lebih banyak individu memiliki cadangan ekonomi yang memadai untuk menghadapi situasi darurat. Ini tidak hanya meningkatkan ketahanan individu terhadap guncangan ekonomi, tetapi juga mengurangi beban pada institusi publik yang harus menyediakan bantuan dalam skala besar selama masa krisis.

Lebih lanjut, rendahnya ketimpangan pendapatan juga memperkuat institusi publik karena dukungan dan kepercayaan masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat merasa bahwa distribusi pendapatan adil, mereka cenderung lebih percaya dan mendukung kebijakan publik serta program pemerintah. Hal ini penting untuk pembangunan jangka panjang karena stabilitas dan efektivitas institusi publik sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Dengan dukungan ini, pemerintah dapat melaksanakan program pembangunan dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2.12.

Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Tabel 2.22.

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	0,3531	0,3170	0,3260	0,3260	0,2884
Kab. Tabanan	0,3239	0,3110	0,2990	0,3470	0,3007
Kab. Badung	0,3167	0,3320	0,3160	0,2800	0,2808
Kab. Gianyar	0,3171	0,3330	0,3070	0,3170	0,2850
Kab. Klungkung	0,3575	0,3460	0,3510	0,3380	0,3071
Kab. Bangli	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820	0,3021

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Karangasem	0,3268	0,3180	0,2970	0,3370	0,2833
Kab. Buleleng	0,2851	0,2820	0,2810	0,3140	0,2785
Kota Denpasar	0,3301	0,3750	0,3680	0,3420	0,3413
Provinsi Bali	0,3690	0,3780	0,3630	0,3620	0,3611

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

C. Kemiskinan

1) Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menjadi permasalahan besar dalam pembangunan karena dampaknya yang luas dan serius terhadap individu, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan:

a) Keterbatasan Akses Terhadap Kebutuhan Dasar:

- Kesehatan: Kemiskinan sering terkait dengan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan yang layak, menyebabkan peningkatan angka penyakit dan kematian yang bisa dicegah.
- Pendidikan: Individu yang hidup dalam kemiskinan sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, yang menghambat mobilitas sosial dan perkembangan individu serta generasi mendatang.
- Akses Air Bersih dan Makanan: Kemiskinan sering berdampak pada ketersediaan air bersih dan pangan yang cukup, menyebabkan masalah gizi dan kesehatan yang serius.

b) Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- Pertumbuhan Ekonomi yang Terhambat: Kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan mengurangi produktivitas tenaga kerja, menyebabkan kurangnya modal manusia, dan membatasi konsumsi dan permintaan ekonomi.
- Cikal Bakal Ketidakstabilan Sosial: Tingginya tingkat kemiskinan dapat memicu ketidakstabilan sosial, konflik, dan ketimpangan yang dapat menghambat pembangunan jangka panjang.

c) Siklus Kemiskinan

Transmisi Generasi: Kemiskinan dapat menjadi siklus di mana kondisi ekonomi yang buruk diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

d) Ketidakmerataan Pembangunan

Ketidaksetaraan: Kemiskinan menyebabkan ketimpangan yang lebih besar antara kelompok-kelompok sosial dan geografis, memperparah kesenjangan dan ketidakmerataan dalam pembangunan.

e) Kerentanan Terhadap Bencana dan Krisis

Kerentanan yang Lebih Besar: Individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali lebih rentan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.

Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir. Sempat menurun selama periode Tahun 2012 hingga Tahun 2020 namun meningkat di Tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19 dan kembali meningkat di tahun 2022. Angka Kemiskinan terendah yang pernah dialami oleh Kabupaten Bangli adalah 4,19% di tahun 2019 dan tertinggi adalah 5,86% di tahun 2014. Namun setelah mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 pada angka 5,28%, pada tahun 2024 telah mengalami penurunan menjadi 5,06%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.23.

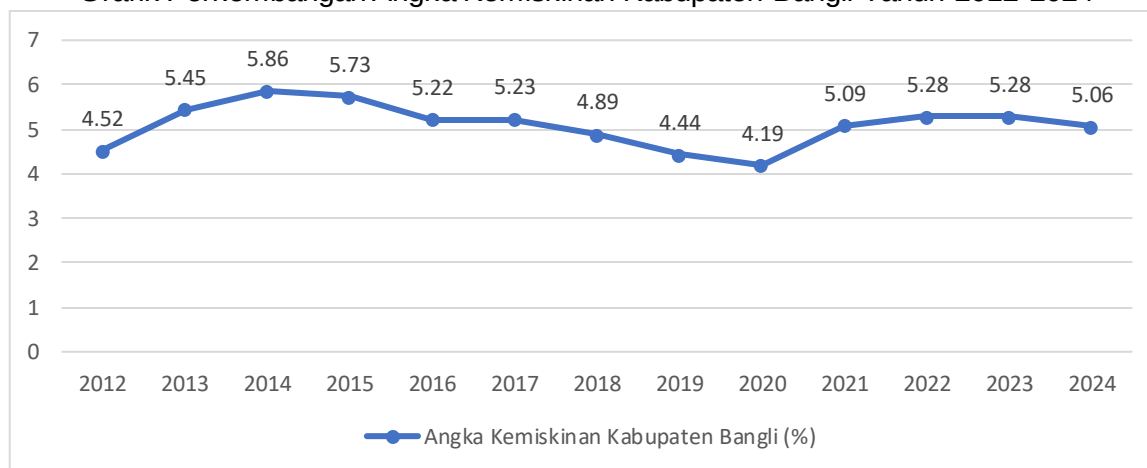
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2012-2024

No	Tahun	Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli (%)
1	2012	4,52
2	2013	5,45
3	2014	5,86
4	2015	5,73
5	2016	5,22
6	2017	5,23
7	2018	4,89
8	2019	4,44
9	2020	4,19
10	2021	5,09
11	2022	5,28
12	2023	5,28
13	2024	5,06

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.13.

Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2012-2024



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang memenuhi syarat untuk bekerja namun belum memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat diukur dengan

menghitung jumlah orang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya dalam suatu periode tertentu. Tingkat pengangguran dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta kondisi pasar tenaga kerja di suatu negara atau wilayah. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi masalah serius bagi suatu wilayah karena dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial pada suatu wilayah.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 0.75%, yang kemudian meningkat drastis menjadi 1.86% pada tahun 2020. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun menjadi 1.8%, menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang lebih signifikan hingga mencapai 0.76%, hampir kembali ke tingkat sebelum pandemi. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka tetap stabil di angka 0.75% dan menurun ke angka 0,74% pada tahun 2024.

Tabel 2.24.

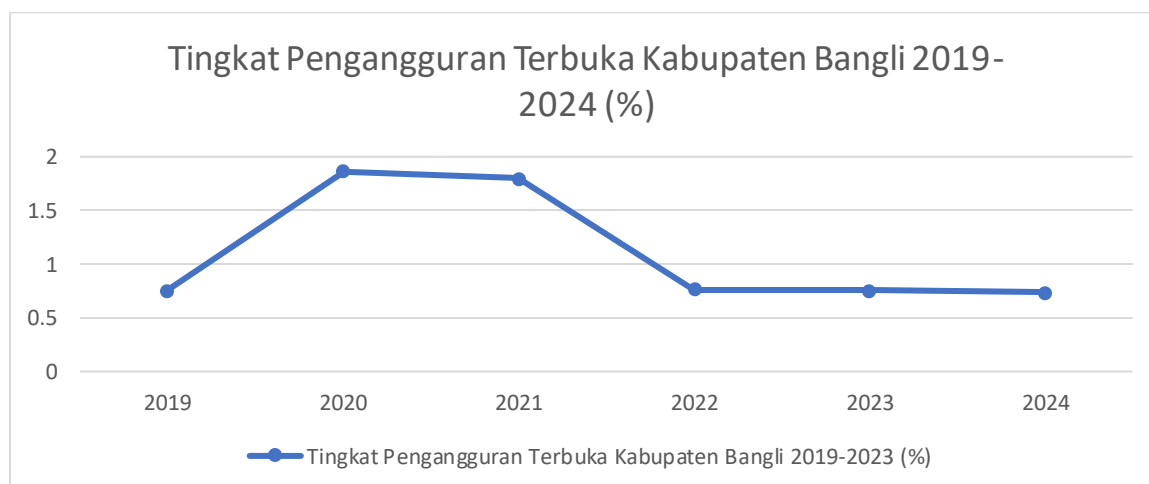
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangli Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bangli	0,75	1,86	1,8	0,76	0,75	0,74
Provinsi Bali	1,57	5,63	5,37	4,8	2,69	1,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.14.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

A. Kualitas Kehidupan Masyarakat

1) Angka Harapan Hidup

Berdasarkan Data BPS Provinsi Bali, Usia Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan yang cukup stabil selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Usia Harapan Hidup Kabupaten Bangli tercatat sebesar 70,52 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Bangli diperkirakan dapat hidup hingga usia 70 tahun lebih. Pada tahun 2021, Usia Harapan Hidup Kabupaten Bangli mengalami sedikit penurunan menjadi 70,62 tahun, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, Usia Harapan Hidup kembali menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, dari 70,97 tahun di tahun 2022, naik menjadi 71,33 tahun di tahun 2023, dan mencapai 71,63 tahun pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali, UHH Kabupaten Bangli masih berada di bawah rata-rata provinsi yang pada tahun 2024 mencapai 73,29 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangli masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan daerah lain di Bali, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan, gizi masyarakat, serta faktor lingkungan pendukung kesehatan.

Tabel 2.25.

Usia Harapan Hidup Saat Lahir di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Jembrana	72,35	72,46	72,82	73,20	73,51
2	Kab. Tabanan	73,65	73,75	74,10	74,84	74,80
3	Kab. Badung	75,10	75,18	75,51	75,88	76,18
4	Kab. Gianyar	73,68	73,78	74,13	74,52	74,86
5	Kab. Klungkung	71,25	71,41	71,83	72,28	72,50
6	Kab. Bangli	70,52	70,62	70,97	71,33	71,63
7	Kab. Karangasem	70,47	70,56	70,89	71,25	71,53
8	Kab. Buleleng	71,83	71,95	72,32	72,70	72,92
9	Kota Denpasar	74,82	74,93	75,30	75,69	76,01
Provinsi Bali		72,13	72,24	72,60	72,98	73,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

2) Indeks Keluarga Sehat

Indeks keluarga sehat adalah salah satu indikator pemerintah dalam mengukur kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan indeks keluarga sehat yaitu keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bati mendapat air susu (ASI) eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar dan penderita

hipertensi melakukan pengebotan secara teratur. Indeks Keluarga sehat inti di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,34 (keluarga tidak sehat) sehingga perlu evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya IKS Kabupaten Bangli seperti akses terhadap layanan kesehatan, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Tabel 2.26.
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Bangli Tahun 2024

Kabupaten	Indeks Keluarga Sehat Inti	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
Badung	0,61	70,27	99,83	99,73	88,90	97,11	75,54	48,37
Bangli	0,34	61,99	95,09	97,54	89,14	94,56	17,30	22,44
Buleleng	0,30	50,52	97,09	98,32	87,73	91,58	32,46	35,18
Gianyar	0,31	66,44	97,96	99,46	86,54	96,61	23,29	34,82
Jembrana	0,43	60,95	97,21	99,48	93,49	97,68	29,66	40,91
Karangasem	0,33	44,40	97,12	97,91	90,36	94,94	41,43	22,12
Klungkung	0,58	67,72	99,74	99,80	89,42	98,71	65,08	53,58
Denpasar	0,36	35,21	94,86	98,34	86,17	91,40	31,80	26,52
Tabanan	0,47	78,49	99,93	99,77	89,25	97,90	69,58	50,82

Sumber: Sistem Informasi Kesehatan, Krama Bali Sehat

B. Jumlah Sarana Kesehatan

Berdasarkan data jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bangli yang diperoleh dari Kabupaten Bangli dalam angka 2025 terlihat adanya peningkatan secara bertahap, terutama pada fasilitas dasar layanan kesehatan masyarakat. Jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Kabupaten Bangli selama periode tersebut tetap stabil masing-masing sebanyak 2 unit dan 1 unit. Hal ini menunjukkan belum adanya penambahan rumah sakit baru dalam lima tahun terakhir. Puskesmas sebagai layanan kesehatan tingkat pertama juga stabil dengan jumlah 12 unit setiap tahunnya dari 2019 hingga 2024. Stabilitas jumlah puskesmas ini mencerminkan fokus pada optimalisasi pelayanan yang sudah ada.

Klinik Pratama mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2019 jumlah Klinik Pratama tercatat sebanyak 7 unit, sempat menurun menjadi 6 unit pada 2021, namun kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai 13 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perluasan layanan kesehatan swasta yang melengkapi peran puskesmas dan rumah sakit.

Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa juga mengalami peningkatan. Dari 356 unit pada tahun 2019 hingga mencapai 369 unit pada tahun 2024. Kenaikan jumlah posyandu menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat.

Secara total, jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bangli meningkat dari 378 unit pada tahun 2019 menjadi 396 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bangli.

Tabel 2.27.

Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Bangli 2019-2024

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah sakit umum	2	2	2	2	2	2
2	Rumah sakit khusus	1	1	1	1	1	1
3	Puskesmas	12	12	12	12	12	12
4	Klinik Pratama	7	7	6	10	13	12
5	Posyandu	356	356	356	356	369	369
Jumlah		378	378	377	381	397	396

Sumber: BPS Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli Dalam Angka 2025

C. Jumlah Tenaga Kesehatan

Berdasarkan data Kabupaten Bangli Dalam Angka 2025, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bangli menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, jumlah total tenaga kesehatan tercatat sebanyak 1.258 orang dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 1.898 orang pada tahun 2024. Tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyak adalah perawat. Jumlah perawat pada tahun 2019 sebanyak 722 orang, meningkat menjadi 933 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan peran penting tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangli.

Jumlah bidan juga mengalami peningkatan, dari 277 orang pada tahun 2019 menjadi 345 orang pada tahun 2024. Ketersediaan bidan yang cukup sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak di daerah. Tenaga dokter mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2024 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 249 orang dari 86 orang pada tahun 2019. Peningkatan jumlah dokter ini diharapkan dapat memperbaiki rasio dokter terhadap jumlah penduduk dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan medis.

Beberapa jenis tenaga kesehatan lainnya juga mulai terdata dan mengalami peningkatan, seperti dokter gigi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, dan ahli teknologi laboratorium medik. Misalnya, tenaga gizi yang mulai terdata pada 2021 sebanyak 52 orang meningkat menjadi 51 orang pada tahun 2024, serta ahli teknologi laboratorium medik dari 27 orang di 2021 menjadi 97 orang di 2024.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangli.

Tabel 2.28.**Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Bangli 2019-2024**

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah (orang)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter	86	187	121	135	118	249
2	Dokter Gigi	-	-	28	34	38	54
3	Perawat	722	702	762	845	887	933
4	Bidan	277	358	364	352	338	345
5	Tenaga Farmasi	90	64	52	61	64	90
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	83	55	18	37	46	48
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	-	-	46	43	39	31
8	Tenaga Gizi	-	-	52	51	49	51
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	-	-	27	38	45	97
10	Jumlah	1.258	1.366	1.470	1.596	1.624	1.898

Sumber: BPS Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli Dalam Angka 2025

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bangli menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia dan sosial ekonomi.

Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangli tercatat sebesar 7,18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata warga Kabupaten Bangli menempuh pendidikan formal selama sekitar tujuh tahun, yang setara dengan tingkat pendidikan hingga kelas satu atau dua SMP. Meskipun angka ini masih relatif rendah, hal ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam sektor pendidikan, seperti aksesibilitas, fasilitas pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Memasuki tahun 2022, rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 7,47 tahun. Peningkatan ini sebesar 0,29 tahun mencerminkan adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat Kabupaten Bangli.

Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangli terus menunjukkan peningkatan, mencapai 7,58 tahun. Meskipun peningkatan dari tahun 2023 hanya sebesar 0,01 tahun, peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak-anak yang melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangli. Secara keseluruhan, peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangli dari 7,18 tahun pada 2021 menjadi 7,58 tahun pada 2024 menunjukkan bahwa ada kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan.

Tabel 2.29.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)			
	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	8,35	8,64	8,65	8,70
Kab. Tabanan	9,14	9,15	9,35	9,57
Kab. Badung	10,62	10,64	10,9	11,14
Kab. Gianyar	9,29	9,55	9,8	9,84
Kab. Klungkung	8,14	8,46	8,48	8,74
Kab. Bangli	7,18	7,47	7,57	7,58
Kab. Karangasem	6,33	6,67	6,68	6,70
Kab. Buleleng	7,25	7,56	7,57	7,69
Kota Denpasar	11,48	11,5	11,52	11,53
Provinsi Bali	9,06	9,39	9,45	9,54

Sumber: BPS Provinsi Bali

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Angka HLS penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2024 sebesar 12,53 tahun, artinya seorang anak yang dilahirkan di tahun 2023 diharapkan dapat menempuh pendidikan selama 12,53 tahun. Angka HLS ini meningkat dari 12,52 tahun di tahun 2023 dan 12,49 tahun di tahun 2022.

Tabel 2.30.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)			
	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	12,92	13,01	13,02	13,05
Kab. Tabanan	13,01	13,03	13,04	13,29
Kab. Badung	13,99	14,03	14,22	14,23
Kab. Gianyar	13,97	14,01	14,09	14,11
Kab. Klungkung	13,00	13,02	13,12	13,13
Kab. Bangli	12,35	12,49	12,52	12,53
Kab. Karangasem	12,42	12,62	12,63	12,91
Kab. Buleleng	13,08	13,26	13,27	13,30
Kota Denpasar	14,09	14,1	14,11	14,13
Provinsi Bali	13,4	13,48	13,58	13,62

Sumber: BPS Provinsi Bali

C. Indeks Pembangunan Literasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan dua makna istilah literasi, yaitu: (1) kemampuan menulis dan membaca; (2) pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Istilah literasi berikut maknanya itu, agaknya merupakan saduran dari bahasa Inggris: literacy, yang memiliki arti: (1) The ability to read and write; (2) Competence or knowledge in a specified area.

Istilah literasi mulai marak digunakan di sekitar abad ke-19, sejalan dengan meluasnya dampak mesin cetak (Revolusi Guttenberg) yang merambah hingga negeri-negeri jajahan (Anderson, 2008). Semula, term literasi merujuk kepada praktik menulis dan membaca yang digunakan untuk membedakan antara mereka yang sudah melek aksara (literate) dan yang masih buta huruf (illiterate). Namun, istilah ini kemudian berkembang dan dipadankan dengan istilah ‘pengetahuan’ dan ‘keterampilan’ dalam berbagai bidang kehidupan. Pemerintah sendiri menyebutkan terdapat enam literasi dasar yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara, yakni literasi baca-tulis hitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi kewarganegaraan (Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi VI/Oktober-2016).

Pada tahun 2024 indeks pembangunan literasi di Kabupaten Bangli adalah 49,92. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 54,80. Jika disandingkan dengan Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Badung yang memiliki indeks pembangunan literasi lebih tinggi dari Provinsi Bali, Kabupaten Bangli memiliki indeks pembangunan literasi yang paling rendah jika disandingkan dengan kabupaten lainnya, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan indeks pembangunan literasi dibandingkan dengan Kabupaten Lain.

Tabel 2.31.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi	
		2023	2024
1	Jembrana	56,00	57,54
2	Tabanan	53,96	60,14
3	Badung	72,70	74,96
4	Gianyar	54,80	55,96
5	Klungkung	61,07	64,57
6	Bangli	54,94	49,92
7	Karangasem	55,85	75,43
8	Buleleng	65,00	68,46
9	Kota Denpasar	71,92	76,11
10	Provinsi Bali	62,70	66,05

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan

Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali persentase penduduk Kabupaten Bangli yang memiliki jaminan kesehatan menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terdapat tren peningkatan dalam kepemilikan jaminan kesehatan di Kabupaten Bangli, terutama pada kategori BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2020, 72,09% penduduk tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Angka ini meningkat secara konsisten setiap tahun, mencapai 85,08% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional.

Sementara itu, kategori Jamkesda hanya muncul pada tahun 2022 dengan angka sangat kecil (0,10%) dan tidak tersedia (N/A) pada tahun 2023. Hal ini kemungkinan mencerminkan peralihan atau integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk asuransi swasta, persentasenya relatif rendah dan cenderung fluktuatif, yakni dari 0,88% di tahun 2020 menjadi 0,12% di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih jaminan yang disediakan pemerintah dibandingkan layanan swasta.

Pada kategori jaminan dari perusahaan atau kantor, meskipun nilainya kecil, terlihat adanya peningkatan dari 0,15% pada tahun 2020 menjadi 1,14% di tahun 2024. Kenaikan ini bisa menunjukkan pertumbuhan sektor formal di daerah tersebut, atau peningkatan kesadaran perusahaan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Bangli semakin membaik, dengan dominasi utama pada kepesertaan BPJS Kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan di Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jenis Jaminan Kesehatan			
		BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
1	2020	72,09	0,00	0,88	0,15
2	2021	80,46	0,00	0,07	0,32
3	2022	81,78	0,10	0,22	0,33
4	2023	80,98	N/A	N/A	0,63
5	2024	85,08	-	0,12	1,14

Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2025 (bali.bps.go.id)

2.2.5. Beragama Malahat dan Berkebudayaan Maju

A. Perkembangan Seni dan Budaya

Perkembangan seni dan budaya merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Bali khususnya Kabupaten Bangli. Banyak kesenian dan kebudayaan khas dan unik yang menjadi jati diri dari masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Bangli seperti budaya perang papah yang ada di Desa Pengotan; seni angkul-angkul seragam di Desa Pengelipuran yang dimanfaatkan sebagai daya tarik tersendiri bagi wisatawan; tari baris bedil di Desa Kayubihi; budaya Ngerebeg yang dilaksanakan oleh 4 banjar yang ada di kota Bangli yaitu Banjar Pande, Banjar Kawan, Banjar Griya dan Banjar Blungbang; dan lain sebagainya.

Untuk menjaga perkembangan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bangli diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat agar seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bangli dapat tetap ada dan lestari. Pemerintah Kabupaten Bangli sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang berfungsi untuk mengembangkan seni dan budaya yang ada di Bangli yaitu penyelenggaraan presentasi seni dan budaya; pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya; jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi; dan pelaksanaan pengelolaan cagar budaya secara terpadu.

Kegiatan presentasi seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 16 kali pada tahun 2020. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 angka ini mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6 kali pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Bangli melakukan 8 kali presentasi seni dan budaya. Pada tahun 2023 penyelenggaraan presentasi seni meningkat menjadi 27, namun pada tahun 2024 menurun kembali menjadi 17 penyelenggaraan presentasi seni.

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola secara terpadu sebanyak 144 buah pada tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 247 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 19 buah. Namun untuk karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi berjumlah 18 buah pada tahun 2020 tidak mengalami penambahan pada tahun-tahun berikutnya atau tidak ada karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi pada tahun 2021 hingga 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33.

Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli dalam Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan presentasi seni dan budaya	kali	16	6	8	27	17

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	144	247	57	22	19
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	18	0	0	0	0
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	144	247	2	2	2

Sumber : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bali Tahun 2020-2024

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

A. Kesenjangan Gender

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti Indeks Pembangunan Manusia yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Gender akan semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100.

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Bangli menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2020, IPG Bangli berada di angka 91,54 dan secara bertahap meningkat setiap tahunnya menjadi 91,58 (2021), 91,86 (2022), 92,23 (2023), hingga mencapai 92,58 pada tahun 2024.

Capaian ini menempatkan Bangli dalam posisi menengah di antara wilayah lain di Bali. IPG Bangli lebih tinggi dibanding Karangasem (yang sempat berada di bawah 90), namun masih di bawah Tabanan, Badung, dan Kota Denpasar yang telah menyentuh atau melampaui angka 95. Capaian IPG Bangli yang terus meningkat juga mencerminkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih setara dan inklusif. Nilai IPG di atas 90 menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Bangli relatif kecil dan terus membaik dari tahun ke tahun.

Dengan tren positif ini, Kabupaten Bangli memiliki potensi untuk terus memperkecil kesenjangan gender dan bergerak menuju capaian pembangunan yang lebih adil serta berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 2.34.

Tabel Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	93,38	93,86	94,43	94,52	94,90
Kab. Tabanan	95,36	95,42	95,45	95,72	95,95
Kab. Badung	95,51	95,53	95,65	95,94	96,16
Kab. Gianyar	94,63	94,70	94,72	95,09	95,14
Kab. Klungkung	91,12	91,18	91,37	91,79	92,18
Kab. Bangli	91,54	91,58	91,86	92,23	92,58
Kab. Karangasem	88,93	88,96	89,90	90,17	90,67
Kab. Buleleng	91,59	91,65	91,85	91,99	92,24
Kota Denpasar	96,77	96,88	96,92	96,68	96,77
Provinsi Bali	93,79	94,01	94,36	94,59	95,10

Sumber: BPS Provinsi Bali, (bali.bps.go.id)

2) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian.

Pada tahun 2024, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bangli tercatat sebesar 69,06, angka yang berada di bawah rata-rata Provinsi Bali sebesar 74,38. Meskipun menunjukkan kinerja yang cukup baik, capaian ini menempatkan Bangli dalam kelompok tengah ke bawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali.

Dalam komponen keterlibatan perempuan di parlemen, Bangli hanya mencatatkan angka 13,33%, masih lebih tinggi dibanding Kota Denpasar (8,89%) dan setara dengan Karangasem, namun lebih rendah dibanding Tabanan (20%) dan Jembrana (17,14%). Rendahnya representasi perempuan di lembaga legislatif menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan gender di Bangli.

Dari sisi perempuan sebagai tenaga profesional, Bangli mencatatkan angka 54,04%, termasuk salah satu yang tertinggi di Bali dan hanya kalah dari Gianyar (59%). Ini menunjukkan bahwa di Bangli, perempuan memiliki peluang cukup besar untuk bekerja di sektor profesional dan berpendidikan.

Namun, dalam hal sumbangan pendapatan perempuan, Bangli hanya mencatat 36,58%, angka yang lebih rendah dibanding Karangasem (43,90%), Klungkung (47,93%), maupun rata-rata provinsi (38,83%). Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi ekonomi perempuan terhadap pendapatan keluarga/masyarakat di Bangli masih terbatas, meskipun keterlibatan profesionalnya tinggi.

Secara keseluruhan, IDG Bangli sebesar 69,06 mencerminkan adanya ketimpangan struktural, khususnya dalam representasi politik dan distribusi pendapatan, yang perlu ditangani dengan kebijakan afirmatif dan pemberdayaan ekonomi berbasis gender. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35.

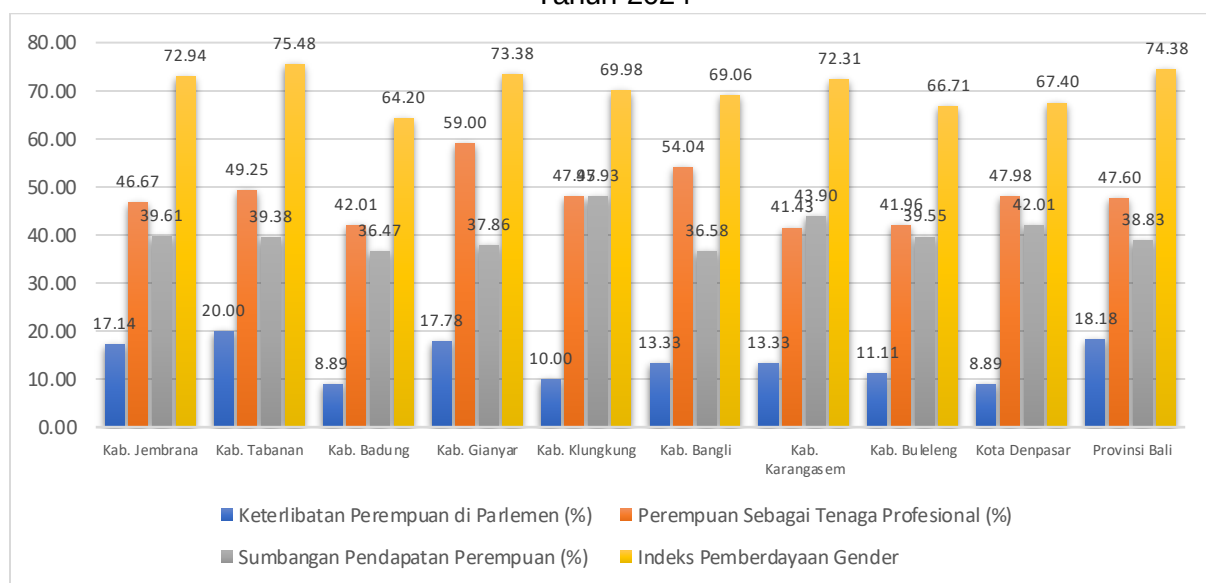
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
Kab. Jembrana	17,14	46,67	39,61	72,94
Kab. Tabanan	20,00	49,25	39,38	75,48
Kab. Badung	8,89	42,01	36,47	64,20
Kab. Gianyar	17,78	59,00	37,86	73,38
Kab. Klungkung	10,00	47,95	47,93	69,98
Kab. Bangli	13,33	54,04	36,58	69,06
Kab. Karangasem	13,33	41,43	43,90	72,31
Kab. Buleleng	11,11	41,96	39,55	66,71
Kota Denpasar	8,89	47,98	42,01	67,40
Provinsi Bali	18,18	47,60	38,83	74,38

Sumber: BPS Provinsi Bali 2025, (bali.bps.go.id)

Gambar 2.15.

Grafik Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Bali 2025, (bali.bps.go.id)

3) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran Indeks Ketimpangan Gender dilakukan untuk membantu

pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Indeks Ketimpangan Gender dinilai semakin kecil maka semakin baik.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Bangli menunjukkan tren penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara konsisten, dari 0,362 pada tahun 2020 menjadi 0,233 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Bangli terus berkurang, meskipun nilai IKG Bangli masih berada di atas rata-rata Provinsi Bali tahun 2024 yang tercatat sebesar 0,183.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Bangli berada pada kategori ketimpangan sedang. Pada tahun 2020, Bangli termasuk dalam lima besar kabupaten/kota dengan ketimpangan tertinggi. Namun, perbaikan yang stabil selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya upaya untuk mempersempit kesenjangan gender, khususnya dalam akses terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Penurunan IKG Bangli yang konsisten, meskipun belum ideal, merupakan indikator bahwa kebijakan pembangunan inklusif dan responsif gender mulai menunjukkan hasil. Namun, masih dibutuhkan penguatan di sektor-sektor strategis seperti pendidikan tinggi perempuan, representasi politik, dan penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi agar ketimpangan ini terus ditekan.

Tabel 2.36.

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	0,365	0,320	0,206	0,211	0,211
Kab. Tabanan	0,236	0,148	0,180	0,170	0,178
Kab. Badung	0,142	0,130	0,118	0,126	0,186
Kab. Gianyar	0,216	0,204	0,193	0,193	0,175
Kab. Klungkung	0,149	0,193	0,198	0,186	0,210
Kab. Bangli	0,362	0,261	0,257	0,249	0,233
Kab. Karangasem	0,401	0,297	0,358	0,284	0,246
Kab. Buleleng	0,405	0,421	0,462	0,389	0,353
Kota Denpasar	0,348	0,212	0,303	0,288	0,200
Provinsi Bali	0,305	0,265	0,321	0,239	0,183

Sumber: BPS Provinsi Bali 2025, (bali.bps.go.id)

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. IPM dikembangkan oleh PBB dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan manusia dengan memperhitungkan beberapa faktor kunci, seperti harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup.

IPM menggabungkan beberapa indikator kunci untuk menciptakan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan manusia daripada hanya menggunakan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Indikator utama yang digunakan dalam perhitungan IPM adalah:

1) Harapan Hidup

IPM memperhitungkan harapan hidup sebagai ukuran kesehatan masyarakat. Harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan gaya hidup yang sehat.

2) Tingkat Pendidikan

IPM juga mempertimbangkan tingkat pendidikan dengan melihat rata – rata tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dan tingkat partisipasi sekolah. Pendidikan yang baik dapat membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi individu dan masyarakat.

3) Standar Hidup

IPM menggunakan PDB per kapita sebagai indikator standar hidup. PDB per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran relatif suatu negara dan dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik distribusi kekayaan diantara penduduknya.

Dengan menggabungkan faktor – faktor tersebut, IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah daripada hanya menggunakan ukuran ekonomi saja. Hal ini memungkinkan pembangunan daerah agar memperhatikan kesejahteraan secara keseluruhan.

Menurut data badan pusat statistik Provinsi Bali, Kabupaten Bangli selalu mengalami peningkatan nilai indeks pembangunan manusia. Dimana pada tahun 2020 nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangli sebesar 70,60. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,47 dan pada tahun 2024 menjadi 72,51. Namun apabila dibandingkan dengan angka indeks pembangunan manusia di Kabupaten lain, dengan nilai 72,51 merupakan kabupaten terendah kedua di Provinsi Bali, tepat berada diatas Kabupaten Karangasem dengan nilai indeks sebesar 69,74. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	72.36	72.75	73.58	74.04	74.60
Kab. Tabanan	76.17	76.45	76.75	77.43	78.42
Kab. Badung	81.6	81.83	82.13	83.08	83.87
Kab. Gianyar	77.36	77.7	78.39	79.24	79.82
Kab. Klungkung	71.73	71.75	72.55	73.11	74.04
Kab. Bangli	70.60	70.60	71.47	71.99	72.51
Kab. Karangasem	67.35	67.36	68.28	68.91	69.74
Kab. Buleleng	72.55	72.56	73.45	73.97	74.52
Kota Denpasar	83.93	84.03	84.37	84.73	85.22
Provinsi Bali	75.5	75.69	76.44	77.1	77.76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

B. Bonus Demografi dan Angka Ketergantungan Penduduk

Bonus demografi adalah periode di mana suatu wilayah mengalami penurunan rasio ketergantungan (dependency ratio) karena meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak 0-14 tahun dan lansia 65 tahun ke atas). Pada tahun 2029, Kabupaten Bangli diperkirakan akan mencapai tahap ini dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 219.379 jiwa, yang merupakan 72% dari total populasi. Sementara itu, penduduk usia non-produktif diperkirakan mencapai 85.314 jiwa, atau 28% dari total populasi.

Dengan angka ketergantungan yang diperkirakan sebesar 39 pada tahun 2029, Kabupaten Bangli akan berada dalam posisi yang sangat menguntungkan secara demografis. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif hanya perlu menanggung 39 penduduk usia non-produktif, yang merupakan salah satu indikator kunci dari bonus demografi. Kondisi ini mencerminkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja dan berkontribusi secara ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bergantung secara ekonomi, seperti anak-anak dan lansia.

Bonus demografi memberikan berbagai implikasi positif bagi Kabupaten Bangli. Salah satu yang paling menonjol adalah kesempatan untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor, terutama pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pasar kerja yang terus berkembang. Selain itu, penciptaan lapangan kerja

yang memadai akan membantu mengoptimalkan potensi ekonomi dari penduduk usia produktif ini.

2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

A. PDRB Kabupaten Bangli

PDRB Kabupaten Bangli (Atas Dasar Harga Konstan) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan selepas Pandemi COVID-19 dan pada tahun 2024 dan telah melampaui kondisi sebelum pandemi. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat dampak berat pandemi terhadap perekonomian global dan lokal. Pemulihan ini tidak hanya sekadar menandakan kembalinya aktivitas ekonomi, tetapi juga menunjukkan daya tahan dan adaptabilitas ekonomi Kabupaten Bangli dalam menghadapi tantangan besar.

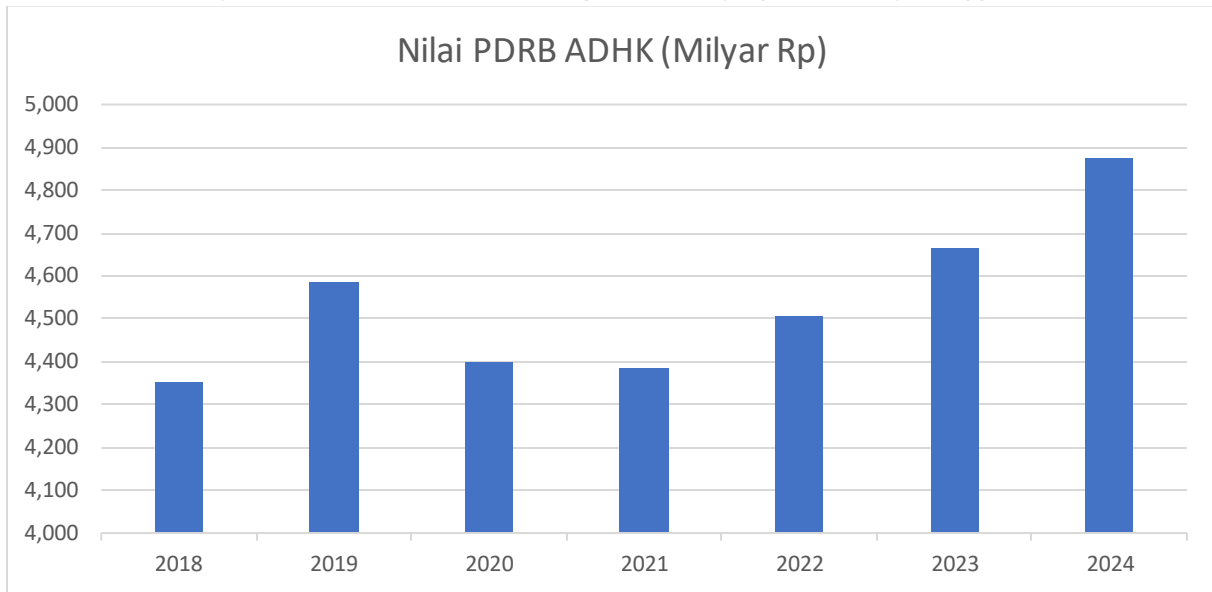
Peningkatan PDRB di Kabupaten Bangli bukan hanya sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, hal ini mencerminkan kemajuan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertumbuhan PDRB yang kuat biasanya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial, seperti pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Ini berarti lebih banyak penduduk yang mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak, yang pada gilirannya meningkatkan standar hidup mereka.

Selain itu, peningkatan PDRB juga menunjukkan adanya peningkatan investasi di Kabupaten Bangli. investasi yang masuk ke Kabupaten Bangli tidak hanya dari sektor publik tetapi juga dari sektor swasta. Peningkatan investasi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Kabupaten Bangli. dengan lebih banyak investasi, infrastruktur dan layanan publik dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bisnis dan kehidupan masyarakat. Investasi ini juga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Peningkatan PDRB juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bangli. Ketika ekonomi tumbuh, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Peningkatan ini berarti akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih memadai seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Gambar 2.16.

Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangli (Dalam Milyar Rp) Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2024

B. Sektor Unggulan Kabupaten Bangli

Sektor unggulan atau sektor basis merupakan sektor – sektor yang memberikan manfaat paling besar dalam perekonomian suatu wilayah. Manfaat ini salah satunya dapat dilihat pada kontribusinya pada PDRB, serta karakteristiknya melalui Analisis LQ dengan membandingkan terhadap sektor yang sama pada wilayah referensi yang lebih luas. Tabel 2.17 memperlihatkan nilai masing – masing Lapangan Usaha dalam PDRB ADHB Kabupaten Bangli beserta kontribusinya. Terlihat bahwa Sektor Pertanian yang diwakili oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki nilai tertinggi yaitu Rp. 2.159.562,75 juta sekaligus dengan kontribusi tertinggi yaitu 27,31%. Lapangan Usaha dengan kontribusi tinggi (>10%) bagi PDRB Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

- Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menunjukkan Sektor pertanian (23,82%)
- Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (12,43%)
- Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (12,07%)
- Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,29%)

Dalam jangka pendek, lapangan usaha diatas yang harus distimulasi pertumbuhannya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli sehingga dapat mencapai kondisi seperti sebelum era pandemi.

Tabel 2.38.

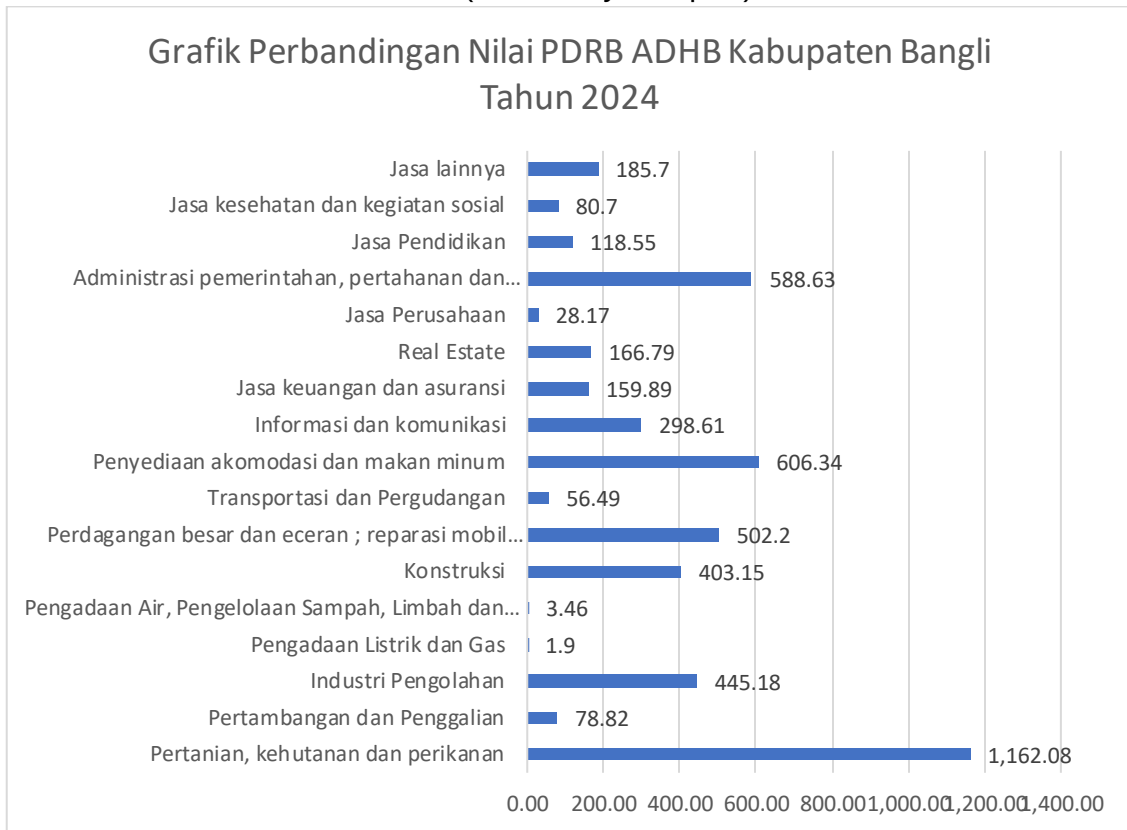
Nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangli Tahun 2024 Berdasarkan Lapangan Usaha (Dalam Milyar Rupiah)

No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Bangli	
		Nilai PDRB (Dalam Milyar Rp)	Kontribusi Dalam PDRB (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.162,08	23,82%
2	Pertambangan dan Penggalian	78,82	1,61%
3	Industri Pengolahan	445,18	9,12%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,90	0,03%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46	0,07%
6	Konstruksi	403,15	8,26%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	502,20	10,29%
8	Transportasi dan Pergudangan	56,49	1,15%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	606,34	12,43%
10	Informasi dan Komunikasi	298,61	6,12%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	159,89	3,27%
12	Real Estate	166,79	3,42%
13	Jasa Perusahaan	28,17	0,57%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	588,63	12,07%
15	Jasa Pendidikan	118,55	2,43%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,70	1,65%
17	Jasa lainnya	185,70	3,80%
	Total PDRB Kabupaten Bangli	4.876,68	100%

Sumber: BPS Kabupaten Bangli Tahun 2024

Gambar 2.17.

Perbandingan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangli Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Olahan Data BPS Kabupaten Bangli Tahun 2024

C. Rasio Kewirausahaan

Guna memajukan perekonomian suatu negara atau daerah, meningkatkan kuantitas dan kualitas wirausahawan menjadi variabel penting. Kesiapan mengambil risiko, inovatif, kreatif, berintegritas dan komunikatif merupakan indikator penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas wirausahawan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali mencatat rasio kewirausahaan pada masyarakat Bali pada tahun 2024 sebesar 3,66 persen, dimana jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut data jumlah UMKM per Kabupaten serta Rasio Kewirausahaan Provinsi Bali.

Tabel 2.39.

Jumlah UMKM dan Rasio Kewirausahaan di Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buleleng	34.374	54.489	57.216	66.368	66.065
Jembrana	24.346	46.277	66.537	67.183	64.703
Tabanan	42.744	43.715	47.160	47.957	43.575
Badung	19.261	22.647	40.989	21.699	36.136

Kabupaten	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Denpasar	32.026	32.224	32.226	29.749	89.403
Gianyar	75.482	75.542	75.620	75.666	52.797
Bangli	44.068	44.123	44.693	44.251	34.729
Klungkung	14.584	35.792	36.072	35.792	19.383
Karangasem	40.468	57.456	40.614	50.717	39.870
Provinsi Bali	327.353	412.265	440.609	439.382	448.434
Rasio Kewirausahaan	7,74%	9,45%	9,99%	3,50%	3,66%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikator ekonomi yang menunjukkan persentase jumlah penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Partisipasi aktif dari angkatan kerja tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya. Tingkat partisipasi angkatan kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, struktur usia penduduk dan tingkat pendidikan, serta kebijakan pemerintah mengenai ketenagakerjaan. Apabila tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi menunjukkan ekonomi yang aktif dan dinamis, sedangkan tingkat partisipasi yang rendah bisa menjadi indikasi masalah dalam penciptaan lapangan kerja atau pengangguran yang tinggi. Dengan demikian indikator ini menjadi penting dalam perumusan RPJMD untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari populasi yang berkontribusi secara ekonomi melalui aktivitas bekerja atau mencari pekerjaan.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat partisipasi angkatan menunjukkan stabilitas dengan fluktuasi minor setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja berada di angka 83,11% lalu mengalami sedikit penurunan menjadi 82,20% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 83,36% sebelum kembali menurun cukup signifikan pada tahun 2024 mencapai 82,27%.

Tabel 2.40.

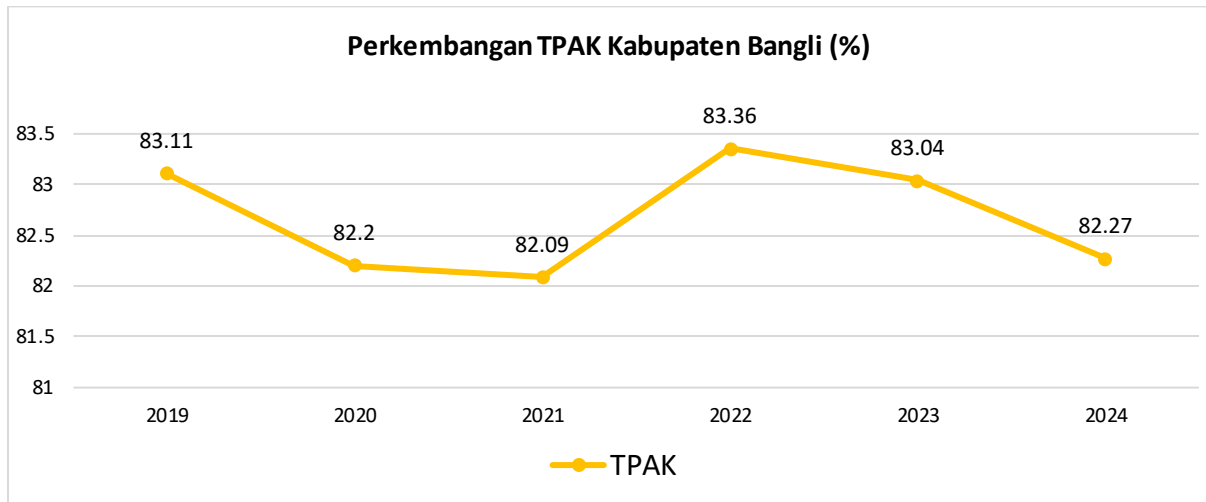
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut di Kabupaten Bangli Tahun 2019 – 2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bangli	83,11	82,20	82,09	83,36	83,04	82,27
Provinsi Bali	73,77	74,32	73,54	76,86	77,08	77,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Gambar 2.18.

Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bangli Tahun 2019 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

E. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah mengacu pada proses penciptaan, pengadopsian, dan penerapan ide, produk, layanan atau praktik baru yang memiliki dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan dan perkembangan wilayah suatu daerah. Inovasi ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Penyelenggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau Insentif Daerah mengakibatkan pengoptimalisasian penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan pemerintahan daerah dalam berinovasi dalam penyelenggaraan kewenangannya sesuai dengan konteks dan dinamika yang terjadi di masing-masing daerah.

Pemerintah Daerah perlu membuat strategi secara cermat dan matang agar inovasi yang dihadirkan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pelaksanaan inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, serta lingkungan organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Sumber daya yang dimaksud yaitu pengaturan organisasi, manajemen data dan jejaring atau kemitraan yang strategis. Hal-hal inilah yang harus mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam menghadirkan dan menjalankan inovasi daerah sesuai dengan kondisi dan dinamika yang ada.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2024, inovasi daerah di Kabupaten Bangli mendapatkan nilai indeks sebesar 63,33 yang dimana menempatkan Kabupaten Bangli menjadi kabupaten dengan nilai indeks tertinggi urutan ke 3 di Provinsi Bali dan urutan 54 Nasional dengan status daerah sangat inovatif. Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli termasuk dalam kelompok daerah yang memiliki tingkat inovasi yang sangat baik di Provinsi Bali. Skor yang diperoleh Kabupaten Bangli juga berada di atas beberapa kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Badung, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Tabanan, dan Gianyar. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Bangli dalam mendorong inovasi di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.41.

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Bali	69,92	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Klungkung	67,75	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Bangli	63,33	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Badung	62,9	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Buleleng	60,98	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Jembrana	59,93	Inovatif
7	Kabupaten Karangasem	58,3	Inovatif
8	Kabupaten Tabanan	57,45	Inovatif
9	Kabupaten gianyar	50,96	Inovatif
10	Kota Denpasar	71,17	Sangat Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2024

2.3.3. Transformasi Digital

Secara umum transformasi digital adalah proses perubahan pola pikir, perilaku, dan cara hidup masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berinteraksi sosial, mengakses informasi, serta meningkatkan 20kualitas hidup. Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

Pembangunan TIK di Kabupaten Bangli menunjukan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir, yang ditunjukan oleh peningkatan pengguna TIK. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti penggunaan telepon seluler, proporsi rumah tangga dengan

akses internet, penggunaan komputer serta indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Persentase penduduk Kabupaten Bangli yang menggunakan HP/telepon cukup stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, angkanya sebesar 91%, sempat menurun menjadi 88% di tahun 2022 dan 89% di tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 91,50%. Angka ini menunjukkan tingkat adopsi teknologi komunikasi yang tinggi di masyarakat. Transformasi digital juga tercermin dari proporsi rumah tangga dengan akses internet. Setelah sempat anjlok drastis menjadi 9,30% di tahun 2022 dan 9,50% di tahun 2023, angka ini melonjak tajam di tahun 2024 menjadi 55%. Kenaikan signifikan ini menandakan adanya upaya serius pemerintah daerah atau program nasional dalam memperluas jaringan internet ke rumah tangga. Indikator lainnya adalah proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi. Pada 2020-2021, angkanya cukup baik di kisaran 48-50%, namun sempat turun tajam menjadi 9% di 2022 dan 8,50% di 2023. Namun, di tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 56%. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan akses masyarakat terhadap perangkat teknologi pendukung transformasi digital.

Perkembangan positif juga tercermin dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangli. Setelah tidak tersedia datanya di tahun 2020-2021, indeks ini mulai tercatat 2,28 pada tahun 2022, meningkat ke 2,48 di tahun 2023, dan mencapai 2,71 di tahun 2024. Kenaikan indeks ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam penerapan sistem digital untuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Bangli

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	91%	91%	88%	89%	91,50%
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	47%	48%	9,30%	9,50%	55%
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	48%	50%	9%	8,50%	56%
Indeks SPBE	N/A	N/A	2,28	2,48	2,71

Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

2.3.4. Integrasi Ekonomi dan Global

Integrasi Ekonomi adalah proses penyatuan kebijakan ekonomi antara beberapa negara atau wilayah untuk membentuk hubungan ekonomi yang lebih erat dengan tujuan meningkatkan kerja sama, memperluas pasar dan memperkuat perekonomian secara bersama – sama. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi antar negara untuk menciptakan pasar yang lebih luas. Integrasi ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, meningkatkan daya saing ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas ekonomi regional dan global.

Ekspor dan impor merupakan bagian penting dari integrasi ekonomi ini dimana ekspor membantu dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat hubungan dagang antar negara sedangkan impor berpengaruh terhadap kebutuhan barang yang tidak tersedia di dalam negeri. Berikut adalah ekspor Provinsi Bali menurut kelompok komoditas utama;

Tabel 2.43.

Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama Tahun 2024

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
Commodity Group		Volume	Value	Segment
1.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	24 632 966	168 389 881	26,54
2.	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) (62)	2 615 787	85 657 796	13,50
3.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	724 701	79 866 390	12,59
4.	Kayu dan barang dari kayu (44)	10 456 561	37 938 763	5,98
5.	Perabotan, lampu, dan alat penerangan (94)	8 669 693	37 669 951	5,94
6.	Kertas, karton, dan barang daripadanya (48)	1 046 556	33 313 227	5,25
7.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	586 427	27 177 648	4,28
8.	Barang anyaman (46)	2 951 543	13 978 494	2,20
9.	Barang dari batu, semen, asbes, atau mika (68)	9 040 673	9 731 890	1,53
10.	Barang dari kulit samak (42)	393 231	9 498 555	1,50
11.	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	1 208 317	9 494 854	1,50
12.	Mesin dan peralatan mekanis serta bag	98 809	8 852 703	1,40
13.	Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (33)	357 847	7 548 711	1,19
14.	Minuman, alkohol, dan cuka (22)	2 849 958	7 404 680	1,17
15.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	884 461	6 413 083	1,01
16.	Kapas (52)	393 877	6 323 552	1,00
17.	Produk Keramik (69)	1 389 647	5 636 125	0,89
18.	Barang tekstil jadi lainnya (63)	343 577	5 278 922	0,83
19.	Kopi, Teh, Rempah-rempah (09)	412 944	5 126 909	0,81
20.	Alas kaki (64)	118 735	5 075 957	0,80
21.	Komoditas Lainnya / Other Commodities	7 965 743	64 118 824	10,11
Jumlah / Total :		77 142 052	634 496 917	100,00

Sumber : BPS Provinsi Bali

Menurut data BPS Provinsi Bali pada tahun 2024 komoditas ikan, krustasea dan moluska menjadi komoditas dengan jumlah ekspor tertinggi dengan jumlah volume mencapai 24.632.966 kg dengan pangsa tertinggi yakni 26,54% mengingat provinsi bali dikelilingi dengan perairan yang membuat komoditas ini menjadi salah satu unggulan untuk diekspor, sedangkan komoditas dengan jumlah ekspor terendah adalah komoditas Mesin dan peralatan mekanis serta bag dengan jumlah volume 98.809 kg, yang mengartikan Provinsi Bali belum bersaing secara signifikan dalam perdagangan produk – produk industri seperti mesin dan peralatan mekanis terutama pada era transformasi digital saat ini.

Tabel 2.44.**Impor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama Tahun 2024**

Kelompok Komoditas		Volume (kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
Commodity Group		Volume	Value	Segment
1.	Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (84)	590 465	25 500 790	15,11
2.	Sereal (10)	41 092 649	24 371 740	14,44
3.	Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (85)	682 437	23 494 353	13,92
4.	Logam mulia dan perhiasan/permata (71)	116 989	13 089 686	7,76
5.	Barang dari kulit samak (42)	351 771	9 240 993	5,48
6.	Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (90)	252 817	7 755 766	4,60
7.	Bahan bakar mineral (27)	9 322 101	7 459 312	4,42
8.	Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (33)	70 273	7 165 315	4,25
9.	Kendaraan dan bagiannya (87)	127 158	6 058 827	3,59
10.	Karet dan barang dari karet (40)	233 023	4 626 193	2,74
11.	Tembakau dan rokok (24)	70 355	4 581 540	2,72
12.	Kendaraan udara dan bagiannya (88)	12 906	3 596 264	2,13
13.	Berbagai barang logam tidak mulia (83)	120 650	2 305 501	1,37
14.	Tutup kepala dan bagiannya (65)	179 903	2 268 438	1,34
15.	Barang dari besi dan baja (73)	75 891	2 234 131	1,32
16.	Ikan, krustasea, dan moluska (03)	1 827	2 218 341	1,31
17.	Pakaian dan aksesorinya (rajutan) (61)	61 131	2 208 171	1,31
18.	Berbagai barang buatan pabrik (96)	79 005	1 657 202	0,98
19.	Plastik dan barang dari plastik (39)	140 171	1 546 363	0,92
20.	Daging hewan (02)	6 912	1 349 486	0,80
21.	Komoditas Lainnya / Other Commodities	899 240	16 016 371	9,49
Jumlah / Total:		54 549 674	168 744 783	100,00

Sumber: BPS Provinsi Bali

Berdasarkan BPS Provinsi Bali data Impor Menurut Komoditas Utama di Provinsi Bali Tahun 2024, komoditas Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya menjadi komoditas yang paling tinggi dengan pangsa pasar 15,11% dan volume mencapai 682.437 kg. Diikuti oleh sereal dengan pangsa pasar sebesar 14,44% dan Volume mencapai 41.092.649 Kg. Meskipun Kabupaten Bangli bukan pusat utama industri besar atau pelabuhan masuk barang impor, karakteristik wilayahnya yang berbasis pertanian dan kerajinan rakyat tetap berkaitan dengan komoditas-komoditas tertentu yang diimpor oleh Bali. Adapun keterkaitan potensial antara komoditas impor Bali dan kebutuhan/aktivitas ekonomi di Bangli antara lain:

- 1) Sereal : Impor sereal sebagai bahan pangan utama menunjukkan adanya kebutuhan konsumsi yang tinggi. Bangli sebagai kabupaten agraris tetap berkontribusi pada diversifikasi pangan, namun kebutuhan sereal impor seperti gandum dan jagung berpotensi masuk ke Bangli sebagai bahan konsumsi rumah tangga atau usaha kuliner kecil.
- 2) Minyak atsiri dan kosmetik : Dengan nilai impor mencapai 7,17 juta USD, kelompok ini berkaitan erat dengan potensi lokal Bangli yang memiliki tanaman aromatik

(misalnya serai wangi dan cengkeh). Artinya, peluang substitusi impor dengan produk lokal berbasis tanaman Bangli sangat terbuka jika dikembangkan lebih lanjut oleh UMKM.

- 3) Instrumen medis dan optik : Komoditas ini mendukung sektor kesehatan. Dalam konteks Bangli, penguatan fasilitas kesehatan di daerah perbukitan memerlukan instrumen medis berkualitas, yang bisa berasal dari impor kelompok ini.
- 4) Barang-barang pabrik dan plastik : Banyak digunakan dalam pengemasan dan kebutuhan usaha kecil. UMKM di Bangli yang bergerak di sektor makanan olahan atau kerajinan kemungkinan menggunakan produk hasil impor ini dalam aktivitas produksinya.
- 5) Komoditas lainnya (9,49%) : Segmen ini sangat luas dan bisa mencakup berbagai barang yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan dan sektor pariwisata lokal Bangli, seperti peralatan rumah tangga, suku cadang mesin, hingga barang-barang teknologi ringan.

Meskipun tidak menjadi pusat distribusi barang impor, Kabupaten Bangli tetap memiliki keterkaitan strategis dengan struktur impor Bali, terutama melalui kebutuhan rumah tangga, sektor UMKM, pertanian terpadu, serta pengembangan sektor kesehatan dan pariwisata. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal Bangli guna menekan ketergantungan pada beberapa kelompok komoditas impor.

A. Realisasi PMA dan PMDN

Dalam suatu daerah, realisasi penanaman modal baik Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing investasi daerah tersebut. Investasi tidak hanya membawa modal finansial tetapi juga beragam manfaat lain seperti teknologi, lapangan kerja dan infrastruktur yang semuanya meningkatkan daya tarik daerah tersebut bagi investor lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan investasi sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan daya saing jangka panjang suatu daerah.

1) Jumlah Investor (PMDN/PMA)

Berdasarkan data pada Tabel 2.46, jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMDA) di Kabupaten Bangli menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 547 investor, yang kemudian meningkat secara signifikan menjadi 1.537 investor pada tahun 2021, atau mengalami kenaikan sebesar 181%. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah investor mencapai 2.312, mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 50,4% dari tahun sebelumnya..

Pertumbuhan paling tajam terjadi pada tahun 2023, dengan lonjakan jumlah investor mencapai 4.111 atau meningkat sekitar 77,8% dibandingkan tahun 2022. Meskipun laju pertumbuhan melambat pada tahun 2024, jumlah investor tetap mengalami peningkatan sebesar 2,6% menjadi 4.218. Tren ini mengindikasikan

peningkatan daya tarik investasi daerah serta membaiknya ekosistem bisnis dan regulasi yang mendukung masuknya investor di wilayah tersebut.

Tabel 2.45.

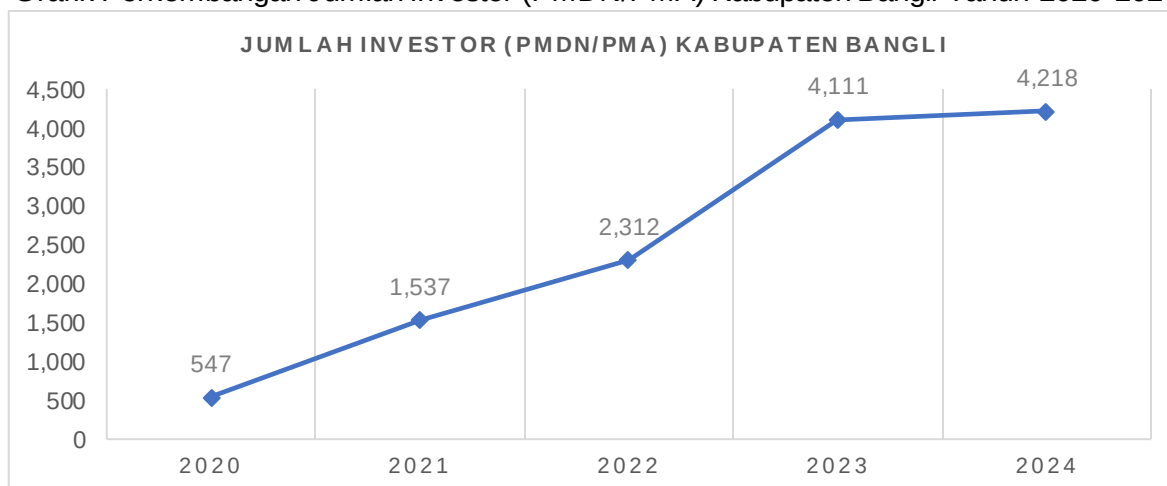
Jumlah Investor (PMDN/PMA) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Investor
1	2020	547
2	2021	1.537
3	2022	2.312
4	2023	4.111
5	2024	4.218

Sumber: Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

Gambar 2.19.

Grafik Perkembangan Jumlah Investor (PMDN/PMA) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

2) Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Pada tahun 2020, total nilai investasi tercatat sebesar Rp305,44 miliar. Nilai ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp580,96 miliar atau meningkat sebesar 90,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan investasi berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai investasi mencapai Rp592,84 miliar, mencerminkan peningkatan sebesar 2,0% secara tahunan. Namun, pada tahun 2023, terjadi kontraksi nilai investasi menjadi Rp501,26 miliar, turun sebesar 15,4% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, seperti penyesuaian pasar atau dinamika regulasi.

Meski demikian, pada tahun 2024, Kabupaten Bangli mencatatkan lonjakan nilai investasi yang sangat signifikan, yakni mencapai Rp1,25 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 149,3% dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Tabel 2.46.

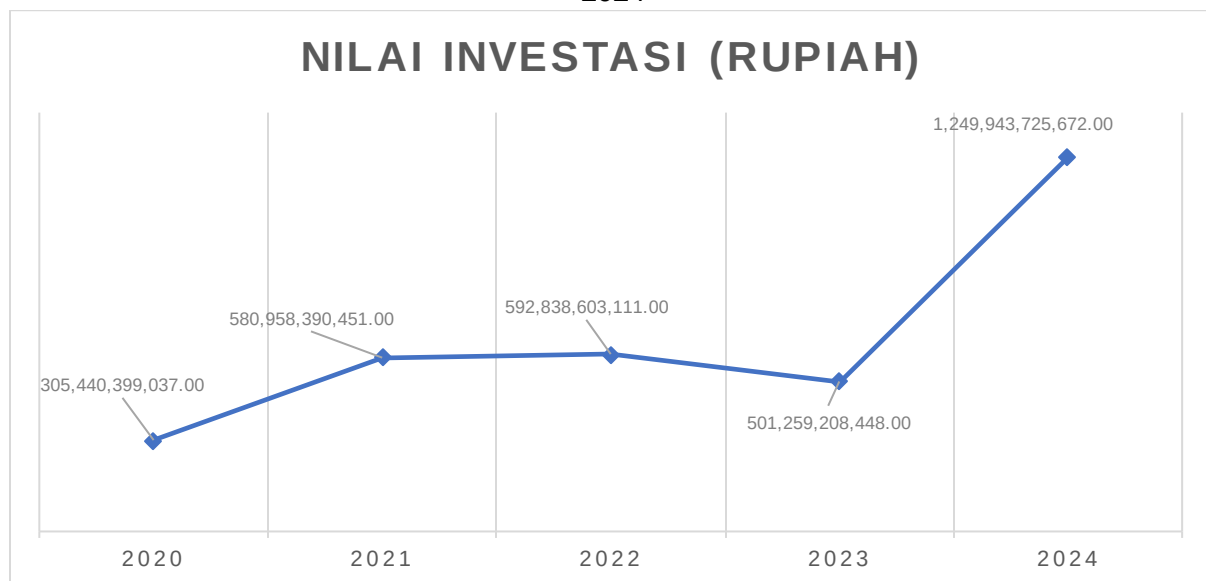
Perkembangan Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai Investasi (Rupiah)
1	2020	305.440.399.037,00
2	2021	580.958.390.451,00
3	2022	592.838.603.111,00
4	2023	501.259.208.448,00
5	2024	1.249.943.725.672,00

Sumber: Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

Gambar 2.20.

Grafik Perkembangan Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

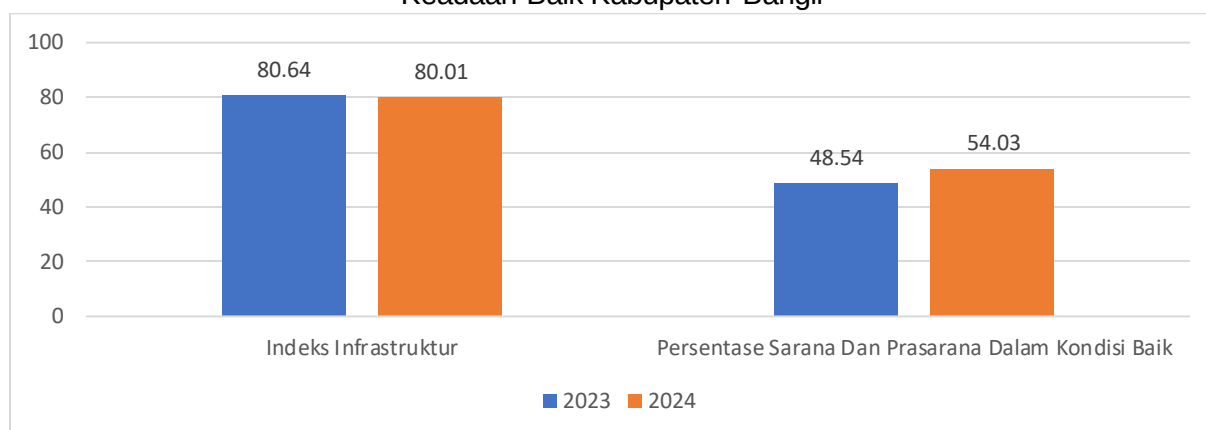
A. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kabupaten Bangli, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal kualitas infrastruktur. Kualitas infrastruktur di Kabupaten Bangli terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari meningkatnya indeks infrastruktur kabupaten yang menunjukkan bahwa berbagai proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Peningkatan ini tidak hanya terlihat pada infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, tetapi juga mencakup sarana dan prasarana publik lainnya seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum. Persentase sarana dan prasarana publik dalam

kondisi baik juga terus meningkat, menandakan bahwa upaya perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada dilakukan dengan cukup efektif.

Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, Kabupaten Bangli masih perlu terus berupaya untuk mencapai kondisi optimal dalam pembangunan infrastruktur publik (kondisi 100% baik). Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah kebutuhan akan pendanaan yang memadai, koordinasi antar instansi yang lebih baik, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan Indeks Infrastruktur dan persentase sarana dan prasarana publik dalam keadaan baik Kabupaten Bangli.

Gambar 2.21.
Perkembangan Indeks Infrastruktur dan Persentase Sarana Prasarana Publik Dalam Keadaan Baik Kabupaten Bangli



Sumber : Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

B. Kondisi Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur yang baik merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Bangli, upaya peningkatan kualitas infrastruktur terus dilakukan, mencakup perbaikan jaringan jalan, pelayanan air bersih dan sanitasi, pelayanan irigasi dan lain-lain. Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, tantangan tetap ada dalam memastikan seluruh sarana dan prasarana publik mencapai kondisi optimal (100% baik).

1) Kondisi Jaringan Jalan

Secara umum, perkembangan panjang jaringan jalan di Kabupaten Bangli yang berada dalam kondisi baik telah mengalami peningkatan signifikan selama periode 2020-2021. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023.

Pada akhir tahun 2023, panjang total jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bangli mencapai 65% dan meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 89,1%. Distribusi jaringan jalan ini mencerminkan upaya untuk

memastikan keterhubungan dan aksesibilitas di seluruh wilayah Bangli, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Seluruh wilayah permukiman di Kabupaten Bangli kini telah menerima akses jaringan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Ini merupakan pencapaian penting yang memungkinkan mobilitas yang lebih baik bagi penduduk setempat, memfasilitasi akses yang lebih mudah ke berbagai layanan dan fasilitas publik. Namun, meskipun telah ada akses jalan yang memadai, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa 100% jaringan jalan di Kabupaten Bangli berada dalam kondisi baik..

Gambar 2.22.

Perkembangan Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2024



Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

2) Cakupan Pelayanan Irigasi

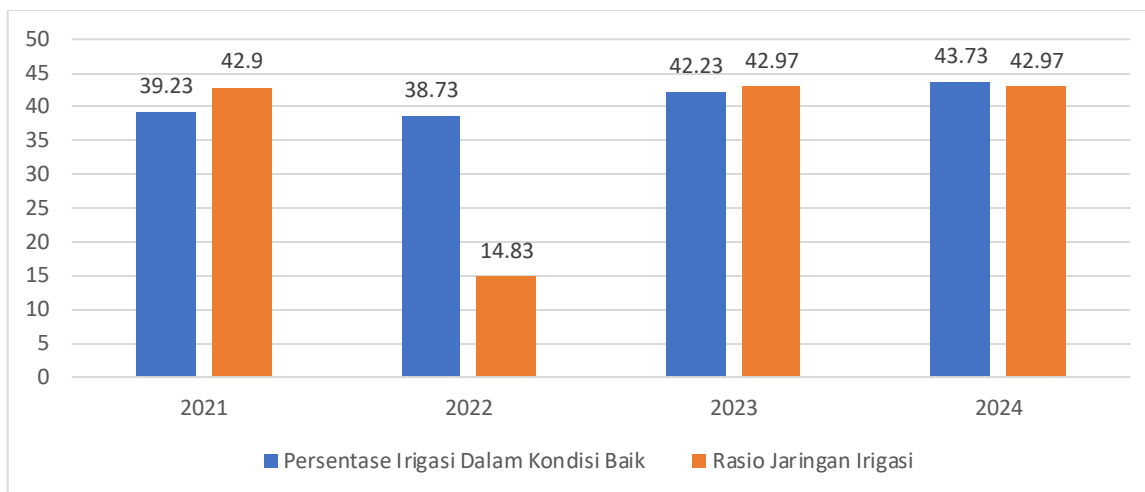
Hingga tahun 2024, rasio jaringan irigasi dan persentase irigasi di Kabupaten Bangli yang dalam kondisi baik terus menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sistem irigasi di kabupaten ini berfungsi dengan optimal.

Kualitas dan cakupan pelayanan jaringan irigasi merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Sistem irigasi yang baik memastikan bahwa tanaman mendapatkan air yang cukup, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan hasil panen yang maksimal. Tanpa jaringan irigasi yang memadai, petani akan kesulitan dalam menjaga produktivitas lahan mereka, terutama selama musim kemarau atau dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang berkelanjutan dan intensif untuk mendorong peningkatan kualitas jaringan irigasi di Kabupaten Bangli. Dengan meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik dan rasio jaringan irigasi di atas 50%, Kabupaten Bangli dapat memastikan bahwa sektor pertaniannya semakin tangguh dan produktif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan hasil

panen, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2.23.
Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bangli



Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

3) Jaringan Telekomunikasi

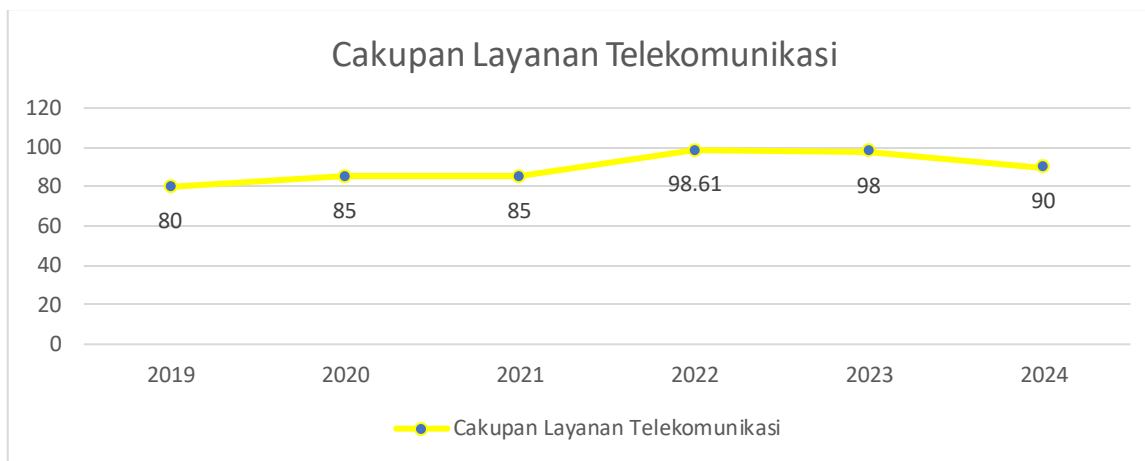
Cakupan pelayanan telekomunikasi di Kabupaten Bangli terus menunjukkan perbaikan yang signifikan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2024, cakupan layanan telekomunikasi telah mencapai angka yang impresif, yaitu 90%. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari pihak terkait dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas jaringan telekomunikasi di daerah tersebut.

Jaringan telekomunikasi dan informasi kini menjadi infrastruktur vital yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pergeseran aktivitas dari yang semula manual atau analog ke digital menuntut adanya jaringan yang handal dan merata. Kehadiran jaringan telekomunikasi yang baik tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga mendukung berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan layanan publik. Sehingga dalam jangka panjang sangat penting untuk terus mendorong peningkatan cakupan layanan telekomunikasi hingga mencapai 100% wilayah di Kabupaten Bangli. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan setiap sudut daerah dapat terhubung dengan baik, tetapi juga untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan internet. Akses internet yang merata akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan ekonomi.

Dengan cakupan layanan telekomunikasi yang mencapai 100%, Kabupaten Bangli dapat menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Masyarakat dapat menikmati berbagai manfaat dari transformasi digital, mulai dari kemudahan

berkomunikasi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan online, hingga peluang bisnis baru yang berbasis teknologi.

Gambar 2.24.
Perkembangan Cakupan Pelayanan Telekomunikasi di Kabupaten Bangli



Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

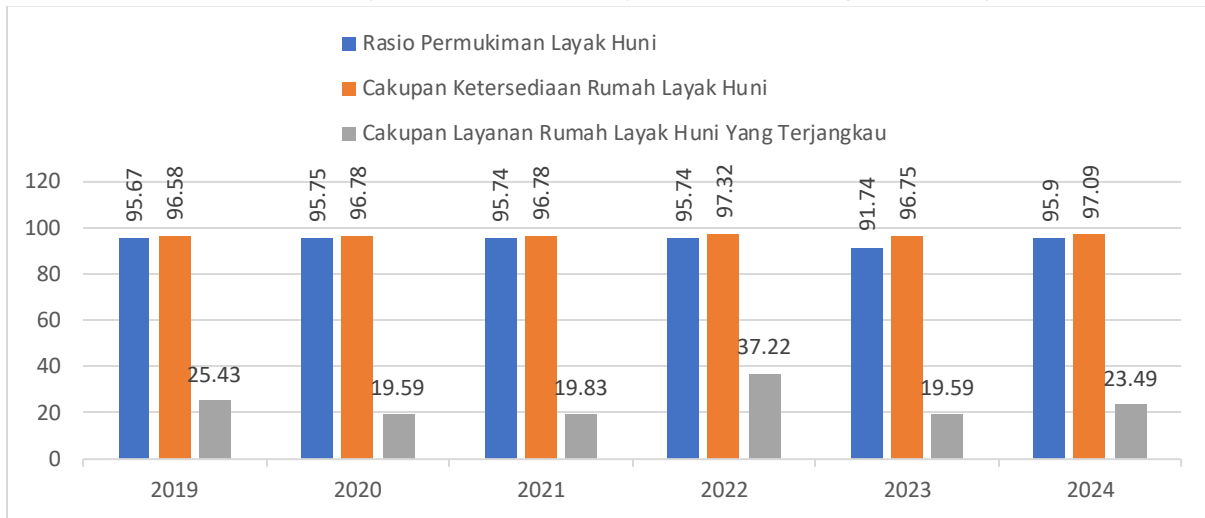
C. Permukiman Layak Huni

Hampir seluruh kawasan permukiman di Kabupaten Bangli sudah termasuk dalam kategori permukiman layak huni. Pada tahun 2024, rasio kawasan permukiman layak huni di Kabupaten Bangli mencapai 95,9%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah permukiman di kabupaten ini sudah memenuhi standar kelayakan, yang mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan infrastruktur dasar, akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, serta kualitas bangunan yang baik. Selain itu, cakupan ketersediaan rumah layak huni juga cukup tinggi, yaitu sebesar 97,9%.

Meski demikian, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni, terutama dalam menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Peningkatan kebutuhan akan bangunan rumah akibat penambahan penduduk harus diantisipasi dengan kebijakan dan program yang tepat.

Saat ini, pembangunan kawasan permukiman masih terkonsentrasi di Bangli Selatan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara Bangli Selatan dan Bangli Utara. Ketimpangan ini dapat berdampak negatif terhadap pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih merata dalam pembangunan kawasan permukiman agar setiap wilayah mendapatkan perhatian dan pembangunan yang seimbang.

Gambar 2.25.
Perkembangan Permukiman Layak Huni di Kabupaten Bangli



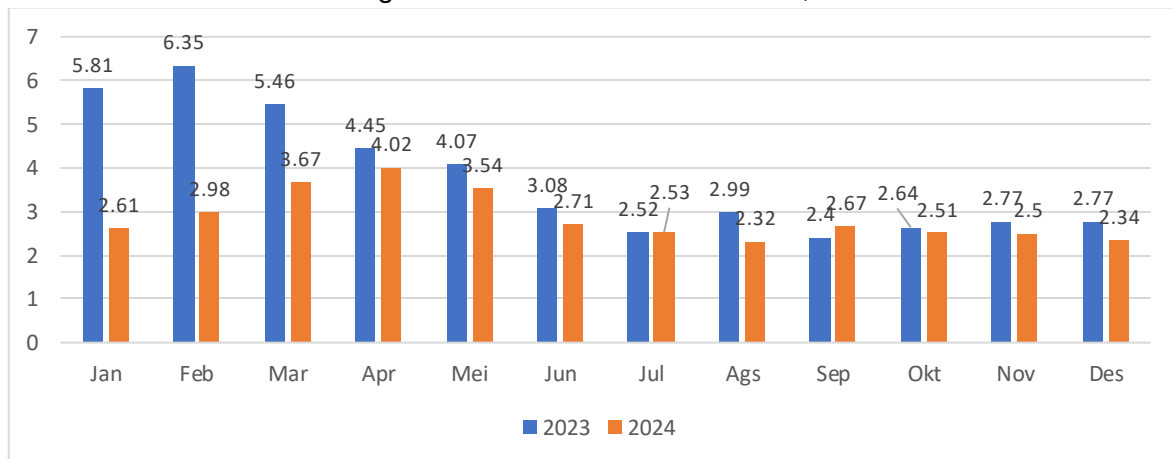
Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Tingkat Inflasi

Secara tahunan, laju inflasi Provinsi Bali tahun 2024 tercatat setinggi 2,34 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2023 yang mencapai 2,77 persen. Terjadi perubahan IHK (2022=100) dari 105,40 pada Desember 2023 menjadi 107,87 pada Desember 2024.

Gambar 2.26.
Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Bali, 2023–2024



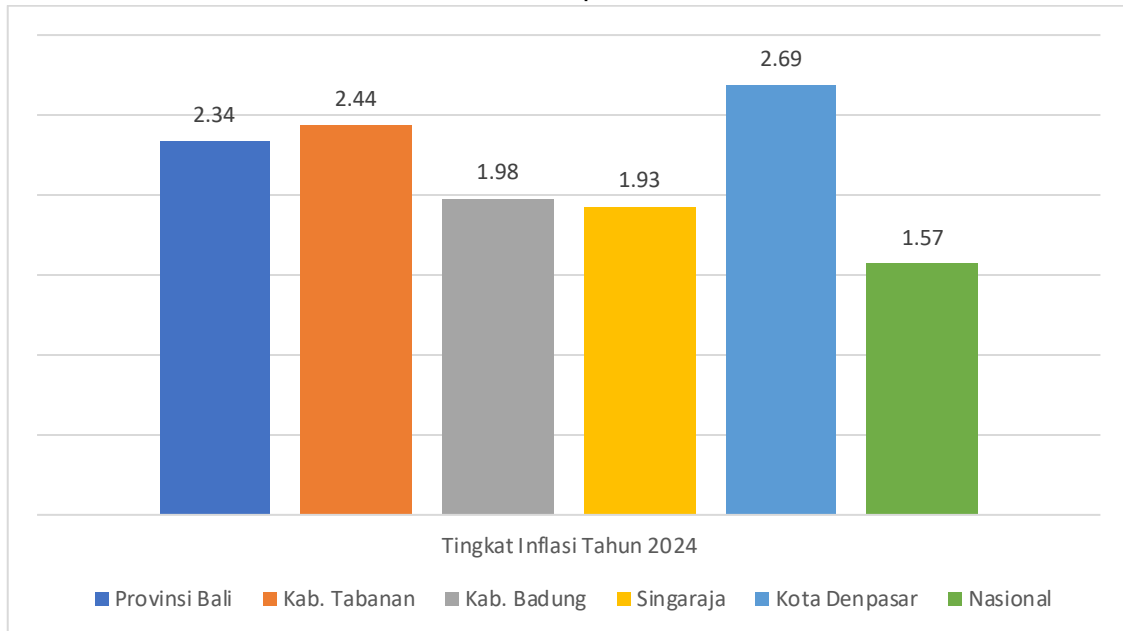
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Bali 2024)

Secara umum, capaian inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Inflasi tahunan 2023 pada Triwulan I 2023, pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, tercatat lebih dari 5,00 persen. Sementara itu, pada periode yang sama di 2024 (Triwulan I), inflasi tahunan Bali tercatat kurang dari 4,00 persen, yang menunjukkan stabilitas harga yang lebih baik,

meskipun tren bulanan (Januari-April 2024) mengalami kenaikan bertahap. Namun demikian, trend yang berlawanan terlihat pada periode April-Desember 2024, yang cenderung menunjukkan adanya penurunan angka inflasi tahunan (y-on-y).

Gambar 2.27.

Perkembangan Inflasi Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, dan Kota Denpasar, 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Bali 2024)

Dibandingkan dengan inflasi nasional, Inflasi tahunan Provinsi Bali dan keempat kabupaten/kota SBH 2022 seluruhnya tercatat di atas angka inflasi nasional. Meskipun demikian, angka inflasi tersebut masih berada dibawah target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2024, yaitu sebesar $2,5 \pm 1$ persen.

Apabila dibandingkan antara keempat kabupaten/kota SBH di Provinsi Bali, secara tahunan Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 2,69 persen. Angka inflasi tahunan Kota Denpasar 2024 ini bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai inflasi tahunan Provinsi Bali yang tercatat sebesar 2,34 persen. Sementara itu, Singaraja menjadi wilayah yang memiliki inflasi tahunan terendah di Provinsi Bali, yaitu sebesar 1,93 persen.

Meskipun Kabupaten Bangli bukan merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi inflasi di daerah ini tetap dapat dianalisis secara tidak langsung dengan merujuk pada perkembangan inflasi di dua kota IHK di Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng (Singaraja). Kedua kota ini dipilih oleh BPS sebagai representasi dinamika harga di wilayah Bali, karena memiliki aktivitas perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan infrastruktur pasar yang relatif lengkap dan stabil.

Dengan menggunakan data inflasi dari kota IHK tersebut, dapat diasumsikan bahwa tren inflasi yang terjadi di Kabupaten Bangli cenderung bergerak searah, meskipun dengan potensi perbedaan tingkat dan tekanan harga yang khas sesuai karakteristik

lokal. Kabupaten Bangli sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis alam, kemungkinan mengalami tingkat inflasi yang lebih stabil dibandingkan kota-kota dengan mobilitas ekonomi dan konsumsi lebih tinggi seperti Denpasar.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Birokrasi

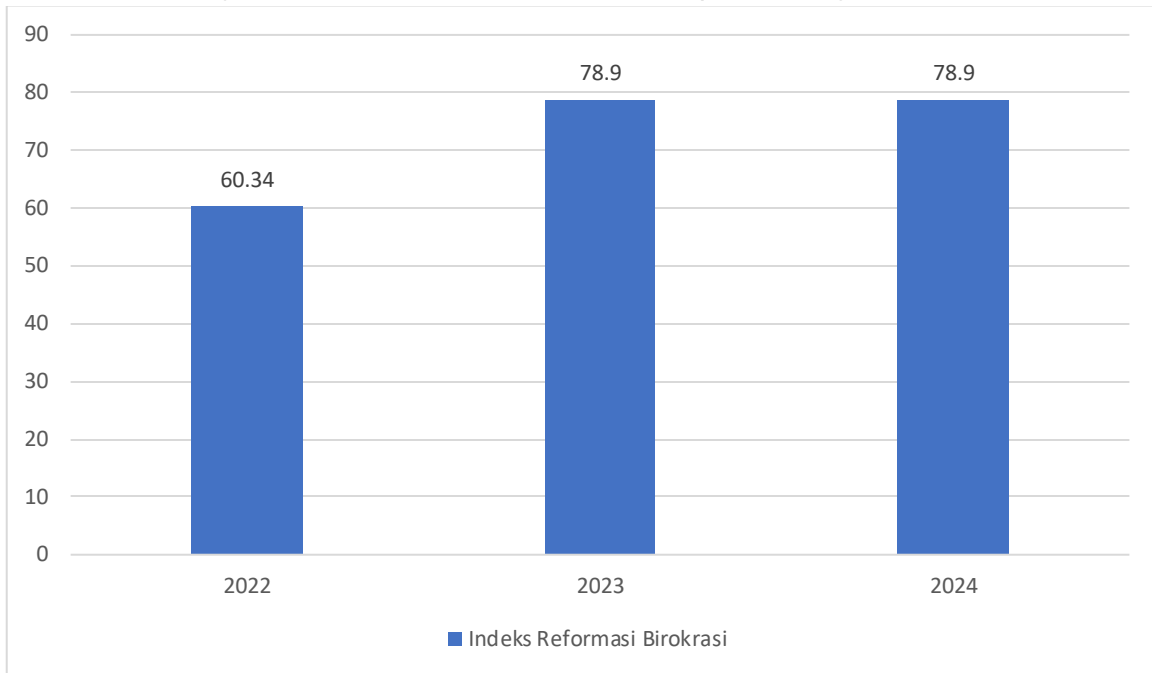
Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023 angka indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bangli mencapai 73,90 dan bertahan hingga tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Namun, meskipun telah menunjukkan kemajuan, Kabupaten Bangli masih membutuhkan optimalisasi lebih lanjut dalam pelayanan publik. Hal ini mencakup baik pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Pelayanan perizinan yang efisien dan transparan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan investasi, sementara pelayanan non-perizinan yang efektif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi, Pemkab Bangli perlu terus melakukan reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi yang lebih canggih dan terintegrasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.

Gambar 2.28.

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangli Tahun 2022-2024



Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunaan SPBE. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Revolusi yang terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau E-Government. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik membuka peluang untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan terpercaya.

Untuk mencapai sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan dengan cara penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas; membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Keterlibatan pemerintah nasional dalam hal ini berbentuk tim koordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik nasional memiliki tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Sistem pemerintah berbasis elektronik yang ada di Kabupaten Bangli pada tahun 2022 mendapatkan skor indeks sebesar 2,28 dengan predikat cukup dan pada tahun

2023 meningkat menjadi 2,48 kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 2,71. Peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Bangli ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Pengembangan Infrastruktur TIK
- Implementasi Aplikasi dan Layanan Berbasis Elektronik
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung SPBE
- Kolaborasi dan Integrasi Antar Lembaga
- Komitmen Pimpinan Daerah
- Peningkatan Penggunaan Layanan Elektronik oleh Masyarakat
- Partisipasi Publik dalam Proses Pemerintahan

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansi

A. Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat

Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan konsistensi dalam penegakan peraturan daerah memiliki peran penting dalam menjamin terciptanya ketertiban umum dan keamanan bagi masyarakat. Keberadaan Linmas yang efektif serta penerapan peraturan daerah yang tegas merupakan fondasi untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi seluruh warga Kabupaten Bangli.

Keamanan dan ketertiban umum bukan hanya penting untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menarik investasi. Jaminan rasa aman ini sangat penting bagi para investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Bangli. Dengan adanya jaminan keamanan, para investor dapat merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam merealisasikan investasi mereka, yang pada gilirannya akan membawa manfaat ekonomi bagi daerah.

Untuk mencapai tujuan ini, cakupan petugas Linmas serta upaya penegakan PERDA di Kabupaten Bangli masih perlu terus ditingkatkan. Peningkatan jumlah dan kualitas petugas Linmas akan memastikan bahwa setiap sudut wilayah terpantau dan terjaga dengan baik. Selain itu, penegakan PERDA yang konsisten dan tegas akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib dan aman.

Dengan komitmen yang kuat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui Linmas dan penegakan peraturan daerah, Kabupaten Bangli akan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk tinggal serta berinvestasi. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Daya Saing diukur dengan menggunakan indikator – indikator yang diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Komponen dasar dalam pembentukan daya saing yaitu

1) Lingkungan Pendukung

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan industri dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian serta tingkat biaya hidup.

2) Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan ketrampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

3) Pasar

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi, pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja, sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.

4) Ekosistem Inovasi

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Selanjutnya masing – masing komponen akan dinilai sesuai dengan kondisi, berikut tabel hasil skoring di Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2024.

Tabel 2.47.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2024

Nama Kab/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Investasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Bali	4,74	3,39	4,63	3,48	4,00	4,23	3,22	3,82	3,28	4,38	3,68	4,06	3,91
Rata-Rata Kab/Kota	4,77	3,72	4,58	3,43	4,04	4,24	3,29	3,25	3,18	4,27	3,78	2,83	3,78
Jembrana	4,79	3,81	4,45	3,54	4,02	4,29	3,20	3,77	3,03	4,08	3,60	2,23	3,73
Tabanan	4,77	3,85	4,68	3,07	4,13	4,30	3,13	3,37	3,00	4,30	3,44	2,42	3,70
Badung	4,85	3,73	4,90	3,36	4,24	4,27	4,21	4,01	3,52	4,67	3,66	4,30	4,14
Gianyar	4,73	3,45	4,68	3,75	4,13	4,30	3,21	3,50	3,22	4,39	4,36	2,53	3,85
Klungkung	4,82	3,70	4,36	3,67	3,94	4,47	2,88	2,74	3,63	3,88	3,57	2,08	3,65
Bangli	4,77	3,53	4,44	3,69	3,87	4,24	2,78	2,41	2,85	3,76	2,97	2,32	3,47
Karangasem	4,81	3,77	4,31	3,27	3,86	4,12	3,08	2,46	2,47	4,15	5,00	1,79	3,59
Buleleng	4,82	3,81	4,45	3,25	3,98	3,96	3,24	2,87	2,27	4,48	4,04	3,61	3,73
Denpasar	4,57	3,78	4,98	3,28	4,23	4,24	3,89	4,16	4,60	4,68	3,35	4,18	4,16

Sumber : Buku Indeks Daya Saing Daerah 2024

1) Institusi

Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang mempengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Kabupaten Bangli memiliki skor 4,77 pada pilar institusi dimana ini menjadi faktor pendukung bagi pelaku ekonomi yang akan berinvestasi dan dapat membentuk iklim bisnis yang kondusif.

2) Infrastruktur

Infrastruktur digunakan untuk mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya saing. Kabupaten Bangli memiliki skor 3,53. Berdasarkan nilai skor tersebut peningkatan dalam penyediaan infrastruktur di Kabupaten Bangli masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien.

3) Adopsi TIK

Adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Salah satu contoh indikator yang mempengaruhi TIK adalah penggunaan internet sebagai penghubung untuk mengakses informasi secara cepat dan menjangkau jarak yang lebih luas, Kabupaten Bangli memiliki skor 4,44 yang artinya akses pemanfaatan informasi dan komunikasi masih kurang di Kabupaten Bangli dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

4) Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah yang dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro yang stabil merupakan kunci kepercayaan investor dan memudahkan pelaku ekonomi dalam menjalankan usaha sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Nilai skor Stabilitas Ekonomi Makro di Kabupaten Bangli merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Bali dimana nilai rata – rata kabupaten lainnya adalah 3,43 sedangkan Kabupaten Bangli mencapai skor 3,69.

5) Kesehatan

Kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dan kreatif. Nilai skor di Kabupaten Bangli 3,87 dimana jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya masih memiliki skor terendah beriringan dengan Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung.

6) Keterampilan

Keterampilan mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah. Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis karena menjadi penyeimbang antara integrasi teknologi dan investasi modal manusia. Nilai skor keterampilan di Kabupaten Bangli adalah 4,24 dimana Kabupaten Bangli merupakan kabupaten dengan nilai skor terendah ketiga di Provinsi Bali. Faktor Keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu penunjang keunggulan kompetitif bagi sektor bisnis.

7) Pasar Produk

Pasar produk menggambarkan keterbukaan pasar melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya. Tidak dapat dimungkiri bahwa kelompok bermodal besar adalah kelompok yang dapat mendominasi pasar. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing diantara kelompok usaha sedang dan besar. Nilai skor Kabupaten Bangli adalah 2,78 nilai tersebut merupakan nilai terendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang menandakan Kabupaten Bangli perlu memperluas pasar produknya untuk bersaing dengan kabupaten di Provinsi Bali.

8) Pasar Tenaga Kerja

Fleksibilitas tenaga kerja dan besarnya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja. Investor akan mempertimbangkan tingkat keterampilan dan upah tenaga kerja yang akan dibayar dalam menanamkan modal bisnisnya. Tenaga kerja mempertimbangkan upah yang akan diterima dan kesejahteraan sosial lainnya dalam memutuskan untuk bekerja. Nilai skor di Kabupaten Bangli merupakan yang terendah di Provinsi Bali dengan nilai 2,41 dimana ini menunjukkan kepentingan investor dan tenaga kerja belum terfasilitasi secara maksimal sehingga produktivitas menjadi terhambat.

9) Sistem Keuangan

Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik. Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta membatu lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Nilai skor Kabupaten Bangli adalah 2,85.

10) Ukuran Pasar

Ukuran pasar memengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan mengeksplorasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industri sehingga meningkatkan nilai tambah. Nilai skor Kabupaten Bangli pada instrumen ini hanya 3,76.

11) Dinamisme Bisnis

Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan. Secara administratif, rendahnya hambatan untuk memulai bisnis serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan

memudahkan perusahaan keluar masuk pasar. Sektor swasta yang gesit dan dinamis dapat meningkatkan produktivitas dengan mengambil risiko bisnis, menguji ide – ide baru dan menciptakan produk serta layanan yang inovatif. Nilai skor dinamisme bisnis di Kabupaten Bangli adalah 2,97 yang berarti kemudahan dalam melakukan atau memulai bisnis yang dapat dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan.

12) Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal. Ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintasvisi dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Nilai skor untuk Kabupaten Bangli adalah 2,32 yang artinya pertumbuhan ide – ide inovatif dan model bisnis baru dapat tingkatkan lagi guna menunjang kenaikan indeks daya saing daerah.

Nilai rata – rata Indeks Daya Saing Daerah di Provinsi Bali adalah 3,91 dan Kabupaten Bangli memiliki nilai 3,47 dimana nilai terendahnya ada pada komponen Sistem Keuangan yang hanya 2,41.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Daerah

A. Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bangli

Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah capaian konkret terhadap ukuran-ukuran kinerja utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dalam periode tertentu. Berikut realisasi capaian indikator kinerja kunci di Kabupaten Bangli

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Bangli

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR KINERJA KUNCI							
A	Pendidikan						
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	88,03	92,85	96,46	68,15	70,25
2	Angka partisipasi kasar	Persen	100,01	99,44	96,46	91,03	91,83
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen		15,63	15,68	16,52	20,11
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	94,59	94,23	89,72	93,53	87,91
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	90,85	73,77	85,29	90,83	88,98
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	88,01	112,8	112,8	99,4	88,71
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	87,83	110,05	102,2	96,15	87,65
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,00421	0,016	0	0	0
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen		0,931	0	0	0
	Angka Kelulusan:						
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM):						
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	99,95	99,95	100	100
	Fasilitas Pendidikan:						
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen			98,2	93,5	98,45
14	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen			99,00	90	97,2
15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	01:22	01:22	01:22	1,22	01:22
16	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	01:26	01:26	01:26	1,26	01:26
17	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	01:23	01:23	01:22,1	01:22,0	01:19

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	01:16	01:16	01:24,6	01:24,4	01:20
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	01:23	01:23	01:22,1	01:22,0	01:20
20	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	01:20	01:20	01:23,3	01:23,2	01:23
21	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Rasio	100,00	0,74	0,87	0,88	0,91
22	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen		89,29	92,50	90	
23	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen		89,29	92,50	90	
24	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	99,1	87,8	93,81	94,38	98,5
B Kepemudaan Dan Olahraga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	50,00	50,00	52,18	55,00	70,00
2	Persentase wirausaha muda	Persen	65,00	65,00	9,89	70,00	63,00
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	45,00	45,00	68,57	50,00	
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Pelatih	5	5	21,45	5	5
5	Cakupan pembinaan atlet muda	Atlet	20	20	42	20	
C Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	9,11	11,8	10,6	14,57	
2	Angka kelangsungan hidup bayi	Rasio		988	989,4	985	
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio	9,6	12,1	12,2	15,6	
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio	7	9,7	7,67	10,75	
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio	176	147	63,96	69,39	
6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	2,1 per 100 balita	2,1 per 100 balita	2,3 per 100 balita	2,1 per 100 balita	
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	11,24	12,22	21,71	0,03	
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,88	0,7	1,12	0,001	
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	81,9 per 100.000 penduduk	81,8 per 100.000 penduduk	88,71 per 100.000 penduduk	52,41 per 100.000 penduduk	
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Persen			88,71	0,1	

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	58,5	68,1	69,08	79,62	
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	97,9	97,3	89,69	82,87	
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	100	
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	Kkal/kapita/hari			-	N/A	
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	104,01	104,7	93,9	98,11	
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	5,7	2,6	0,002	2,3	
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100	100	100	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen			59,6	44,9	
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk			22,83	59	
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen			0,003	3,8	
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen			100	44,9	
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen			38,8	81,32	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	180,8/ 100.000 pddk	35,64/ 100.000 pddk	100	100	
25	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	
26	Angka kejadian Malaria	Persen			0	0,004	
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,01	0,04	0,006	0,01	
28	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Persen			-	N/A	

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	100	100	100	100	
30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	21,59	100	
31	Cakupan kunjungan bayi	Persen			104,2	107	
32	Cakupan puskesmas	Persen	1	1	100	100	
33	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	1	1	100	100	
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	0,902	89,1	81,63	75,6	
35	Cakupan pelayanan nifas	Persen	0,955	0,9733	90,09	82,55	
36	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	0,45	0,527	53,9	50,7	
37	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	0,87	0,9503	95,9	91,8	
38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	1	1	100	94	
39	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	0,7619	0,9775	99,61	95,4	
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	1	1	98	100	
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	1	1	100	100	100
42	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	1	1	100	100	
D	Pekerjaan Umum						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	73,1	73,60%	70,50%	65,00%	57,55%
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen			40,00%	0,39%	0,38%
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen			0,00%	0,00%	0%
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	0,65%	0,73%	1,38%	70,00%	57,55%
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen			0,02%	0,03%	0,03%

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen			0,00%	0,00%	0%
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	90,49%	90,49%	91,25%	91,25%	93,79%
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen			0,00%	0,00%	0
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	0,01%	0,01%	81,73%	70,00%	93,90%
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen			0,00%	0,00%	0
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungain rawan longsor	Persen			0,00%	0,00%	0
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	37,73%	37,91%	38,73%	42,23%	59,73%
13	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	42,97%	42,97%	14,83%	42,97%	20,41%
14	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	80,30%	80,98%	85,54%	85,66%	85,66%
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	80,30%	80,98%	85,54%	85,66%	85,66%
16	Persentase areal kawasan kumuh	Persen			0,28%	1,65%	2,60%
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan						
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk				-		
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Jumlah tempat ibadah x1000 Jumlah penduduk			-	5,91%	
E	Penataan Ruang						
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen			0,01%	0,97%	0,97%
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen			20,27%	20,27%	20,27%
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	2,33%	2,38%	2,37%	2,39%	0,50%
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen			0,00%	0,00%	0,00%

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Persen			30%	0,00%	
6	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	48,63%	48,63%	48,63%	99,97%	99,63%
F	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Rasio rumah layak huni	Persen	96,78%	96,98%	96,83	90,75%	97,09
2	Rasio permukiman layak huni	Persen	95,74%	95,74%	95,74	91,74%	95,9
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	96,78%	96,98%	97,32	96,75%	97,09
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	19,59%	19,81%	37,22	19,59%	23,49
5	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	95,74%	95,91%	95,74	95,74%	95,9
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,19%	0,19%	0,28	0,17%	0,25
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	23,96%	23,96%	14,53	23,96%	23,96
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	3,39%	3,39%	7,13	3,39%	3,39
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	95,74%	95,74%	95,74	80,55%	95,9
G	Sosial						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	3.2%	36,05%	56	43%	20%
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	3.2%	32,70%	74	85%	43%
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0.3%	31,22%	63	43%	20%
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	N/A	N/A	N/A		N/A

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	N/A	N/A	N/A		N/A
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	N/A	N/A	N/A		N/A
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100%	100%	100	100%	100%
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100%	100%	100	100%	100%
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	0.14%	0,06%	27	44%	44%
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	4,33%	3,69%	4,40	3,61	3,64
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	6.6	6,6	10,00	10	10
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	13.1%	9,60%	25,60	15,54	16,34
4	Rasio KDRT	Rasio	0.011%	0,01%	0,009	0	0,005
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		0	0		-	-
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	73%	78%	95,00	79,42	75
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100	100%	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100%	100%	100	100%	100

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	0	0	0	100%	N/A
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100%	100%	100	100%	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100%	100%	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	N/A	N/A	0	N/A	N/A
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	N/A	N/A	0	N/A	N/A
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	0,95%	0,94%	0,99	0,99	0,92
15	Ratio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	0,95%	0,94%	0,98	0,98	0,95
16	Ratio APM perempuan/laki-laki di SMA	Rasio	0,90%	1,02%	0,72	0,72	0,94
17	Ratio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Rasio	0,96%	0,95%	0,81	0,75	0,93
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	0,94%	0,94%	0,96	0,81	0,94
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persen	24%	25%	46,00	25	24
I	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase koperasi aktif		82,63%	83,19%	83,47	74,79	83,19
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen			80,2	79,98	80,21
3	Persentase BPR/LKM aktif	Persen					-
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	97,46%	98,01%	98,34	98,02	97,52
J	Tenaga Kerja						
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun				N/A	0	
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen			N/A	0	
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen			4,54	4,9	2,94

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Keselamatan dan perlindungan	Persen			35%	0	100%
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen			23,64	70,86	75,37
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen			66,66	100	91%
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen			100%	100	100%
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen			100	100	100%
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persen			0,01	2,6	6,4
K	Pangan						
1	Ketersediaan pangan utama	Persen	47,2	90,17	87,57	84,76	84,98
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Persen			111,40	114,40	119
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	76,00	1	42,00	85,00	90
L	Pertanian						
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	27,75	27,76	27,76		
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen			16		
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen			1,33	-	
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen			27,76	-	
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton			7,57	5,16	5,57
6	Cakupan bina kelompok petani	Persen			23,2	23,8	6,3
M	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	Ton			4.983,81	4879,95	4912,14
2	Konsumsi ikan	kg/kap/th			31,50	31,5	51,72
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen			12,12	12,35	12,28
N	Lingkungan Hidup						
1	Peningkatan Indeks Kualitas Air				N/A	-	56,67
2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara				0,99	-	92,703

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan				N/A	-	41,13
4	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada			N/A	-	256,61
5	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/ tidak ada			N/A	-	tidak ada
6	Penetapan hak MHA				3	0	4
7	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan				0	0	0
8	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana				1	6	0
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat				68 desa 4 kelurahan	69 desa 4 kelurahan	68 desa & 4 kelurahan
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak ada			tidak ada	tidak ada	ada
11	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi				-	-	0,00
12	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada			tidak ada	tidak ada	0
13	Terintegrasi nya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota	Ada/ tidak ada			tidak ada	tidak ada	0
14	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada	ada	ada	tidak ada	tidak ada	2
15	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	62	50	51,54	56,67	56,67
16	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	91,5	91,98	92	91,35	92,703
17	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	tidak ada	44,1	34,69	41,91	41,13
18	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	5,71%	11,43%	60	75	30
19	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Unit	3	3	0	0	0
20	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	desa	3	tidak ada	3	0	0

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	desa	3	tidak ada	3	0	0
22	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	desa			3	0	0
23	Penetapan hak MHA	desa			3	0	4
24	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kegiatan			15	0	0
25	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Kegiatan			1	6	0
26	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Desa/Kel	68 desa 4 kelurahan	68 desa 4 kelurahan	68 desa 4 kelurahan	69 desa 4 kelurahan	68 desa& 4 kelurahan
27	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Penghargaan			-	Ada	ada
28	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	-	tidak ada	tidak ada	-	100	0
29	Timbulan sampah yang ditangani	Kubik/Ton	39.777,41	40.479,96	21.214,53	41.195,36	30.843,22
30	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	16,34%	17,00%	15,13	19,82%	22%
31	Persentase cakupan area pelayanan	Persen			7,13	7,13	7,13%
32	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	52,60%	50,32%	51,95	61,05	74,22%
33	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Unit			1	1	8
34	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen			0,01	0%	0%
35	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen			0,01	0%	22%
O	Kependudukan						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	69,53	72,8	73,5	74,52	74,89
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	6,75	6	6	6,59	6,48
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	46,49	50	52,22	55,93	58,47
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada			Ada	Ada	Ada

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum			Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	68,31	97,07	96,75	98,1	97,98
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	36,53	41,03	2,05	97,79	98,18
P	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	86	86	90	100	86
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	50	50	0	50	50
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	6,94	6,94	144	72	66,6
4	Persentase LSM aktif	Persen	N/A	N/A		-	
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	N/A	N/A		-	
6	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	99,7	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	9,8	9,8	1,38	1,71	1,7
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	N/A	N/A		-	
Q	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,07	N/A	0	1,85	data blm rilis
2	Total Fertility Rate (TFR)	TFR	N/A	N/A	0	2,15	2,5
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	39,28	39,28%	39,28	39,28%	39,28
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen			43,33	-	blm disusun
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Buah			0	-	

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor			4	4	4
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kegiatam			0	-	33
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	-	2	2	2	2
9	Ratio Akseptor KB	Persen	86,1	85,5	64,17	71,39	73,27
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	86,1	85,5	64,49	70,92	73,33
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Rasio	38/1000	38/1000	2,97	22/1000	30/1000
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,1	0,1	3,98	0,6	tdk ada data pencatatan jml pus umur dibawah 20 thn
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	4,6	4,6	2,89	7,8	4,09
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	50,21	50,21	43,27	36,29	36,72
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	6,1	6,1	13,67	-	0,003
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	76,4	76,4	68,6	70	9,351
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	45,1	45,1	60,58	46	45
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	39,9	39,9	15,49	50	13,375
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen			100	100	50
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	65,5	65,5	70	68,9	67,5

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	88,88	86,11	100	100	100
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	71,3	68,7	43,96	76,8	45
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	23,1	30	30	100	100
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	100	100	100	100	100
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persen				N/A	
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	64,83	100	100	1001	100
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	89,3	100	100	100	100
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	20-24	21-24	21-24	21-24	21-24
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	73	90		49,36	
R	Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Unit	46.068	41.250	19.718	75.558 Unit	37.397
2	Rasio ijin trayek	Rasio	1:5.710	1:6.252	0,000224	0.0014	00:12,1

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	6.654	2.661	3.853	3.257 Kendaraan	3.294
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Dermaga/terminal	3	3	4	3 Dermaga/ 1Terminal	3
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	8	11	22,29	0,22	0,17
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	17,69	31%	66	81%	37,95%
7	Pemasangan Rambu-rambu	Jenis	6	5	126	2 Jenis	-
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	810	542	0,00766	0,089	695 Unit
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	46.068	41.252	88.480	88.589	37.397
10	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan penyeberangan per tahun	Orang/ barang	10.062	2.868	4.696	3.796	3.289
11	Jumlah orang/ barang melalui terminal per tahun	Orang/ barang	35.640	34.551	84.709	49.840	39.468
S	Komunikasi dan Informatika						
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen			-	0%	0%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	85%	85%	98,61	98%	90%
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	91%	91%	88,00	89%	91,5
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	47%	48%	9,3	9,50%	55%
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	48%	50%	9	8,50%	56%
6	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen			100	100	100
T	Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu						
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	34	101	15	4.111	4218
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	225.070.039.557	453.389.293.950	244.073.000.000,000	501,259,000,000	1.249.943.725.672

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	2.924	1,45	3,272	2,59	3,068
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp.			11.880.212.660	335,491,000,000	465.866.904.901
U	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata	Orang	323.233	183.309	1.161.901	1.742.454	1.637,819
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-3 hari
3	PAD sektor pariwisata	RP.	13.043.250.000	4.279.227.000	32.575.707.115	52.936.886.000	48.640.864.000
V	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan presentasi seni dan budaya	kali	17	6	8	17	16
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	144	247	57	19	6
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	18	0	0	0	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	144	247	2	2	2
W	Perdagangan dan Perindustrian						
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp.	7.230.395.864	10.773.435.145	12.378.737.326	20.977.605.837	14.234.981.279,00
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	20%	20%	40,00	25	28,57%
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen			10,00	32,53	50%
X	Perpustakaan						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2,32%	212	972	403	1.314
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persentase	0,49	0,49	0,50	0,50%	0,04
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persentase	1,07	1,06	0,00098	0%	0,09
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	4.105	1.655	972	1,5	5
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	1061	1061	10.786	10778	10,778
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	1	1	50,00	32	60

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Y	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	90%	100%	49,52	57,38%	64,98
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	1 kegiatan (Pembinaan kearsipan)	1 kegiatan (Pembinaan kearsipan)	89,29	41,18%	60,22
Z	Transmigrasi						
1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	0,31	0,31	0,31	0	0,31
A							
A	Organisasi						
1	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli	Dokumen			1	1	1
2	Tersusun Dokumen Tata Naskah	Dokumen			1	1	1
3	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersusun	Dokumen			1	1	1
4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Daerah	Baik			Baik	Baik	61,28
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				83,95	84,4	85,4
A							
B	Keuangan						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	Audit BPK	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	6,49	10,58	0,09	2,43	3,5
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	6,49	10,58	0	-	N/A
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	-	-	24,83	5,73	24,15
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	24,15%	25,71%	27,63	6,13	17
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	20,87%	22,99%	86,33	N/A	N/A
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	31,54%	39,88%	10,68	12,85	0,35
8	Penetapan APBD		0,35%	0,31%	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu
A							
C	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan						
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	31	31	29	30	27
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	631	631	119	1847	294

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Jumlah Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	2.250	2.250	2.339	2158	2089
	Pendidikan dan Pelatihan						
1	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan/Tahun	1 Bulan - 4 Tahun	1 Bulan - 4 Tahun	1 bulan	52 JP	5,9
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,03	0,03	1,6	0,02	0,04
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	43,12	43,12	1,6	0,02	0,03
A D	Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak ada			Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak ada			Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak ada			Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen			98,37	100	83,94
5	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen			85,08	100	100
A E	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	0	75		85	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	13,79	75		85	100
	Penerapan SIDA:						
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	0	40		100	100
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	0	75		85	100
AF	Pengawasan						
1	Persentase tindak lanjut temuan	persen	100	100	94,81	92,34	95,48
2	Persentase pelanggaran pegawai	persen	tidak ada	tidak ada		0	0

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Sekretariat Dewan						
G							
1		Dokumen			5	6	
2		Dokumen			2	2	
3	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen			2	2	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

2.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Jenis Pelayanan Dasar yang ada di Kabupaten Bangli terdiri atas:

A. Pendidikan

- 1) pendidikan anak usia dini;
- 2) pendidikan dasar;
- 3) pendidikan kesetaraan;

B. Kesehatan

- 1) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) pelayanan kesehatan balita;
- 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 12) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);

C. Pekerjaan Umum (Air Minum dan Sanitasi)

- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

D. Perumahan Rakyat

- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) pelayanan informasi rawan bencana;
- 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

F. Sosial

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Setiap urusan tersebut memiliki indikator kinerja pelayanan yang terstandarisasi secara nasional, dan wajib dilaporkan capaian realisasinya per tahun selama periode 2020–2024 sebagai bagian dari evaluasi RPJMD 2021–2026.

Dalam RPJMD Kabupaten Bangli, SPM menjadi instrumen utama untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada hasil yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian terhadap masing-masing indikator SPM digunakan tidak hanya sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja, namun juga sebagai dasar penentuan prioritas program dan alokasi anggaran. Berikut merupakan rincian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangli.

Tabel 2.49.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Pendidikan							
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	87,51	87,51	90,07	100,00	100,00
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	87,92	91,03	92,06	100,00	100,00
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	88,03	87,03	87,03	100,00	100,00
B	Kesehatan							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah warga negara penderita Diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan	Persen	100	100	100	100	100
C Pekerjaan Umum (Air Minum dan Sanitasi)								
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	-	-	-	100	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	-	-	-	-	-
D Perumahan Rakyat								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	-	-	-	100	-
2	Fasilitasi penyediaan	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi	Persen	-	-	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
	rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	akibat program daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni						
E	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persen	100	100	98,41	100,00	-
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	Persen	-	-	-	100,00	-
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	-	-	-	100,00	-
4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	-	-	3 Orang	100,00	-
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	-	-	6,72	100,00	-
F	Sosial							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	Persen	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar diluar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar diluar Panti	Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti	Persen	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	Persen	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pengemis diluar Panti	dasar tuna sosial diluar panti						
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024 terlihat perkembangan SPM di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan yang signifikan. Selama periode 2020-2024 Pelayanan di sektor kesehatan dan sosial menunjukkan performa terbaik, dengan indikator yang konsisten mencapai 100% sejak awal periode evaluasi. Sementara sektor pendidikan mengalami peningkatan signifikan, dari kisaran 87–91% pada 2020–2022, mencapai 100% pada 2023 dan 2024 untuk seluruh indikator (PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan).

Capaian di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat masih terbatas, dengan beberapa indikator belum menunjukkan data capaian secara konsisten setiap tahunnya. Pelayanan ketenteraman, informasi kebencanaan, serta penyelamatan dan evakuasi mulai menunjukkan capaian maksimal pada 2023, namun belum tersedia data lengkap untuk tahun 2024.

Secara keseluruhan, implementasi SPM di Kabupaten Bangli menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, meskipun beberapa sektor masih memerlukan perhatian lebih untuk menjamin pemerataan dan kesinambungan layanan.

2.6. PERJANJIAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI

Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki kerja sama perjanjian dengan PT. BPR. Bank Daerah Bangli. Perjanjian ini melibatkan 2 OPD yang ada di Kabupaten Bangli yaitu Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli

A. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan PT. BPR Bank Daerah Bangli (PERSERODA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Rekening Kas Desa Melalui PT BPR BANK DAERAH Bangli (PERSERODA)

Perjanjian ini ditanda tangani oleh I Dewa Bagus Riana selaku Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli dan I Made Astawa selaku direktur Utama PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda). Perjanjian ini bermaksud sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Rekening Kas Desa atau transaksi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun rekening yang disimpan dan dikelola yaitu:

- a) Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- b) Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Pengelolaan Rekening Kas Desa adalah serangkaian kegiatan pengelolaan keuangan Desa yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas transaksi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan kas desa pada pemerintah desa

1) Dasar hukum atas perjanjian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 31), telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- e) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 921);
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
- l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK);
- m) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK);
- n) Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 50);
- o) Keputusan Bupati Bangli Nomor 900/740/2018 tentang Penunjukan PD.BPR BANK PASAR KABUPATEN BANGLI sebagai Bank untuk Penempatan Rekening Kas Desa Se Kabupaten Bangli.

2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:

- a) Untuk membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi kedua pihak yang ada di dalam perjanjian ini
- b) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan rekening kas desa yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel
- c) Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan terjadinya tindak pidana korupsi, dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan rekening kas desa.

Perjanjian ini memiliki Ruang Lingkup Perjanjian yaitu untuk Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rekening Kas Desa yang meliputi pencatatan atas transaksi Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Keuangan Kas Desa pada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Bangli pada PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a) Melakukan Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- b) Melakukan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Pengelolaan Rekening Kas Desa Meliputi:

a) Pendapatan asli Desa yang meliputi:

- Hasil Usaha Desa
- Hasil Aset
- Swadaya dan Partisipasi, serta gotong royong Masyarakat
- Lain-lain Pendapatan asli Desa

b) Pendapatan Transfer yang meliputi:

- Dana Desa
- Alokasi Dana Desa
- Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Bantuan Keuangan Kabupaten
- Bantuan Keuangan Provinsi
- Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat

c) Pendapatan lain yang meliputi:

- Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa
- Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga
- Penerimaan berupa sumbangan atau hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- Koreksi kesalahan atas belanja tahun sebelumnya yang mengakibatkan adanya penerimaan pada tahun berjalan
- Bunga Bank
- Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

B. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan PT. BPR Bank Daerah Bangli (PERSERODA) tentang Pengelolaan Rekening Kas Desa Melalui PT BPR BANK DAERAH Bangli (PERSERODA)

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk menjelaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pada hari Senin 6 Januari 2025 bertempat di Bangli dengan I Dewa Agung Putu Purnama sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli dalam jabatannya selaku Kepala Dinas berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Bangli Nomor 100.3.7.1/4/Pem disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Kemudian I Made Astawa sebagai Direktur Utama PT.BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berikut adalah hal – hal yang diterangkan oleh para pihak:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli adalah unsur Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

2. PT. BPS Bank Daerah Bangli (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
5. Transaksi non tunai adalah Pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan Kartu, Cek, Bilyet Giro, Surat Perintah Pemindahbukuan, Uang Elektronik, Elektronik data Capture dan Cash Management System atau sejenisnya.
6. Aplikasi BDB Bisa adalah Aplikasi yang dipergunakan oleh pemerintah desa dalam mengelola pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari rekening desa ke stakeholder lainnya, berupa standing instruction yang ditujukan untuk nasabah non perorangan (perusahaan/lembaga) yaitu pemerintah desa.
7. Pengelolaan Rekening Kas Desa adalah serangkaian kegiatan pengelolaan keuangan Desa yang meliputi pencatatan atas transaksi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan kas desa pada pemerintah desa.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Surat Pertanggungjawaban Belanja yang selanjutnya disingkat SPTJB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh pelaksana kegiatan atas transaksi belanja Desa.

Berdasarkan hal – hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing–masing, Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan atas Rekening Kas Desa Melalui PT. BPS Bank Daerah Bangli (Perseroda).

1) Ketentuan Dan Syarat–Syarat

Ketentuan dan Syarat – syarat setelah para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan perjanjian Kerja Sama terdapat pada pasal 1 tentang Dasar Perjanjian Kerja Sama pada Dokumen Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dan PT. BPR Bank Daerah Banglo (Perseroda). Berikut adalah ketentuan dan syarat – syarat yang telah ditetapkan:

- a) Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 655).
- b) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
- c) Undang – Undang Nomor 7 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31), telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 3970) dengan Perubahan terakhir berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4).

- d) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
- e) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375).
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761).
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 11/OJK).
- l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK).
- m) Peraturan Bupati Bangli Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 50)
- n) Keputusan Bupati Bangli Nomor 900/740/2018 tentang Penunjukan PD. BPS “Bank Pasar” Kabupaten Bangli Sebagai Bank Untuk Penempatan Rekening Kas Desa Se Kabupaten Bangli.
- o) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda), tanggal 29 Januari 2021 Nomor 11 yang dibuat dihadapan Doktor Doktorandus Nengah Renaya Sarjanan Hukum, Sarjana Pendidikan, Magister Kenotariatan Notaris di Gianyar, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007579.AH.01.01 Tahun 2021

Surat Keputusan Tanggal 2 Februari 2021, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang dibuat dihadapan I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kota Denpasar, Nomor 13 Tanggal 18 September 2024 telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 September 2024, dengan Nomor Surat AHU-0061839.AH.01.02 Tahun 2024.

2) Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan Rekening Kas Desa baik penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan juga sebagai dasar hukum dan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan ruang lingkup yang disepakati. Kerja sama ini jelas dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Desa dan terjadinya tindak pidana korupsi dengan pengelolaan Rekening Kas Desa yang lebih tertata dan transparan langsung dari Pihak PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).

3) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya yang termaksud dalam perjanjian adalah Pengelolaan Rekening Kas Desa yang meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa melalui PT. BPR Bank Daerah Bangli(Perseroda). Melalui mekanisme tata kelola keuangan Desa yang mengandung nilai – nilai akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait. Jenis layanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terdiri dari :

- a) Pemberian akses informasi terhadap pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b) Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Keterangan diatas terdapat dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 tentang Pelaksanaan, Mekanisme Pengelolaan Rekening Kas Desa dan Jenis Layanan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).

4) Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban terbagi pada masing – masing pihak guna mengantisipasi melebarnya maksud dari perjanjian kerja sama ini. Berikut adalah rincian hak dan kewajiban masing – masing pihak :

- a) Pihak Pertama berhak untuk :
 - Memperoleh informasi terkait pengelolaan rekening kas desa dari **PIHAK KEDUA**.
 - Melakukan evaluasi atas pengelolaan rekening kas desa yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

b) Kewajiban Pihak Pertama yaitu :

- Memfasilitasi pembukaan akses pada aplikasi BDB Bisa.
- Menyampaikan kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan keseragaman administrasi yang perlu dilakukan dalam melakukan transaksi pengeluaran yang dilakukan prosesnya pada **PIHAK KEDUA**.
- Melakukan komunikasi dengan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan evaluasi pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, berdasarkan atas evaluasi yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** bersama dengan Pemerintah Desa.
- Memastikan Bank Daerah sebagai satu – satunya Bank untuk pengelolaan rekening kas desa.
- Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan *siskeudes online* dalam penerapan transaksi non tunai menggunakan aplikasi BDB BISA.

c) Pihak Kedua berhak untuk :

- Menerima masukan khususnya untuk peningkatan pelayanan dari **PIHAK PERTAMA**.
- Memberikan informasi berkaitan dengan perubahan informasi baik dari sisi administrasi dan regulasi dalam pengelolaan Rekening Kas Desa.
- Terhubung dengan *siskeudes online* dalam penerapan Transaksi Non Tunai menggunakan aplikasi BDB BISA.

d) Kewajiban Pihak Kedua yaitu:

- Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan permasalahan administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- Memberikan layanan atas pengelolaan rekening kas Desa kepada Pemerintah Desa sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
- Memberikan jaminan keamanan kepada **PIHAK PERTAMA** atas keamanan penyimpanan dana Pemerintah Desa.
- Menjamin kelancaran pembayaran transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Rincian Hak dan Kewajiban para pihak diatas tercantum dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dalam pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban.

5) FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Pada situasi tertentu yang mengakibatkan tidak dilaksanakan atau tertundanya ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila disebabkan oleh adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa). Hal – hal yang dimaksud dalam *Force Majeure* (Keadaan memaksa) adalah bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum dan keadaan – keadaan lain diluar kekuasaan para pihak yang harus dinyatakan oleh negara/daerah dan/atau pemerintah yang sah. Jika terjadi *Force Majeure* (Keadaan memaksa) Pihak yang mengalami tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*(Keadaan memaksa) dan jika ada keterlambatan pemberitahuan akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *Force Majeure* (Keadaan memaksa). Segala kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu

pihak bukan menjadi tanggung jawab pihak lainnya. Hal ini tercantum pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) pada pasal 10 tentang *Force Majeure* (Keadaan memaksa) untuk memperjelas arah tanggung jawab masing – masing pihak jika sewaktu – waktu terjadi hal yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya ketentuan perjanjian.

6) JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan tanggal, bulan, tahun pada awal perjanjian ini dan perjanjian ini dinyatakan berakhir apabila :

- a) Perjanjian ini berakhir karena jangka waktu perjanjian telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang.
- b) Salah satu **PIHAK** mengakhiri Perjanjian secara sepihak karena salah satu Pihak lalai atau cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- c) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapus kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat – syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.
- d) Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam penyelesaian kewajiban masing – masing yang masih ada terhadap **PIHAK** lainnya pada suatu saat atau sesudah tanggal pengunduran diri salah satu **PIHAK**.

Ketentuan ini tercantum pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dalam pasal 11 dan pasal 12 tentang jangka waktu dan berakhirnya perjanjian. Dan hal – hal yang belum cukup diatur atau dilakukan perubahan maupun penambahan terhadap ketentuan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan. Hal ini membuat perjanjian ini tetap mengikat namun juga fleksibel bagi semua pihak untuk mendapatkan hasil kerja sama yang maksimal.

2.7. ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN BANGLI

2.7.1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangli

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran pembangunan kabupaten/kota sebagai upaya mendukung sasaran pembangunan Provinsi Bali yang telah diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran pembangunan ini berupa target Indikator Makro Ekonomi yang disesuaikan terhadap kontribusi masing-masing kabupaten/kota bagi perekonomian Provinsi Bali. Untuk mendukung terwujudnya Sasaran Pembangunan Provinsi Bali tersebut, maka target ekonomi makro Kabupaten Bangli dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 mengikuti sasaran pembangunan tersebut. Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 2.50.

Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2026 dan 2030

Tahun	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Gini Rasio	Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka
2026	Bali	5,60-6,30	3,00-3,50	0,340-0,345	78,94	1,77-2,30
	Bangli	4,90-5,50	3,98-4,23	0,301	74,11	0,72
2030	Bali	8,25-8,75	1,50-2,50	0,330-0,334	79,56	1,50-2,00
	Bangli	7,50-8,00	3,20-3,45	0,298	77,10	0,58

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

2.7.2. Highlight Intervensi Pembangunan di Kabupaten Bangli

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan wilayah serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, Kabupaten Bangli akan menerima sejumlah intervensi pembangunan infrastruktur strategis yang dibiayai melalui skema APBN maupun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota lainnya di kawasan strategis provinsi. Berdasarkan dokumen Perpres Nomor 12 Tahun 2025 – Lampiran IV, beberapa proyek yang direncanakan mencakup sektor transportasi, lingkungan, permukiman, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, mitigasi bencana, hingga penguatan institusi pendidikan tinggi.

Secara umum, berbagai rencana pembangunan infrastruktur tersebut memperlihatkan adanya komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bangli, tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi proyek-proyek tersebut ke dalam RPJMD Kabupaten Bangli menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta memperkuat daya tahan daerah terhadap dinamika tantangan global dan nasional di masa mendatang. Berikut merupakan rincian rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangli sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Tabel 2.51.

Sasaran Pembangunan di Kabupaten Bangli

No	Lokasi Prioritas	Indikasi Intervensi
1	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali)	Peningkatan 6A Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata Bali, antara lain: - Kintamani-Danau Batur
		Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud-Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara
2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida	Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah
		Pelestarian kearifan budaya Subak dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan
		Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
		Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)

No	Lokasi Prioritas	Indikasi Intervensi
		Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian pangan, peternakan, dan hortikultura
		Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba
		Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, Danau Batur
		Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Java-Bali Interconnection
		Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
		Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gundang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
		Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi
3	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Bangli-Buleleng	Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian
		Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi

No	Lokasi Prioritas	Indikasi Intervensi
		Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian Kopi
		Pengembangan Produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
4	Kawasan Konservasi TWA Gunung Batur-Bukit Payang	Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
		Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		Penguatan pengelolaan hutan lestari
		Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan
		Perlindungan dan pengamanan hutan
5	- Kabupaten Bangli - Kabupaten Karangasem - Kabupaten Buleleng	Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
6	Provinsi Bali	Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah dan dayah/ pesantren serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah - Revitalisasi pendidikan non-formal - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: - Penurunan Kematian ibu dan anak - Pencegahan dan Penurunan <i>stunting</i> - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Pengendalian Penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: - Penuntasan TBC - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa - Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

No	Lokasi Prioritas	Indikasi Intervensi
		Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
		Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan - Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
		Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: - Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan - Penerapan jaringan cerdas (<i>smart grid</i>) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik - Penerapan <i>Internet of Things (IoT)</i> di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara <i>real-time</i> - Perluasan penggunaan kendaraan listrik
		Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: - Perluasan infrastruktur digital - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital - Pembangunan jaringan <i>broadband</i> hingga ke pelosok
		Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: - Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital - Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN - Digitalisasi layanan publik prioritas - Pengembangan ekosistem layanan publik digital
		Memperkuat reformasi hukum, terutama di Bali, antara lain melalui: - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) - Penanggulangan judi dan penyelundupan - Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) - Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang - Penguatan pengawasan dan penindakan imigrasi
		Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Bali, antara lain melalui: - Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

No	Lokasi Prioritas	Indikasi Intervensi
		- Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pembudayaan Masyarakat Hukum Adat

Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025

2.7.3. Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali di Kabupaten Bangli

Pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali pada periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, telah menetapkan rencana pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten/Kota guna mendukung terwujudnya pembangunan sesuai visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Adapun daftar rencana pembangunan infrastruktur strategis yang dilakukan di Kabupaten Bangli yaitu:

Tabel 2.52.

Daftar Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, Tahun 2025-2030

No	Lokasi Rencana Pembangunan	Kegiatan	
1	Kabupaten Bangli	1	Pembangunan Pusat Olahraga Provinsi Bali
		2	Penataan Kawasan Kintamani Batur
		3	Perlindungan Danau Batur
		4	Pembangunan/Penataan Jalan Batur-Besakih
		5	Pembangunan Gedung Parkir di Kawasan Pura Batur
		6	Pembangunan Akses Jalan Buleleng-Besakih (tanpa melewati Kawasan Batur)
		7	Penataan dan Pemeliharaan Pura Sad Kayangan Batur

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 mendukung terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur strategis Provinsi Bali tersebut dengan menyematkannya secara tersirat dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

2.8. BUMD PENDUKUNG PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI

Kabupaten Bangli memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam berbagai sektor pelayanan publik dan ekonomi daerah. Berikut adalah beberapa BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli.

- **Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli:** Perumda Air Minum Tirta Danu Arta adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Bangli yang bertugas menyediakan layanan air minum berkualitas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli dan kemudian berganti nama menjadi Perumda Air Minum Tirta Danu Arta.

- **PT Bank Daerah Bangli (PERSERODA):** PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Bangli yang berfungsi menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat setempat. Berkantor pusat di Jl. Merdeka No.27, Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614, bank ini memiliki beberapa unit layanan, termasuk Kantor Kas di Kintamani Barat, Kintamani Timur, Susut, dan Tembuku
- **Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli:** Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti (PDBMB) Kabupaten Bangli adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan), serta perbengkelan.

Keberadaan BUMD ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Bangli dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri.

A. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli

Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 5 tahun 1986 dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Bangli Nomor 09 tahun 1987 seri C nomor 1. Perda tersebut telah mengalami empat kali perubahan, yaitu dengan Perda Kabupaten Bangli Nomor 18 tahun 1991, Perda Kabupaten Bangli Nomor 21 tahun 2001 dan Perda Kabupaten Bangli Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta.

Perumda Air Minum Tirta Danu Arta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangli sebagai Lembaga Pelaksana Penyedia Jasa pelayanan air minum. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Air Minum Tirta Danu Arta merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar dan syarat kesehatan. Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Danu Arta sesuai dengan Perda Kabupaten Bangli No. 6 Tahun 2021 yaitu:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Perumda Air Minum Tirta Danu Arta memiliki peran penting dalam pembangunan Kabupaten Bangli melalui berbagai inisiatif dan kontribusi, antara lain:

- a. **Penyediaan Air Bersih Berkualitas:** Sebagai penyedia layanan air minum utama di Kabupaten Bangli, Perumda Air Minum Tirta Danu Arta bertanggung jawab

memastikan ketersediaan air bersih yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat, mendukung kesehatan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- b. **Pengembangan Infrastruktur Air Minum:** Perusahaan ini secara aktif mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai rencana bisnisnya, dengan tujuan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Bangli.
- c. **Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM):** Perumda Air Minum Tirta Danu Arta bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dalam mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi pegawai, guna memastikan pelayanan yang profesional dan efisien kepada masyarakat.
- d. **Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan:** Perumda Air Minum Tirta Danu Arta menjalin nota kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (STIKI) untuk pengembangan dan inovasi di bidang teknologi informasi, mendukung peningkatan layanan dan operasional perusahaan.
- e. **Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan ini berkontribusi dalam meningkatkan PAD melalui profitabilitas usahanya, yang kemudian digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah

Melalui berbagai peran tersebut, Perumda Air Minum Tirta Danu Arta berkontribusi signifikan dalam pembangunan Kabupaten Bangli, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan air minum yang berkualitas dan inovatif.

B. PT. Bank Daerah Bangli (PERSERODA)

PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda), berdiri sejak Tanggal 21 Pebruari 1968 pada mulanya bernama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor II/PD/DPRD.GR/1967. PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) mulai beroperasi pada tanggal 21 Pebruari 1968 dengan nama PD Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli. Tahun 1973 Peraturan Daerah Nomor II/PD/DPRD.GR/1967 diadakan perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2/DPRD/1973, tanggal 30 Juni 1973. Selama lebih dari 2 dasa warsa berdiri, Perusahaan ini mengalami beberapa kali pergantian nama sejalan dengan perubahan Peraturan Daerah. Pada Tahun 1994, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994, PD Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli diubah namanya menjadi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan Perubahan terakhir pada Tanggal 5 Desember 2006 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli maka namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli hingga pada tahun 2021 berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri dilaksanakan perubahan nama dan bentuk badan hukum menjadi PT. BPR Bank Daerah Kabupaten Bangli (Perseroda).

Pada awal berdirinya hanya menempati sebuah ruangan kecil diluar area pasar Bangli dan hanya memfokuskan melayani pedagang tradisional semata. Tapi kini sejalan dengan kemajuan usahanya, Kantor PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah menempati gedung di Jalan Merdeka No. 27 Bangli dan dengan cakupan pelayanan wilayah Kabupaten Bangli.

PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) memiliki peran penting dalam pembangunan Kabupaten Bangli melalui berbagai inisiatif dan kontribusi, antara lain:

- a. **Mendorong Perekonomian Lokal:** memberikan akses pemodalannya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui kredit Bakulan yang diperuntukan bagi pedagang kecil di pasar-pasar.
- b. **Menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD):** sebagai perusahaan milik daerah, laba yang diperoleh disetor kembali ke kas daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
- c. **Penyedia Layanan Keuangan Inklusif:** menyediakan produk tabungan, deposito dan kredit yang ramah bagi masyarakat umum, terutama mereka yang tidak terjangkau oleh bank-bank besar, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui pendekatan langsung di desa dan kecamatan.
- d. **Pembangunan Ekosistem Keuangan di Pedesaan:** dengan keberadaan kantor kas di berbagai kecamatan (Kintamani Barat, Kintamani Timur, Susut dan Tembuku), bank ini menjadi instruktur keuangan yang menjangkau pelosok.
- e. **Menjangkau Stabilitas Ekonomi Daerah:** Dalam situasi kritis atau ketidakstabilan ekonomi, BPR daerah bisa memberi keringanan atau restrukturisasi pinjaman bagi warga, sehingga membantu stabilitas sosial dan ekonomi.
- f. **Mitra Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan:** Terlibat dalam program-program strategis pemerintah daerah, termasuk pembiayaan pembangunan berbasis masyarakat dan penyaluran dana bantuan secara transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) adalah penggerak ekonomi kerakyatan yang tak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangli.

C. Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli

Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti (PD BMB) Kabupaten Bangli didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut, pada tahun 2023, status hukum PD BMB diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan badan usaha milik daerah tersebut.

Tugas pokok Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli adalah mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan di bidang usaha-usaha pertanian dalam arti luas, perbengkelan dan di bidang sumber daya alam yang bergerak di bidang energi, batuan dan mineral

Tujuan didirikannya perusahaan daerah ini adalah:

- a. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah pembangunan ekonomi pada umumnya dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat
- b. Membantu dan turut mengusahakan kelancaran distribusi keperluan masyarakat dan ikut serta mengusahakan stabilitas perekonomian
- c. Turut serta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
- d. Mencari laba dengan menggunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat.

Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Setelah bertransformasi dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) melalui Perda No. 4 Tahun 2023, peran lembaga ini menjadi lebih fleksibel dan profesional dalam mendukung pembangunan. Berikut ini adalah peran utamanya dalam konteks pembangunan di Kabupaten Bangli:

- a. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah:** Perseroda Bhukti Mukti Bhakti menjalankan kegiatan usaha berbasis potensi lokal seperti pertanian, perkebunan dan perikanan, serta perdagangan dan perbengkelan
- b. **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD):** sebagai BUMD, Perseroda Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap PAD Kabupaten Bangli melalui laba usaha, deviden ke pemerintah daerah dan kerjasama bisnis strategis.
- c. **Menyediakan Layanan dan Infrastruktur Ekonomi:** Perseroda Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli terlibat dalam penyediaan sarana pertanian dan alat berat, pengelolaan bengkel perawatan alat berat/mechanis, serta dukungan logistik dan distribusi hasil pertanian.

Secara umum, Perseroda Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli adalah instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah, memperkuat daya saing Bangli, serta menjembatani kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

2.9. GAMBARAN KONDISI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN TERAKHIR

Penelaahan gambaran kondisi keuangan Kabupaten Bangli selama lima tahun terakhir menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Evaluasi terhadap kinerja keuangan yang mencakup pendapatan, belanja serta pengelolaan aset daerah selama periode sebelumnya dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada. Analisis mendalam terhadap pola pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah dan pembiayaan daerah dapat menjadi referensi komprehensif untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Gambaran kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah dengan penjelasan sebagai berikut.

2.9.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024

Kinerja pelaksanaan APBD merupakan salah satu aspek krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam analisis ini mencakup perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan serta gambaran realisasi belanja daerah. Dengan memahami proporsi dan pencapaian setiap sumber pendapatan, serta realisasi belanja daerah, dapat diidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan serta langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta memastikan bahwa RPJMD yang disusun mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bangli.

Berikut ini terlampir Tabel Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 hingga Tahun 2024 Kabupaten Bangli yang memberikan rincian sumber-sumber pendapatan daerah, alokasi dan penggunaan anggaran belanja serta pembiayaan daerah selama periode tersebut.

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah tahun 2024, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli memiliki kecenderungan untuk terus meningkat selama tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun-tahun berikutnya setelah pandemi, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli terus meningkat. Pada Tahun 2024 tercatat Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli adalah Rp1,33 Triliun Rupiah dimana mengalami peningkatan 5,34% dari tahun 2023 yang realisasinya mencapai Rp1,26 Triliun Rupiah. Apabila disandingkan dengan Tahun 2020, Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli meningkat 225,25% pada tahun 2024. Peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bangli ini tentu saja memberikan dampak yang sangat baik bagi Pembangunan. Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli telah mendukung peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik hingga mendorong perkembangan teknologi dan informasi.

Gambar 2.29.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Tabel 2.53.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

KODE REKENING				URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	Tahun 2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1				2	3	4	5	6	7	8
4.				PENDAPATAN DAERAH						
4.	1.			PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.325.150.582,49	163.537.080.259,99	144.009.165.738,50	221.936.319.230,20	223.331.911.793,18	16,44
4.	1.	1.		<i>Pajak Daerah</i>	20.541.596.069,51	23.318.329.220,50	36.707.060.479,07	52.336.252.396	55.669.213.782,00	22,07
4.	1.	2.		<i>Retribusi Daerah</i>	11.948.450.442,01	8.281.617.975,00	36.328.299.166,20	57.401.453.950	156.452.877.623,21	67,27
4.	1.	3.		<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	7.089.522.902,70	6.101.592.913,01	5.597.430.541,18	5.887.399.995	6.435.382.923,30	-1,92
4.	1.	4.		<i>Lain-lain PAD yang syah</i>	64.745.581.168,27	125.835.540.151,48	65.376.375.552,05	106.311.212.889	4.774.437.464,67	-40,63
4.	2.			PENDAPATAN TRANSFER	271.355.740.263,00	949.349.146.346,74	962.928.823.871,00	1.042.728.940.879,00	1.103.065.395.527,00	32,38
4.	2.	01.		<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	116.220.164.000,00	857.733.621.031,00	807.793.247.608,00	900.285.215.914,00	813.642.953.312,00	47,58
4.	2.	01.	01.	<i>Dana Perimbangan</i>		<i>703.032.171.031,00</i>	<i>741.717.529.608,00</i>	809.317.417.914	738.554.479.812,00	1,24
4.	2.	01.	02.	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	53.462.813.000,00	89.588.187.000,00	10.515.789.000,00	30.884.546.000	14.491.125.500,00	-22,98
4.	2.	01.	05.	<i>Dana Desa</i>	<i>62.757.351.000,00</i>	<i>65.113.263.000,00</i>	55.559.929.000,00	60.083.252.000	60.597.348.000,00	-0,70
4.	2.	02.		<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	155.135.576.263,00	91.615.525.315,74	155.135.576.263,00	142.443.724.965,00	289.422.442.215,00	13,28
4.	2.	02.	1	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	92.910.305.211,00	66.727.321.041,74	92.910.305.211,00	106.999.308.955	130.956.251.029,00	7,11
4.	2.	02.	02.	<i>Bantuan Keuangan</i>	62.225.271.052,00	24.888.204.274,00	62.225.271.052,00	35.444.416.010	158.466.191.186,00	20,56
4.	3.			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	33.913.502.170,00	37.389.713.549,00	702.617.710,00	-	5.812.477.147,00	-29,73
4.	3.	01.		<i>Pendapatan Hibah</i>	33.913.502.170,00	37.389.713.549,00	702.617.710,00		5.812.477.147,00	-29,73
				JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	409.594.393.015,49	1.150.275.940.155,73	1.107.640.607.319,50	1.264.665.260.109,20	1.332.209.784.467,18	26,60

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024

Pendapatan daerah Kabupaten Bangli terdiri dari tiga komponen utama: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Komposisi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangli tahun 2024 adalah:

- Pendapatan Asli Daerah berkontribusi 17,55%
- Pendapatan Transfer berkontribusi 82,45%

Secara umum komposisi tersebut tidak mengalami perubahan selama 6 tahun terakhir yaitu sumber Pendapatan Daerah utama Kabupaten Bangli adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan transfer adalah aliran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah untuk pemerintah daerah lainnya sebagai bentuk bantuan atau dukungan keuangan. Dana ini biasanya diberikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai program-program atau kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk lebih jelasnya, kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten Bangli dapat dilihat pada **Tabel 2.50** berikut.

Tabel 2.54.

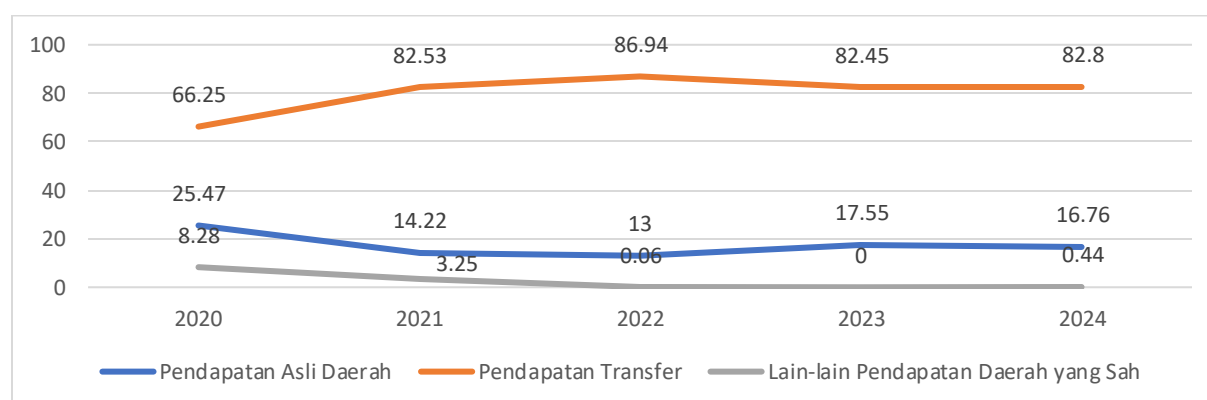
Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Pendapatan Daerah	Kontribusi Dalam Pendapatan Daerah (Dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah	25,47	14,22	13,00	17,55	16,76
2	Pendapatan Transfer	66,25	82,53	86,94	82,45	82,80
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8,28	3,25	0,06	-	0,44

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Gambar 2.30.

Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Selanjutnya akan dibahas mengenai masing-masing komponen dari 3 jenis pendapatan daerah tersebut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat selama periode Tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,44% setiap tahunnya. Pada tahun 2021 mencatat lonjakan terbesar dalam total Pendapatan Asli Daerah yang mencapai Rp. 163,537,080,259.99, peningkatan ini terutama disumbang oleh komponen PAD lain-lain yang sah yang mengalami lonjakan menjadi Rp. 125,835,540,151.48, sekitar 77% dari total PAD tahun tersebut. Hingga pada tahun 2024, mencatatkan total PAD tertinggi sepanjang periode tersebut, yakni Rp. 223.331.911.793,18. Peningkatan signifikan terlihat pada komponen retribusi daerah. Retribusi Daerah mencapai Rp. 156.452.877.623,21 yang menyumbang sebesar 70,05% dari total PAD Tahun 2024. Pendapatan pada Pajak Daerah juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,37% mencapai Rp. 55.669.213.782,00. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam memperluas basis pajak dan retribusi daerah serta efisiensi dalam penagihan. Sementara itu pendapatan lain-lain yang sah mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp. 4.774.437.464,67.

Jika dilihat pada masing-masing Komposisi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah menunjukkan peningkatan substansial dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun sempat menurun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Bangli pada tahun 2020 sebesar Rp. 20.541.596.069,51 telah mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 menjadi Rp. 55.669.213.782,00. Pada komposisi Retribusi daerah, pendapatan daerah mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021 atau saat masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, retribusi daerah hanya mencapai Rp. 11.948.450.442,01 dan Kembali menurun pada tahun 2021 menjadi Rp. 8.281.617.975,00. Namun Kembali meningkat pada tahun 2022 hingga pada tahun 2024 menjadi Rp. 156.452.877.623,21. Ini menunjukkan pemulihan yang kuat dari masa-masa pandemi Covid-19.

Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki kontribusi yang lebih kecil terhadap PAD dibandingkan komponen lainnya, meski begitu kontribusi komponen ini tetap relatif stabil selama periode tersebut stabilitas ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan sumber pendapatan yang andal dan dapat diandalkan dalam jangka panjang.

Tabel 2.55.

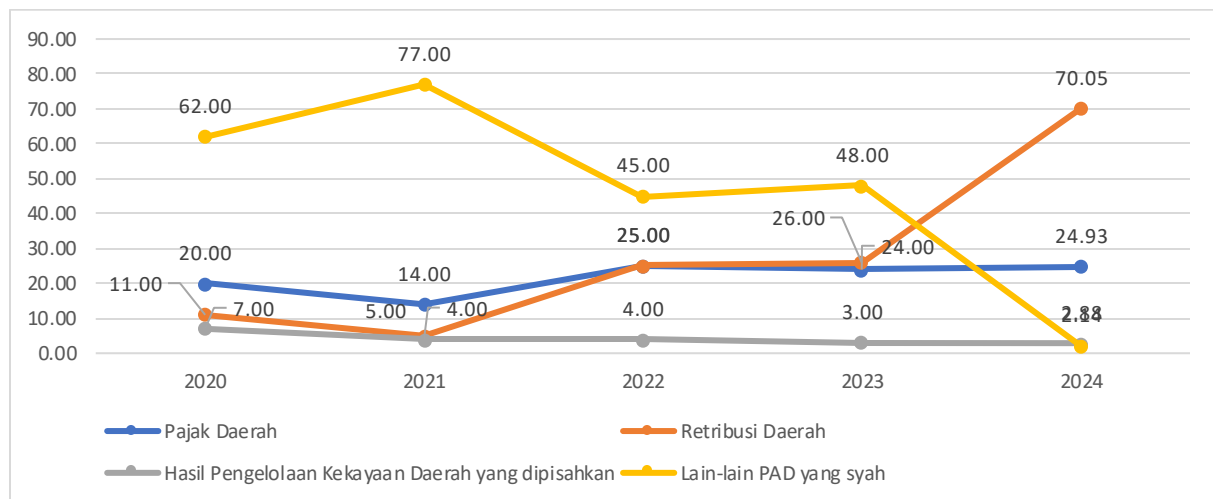
Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Dalam Pendapatan Asli Daerah (Dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Daerah	20%	14%	25%	24%	24,93%
2	Retribusi Daerah	11%	5%	25%	26%	70,05%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7%	4%	4%	3%	2,88%
4	Lain-lain PAD yang syah	62%	77%	45%	48%	2,14%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Gambar 2.31.

Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

2) Pendapatan Transfer

Secara garis besar, pendapatan transfer menunjukkan adanya dinamika yang variatif dari berbagai sumber dengan peningkatan signifikan pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah tahun 2024 terlihat bahwa total pendapatan transfer mengalami peningkatan setelah penurunan tajam pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2024. Selama periode tahun 2020-2024, pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 32,38%. Pada periode tahun 2020-2024 jumlah pendapatan transfer tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar RP. 1.103.065.395.527,00.

Komponen Pendapatan Transfer dengan kontribusi paling besar ialah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, terkecuali pada tahun 2020 yakni masa pandemi Covid-19 pendapatan transfer dari pemerintah pusat menurun drastis dan nilainya lebih rendah dari pendapatan transfer antar daerah, penurunan ini terutama disebabkan oleh realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, pemotongan dana perimbangan, dan penyesuaian APBN yang mengutamakan kebutuhan darurat nasional.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri dari tiga komponen utama: dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa. Dana perimbangan mengalami fluktuasi sepanjang periode. Tahun 2024 tercatat terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah Dana Perimbangan tercatat sebesar Rp. 809.317.417.914 dan menurun pada tahun 2024 menjadi Rp. 738.554.479.812,00. Sedangkan, Dana insentif daerah menunjukkan variasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 mencatat angka tertinggi, yang mungkin disebabkan oleh insentif tambahan untuk mendorong pemulihan pasca-pandemi dan terjadi Penurunan tajam pada tahun 2022 mengindikasikan revisi kebijakan atau evaluasi ulang terhadap kinerja daerah dan pada Tahun 2024 tercatat Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 14.491.125.500,00. Sementara itu Dana desa relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk tetap mendukung pembangunan di tingkat desa meskipun dalam kondisi krisis. Terjadi peningkatan bertahap dari tahun 2020 hingga 2021, dengan sedikit penurunan pada tahun 2022. Peningkatan ini mendukung program pengembangan dan pemberdayaan desa.

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari dua komponen utama yakni pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diterima oleh suatu daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi di daerah lain, biasanya terkait dengan sumber daya alam atau pajak. Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangli tahun 2024, Pendapatan bagi hasil mengalami fluktuasi setiap tahun. Peningkatan terlihat pada tahun 2021 hingga 2024. Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 yang mungkin disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi dan produksi akibat pandemi Covid-19. Pendapatan bagi hasil kembali stabil dan meningkat hingga tahun 2024, mencerminkan pemulihan ekonomi dan meningkatnya kegiatan produksi serta eksplorasi sumber daya alam. Sedangkan untuk bantuan keuangan yang merupakan dana yang diberikan oleh satu daerah kepada daerah lain untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Bantuan keuangan juga mengalami fluktuasi yang signifikan setiap tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp. 158.466.191.186,00. Tahun 2021 mencatat angka terendah selama periode, yang kemungkinan besar akibat pengurangan anggaran karena prioritas penanganan pandemi Covid-19. Bantuan keuangan kembali meningkat pada tahun 2022, namun menurun lagi pada tahun 2023, mencerminkan adanya variasi dalam kebijakan pemberian bantuan antar daerah. Secara umum, pendapatan bagi hasil cenderung lebih stabil dibandingkan bantuan keuangan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi hasil, seperti eksplorasi sumber daya alam dan perpajakan, lebih konsisten meskipun ada gangguan ekonomi.

Tabel 2.56.

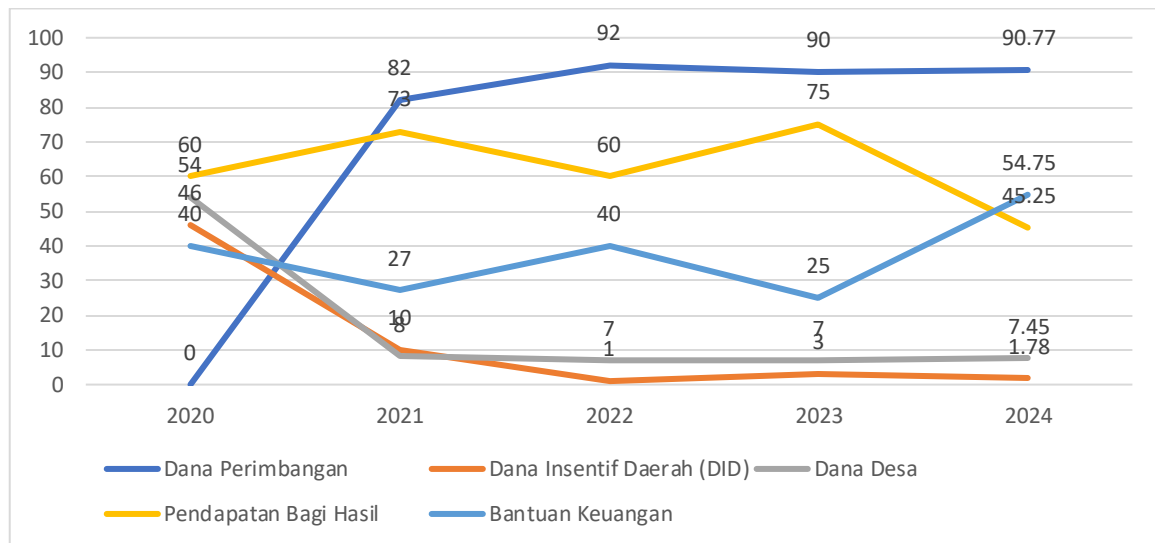
Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Pendapatan Transfer	Kontribusi Dalam Pendapatan Transfer (Dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	43%	90%	84%	86%	73,76%
a	Dana Perimbangan	0%	82%	92%	90%	90,77%
b	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	46%	10%	1%	3%	1,78%
c	<i>Dana Desa</i>	54%	8%	7%	7%	7,45%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57%	10%	16%	14%	26,24%
a	Pendapatan Bagi Hasil	60%	73%	60%	75%	45,25%
b	Bantuan Keuangan	40%	27%	40%	25%	54,75%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Gambar 2.32.

Perkembangan Komposisi Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Bangli hanya bersumber dari Pendapatan Hibah. Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangli tahun 2024, komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak tercatat di tahun 2023, hal ini mungkin menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli pada tahun tersebut tidak menerima hibah atau hibah tidak dilaporkan dalam kategori ini. Secara garis besar Pendapatan hibah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2020 mencatat penerimaan sebesar Rp. 33.913.502.170,00 yang kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 37.389.713.549,00.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa daerah menerima lebih banyak hibah selama periode ini. Faktor-faktor yang bisa berkontribusi termasuk program-program baru, inisiatif kerjasama dengan donor, atau perbaikan dalam pengelolaan hibah. Sementara itu, Tahun 2022 menunjukkan penurunan drastis dalam pendapatan hibah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan pendapatan hanya sebesar Rp. 702.617.710,00. Ini bisa disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan pemberian hibah, pengurangan anggaran hibah, atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi jumlah hibah yang diberikan. Pada Tahun 2024 Pendapatan Dana Hibah Kabupaten Bangli Kembali meningkat menjadi Rp. 5.812.477.147,00.

Tabel 2.57.

Perkembangan Komposisi Struktur Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)

No	Komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Kontribusi Dalam Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Hibah	100%	100%	100%	-	100%

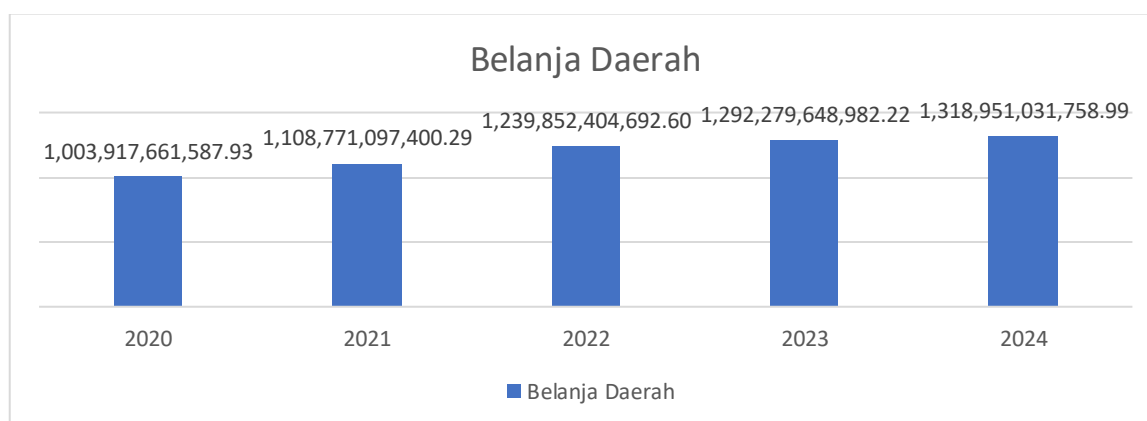
Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

B. Belanja Daerah

Perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Realisasi belanja daerah meningkat dari Rp. 1.003.917.661.587,93 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.108.771.097.400,29 pada tahun 2021, dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi Rp. 1.318.951.031.758,99 dengan rata-rata pertumbuhan 5,61% selama periode 2020 hingga 2024. peningkatan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, maupun hibah. Program dan proyek baru yang membutuhkan anggaran lebih besar juga bisa berkontribusi pada kenaikan anggaran belanja.

Gambar 2.33.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Tabel 2.58.
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

KODE REKENING				URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1				2	3	4	5	6	7	8
5				BELANJA DAERAH						
5	1			BELANJA OPERASI	757.959.587.521,69	771.893.711.219,70	802.380.607.582,79	914.645.335.116,91	977.307.885.658,66	5,21
5	1	01		Belanja Pegawai	531.600.679.857,32	504.713.498.483,72	515.867.247.541,00	543.496.536.159,00	571.014.259.148,20	1,44
5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	184.852.123.000,37	258.898.781.262,98	273.728.730.016,95	291.110.653.556,00	322.698.855.188,61	11,79
5	1	03		Belanja Bunga	-	138.750.000,00	3.297.009.892,57	4.504.678.363,00	4.415.152.893,00	99,78
5	1	05		Belanja Hibah	41.326.584.664,00	7.904.115.473,00	9.234.589.134,27	75.339.846.039,00	78.929.618.428,85	13,82
5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	180.200.000,00	238.566.000,00	253.030.998,00	193.621.000,00	250.000.000,00	6,77
5	2			BELANJA MODAL	57.141.114.023,90	183.280.091.201,59	293.929.282.841,81	211.649.206.855,31	177.103.414.966,33	25,39
5	3			BELANJA TIDAK TERDUGA	30.605.993.364,34	3.409.319.517,00	2.430.457.000,00			-100,00
5	4			BELANJA TRANSFER	158.210.966.678,00	150.187.975.462,00	141.112.057.268,00	165.985.107.010,00	164.539.731.134,00	0,79
5	4	1		Belanja Bagi Hasil	3.792.032.485,00	3.410.243.000,00	6.717.100.000,00	12.017.402.100,00	13.317.333.850,00	28,56
5	4	2		Belanja Bantuan Keuangan	154.418.934.193,00	146.777.732.462,00	134.394.957.268,00	154.479.748.000,00	151.222.397.284,00	-0,42
				JUMLAH BELANJA DAERAH	1.003.917.661.587,93	1.108.771.097.400,29	1.239.852.404.692,60	1.292.279.648.982,22	1.318.951.031.758,99	5,61
				SURPLUS/DEFISIT	-594.323.268.572,44	41.504.842.755,44	-132.211.797.373,10	-27.614.388.873,02	13.258.752.708,19	-147,39

Sumber: Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024

Belanja Daerah Kabupaten Bangli terdiri dari empat komponen utama yakni: (1) Belanja Operasi; (2) Belanja Modal; (3) Belanja Tidak Terduga; dan (4) Belanja Transfer. Komposisi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangli tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Belanja operasi teralokasi sebesar 74,10%
- Belanja modal teralokasi sebesar 13,43%
- Belanja tidak terduga teralokasi sebesar 0,00%
- Belanja transfer teralokasi sebesar 12,48%

Secara umum komposisi dari beberapa komponen belanja daerah tersebut tidak mengalami perubahan selama 5 tahun terakhir yaitu komponen belanja daerah terbesar dalam struktur belanja daerah Kabupaten Bangli selama periode 2020-2024 ialah Belanja Operasi yang mana komponen ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Berdasarkan Tabel 2.58 di atas, secara keseluruhan, jumlah belanja daerah Kabupaten Bangli menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dari Rp. 1.003.917.661.587,93 pada tahun 2020 dan mencapai Rp. 1.318.951.031.758,99 pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, alokasi masing-masing komponen belanja daerah Kabupaten Bangli dapat dilihat pada Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59.

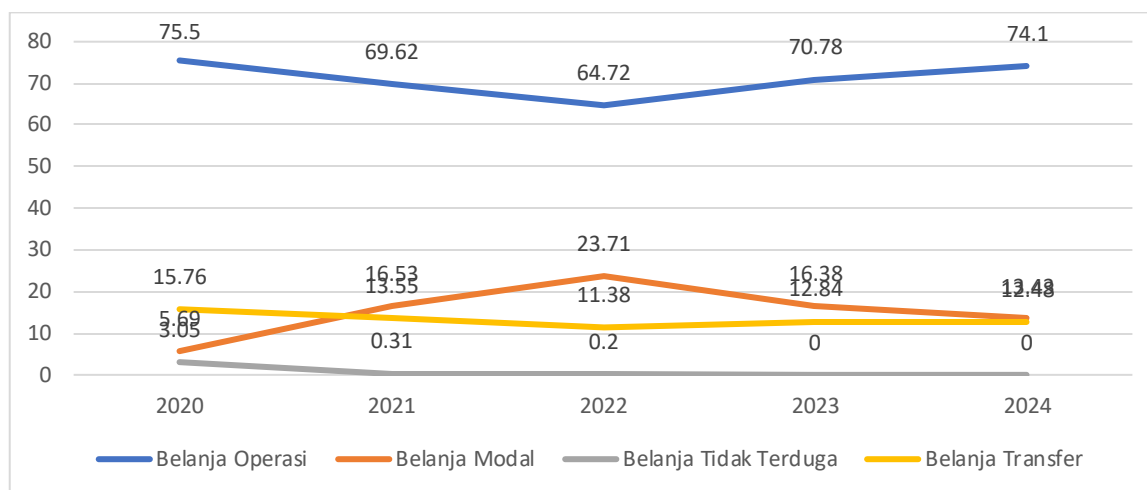
Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Komponen Belanja Daerah	Alokasi Dalam Belanja Daerah (Dalam %)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Operasi	75,50%	69,62%	64,72%	70,78%	74,10%
2	Belanja Modal	5,69%	16,53%	23,71%	16,38%	13,43%
3	Belanja Tidak Terduga	3,05%	0,31%	0,20%	0,00%	0,00%
4	Belanja Transfer	15,76%	13,55%	11,38%	12,84%	12,48%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Gambar 2.34.

Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024
(dalam %)



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai masing-masing komponen dari keempat jenis Belanja Daerah tersebut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan komponen terbesar dari struktur belanja daerah Kabupaten Bangli, dalam konteks ini mencakup pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari termasuk gaji pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Secara umum, belanja operasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,21% setiap tahun. Perkembangan realisasi belanja operasi tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten dan mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan operasional pemerintah daerah serta upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Total belanja operasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 757.959.587.521,69 menjadi Rp. 977.307.885.658,66 pada tahun 2024.

Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam Belanja Operasi di 5 tahun terakhir dengan rata-rata alokasi sebesar 63,53%. Komponen ini meningkat dari Rp. 531.600.679.857,32 pada tahun 2020 menjadi Rp. 571.014.259.148,20 pada tahun 2024, kenaikan belanja pegawai ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan remunerasi serta peningkatan jumlah pegawai. Ini penting untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik.

Komponen terbesar kedua dalam Belanja Operasi adalah Belanja Barang dan Jasa dengan rata-rata alokasi dalam struktur Belanja Operasi ini sebesar 31,37%. Belanja Barang dan Jasa mencakup pengeluaran untuk pengadaan

barang serta pembayaran jasa yang diperlukan untuk menjalankan berbagai program pemerintah. Ini termasuk biaya operasional seperti peralatan kantor, bahan bakar, pemeliharaan, dan jasa profesional. Belanja Barang dan Jasa menunjukkan peningkatan konsisten. Pada tahun 2020 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 184.852.123.000,37 dan meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi Rp. 571.014.259.148,20.

Selanjutnya adalah Belanja Bunga yang merupakan pembayaran bunga atas utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ini mencakup bunga atas pinjaman yang diambil untuk membiayai berbagai proyek dan kegiatan. Belanja Bunga mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 dan ditahun 2023 hingga 2024 belanja bunga relatif lebih stabil yang mengindikasikan bahwa jumlah pinjaman atau kondisi bunga pinjaman relatif konstan. Rata-rata alokasi belanja bunga terhadap belanja operasi adalah sebesar 0,31% setiap tahun.

Komponen keempat adalah Belanja Hibah yang merupakan pengeluaran yang diberikan kepada pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat untuk mendukung kegiatan tertentu. Perkembangan belanja hibah Fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 41.326.584.664,00 yang mengindikasikan adanya kebutuhan program bantuan selama pandemi. Penurunan belanja hibah terjadi pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Alokasi belanja hibah terhadap belanja operasi rata-rata sebesar 4,78% setiap tahunnya.

Kemudian, Belanja Sosial merupakan pengeluaran untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, seperti bantuan untuk keluarga miskin, bencana alam, dan program sosial lainnya. Belanja sosial sempat menurun pada tahun 2023, dan Kembali meningkat pada 2024 menjadi sebesar Rp. 250.000.000,00 menunjukkan fokus pemerintah dalam mendukung masyarakat pasca-pandemi. Alokasi Belanja Sosial ini terhadap anggaran Belanja Operasi rata-rata sebesar 0,26%.

Tabel 2.60.

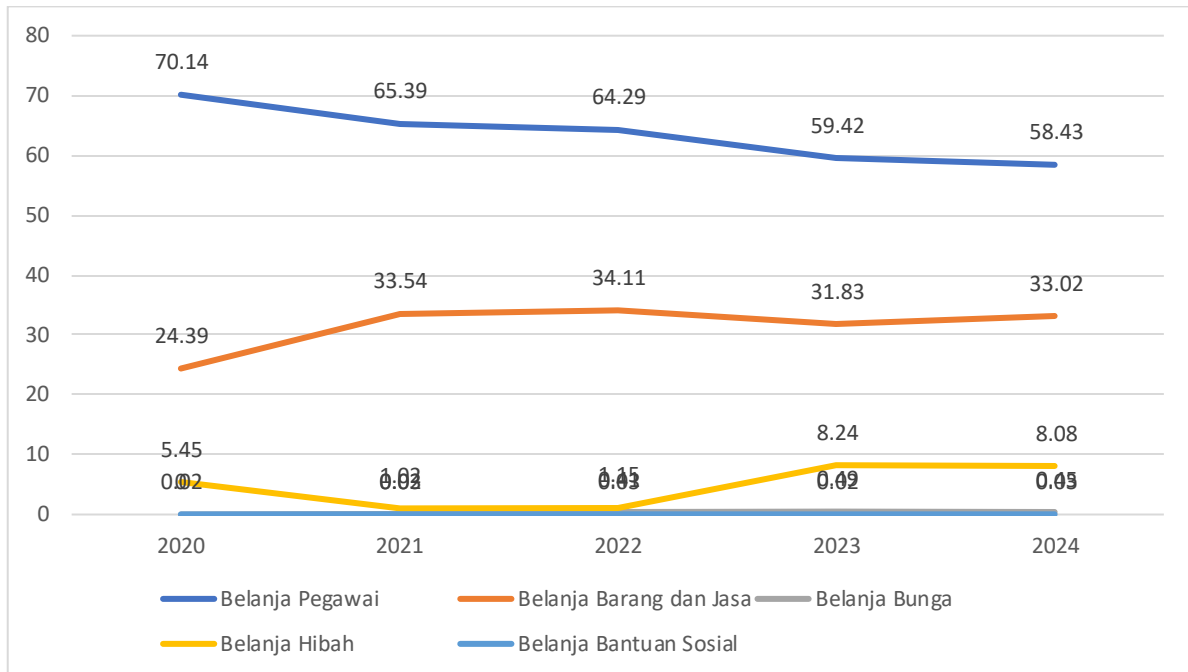
Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No .	Komponen Belanja Operasi	Alokasi Dalam Belanja Operasi (Dalam %)					Rata-Rata Tiap Tahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Pegawai	70.14 %	65.39 %	64.29 %	59.42 %	58,43 %	63,53%
2	Belanja Barang dan Jasa	24.39 %	33.54 %	34.11 %	31.83 %	33,02 %	31,38%
3	Belanja Bunga	0.00%	0.02%	0.41%	0.49%	0,45%	0,31%
4	Belanja Hibah	5.45%	1.02%	1.15%	8.24%	8,08%	4,79%
5	Belanja Bantuan Sosial	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0,03%	0,03%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Gambar 2.35.

Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024
(Dalam %)



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

2) Belanja Modal

Belanja modal dalam hal ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk pembelian, pembangunan, atau perbaikan aset tetap seperti gedung, jalan, jembatan, peralatan, dan investasi lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran daerah yang mencerminkan investasi jangka panjang dan kesiapan menghadapi situasi darurat. Alokasi belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Bangli rata-rata sebesar 15,15% per tahun. Pada periode 2020-2024, belanja modal mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi peningkatan belanja modal hingga nilai belanja modal Kabupaten Bangli pada tahun 2022 mencapai Rp. 293.929.282.841,81 peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi infrastruktur dan aset tetap. Pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi Rp. 211.649.206.855,31. Kemudian penurunan terjadi lagi di tahun 2024 menjadi Rp. 177.103.414.966,33, penurunan ini mungkin disebabkan oleh penyesuaian anggaran setelah penyelesaian beberapa proyek besar atau perubahan prioritas kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 2.61.

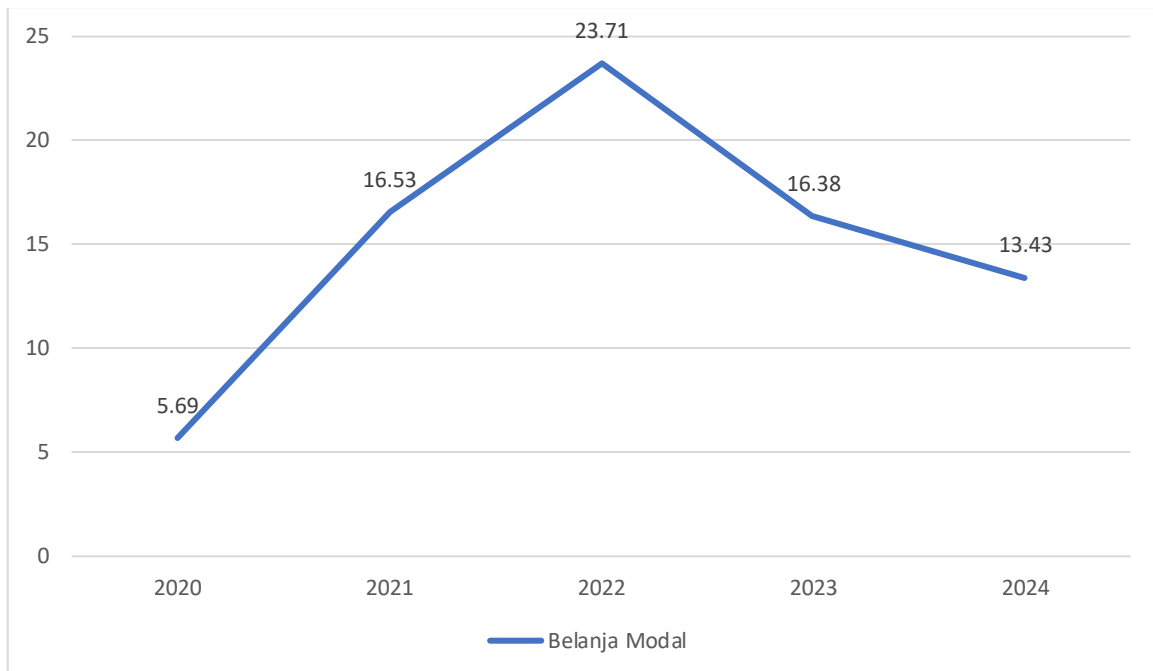
Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Modal Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Komponen Belanja Modal	Alokasi Dalam Belanja Daerah (Dalam %)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Tiap Tahun
1	Belanja Modal	5.69%	16.53%	23.71%	16.38%	13,43%	15.15%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Gambar 2.36.

Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Modal Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024
(Dalam %)



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dalam konteks belanja daerah merupakan pos anggaran yang digunakan untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang tidak terduga dan mendesak, seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau kebutuhan darurat lainnya. Berdasarkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Bangli tahun 2024, perkembangan realisasi belanja tidak terduga menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan yang mencerminkan respons tanggap pemerintah terhadap berbagai situasi darurat yang muncul selama periode tersebut.

Pada Tahun 2020 mencatat lonjakan signifikan dalam belanja tidak terduga sebesar Rp. 30,60 Miliar yang terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19. Lonjakan jumlah belanja tidak terduga ini dialokasikan untuk kebutuhan penanganan darurat krisis kesehatan dan bantuan sosial. Pada tahun 2021,

anggaran ini menurun drastis sebesar 88,86% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 3,40 Miliar, dan semakin menurun pada tahun 2022 sebesar 28,71% menjadi Rp. 2,43 Miliar. Penurunan ini menunjukkan peralihan dari fase tanggap darurat ke fase penanganan dan pemulihan yang lebih terencana dan stabil. Pada tahun 2023 dan 2024, tidak ada alokasi anggaran untuk belanja tidak terduga, yang menunjukkan stabilitas kondisi atau perencanaan anggaran yang lebih baik untuk menangani kejadian darurat. Secara keseluruhan, perkembangan belanja tidak terduga di Kabupaten Bangli mencerminkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat dan menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dihadapi setiap tahunnya.

Tabel 2.62.

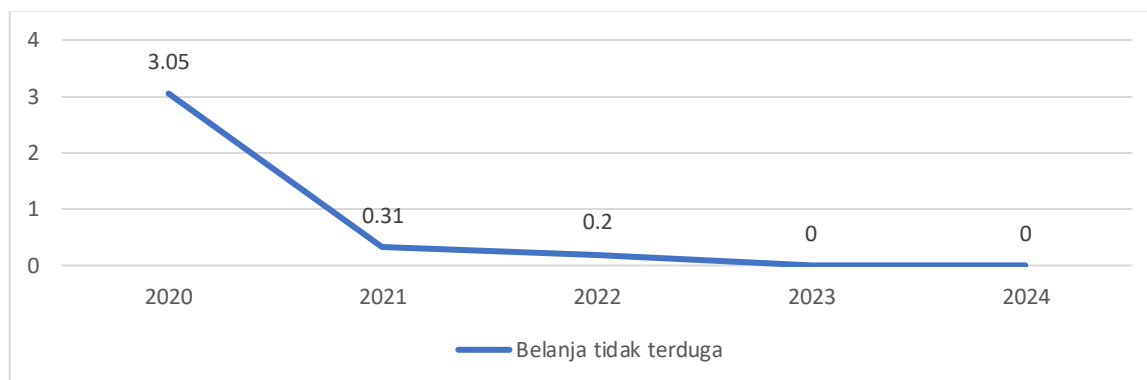
Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Komponen Belanja Tidak Terduga	Alokasi Dalam Belanja Daerah (Dalam %)					Rata-Rata Tiap Tahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Tidak Terduga	3.05%	0.31%	0.20%	0.00%	0,00%	0.71%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Gambar 2.37.

Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

4) Belanja Transfer

Belanja transfer adalah bagian dari belanja daerah yang dialokasikan untuk mendukung pemerintah desa dan lembaga lainnya. Belanja transfer memiliki dua komponen utama yakni (1) Belanja Bagi Hasil dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Komponen yang memiliki kontribusi terbesar dalam Belanja Transfer adalah Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan dana yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program lainnya di tingkat desa dan antar daerah dengan rata-rata alokasi sebesar 95,11% tiap tahun pada periode 2020 hingga

2024. Tingginya alokasi dari komponen ini mencerminkan fokus pemerintah Kabupaten Bangli pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Belanja Bantuan Keuangan, mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Bangli mencapai angka Rp. 154.418.934.193,00 namun menurun pada tahun berikutnya hingga tahun 2022 menjadi 134.394.957.268,00. Pada tahun 2023 belanja bantuan keuangan kembali meningkat menjadi Rp. 154,47 Miliar yang menggambarkan adaptasi pemerintah daerah dalam menangani situasi ekonomi yang dinamis dan memastikan dukungan finansial yang memadai untuk program-program prioritas. Pada tahun 2024 Belanja Bantuan Keuangan Kembali mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 151.222.397.284,00.

Sementara itu, belanja bagi hasil mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024, pada tahun 2021 belanja bagi hasil mengalami penurunan menjadi Rp. 3.410.243.000,00, namun di tahun berikutnya terjadi peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp. 13.317.333.850,00 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli menerima pendapatan yang semakin besar dari transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Tabel 2.63.

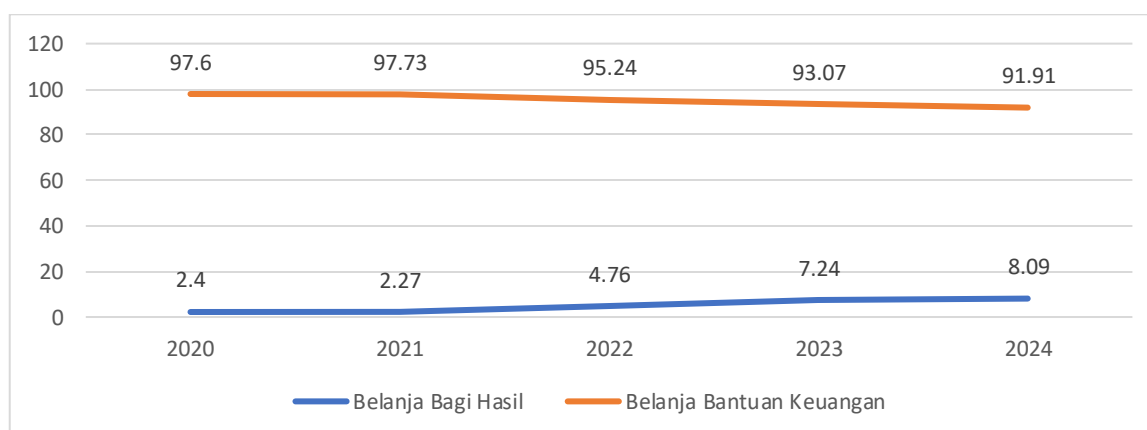
Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Transfer Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Komponen Belanja Transfer	Alokasi Dalam Belanja Transfer (Dalam %)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Tiap Tahun
1	Belanja Bagi Hasil	2.40%	2.27%	4.76%	7.24%	8,09	4,95%
2	Belanja Bantuan Keuangan	97.60%	97.73%	95.24%	93.07%	91,91	95,11%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

Gambar 2.38.

Perkembangan Komposisi Struktur Belanja Transfer Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024 (Dalam %)



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam pendapatan atau belanja daerah. Komponen ini penting dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah, membantu menutupi defisit anggaran, atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah mencakup dua komponen utama yakni:

- Penerimaan pembiayaan: Sumber dana yang diperoleh untuk membiayai pengeluaran daerah, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman daerah.
- Pengeluaran pembiayaan: Penggunaan dana untuk berbagai keperluan pembiayaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Bangli periode tahun 2020-2024 secara umum menunjukkan adanya efisisensi dalam penggunaan anggaran dengan adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di tahun sebelumnya yang konsisten tiap tahun. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjabaran masing-masing komponen pembiayaan daerah tersebut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Perkembangan realisasi jumlah total penerimaan pembiayaan Kabupaten Bangli dari tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tercatat jumlah penerimaan sebesar Rp. 37.936.616.185,25. Pada tahun 2021 dan 2022, penerimaan meningkat secara signifikan masing-masing sebesar 50,04% dan 33,05%. Hal ini mengindikasikan adanya pemulihan dalam pengelolaan anggaran pasca pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2023 penerimaan turun sebesar 46,02% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 40.882.706.881,71 dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp. 12.902.572.787,62. Variasi penerimaan pembiayaan dari tahun ke tahun mencerminkan perubahan dalam kebijakan pengelolaan anggaran, prioritas belanja, dan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 2.64.

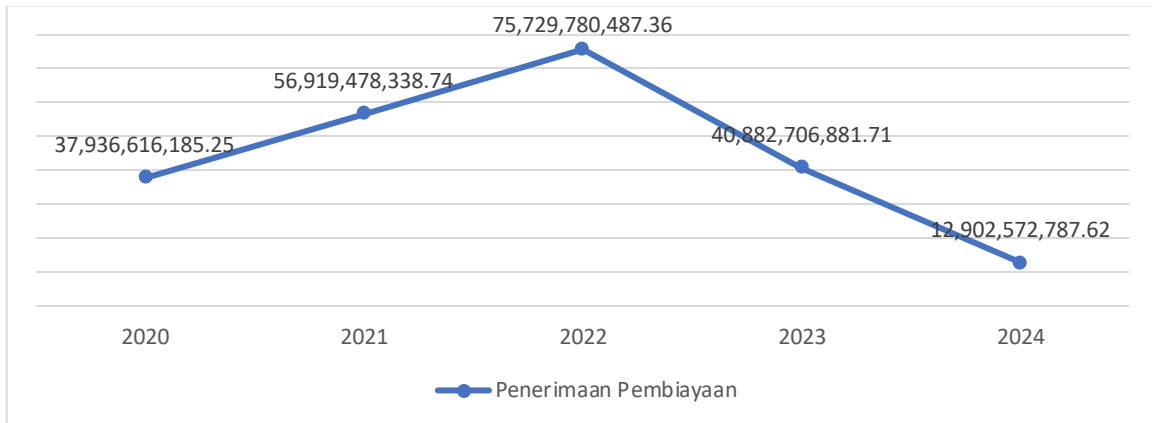
Perkembangan Struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Tahun	Penerimaan Pembiayaan	
		Alokasi Dana (Rp.)	Pertumbuhan
1	2020	37.936.616.185,25	-63,14%
2	2021	56.919.478.338,74	50,04%
3	2022	75.729.780.487,36	33,05%
4	2023	40.882.706.881,71	-46,02%
5	2024	12.902.572.787,62	-68,44%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Gambar 2.39.

Perkembangan Struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Bangli Tahun 2020 hingga 2023 tidak menunjukkan realisasi pengeluaran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun tersebut tidak ada alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk penyertaan modal atau pengeluaran pembiayaan lainnya, kemungkinan besar karena fokus anggaran dialihkan ke pos lain. Namun pada tahun 2024 alokasi dana pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bangli tercatat sebesar Rp. 11.962.764.660,00.

Tabel 2.65.

Perkembangan Struktur Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pengeluaran Pembiayaan	
		Alokasi Dana (Rp.)	Pertumbuhan
1	2020	0	0
2	2021	0	0
3	2022	0	0
4	2023	0	0
5	2024	11.962.764.660,00	100,00%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran daerah, yang mencerminkan seberapa besar kebutuhan pembiayaan bersih yang harus dipenuhi oleh suatu daerah. Dalam periode 2020-2024, Kabupaten Bangli mengalami variasi signifikan dalam pembiayaan netto. Pada tahun 2020, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp. 37.936.616.185,25 yang menunjukkan saldo positif yang kuat. Namun pada tahun berikutnya, yakni tahun 2021 hingga 2022 tercatat pembiayaan netto meningkat

sebesar 50,04% di tahun 2021 dan 33,05% di tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan pinjaman daerah. Tahun 2023, pembiayaan netto kembali menurun sebesar 46,02% dari tahun sebelumnya dan Kembali menurun pada tahun 2024 menjadi Rp. 939.808.127,62. Fluktuasi ini mencerminkan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi anggaran daerah, termasuk perubahan kebijakan, prioritas pengeluaran, serta kondisi ekonomi lokal dan nasional.

Tabel 2.66.

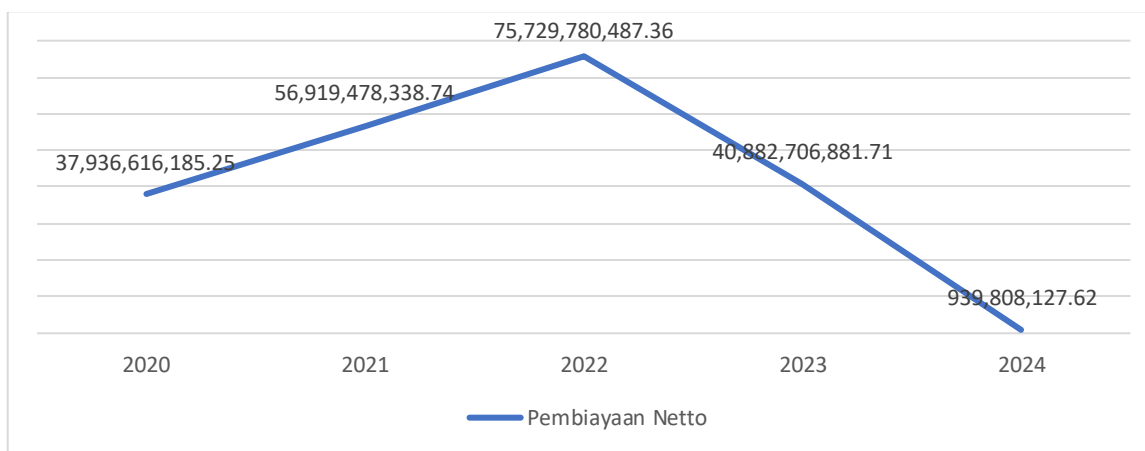
Perkembangan Struktur Pembiayaan Netto Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pembiayaan Netto	
		Alokasi Dana (Rp.)	Pertumbuhan
1	2020	37.936.616.185,25	-63,14%
2	2021	56.919.478.338,74	50,04%
3	2022	75.729.780.487,36	33,05%
4	2023	40.882.706.881,71	-46,02%
5	2024	939.808.127,62	-97,70%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Gambar 2.40.

Perkembangan Struktur Pembiayaan Netto Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Berdasarkan data realisasi pembiayaan daerah tahun 2020-2024, Kabupaten Bangli cukup konsisten mempertahankan ketersediaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bangli berupaya untuk mengefisieni pengelolaan anggaran untuk kesiapan dalam menangani kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Bangli dari 2020-2024 menunjukkan fluktuasi

yang mencerminkan berbagai dinamika dalam penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pada tahun 2020, sisa anggaran mengalami defisit yang sangat besar yakni minus Rp. 556.386.652.387,19. hal ini disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19 yang pemerintah daerah untuk mengeluarkan dana besar untuk penanganan pandemi dan dampaknya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembiayaan. Dan pada tahun 2021, sisa anggaran kembali surplus sebesar Rp. 98.424.321.094,18. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Bangli sangat berupaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan setelah mengalami defisit besar saat pandemi. Tahun 2022 sisa anggaran kembali mengalami defisit sebesar Rp. 56.482.016.885,74 namun tahun 2023 kembali mengalami surplus kecil sebesar Rp. 13.268.318.008,69 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp. 14.198.560.835,81 hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup panjang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan jumlah sisa anggaran dan jumlah surplus menunjukkan keterkaitan yang erat. Ketika surplus tinggi, sisa anggaran cenderung meningkat, menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif. Sebaliknya, ketika terjadi defisit, sisa anggaran juga mencatat penurunan yang signifikan.

Tabel 2.67.

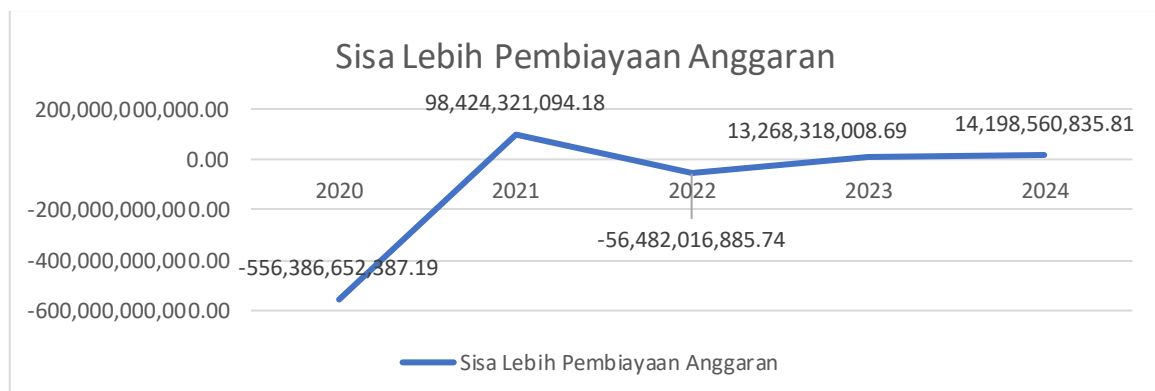
Perkembangan Struktur Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024

No	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
	Tahun	Jumlah (Rp.)	Pertumbuhan
1	2020	-556.386.652.387,19	-556.46%
2	2021	98.424.321.094,18	-117.69%
3	2022	-56.482.016.885,74	-157.39%
4	2023	13.268.318.008,69	-123.49%
5	2024	14.198.560.835,81	7,01%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Gambar 2.41.

Perkembangan Struktur Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024



Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Tabel 2.68.

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Bangli

KODE REKENING				URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1				2	3	4	5	6	7	8
4.				PENDAPATAN DAERAH						
4.	1.			PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.325.150.582,49	163.537.080.259,99	144.009.165.738,50	221.936.319.230,20	223.331.911.793,18	16,44
4.	1.	1.		<i>Pajak Daerah</i>	20.541.596.069,51	23.318.329.220,50	36.707.060.479,07	52.336.252.396	55.669.213.782,00	22,07
4.	1.	2.		<i>Retribusi Daerah</i>	11.948.450.442,01	8.281.617.975,00	36.328.299.166,20	57.401.453.950	156.452.877.623,21	67,27
4.	1.	3.		<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	7.089.522.902,70	6.101.592.913,01	5.597.430.541,18	5.887.399.995	6.435.382.923,30	-1,92
4.	1.	4.		<i>Lain-lain PAD yang syah</i>	64.745.581.168,27	125.835.540.151,48	65.376.375.552,05	106.311.212.889	4.774.437.464,67	-40,63
4.	2.			PENDAPATAN TRANSFER	271.355.740.263,00	949.349.146.346,74	962.928.823.871,00	1.042.728.940.879,00	1.103.065.395.527,00	32,38
4.	2.	01.		<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	116.220.164.000,00	857.733.621.031,00	807.793.247.608,00	900.285.215.914,00	813.642.953.312,00	47,58
4.	2.	01.	01.	<i>Dana Perimbangan</i>		703.032.171.031,00	741.717.529.608,00	809.317.417.914	738.554.479.812,00	1,24
4.	2.	01.	02.	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	53.462.813.000,00	89.588.187.000,00	10.515.789.000,00	30.884.546.000	14.491.125.500,00	-22,98
4.	2.	01.	05.	<i>Dana Desa</i>	62.757.351.000,00	65.113.263.000,00	55.559.929.000,00	60.083.252.000	60.597.348.000,00	-0,70
4.	2.	02.		<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	155.135.576.263,00	91.615.525.315,74	155.135.576.263,00	142.443.724.965,00	289.422.442.215,00	13,28
4.	2.	02.	1	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	92.910.305.211,00	66.727.321.041,74	92.910.305.211,00	106.999.308.955	130.956.251.029,00	7,11
4.	2.	02.	02.	<i>Bantuan Keuangan</i>	62.225.271.052,00	24.888.204.274,00	62.225.271.052,00	35.444.416.010	158.466.191.186,00	20,56
4.	3.			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	33.913.502.170,00	37.389.713.549,00	702.617.710,00	-	5.812.477.147,00	-29,73
4.	3.	01.		<i>Pendapatan Hibah</i>	33.913.502.170,00	37.389.713.549,00	702.617.710,00	-	5.812.477.147,00	-29,73
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					409.594.393.015,49	1.150.275.940.155,73	1.107.640.607.319,50	1.264.665.260.109,20	1.332.209.784.467,18	26,60
5.				BELANJA DAERAH						
5.	1.			BELANJA OPERASI	757.959.587.521,69	771.893.711.219,70	802.380.607.582,79	914.645.335.116,91	977.307.885.658,66	5,21
5.	1.	01.		<i>Belanja Pegawai</i>	531.600.679.857,32	504.713.498.483,72	515.867.247.541,00	543.496.536.159	571.014.259.148,20	1,44
5.	1.	02.		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	184.852.123.000,37	258.898.781.262,98	273.728.730.016,95	291.110.653.556	322.698.855.188,61	11,79
5.	1.	03.		<i>Belanja Bunga</i>	-	138.750.000,00	3.297.009.892,57	4.504.678.363	4.415.152.893,00	99,78
5.	1.	05.		<i>Belanja Hibah</i>	41.326.584.664,00	7.904.115.473,00	9.234.589.134,27	75.339.846.039	78.929.618.428,85	13,82
5.	1.	06.		<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	180.200.000,00	238.566.000,00	253.030.998,00	193.621.000	250.000.000,00	6,77
5.	2.			BELANJA MODAL	57.141.114.023,90	183.280.091.201,59	293.929.282.841,81	211.649.206.855,31	177.103.414.966,33	25,39

KODE REKENING				URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1				2	3	4	5	6	7	8
5.	3.			BELANJA TIDAK TERDUGA	30.605.993.364,34	3.409.319.517,00	2.430.457.000,00			-57,02
5.	4.			BELANJA TRANSFER	158.210.966.678,00	150.187.975.462,00	141.112.057.268,00	165.985.107.010,00	164.539.731.134,00	0,79
5.	4.	1		Belanja Bagi Hasil	3.792.032.485,00	3.410.243.000,00	6.717.100.000,00	12.017.402.100	13.317.333.850,00	28,56
5.	4.	2		Belanja Bantuan Keuangan	154.418.934.193,00	146.777.732.462,00	134.394.957.268,00	154.479.748.000	151.222.397.284,00	-0,42
				JUMLAH BELANJA DAERAH	1.003.917.661.587,93	1.108.771.097.400,29	1.239.852.404.692,60	1.292.279.648.982,22	1.318.951.031.758,99	5,61
				SURPLUS/DEFISIT	-594.323.268.572,44	41.504.842.755,44	-132.211.797.373,10	-27.614.388.873,02	13.258.752.708,19	-146,74
6.				PEMBIAYAAN DAERAH						
6.	1.			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.936.616.185,25	56.919.478.338,74	75.729.780.487,36	40.882.706.881,71	12.902.572.787,62	-19,40
		01.		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	37.936.616.185,25	56.919.478.338,74	65.045.850.787,36	40.882.706.881,71	12.902.572.787,62	-19,40
		02.		Pencairan Dana Cadangan	0	0	0			
		03.		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0			
		04.		Penerimaan Pinjaman daerah	0	0	10.683.929.700,00			
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.936.616.185,25	56.919.478.338,74	75.729.780.487,36	40.882.706.881,71	12.902.572.787,62	-19,40
6.	2.			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	11.962.764.660,00	0,00
6.	2.	01.		Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0			
6.	2.	2		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0			
6.	2.	03.		Pembayaran Pokok Utang	0	0	0			
6.	2.	04.		Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0			
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	11.962.764.660,00	0,00
				PEMBIAYAAN NETTO	37.936.616.185,25	56.919.478.338,74	75.729.780.487,36	40.882.706.881,71	939.808.127,62	-52,27
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	-556.386.652.387,19	98.424.321.094,18	-56.482.016.885,74	13.268.318.008,69	14.198.560.835,81	-148,01

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024

2.9.2. Neraca Daerah Kabupaten Bangli

Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli menunjukkan perubahan signifikan dalam posisi keuangan antara tahun anggaran 2020 hingga 2024. Secara umum, terjadi peningkatan yang sangat besar pada ekuitas, sementara aset dan kewajiban mengalami penurunan pada tahun 2024.

Total aset meningkat tajam dari tahun 2020 dengan jumlah 1.268.162.017.043,32 Rupiah hingga pada tahun 2023 menjadi 1.649.391.830.340,66 Rupiah. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah. Namun pada tahun 2024 aset Kabupaten Bangli mengalami penurunan menjadi 1.600.896.454.919,98 Rupiah.

Total kewajiban menurun dari 170.059.407.954,75 Rupiah pada tahun 2023 menjadi 125.662.145.810,76 Rupiah pada tahun 2024. Ini menunjukkan perbaikan posisi keuangan pemerintah daerah, dengan pengurangan beban utang, terutama pada Kewajiban Jangka Pendek turun signifikan dari 110.245.590.357,75 Rupiah menjadi 77.811.092.873,76 Rupiah, serta Kewajiban Jangka Panjang turun dari 59.813.817.597,00 Rupiah menjadi 47.851.052.937,00 Rupiah pada tahun 2024.

Ekuitas atau kekayaan bersih mengalami peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 jumlah ekuitas Kabupaten Bangli sebesar 1.244.850.145.953,19 Rupiah. Jumlah ini terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 1.484.416.429.378,22 Rupiah. Peningkatan ini mencerminkan surplus akumulatif serta kinerja fiskal yang sehat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan neraca ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli mengalami peningkatan kekuatan finansial yang signifikan pada periode tahun 2020 hingga 2024, ditandai dengan peningkatan nilai aset, penurunan kewajiban, dan pertumbuhan ekuitas. Berikut Tabel Neraca Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024.

Tabel 2.69.
Neraca Daerah Kabupaten Bangli Tahun anggaran 2020-2024

URAIAN	KODE	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
ASET	5.3.1	1.268.162.017.043,32	1.385.330.610.911,74	1.517.960.855.187,34	1.649.391.830.340,66	1.600.896.454.919,98
ASET LANCAR	5.3.1.1	100.753.025.829,54	178.949.771.262,04	108.732.696.272,71	121.448.424.670,93	82.904.025.668,77
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	65.119.688.302,46	117.209.643.226,51	42.470.903.814,35	13.273.104.462,69	14.199.120.569,81
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	50.242.780.570,15	58.212.830.752,33	35.085.330.183,85	5.872.675.115,43	7.627.157.859,90
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	242.260.422,00	51.528.600,00	398.411.000,00	745.647.866,00	173.271.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00	54.916.900,00	0,00	0,00
Kas di BLUD						3.646.136.188,47
Kas di BLUD RSUD	5.3.1.1.1.4	6.710.966.746,25	54.323.932.097,68	4.621.882.096,23	2.575.866.509,58	
Kas di BLUD Puskesmas	5.3.1.1.1.5	4.644.364.346,81	3.909.741.517,21	0,00	0,00	
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.6	3.279.316.217,25	711.610.259,29	722.912.155,88	246.105.211,68	192.339.949,44
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	0,00	0,00	1.587.451.478,39	4.041.000,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.8			0,00	3.828.768.760,00	2.560.215.572,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.1.2.1	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Jangka Pendek Lainnya	5.3.1.1.2.2	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3	46.267.051.023,89	59.773.327.434,98	72.775.811.963,85	124.646.895.884,58	85.115.029.028,96
Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1	33.837.777.822,45	37.191.988.336,85	38.817.107.320,78	38.799.756.571,78	40.498.092.501,78
Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	305.428.429,14	322.620.095,81	422.021.095,81	349.609.459,67	17.458.030.366,81
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.3.3	3.277.990.522,50	3.439.795.200,80	3.625.614.352,71	5.465.663.912,25	3.268.678.453,90
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.4	2.896.069.617,60	3.195.864.735,52	12.370.489.737,55	6.854.570.960,88	784.899.901,47
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.3.5	5.949.784.632,20	15.623.059.066,00	17.540.579.457,00	73.177.294.980,00	23.105.327.805,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.4	0,00	10.456.764.213,91	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.5	-23.225.375.053,65	-25.379.536.032,21	-27.854.226.847,91	-28.916.300.643,63	-30.602.247.306,15
Beban Dibayar dimuka	5.3.1.1.6	90.116.387,26	347.444.355,56	511.080.692,61	467.195.008,72	449.124.054,50
Persediaan	5.3.1.1.7	12.501.545.169,58	16.542.128.063,29	20.829.126.649,81	11.977.529.958,57	13.742.999.321,65

URAIAN	KODE	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	60.945.480.296,40	61.860.525.954,29	68.396.974.646,40	80.516.323.862,52	76.621.142.103,93
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	324.241.678,64	188.429.063,83	210.204.167,67	227.898.127,47	279.482.157,10
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	613.548.525,00	613.548.525,00			
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.2	19.800.000,00	19.800.000,00	210.204.167,67	227.298.127,46	
Penyisihan Investasi Jangka panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.3	-309.106.846,36	-444.919.461,17	0,00		
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	60.621.238.617,76	61.672.096.890,46	68.186.770.478,73	80.288.425.735,05	76.341.659.946,83
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	60.621.238.617,76	61.672.096.890,46	68.186.770.478,73	80.288.425.735,05	
ASET TETAP	5.3.1.3	1.097.732.453.675,88	1.131.812.237.421,41	1.322.302.236.652,85	1.430.912.409.516,22	1.429.704.777.075,41
Aset Tetap Tanah	5.3.1.3.1	162.031.428.899,00	163.234.788.899,00	182.690.383.171,00	193.005.470.022,36	193.852.370.022,36
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	302.010.208.697,90	357.667.592.558,25	438.946.426.286,18	463.328.990.303,74	494.372.411.289,74
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	425.002.132.404,77	464.765.258.821,12	643.314.788.999,19	779.467.101.326,13	827.419.047.313,22
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.137.775.532.102,04	1.187.642.494.878,20	1.255.416.002.811,16	1.340.339.617.709,94	1.382.788.358.020,94
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	71.814.656.256,96	79.076.307.886,96	75.929.952.477,76	66.537.336.078,76	66.950.764.040,76
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	6.121.972.638,36	16.304.806.709,45	5.901.638.883,11	6.918.380.698,20	40.170.403.669,38
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	-1.007.023.477.323,15	-1.136.879.012.331,57	-1.279.896.955.975,55	-1.418.684.486.622,91	-1.575.848.577.280,99
DANA CADANGAN	5.3.1.4	-	-	-	-	-
Dana Cadangan		-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.6	8.731.057.241,50	12.708.076.274,00	18.528.947.615,38	16.514.672.290,99	11.666.510.071,87
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.1	0,00	0,00	0,00		0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.2	263.881.666,67	6.189.039.766,67	10.582.906.873,25	11.308.927.600,75	12.951.272.161,75
Aset Lain-lain	5.3.1.6.3	8.467.175.574,83	6.519.036.507,33	2.551.916.440,33	3.187.564.663,77	37.233.537.046,27
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				8.100.302.938,80	5.944.307.034,80	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				-2.830.494.631,00	-3.894.722.668,33	-4.942.215.469,65
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				-2.072.478.977,00	-2.009.146.340,00	-33.974.548.366,50
Kas yang Dibatasi Penggunaannya						398.464.700,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				2.196.794.971,00	1.977.742.000,00	0,00
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi Gedung dan Bangunan						12.319.343.837,00

URAIAN	KODE	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi						-3.137.223.568,00
KEWAJIBAN	5.3.2	23.311.871.090,13	49.250.774.624,50	100.607.968.846,70	170.059.407.954,75	125.662.145.810,76
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	23.311.871.090,13	38.566.844.924,50	29.828.283.644,70	110.245.590.357,75	77.811.092.873,76
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.3.2.1.1	6.757.161,00	1.083.035,00	745.454,00	0,00	199,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2			382.589.121,00	382.589.121,00	318.824.263,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3			996.897.055,00	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	60.767.838,48	118.937.034,06	197.958.598,50	1.135.941.209,78	1.175.988.258,12
Utang Belanja						62.699.549.481,21
Utang Beban	5.3.2.1.5	23.226.776.983,50	18.244.202.011,77	22.278.573.989,77	95.103.167.407,54	
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	17.569.107,15	20.202.622.843,67	5.971.519.426,43	1.661.127.959,43	1.653.966.012,43
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	-	10.683.929.700,00	70.779.685.202,00	59.813.817.597,00	47.851.052.937,00
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	-	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.2	-	10.683.929.700,00	70.779.685.202,00	59.813.817.597,00	47.851.052.937,00
EKUITAS	5.3.3	1.244.850.145.953,19	1.336.079.836.287,24	1.417.352.886.340,64	1.479.332.422.421,91	1.484.416.429.378,22
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	1.268.162.017.043,32	1.385.330.610.911,74	1.517.960.855.187,34	1.649.391.830.376,66	3.220.157.150.377,96

Sumber: Laporan Neraca Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024

2.10. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sosial-ekonomi. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah memberikan gambaran tentang arah dan potensi perkembangan ekonomi serta kapasitas fiskal Kabupaten Bangli dalam beberapa tahun mendatang. Analisis ini mengkaji proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Bangli dari tahun 2026 hingga 2030, dengan fokus pada komponen pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah dikurangi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2.10.1. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bangli 2025-2030

Proyeksi keuangan daerah Kabupaten Bangli periode 2026-2030 menunjukkan tren positif dalam pendapatan maupun belanja daerah, hal ini mencerminkan optimisme pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli. Berikut adalah penjelasan terkait proyeksi keuangan daerah Kabupaten Bangli untuk tahun 2026-2030, yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah:

A. Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bangli diproyeksikan terus meningkat, dari Rp.1,237 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp.1,523 triliun pada tahun 2030.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya selama periode 2026-2030. Pada tahun 2026, PAD diproyeksikan sebesar Rp.304,73 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp.428,45 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer, yang mencakup dana dari pemerintah pusat, juga diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan dari Rp.932,56 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp.1,094 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan ketergantungan Kabupaten Bangli pada dana transfer sebagai komponen utama pendapatan daerah, dan pentingnya pengelolaan dana tersebut untuk pembangunan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada proyeksi keuangan ini, tidak ada pendapatan yang tercatat dalam kategori "Lain-lain Pendapatan yang Sah" untuk periode 2026-2030, menunjukkan bahwa semua pendapatan telah dialokasikan dalam dua kategori utama sebelumnya.

B. Belanja Daerah

Total belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp.1,248 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp.1,534 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berencana untuk meningkatkan pengeluaran guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah, sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diharapkan.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi, yang mencakup pengeluaran untuk kebutuhan operasional pemerintahan daerah, diproyeksikan meningkat dari Rp.989,22 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp.1,213 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publik seiring dengan bertambahnya pendapatan daerah.

2. Belanja Modal

Belanja modal, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan investasi jangka panjang, diproyeksikan juga meningkat dari Rp.75,14 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp.94,93 miliar pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan komitmen daerah dalam investasi infrastruktur dan fasilitas publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga diproyeksikan tetap bertahan di angka Rp.5 miliar pada tahun 2026 hingga pada tahun 2030. Kestabilan ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat atau kejadian tak terduga yang memerlukan alokasi anggaran.

Penjabaran mengenai proyeksi keuangan daerah dapat dilihat pada **Tabel 2.70** berikut.

Tabel 2.70.
Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2030

DE REKEN	URAIAN	BASELINE 2024	ANGGARAN 2025	ANGGARAN 2026	ANGGARAN 2027	ANGGARAN 2028	ANGGARAN 2029	ANGGARAN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH	1.332.209.784.467,18	1.250.432.095.025,19	1.316.797.555.000,00	1.400.529.872.000,00	1.458.142.283.000,00	1.526.937.366.000,00	1.597.426.380.000,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	223.331.911.793,18	303.230.572.809,19	297.710.219.000,00	314.426.836.000,00	329.356.347.000,00	348.836.230.000,00	366.188.044.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	55.669.213.782,00	93.596.300.000,00	99.371.230.000,00	105.502.500.000,00	113.088.210.000,00	121.841.290.000,00	131.284.060.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	156.452.877.623,21	184.508.304.000,00	186.006.760.000,00	196.398.961.000,00	203.489.115.000,00	211.001.088.000,00	218.633.618.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.435.382.923,30	6.682.100.000,00	6.294.152.000,00	6.412.752.000,00	6.587.252.000,00	9.718.052.000,00	9.905.352.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.774.437.464,67	18.443.868.809,19	6.038.077.000,00	6.112.623.000,00	6.191.770.000,00	6.275.800.000,00	6.365.014.000,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.103.065.395.527,00	947.201.522.216,00	1.019.087.336.000,00	1.086.103.036.000,00	1.128.785.936.000,00	1.178.101.136.000,00	1.231.238.336.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	813.642.953.312,00	815.631.294.000,00	847.979.336.000,00	884.995.036.000,00	927.677.936.000,00	976.993.136.000,00	1.030.130.336.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	289.422.442.215,00	131.570.228.216,00	171.108.000.000,00	201.108.000.000,00	201.108.000.000,00	201.108.000.000,00	201.108.000.000,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.812.477.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.812.477.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.318.951.031.758,99	1.251.131.215.396,00	1.317.297.555.000,00	1.401.029.872.000,00	1.458.642.283.000,00	1.527.437.366.000,00	1.610.426.380.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	977.307.885.658,66	966.337.573.311,00	989.222.100.000,00	1.041.236.230.000,00	1.102.176.067.000,00	1.154.662.921.000,00	1.205.824.123.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	571.014.259.148,20	606.614.562.293,83	627.282.600.000,00	658.646.730.000,00	691.579.067.000,00	726.158.021.000,00	762.465.923.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.698.855.188,61	334.626.712.651,17	343.000.000.000,00	360.150.000.000,00	378.157.500.000,00	397.065.400.000,00	419.918.700.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.415.152.893,00	4.331.637.634,00	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	78.929.618.428,85	20.325.160.732,00	14.000.000.000,00	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	22.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	439.500.000,00	439.500.000,00	439.500.000,00	439.500.000,00	439.500.000,00	439.500.000,00

DE REKEN	URAIAN	BASELINE 2024	ANGGARAN 2025	ANGGARAN 2026	ANGGARAN 2027	ANGGARAN 2028	ANGGARAN 2029	ANGGARAN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5,2	BELANJA MODAL	177.103.414.966,33	129.801.578.023,00	143.640.891.500,00	165.838.937.900,00	152.460.522.700,00	158.154.887.800,00	178.771.784.300,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	-	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	26.749.935.700,00	25.892.811.600,00	26.808.723.400,00	27.196.682.243,00	30.702.844.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	76.553.127.000,00	87.553.127.000,00	75.553.127.000,00	75.700.715.257,00	80.553.127.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	19.551.652.000,00	32.450.170.000,00	29.155.843.000,00	35.314.661.000,00	46.572.984.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	9.786.176.800,00	18.942.829.300,00	19.942.829.300,00	18.942.829.300,00	19.942.829.300,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	2.227.335.462,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	2.227.335.462,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	165.985.107.010,00	152.764.728.600,00	179.434.563.500,00	188.954.704.100,00	199.005.693.300,00	209.619.557.200,00	220.830.472.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.017.402.100	12.845.170.400,00	16.926.530.500,00	18.321.269.100,00	19.840.586.300,00	21.496.194.200,00	23.300.940.700,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.479.748.000	139.919.558.200,00	162.508.033.000,00	170.633.435.000,00	179.165.107.000,00	188.123.363.000,00	197.529.532.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	13.258.752.708,19	-699.120.370,81	-500.000.000,00	-500.000.000,00	-500.000.000,00	-500.000.000,00	-13.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	12.902.572.787,62		500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	13.000.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.902.572.787,62	14.199.120.370,81	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.902.572.787,62	14.199.120.370,81	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.962.764.660,00	13.500.000.000,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	939.808.127,62	699.120.370,81	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	13.000.000.000,00

DE REKEN	URAIAN	BASELINE 2024	ANGGARAN 2025	ANGGARAN 2026	ANGGARAN 2027	ANGGARAN 2028	ANGGARAN 2029	ANGGARAN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	14.198.560.835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.11. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangli, karena menjadi dasar utama bagi perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Pada bagian ini akan disajikan analisis mendalam yang menjelaskan butir-butir penting dari isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis ini mencakup identifikasi permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan RPJMD. Sedangkan untuk Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

2.11.1. Permasalahan Pembangunan

Kabupaten Bangli menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kebijakan yang lebih terarah untuk mengatasi permasalahan ini demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli. Berikut adalah rangkuman permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangli yang diidentifikasi dari penjabaran kondisi umum daerah.

Tabel 2.71.
Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Bangli

No	Aspek	Permasalahan
A	Aspek Geografi dan Demografi	
1	Posisi dan Peran Strategis Daerah	Luas Kecamatan Kintamani adalah 70% dari Kabupaten Bangli sehingga membutuhkan cakupan layanan administratif yang lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya
		Produksi Komoditas Unggulan seperti Jeruk dan Kopi Arabika mengalami penurunan
		Perlu upaya pengendalian pemanfaatan ruang secara berkala dan berkelanjutan untuk meminimalkan alih fungsi lahan pada kawasan lindung
2	Potensi Sumber Daya Alam	Penurunan kualitas air danau, pencemaran, dan eutrofikasi akibat limbah domestik dan industri
3	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Meningkatnya alih fungsi Lahan

No	Aspek	Permasalahan
		Kabupaten Bangli secara umum tergolong baik dalam hal swasembada pangan dan telah mampu memenuhi kebutuhan minimum penduduknya, pangan yang dimaksud terdiri dari beras dan umbi-umbian. Namun jika hanya ditinjau dari ketersediaan beras, kebutuhan minimum terhadap pangan masih tergolong defisit sehingga dibutuhkan inovasi dalam sektor pertanian yang dapat meningkatkan kapasitas panen.
4	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Terjadi penurunan pada nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli pada tahun 2024
5	Lingkungan Hidup Berkualitas	Kualitas air di Kabupaten Bangli masih perlu ditingkatkan
		Belum Optimalnya Pengurangan dan Penanganan sampah di Kabupaten Bangli
6	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Kabupaten Bangli menghadapi berbagai risiko bencana yang disebabkan oleh kondisi geografis dan topografi wilayahnya
7	Demografi	Terjadinya ketimpangan jumlah penduduk antara Bangli Selatan (Susut, Tembuku, Bangli) dan Bangli Utara (Kintamani)
B	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1	Kesejahteraan Ekonomi	Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli selama lima tahun terakhir belum menunjukkan dampak yang optimal terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat
		Masih adanya keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Bangli
2	Kesehatan untuk Semua	Indeks Keluarga sehat inti di Kabupaten Bangli termasuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat, sehingga perlu evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya IKS Kabupaten Bangli seperti akses terhadap layanan kesehatan, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan
3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangli masih tergolong rendah
		Kabupaten Bangli masih berada di bawah beberapa kabupaten/kota lainnya dalam hal literasi dan numerasi
4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Bangli
5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Banyak dari kawasan cagar budaya yang dilestarikan belum dikelola secara terpadu
6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Nilai Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Bangli masih lebih rendah dari nilai Indeks Perlindungan anak Provinsi Bali
		Kurang terintegrasinya Kesetaraan Gender pada perumusan kebijakan dan pembangunan di kabupaten Bangli.

No	Aspek	Permasalahan
C	Aspek Daya Saing Daerah	
1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bangli terendah kedua di Provinsi Bali.
2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, dan Sektor Perdagangan belum di garap secara optimal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Bangli.
		Masih perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah
3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Kabupaten Bangli masih memiliki permasalahan seperti keterbatasan energi terbarukan, alih fungsi lahan pertanian serta ketergantungan ekonomi pada pariwisata konvensional
4	Transformasi Digital	Indeks pembangunan TIK masih dalam kategori sedang
5	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Belum memadainya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur
		Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Bangli meskipun terus meningkat namun masih berada di bawah 50%
D	Aspek Pelayanan Umum	
1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Pelayanan publik belum optimal.
2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Belum optimalnya cakupan LINMAS dan penegakan PERDA di Kabupaten Bangli untuk memastikan setiap sudut wilayah terpantau dan terjaga dengan baik.
3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Nilai rata – rata indeks daya saing daerah di Kabupaten Bangli 3,47 dan merupakan nilai indeks terendah di Provinsi Bali

Sumber: Hasil Inventarisasi Kondisi Umum Kabupaten Bangli

2.11.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang disajikan pada **Tabel 2.71** di atas, makaselanjutnya dilakukan identifikasi potensi dan permasalahan sebelum dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli memiliki potensi dalam menyelesaikan permasalahan daerah, untuk itu perlunya memahami berbagai isu-isu penting yang dihadapi Kabupaten Bangli. Dengan menangani isu-isu ini secara efektif, Kabupaten Bangli dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.72.

Identifikasi potensi dan permasalahan daerah Kabupaten Bangli

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Aspek Geografi dan Demografi							
	Posisi dan Peran Strategis Daerah	Kecamatan Kintamani adalah Kecamatan paling luas di Kabupaten Bangli dan memiliki potensial untuk pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Bangli	Luas Kecamatan Kintamani adalah 70% dari Kabupaten Bangli sehingga membutuhkan cakupan layanan administratif yang lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya	Belum optimalnya integrasi ekonomi dan konektivitas	Ketimpangan ekonomi daerah pedesaan dan perkotaan	Kesenjangan antarwilayah dan ketimpangan pembangunan	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pembangunan	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
		Kabupaten Bangli adalah penghasil Komoditas Jeruk dan Kopi Arabika terbesar di Provinsi Bali	Produksi Komoditas Jeruk dan Kopi Arabika mengalami penurunan	Belum tercapainya ketahanan pangan dan energi	Banyak negara terlalu tergantung pada ekspor atau impor satu jenis komoditas	Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan	Belum optimalnya sektor pertanian dalam rangka mendukung upaya diversifikasi dan transformasi ekonomi	Daya Saing Ekonomi Lokal, Ketahanan Pangan dan Industri Kreatif
		Kabupaten Bangli berperan penting dalam menjaga serta melestarikan kawasan lindung	Perlu upaya pengendalian pemanfaatan ruang secara berkala dan berkelanjutan untuk meminimalkan alih fungsi lahan pada kawasan lindung	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Hilangnya keanekaragaman hayati serta polusi dan kerusakan lingkungan	Sumber air minum tercemar, tingginya timbulan sampah	Keterbatasan dan persaingan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya alam (energi, air, dan pangan)	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
	Potensi Sumber Daya Alam	Danau Batur merupakan danau terbesar yang ada di Provinsi Bali dan	Penurunan kualitas air danau, pencemaran, dan eutrofikasi akibat	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Hilangnya keanekaragaman hayati serta polusi	Sumber air minum tercemar, tingginya timbulan sampah	Keterbatasan dan persaingan dalam mengakses serta	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Bangli	limbah domestik dan industri	dan sumber daya alam	dan kerusakan lingkungan		memanfaatkan sumber daya alam (energi, air, dan pangan)	dan ketahanan terhadap bencana
	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kabupaten Bangli memiliki potensi daya tampung lingkungan yang cukup baik, didukung oleh kawasan konservasi, sumber daya air, dan ekosistem pertanian.	Perlu upaya pengendalian pemanfaatan ruang secara berkala dan berkelanjutan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangli	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Hilangnya keanekaragaman hayati serta polusi dan kerusakan lingkungan	Sumber air minum tercemar, tingginya timbulan sampah	Keterbatasan dan persaingan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya alam (energi, air, dan pangan)	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
		Kabupaten Bangli secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan minimum penduduknya, pangan yang dimaksud terdiri dari beras dan umbi-umbian.	jika hanya ditinjau dari ketersediaan beras, kebutuhan minimum terhadap pangan masih tergolong defisit sehingga dibutuhkan inovasi dalam sektor pertanian yang dapat meningkatkan kapasitas panen.	Belum tercapainya ketahanan pangan dan energi	Banyak negara terlalu tergantung pada ekspor atau impor satu jenis komoditas	Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan	Belum optimalnya sektor pertanian dalam rangka mendukung upaya diversifikasi dan transformasi ekonomi	Daya Saing Ekonomi Lokal, Ketahanan Pangan dan Industri Kreatif
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Kabupaten Bangli termasuk dalam klasifikasi "Sangat Tahan" pada Indeks Ketahanan Pangan	Terjadi penurunan pada nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli pada tahun 2024	Belum tercapainya ketahanan pangan dan energi	Banyak negara terlalu tergantung pada ekspor atau impor satu jenis komoditas	Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan	Belum optimalnya sektor pertanian dalam rangka mendukung upaya diversifikasi dan	Daya Saing Ekonomi Lokal, Ketahanan Pangan dan Industri Kreatif

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
							transformasi ekonomi	
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten yang memiliki sumber air bersih yang besar dan setiap Kecamatan Surplus Air	Kualitas air di Kabupaten Bangli masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Hilangnya keanekaragaman hayati serta polusi dan kerusakan lingkungan	Sumber air minum tercemar, tingginya timbulan sampah	Keterbatasan dan persaingan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya alam (energi, air, dan pangan)	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana
		Pengurangan dan Penanganan sampah di Kabupaten Bangli telah mengalami Peningkatan	Belum Optimalnya Pengurangan dan Penanganan sampah di Kabupaten Bangli	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Kesenjangan Daur Ulang dan Ekonomi Sirkular	Sumber air minum tercemar, tingginya timbulan sampah	Keterbatasan dan persaingan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya alam (energi, air, dan pangan)	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	IRB Kabupaten Bangli menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 hingga 2022	Kabupaten Bangli menghadapi berbagai risiko bencana yang disebabkan oleh kondisi geografis dan topografi wilayahnya	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Krisis lingkungan pada perubahan iklim	Perubahan iklim dan polusi udara	Terdapat ancaman terhadap ketersediaan udara, air, dan tanah berkualitas; peningkatan suhu, kekeringan, bencana alam	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Demografi	Kabupaten Bangli memiliki potensi pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan untuk mendukung pembangunan daerah	Terjadinya ketimpangan jumlah penduduk antara Bangli Selatan (Susut, Tembuku, Bangli) dan Bangli Utara (Kintamani)	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata	Ketimpangan ekonomi daerah pedesaan dan perkotaan	Kesenjangan antarwilayah dan ketimpangan pembangunan	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pembangunan	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
	Kesejahteraan Ekonomi	Angka Pengangguran Terbuka dan kemiskinan di Kabupaten Bangli telah mengalami penurunan yang signifikan	Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli selama lima tahun terakhir belum menunjukkan dampak yang optimal terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Perekonomian dan Kapasitas Ketenagakerjaan belum merata	Ketimpangan ekonomi daerah pedesaan dan perkotaan	Kesenjangan antarwilayah dan ketimpangan pembangunan	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pembangunan	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kesejahteraan Sosial serta menurunkan kemiskinan
			Masih adanya keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Bangli	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata				Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kesejahteraan Sosial serta menurunkan kemiskinan
	Kesehatan untuk Semua	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangli telah	Indeks Keluarga sehat inti di Kabupaten Bangli termasuk dalam	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata	Terbatasnya akses ke layanan kesehatan memadai	Kesenjangan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi kesehatan	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kesejahteraan

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		mengalami peningkatan yang signifikan	kategori Keluarga Tidak Sehat					Sosial serta menurunkan kemiskinan
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bangli menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2021 hingga 2024	Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangli masih tergolong rendah	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata	Akses terbatas ke pendidikan berkualitas pada negara berkembang	Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada semua aspek (membaca, matematika, dan sains)	Kurangnya kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kesejahteraan Sosial serta menurunkan kemiskinan
			Kabupaten Bangli masih berada di bawah beberapa kabupaten/kota lainnya dalam hal literasi dan numerasi	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata	Akses terbatas ke pendidikan berkualitas pada negara berkembang	Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada semua aspek (membaca, matematika, dan sains)	Kurangnya kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kesejahteraan Sosial serta menurunkan kemiskinan
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Kabupaten Bangli memiliki beberapa potensi dalam penguatan perlindungan sosial yang dapat mendukung ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat	Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Bangli	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata	Terbatasnya akses ke layanan kesehatan memadai	Kesenjangan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi kesehatan	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kesejahteraan Sosial serta menurunkan kemiskinan
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Kabupaten Bangli memiliki banyak kesenian dan kebudayaan khas dan unik yang	Banyak dari kawasan cagar budaya yang dilestarikan belum	Penegakan regulasi dan penerapan tata kelola yang baik belum optimal	Ancaman Terhadap Warisan Budaya Dunia	Ketimpangan Dukungan terhadap Pelaku Budaya Lokal	Ketegangan antara Pelestarian Budaya dan	Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		menjadi jati diri dari masyarakat	dikelola secara terpadu				Pariwisata Massal	
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Kabupaten Bangli memiliki peluang besar untuk meningkatkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan memperkuat berbagai aspek kebijakan dan program perlindungan anak	Nilai Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Bangli masih lebih rendah dari nilai Indeks Perlindungan anak Provinsi Bali	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata	Kekerasan Terhadap Anak	Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Anak	Masih Rendahnya Kabupaten/Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
		Indeks pembangunan gender di Kabupaten Bangli telah mengalami peningkatan yang signifikan	Kurang terintegrasinya Kesetaraan Gender pada perumusan kebijakan dan pembangunan di kabupaten Bangli.	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata	Kesenjangan partisipasi ekonomi pada peluang kerja	Kualitas sumber daya manusia yang jauh tertinggal, terlebih pada perempuan	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3	Aspek Daya Saing Daerah							
	Daya Saing Sumber Daya Manusia	Dengan mayoritas penduduk berada di usia produktif investasi dalam pendidikan dan pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan	Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bangli terendah kedua di Provinsi Bali	Pemerataan kesejahteraan sosial dan kesehatan belum merata	Akses terbatas ke pendidikan berkualitas pada negara berkembang	Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada semua aspek (membaca, matematika dan sains)	Kurangnya kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bangli	Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, dan Sektor Perdagangan belum di garap secara optimal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Bangli.	Peningkatan Perekonomian dan Kapasitas Ketenagakerjaan belum optimal	Persaingan global yang semakin meningkat	Tingkat produktivitas masih rendah	Belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
		Kabupaten Bangli mendapatkan nilai Indeks Inovasi Daerah dengan status daerah Sangat inovatif	Masih perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah	Belum optimalnya pelaksanaan demokrasi dan partisipasi masyarakat	Masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan	Peningkatan jumlah penduduk miskin	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Kabupaten Bangli memiliki potensi besar dalam ekonomi hijau melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, pertanian organik, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan	Kabupaten Bangli masih memiliki permasalahan seperti keterbatasan energi terbarukan, alih fungsi lahan pertanian serta ketergantungan ekonomi pada pariwisata konvensional	Peningkatan Perekonomian dan Kapasitas Ketenagakerjaan belum optimal	Ketimpangan ekonomi daerah pedesaan dan perkotaan	Kualitas sumber daya manusia pada aspek budaya	Tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kesejahteraan Sosial serta menurunkan kemiskinan
	Transformasi Digital	Nilai indeks pembangunan TIK Kabupaten Bangli	Indeks pembangunan TIK	Keterbatasan infrastruktur penunjang dan	Ketimpangan ekonomi daerah	Perkembangan ekonomi digital	Keterbatasan infrastruktur teknologi	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		mengalami peningkatan sejak tahun 2019	masih dalam kategori sedang	energi	pedesaan dan perkotaan			pembangunan infrastruktur daerah
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Kabupaten Bangli memiliki produk-produk unggulan yang berpotensi meningkatkan nilai Ekspor	Belum optimalnya pengenalan produk-produk unggulan Kabupaten Bangli di Pasar Internasional	Belum optimalnya integrasi ekonomi dan konektivitas	Persaingan global yang semakin meningkat	Tingkat produktivitas masih rendah	Belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal	Daya Saing Ekonomi Lokal, Ketahanan Pangan dan Industri Kreatif
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kualitas infrastruktur di Kabupaten Bangli terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	Belum memadainya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur.	Keterbatasan infrastruktur penunjang dan energi	Peluang industri 5.0 (efisiensi manufaktur, pertanian, kesehatan dan pendidikan)	Krisis lingkungan yang mempengaruhi pembangunan	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pembangunan	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
		Rasio jaringan irigasi dan persentase irigasi di Kabupaten Bangli yang dalam kondisi baik terus menunjukkan peningkatan	Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Bangli meskipun terus meningkat namun masih berada dibawah 50%	Keterbatasan infrastruktur penunjang dan energi	Peluang industri 5.0 (efisiensi manufaktur, pertanian, kesehatan dan pendidikan)	Krisis lingkungan yang mempengaruhi pembangunan	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pembangunan	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
4	Aspek Pelayanan Umum							
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan signifikan pada	Kabupaten Bangli masih membutuhkan optimalisasi dalam pelayanan publik untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi	Penegakan regulasi dan penerapan tata kelola yang baik belum optimal	Praktik korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak praktis	Pemberantasan korupsi dan tata kelola data pemerintah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

NO.	ASPEK	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
					GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		tahun 2022 dan 2023						
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Kabupaten Bangli telah menjalankan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang telah efektif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman	Cakupan Linmas dan penegakan PERDA di Kabupaten Bangli masih perlu terus ditingkatkan untuk memastikan setiap sudut wilayah terpantau dan terjaga dengan baik.	Belum optimalnya pelaksanaan demokrasi dan partisipasi masyarakat	Tingginya tingkat kejahatan dan konflik sosial	Pemberantasan korupsi dan tata kelola data pemerintahan	Ancaman stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Pengoptimalan pelaksanaan demokrasi dan partisipasi masyarakat
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Nilai rata – rata indeks daya saing daerah di Kabupaten Bangli 3,47 dan merupakan nilai indeks terendah di Provinsi Bali	Penegakan regulasi dan penerapan tata kelola yang baik belum optimal	Tingginya tingkat kejahatan dan konflik sosial	Modernisasi dan penguatan postur pertahanan	Ancaman stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Inventarisasi Kondisi Umum Kabupaten Bangli

Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan daerah, serta isu-isu yang termuat dalam KLHS Kabupaten Bangli, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara berbagai aspek Pembangunan yang memerlukan pendekatan lebih terstruktur dalam perumusannya. Oleh karena itu, untuk memperjelas strategi yang akan diambil dalam mengatasi permasalahan daerah Kabupaten Bangli, isu-isu strategis ini selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik potensi dan permasalahan yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap isu strategis yang dirumuskan memiliki dasar analisis yang kuat dan terintegrasi, sehingga strategi kebijakan yang disusun dapat lebih efektif dalam menjawab permasalahan daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Berikut Penjabaran dari Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bangli 2025-2029:

Tabel 2.73.

Perumusan Isu-isu Strategis Kabupaten Bangli

NO	ISU STRATEGIS	POTENSI DAERAH	RANGKUMAN PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah	Kecamatan Kintamani adalah Kecamatan paling luas di Kabupaten Bangli dan memiliki potensial untuk pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Bangli	Luas Kecamatan Kintamani adalah 70% dari Kabupaten Bangli sehingga membutuhkan cakupan layanan administratif yang lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya	Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Bangli bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di Kabupaten Bangli. Selain itu, pemerataan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan, terutama dalam mendukung sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Bangli.
		Pengurangan dan Penanganan sampah di Kabupaten Bangli telah mengalami Peningkatan	Diperlukan upaya pengurangan dan penanganan sampah yang lebih efektif guna meningkatkan persentase sampah yang dikelola	
		Kabupaten Bangli memiliki potensi pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan untuk mendukung pembangunan daerah	Kecamatan Susut, Bangli, dan Tembuku di bagian selatan memiliki kepadatan 3x lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Kintamani di bagian utara yang mengindikasikan terjadinya polarisasi permukiman di Bangli Selatan.	
			Jumlah penduduk Kabupaten Bangli merupakan yang terendah kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Klungkung.	
		Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bangli	Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, dan Sektor Perdagangan menyumbang kontribusi tertinggi untuk PDRB Kabupaten Bangli, namun ketiga sektor ini belum di garap secara optimal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Bangli.	
		Nilai indeks pembangunan TIK Kabupaten Bangli mengalami peningkatan sejak tahun 2019	Indeks pembangunan TIK masih dalam kategori sedang	
		Kualitas infrastruktur di Kabupaten Bangli terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	Kebutuhan akan pendanaan yang memadai untuk pembangunan infrastruktur, koordinasi antar instansi, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan.	

NO	ISU STRATEGIS	POTENSI DAERAH	RANGKUMAN PERMASALAHAN	KETERANGAN
		Rasio jaringan irigasi dan persentase irigasi di Kabupaten Bangli yang dalam kondisi baik terus menunjukkan peningkatan	Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Bangli meskipun terus meningkat namun masih berada di bawah 50%	
2	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana	Kabupaten Bangli berperan penting dalam menjaga serta melestarikan kawasan lindung	Perlu upaya pengendalian pemanfaatan ruang secara berkala dan berkelanjutan untuk meminimalkan alih fungsi lahan	Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Tantangan utama meliputi alih fungsi lahan, tekanan terhadap kawasan konservasi, dan tata kelola ruang yang belum optimal.
		Kabupaten Bangli memiliki potensi daya tampung lingkungan yang cukup baik, didukung oleh kawasan konservasi, sumber daya air, dan ekosistem pertanian.	Perlu upaya pengendalian pemanfaatan ruang secara berkala dan berkelanjutan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangli	
		Pengurangan dan Penanganan sampah di Kabupaten Bangli telah mengalami Peningkatan	Diperlukan upaya pengurangan dan penanganan sampah yang lebih efektif guna meningkatkan persentase sampah yang dikelola	Kabupaten Bangli menghadapi tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti peningkatan limbah, degradasi lahan, dan risiko bencana alam akibat kondisi topografi serta perubahan iklim. Diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana.
		Danau Batur merupakan danau terbesar yang ada di Provinsi Bali dan dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Bangli	Penurunan kualitas air danau, pencemaran, dan eutrofikasi akibat limbah domestik dan industri	
		Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten yang memiliki sumber air bersih yang besar dan setiap Kecamatannya Surplus Air	Kualitas air di Kabupaten Bangli masih perlu ditingkatkan	
		IRB Kabupaten Bangli menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 hingga 2022	Kabupaten Bangli menghadapi berbagai risiko bencana yang disebabkan oleh kondisi geografis dan topografi wilayahnya, sehingga diperlukan Upaya lebih lanjut untuk mitigasi kebencanaan	

NO	ISU STRATEGIS	POTENSI DAERAH	RANGKUMAN PERMASALAHAN	KETERANGAN
3	Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM, Kesejahteraan Sosial serta menurunkan kemiskinan	Angka Pengangguran Terbuka dan kemiskinan di Kabupaten Bangli telah mengalami penurunan yang signifikan	Angka Kemiskinan di Bangli menurun selama 5 tahun terakhir, namun perlu percepatan penurunannya dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Kabupaten Bangli masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas SDM, angka kemiskinan, dan kesenjangan kesejahteraan sosial. Diperlukan strategi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, pengembangan ekonomi kreatif, serta optimalisasi program perlindungan sosial. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, daya saing SDM dapat meningkat, kemiskinan berkurang, dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bangli semakin membaik.
			Diperlukan upaya penanganan pada jumlah keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Bangli	
		Jumlah Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bangli telah mengalami peningkatan yang signifikan	Indeks Keluarga sehat inti di Kabupaten Bangli termasuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat	
		Perkembangan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Bangli menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2021 hingga 2024	Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangli masih tergolong rendah	
			Kabupaten Bangli masih berada di bawah beberapa kabupaten/kota lainnya dalam hal literasi dan numerasi	
		Kabupaten Bangli memiliki beberapa potensi dalam penguatan perlindungan sosial yang dapat mendukung ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat	Perlu meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya JKN sehingga masyarakat yang termasuk golongan mampu akan ikut JKN secara mandiri agar capaian kepesertaan JKN menjadi 100%.	
		Dengan mayoritas penduduk berada di usia produktif investasi dalam pendidikan dan pelatihan dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan	Rata – rata angka indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangli merupakan kabupaten terendah kedua di Provinsi Bali.	
4	Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	Kabupaten Bangli memiliki banyak kesenian dan kebudayaan khas dan unik yang menjadi jati diri dari masyarakat	Banyak dari kawasan cagar budaya yang dilestarikan belum dikelola secara terpadu	Kabupaten Bangli memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan budaya lokal. Diperlukan strategi pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, peningkatan kualitas layanan, serta promosi yang lebih luas. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal.
		Kabupaten Bangli memiliki potensi unggulan di bidang wisata alam dan desa wisata yang layak dikembangkan guna menunjang perekonomian daerah.	sebagian besar potensi wisata yang tersebar di empat kecamatan belum digarap secara optimal	

NO	ISU STRATEGIS	POTENSI DAERAH	RANGKUMAN PERMASALAHAN	KETERANGAN
		Bangli berpotensi mengembangkan agrowisata sebagai inovasi integrasi sektor pertanian dan pariwisata untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali	Belum optimalnya integrasi antara sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Bangli dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali.	
5	Daya Saing Ekonomi Lokal, Ketahanan Pangan dan Industri Kreatif	Kabupaten Bangli adalah penghasil Komoditas Jeruk dan Kopi Arabika terbesar di Provinsi Bali	Produksi Komoditas Jeruk dan Kopi Arabika mengalami penurunan	Kabupaten Bangli memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Namun, tantangan seperti rendahnya daya saing produk lokal, keterbatasan inovasi, serta ketahanan pangan yang belum optimal masih perlu diatasi
		Kabupaten Bangli berpotensi mengembangkan hasil pertanian pangan selain beras seperti umbi-umbian dikarenakan relatif tingginya proporsi lahan perkebunan dibandingkan luasan pertanian lahan basah	jika hanya ditinjau dari ketersediaan beras, kebutuhan minimum terhadap pangan masih tergolong defisit sehingga dibutuhkan inovasi dalam sektor pertanian yang dapat meningkatkan kapasitas panen.	
		Kabupaten Bangli termasuk dalam klasifikasi "Sangat Tahan" pada Indeks Ketahanan Pangan	Terjadi penurunan pada nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli pada tahun 2024	
		Produk kerajinan tangan, kuliner lokal, serta olahan hasil pertanian memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif.	UMKM belum digarap secara optimal untuk menunjang perekonomian lokal di kabupaten Bangli	
		Aktivitas perdagangan hasil pertanian dan produk lokal melalui pasar-pasar tradisional menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa	belum semua kecamatan memiliki sarana dan prasarana pasar tradisional yang layak	
6	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kabupaten Bangli memiliki peluang besar untuk meningkatkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan memperkuat berbagai aspek kebijakan dan program perlindungan anak	Nilai Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Bangli masih lebih rendah dari nilai Indeks Perlindungan anak Provinsi Bali	Kabupaten Bangli masih perlu mengoptimalkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penerapan program keluarga berencana, serta mengembangkan akses terhadap pendidikan dan ekonomi bagi perempuan, serta perlunya penguatan perlindungan bagi anak dan keluarga rentan.
		Indeks pembangunan gender di Kabupaten Bangli telah mengalami peningkatan yang signifikan	Mengintegrasikan Kesetaraan Gender pada perumusan kebijakan dan pembangunan di kabupaten Bangli.	
7	Tata kelola pemerintahan dan	Kabupaten Bangli mendapatkan nilai Indeks Inovasi Daerah dengan status daerah Sangat Inovatif	Masih perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah	Diperlukan penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan mekanisme pelayanan yang lebih cepat dan

NO	ISU STRATEGIS	POTENSI DAERAH	RANGKUMAN PERMASALAHAN	KETERANGAN
	Kualitas Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023	Kabupaten Bangli masih membutuhkan optimalisasi dalam pelayanan publik untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi	efisien. Dengan tata kelola yang baik, pelayanan publik dapat lebih efektif, transparan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
		Nilai rata – rata indeks daya saing daerah di Kabupaten Bangli 3,22 dan nilai terendahnya ada pada komponen sistem keuangan yang hanya 1,71	Penegakan regulasi dan penerapan tata kelola yang baik belum optimal	
8	Pengoptimalan pelaksanaan demokrasi dan partisipasi masyarakat	Kabupaten Bangli telah menjalankan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang telah efektif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman	Cakupan LINMAS dan penegakan PERDA di Kabupaten Bangli masih perlu terus ditingkatkan untuk memastikan setiap sudut wilayah terpantau dan terjaga dengan baik.	Kabupaten Bangli masih menghadapi tantangan dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat, seperti rendahnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Sumber: Hasil Pemetaan Isu Strategis Kabupaten Bangli

BAB 3

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Bangli dalam periode 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kearifan lokal, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pesisir, Bangli memiliki karakteristik pembangunan yang unik, dengan keunggulan pada potensi pertanian, pariwisata alam, dan budaya yang kaya. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah harus menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029. Visi pembangunan yang ditetapkan mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, sedangkan misi pembangunan merumuskan langkah strategis yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut.

Selain itu, tujuan pembangunan disusun untuk memberikan gambaran tentang hasil yang ingin dicapai melalui implementasi misi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur. Sasaran ini selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan indikator kinerja pembangunan daerah, yang akan digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan pelaksanaan RPJMD.

Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Arah kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
2. Kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, sebagaimana tercantum dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025-2045 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.
3. RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045, yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah jangka panjang.
4. Potensi unggulan dan tantangan pembangunan Kabupaten Bangli, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.
5. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang dihimpun melalui berbagai proses partisipatif dalam penyusunan RPJMD ini.

Dengan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan terukur, diharapkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mengarahkan pembangunan daerah, serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Selanjutnya, bab ini akan menguraikan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli 2025-2029, yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

3.1. VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 merupakan citra masa depan yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun ke depan. Visi ini menjadi arah utama bagi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun strategi yang selaras dengan kebutuhan dan potensi Kabupaten Bangli.

Visi pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 mempertimbangkan karakteristik wilayah, tantangan pembangunan, serta aspirasi masyarakat, dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045. Selain itu, visi ini juga mengacu pada berbagai dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti RPJMD Provinsi Bali, RPJMN, dan RPJPN, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat terintegrasi dengan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pesisir, Bangli memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan, pariwisata berbasis alam dan budaya, serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, visi pembangunan Kabupaten Bangli harus mampu mengarahkan seluruh sektor pembangunan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan visi ini juga mempertimbangkan tantangan pembangunan daerah, seperti kebutuhan peningkatan daya saing ekonomi, pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, visi yang ditetapkan harus mampu menjadi landasan yang kuat dalam menjawab tantangan tersebut, sekaligus mendorong Bangli menuju pembangunan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

Visi ini juga selaras dengan konsep “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”, yang menekankan pentingnya pemuliaan dan keharmonisan hubungan antara manusia, lingkungan, dan budaya, dalam rangka menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Visi pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 akan menjadi arah kebijakan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam misi pembangunan sebagai langkah konkret dalam mencapai visi tersebut.

Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BANGLI “BANGLI JENGAH”: pesaJE NGAYaH

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli tersebut di atas memiliki makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bangli beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bangli yang sejahtera dan bahagia, *sekala niskala* menuju kehidupan *krama* dan *gumi* Bangli sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpolo, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

Bangli Jengah mencerminkan komitmen Kabupaten Bangli untuk terus maju dengan semangat tinggi, menggapai kesejahteraan, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Tekad kolektif dan semangat masyarakat Kabupaten Bangli untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi bangkit dengan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

Jengah adalah istilah dalam budaya Bali yang menggambarkan semangat pantang menyerah dan keinginan kuat untuk berjuang lebih keras. Ketika masyarakat merasa "*jengah*," mereka merasakan kebanggaan yang mendalam terhadap Bangli sebagai tempat mereka tinggal dan identitas mereka. Dengan "*jengah*," masyarakat merasa bahwa Bangli adalah bagian dari diri mereka, dan karena itu, mereka terdorong untuk bekerja keras, berkolaborasi, dan berinovasi demi kemajuan daerah mereka.

Pesaje Ngayah adalah filosofi hidup yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, pengabdian tanpa pamrih, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. *Ngayah* bukan sekadar tindakan fisik, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, di mana kerja keras dan pengabdian dilihat sebagai bentuk pemujaan atau persembahan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan leluhur. Dari sisi sosial, *Ngayah* memperkuat ikatan antar warga, membangun rasa saling percaya, dan menciptakan solidaritas yang tinggi di dalam masyarakat.

Ngayah berakar pada konsep *Tri Hita Karana* yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Dalam konteks ini, *Ngayah* adalah wujud dari harmoni dan keselarasan sosial, di mana individu memberikan kontribusi mereka demi kesejahteraan bersama.

Kabupaten Bangli terletak di tengah-tengah Pulau Bali. Bangli menjadi sentral atau pusat yang strategis, sebab berada di tengah dari sekian banyak wilayah yang disemayami Pura. Kabupaten Bangli, menjadi **sarining** (pusat) **Padmabhuana** secara alami dan menjadi representasi *Purusha-Pradhana* sebagai cikal bakal kehidupan. Gunung Batur merupakan simbol dari *Purusha* dan Danau Batur, merupakan aspek *Pradhana*. Keduanya bertemu secara alami dan menghasilkan sebuah kehidupan. Secara langsung menjadi penopang kelangsungan entitas dan menjadi pusat kekuatan Bali. Oleh sebab itu pembangunan di Bangli hendaknya mengutamakan dan memperhatikan keagungan, kesucian dan keindahan (*Satyam, Siwam, Sundaram*).

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami untuk membangun kehidupan Masyarakat Bangli secara komprehensif, yaitu :

1. **Krama Bangli/SDM (Pawongan)** adalah pembangunan SDM Bangli yang Cerdas (*Pradnyan*) dan Unggul (*Sidha*);
2. **Alam Bangli (Palemahan)** adalah pembangunan untuk mewujudkan Bangli yang **BANGLI** (Bersih, Aman, Nyaman, Gairah, Lestari, Indah); dan
3. **Kebudayaan Bangli** yang mencakup agama, tradisi, seni dan adat istiadat (*Parhayangan*).

Ketiga hal inilah yang disebut *Prakerti* (unsur utama) dalam membangun Bangli.

1. Pembangunan Krama Bangli/SDM

SDM cerdas yang dimaksud adalah bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi Krama Bangli juga harus cerdas spritual, cerdas emosional dan cerdas sosial. Singkatnya adalah membangun SDM yang bijaksana, jujur, berkarakter dan berbudaya. Caranya dengan membenahi pendidikan (kurikulum) yaitu pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti menjadi pendidikan yang utama.

SDM unggul adalah SDM yang kompetitif/berdaya bersaing, visioner, kreatif, inovatif, produktif dan terbuka dengan senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan; sehingga melahirkan Krama Bangli yang "*Sidha/Unggul*" Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul harus menjadi proritas utama. Sumber Daya Manusia (SDM) unggul memiliki jati diri, integritas, dan kompetensi, serta memiliki daya saing tinggi (*Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci*) dalam menghadapi dinamika persaingan nasional dan internasional. SDM Bangli ke depan harus dapat mengoptimalisasi kemampuan diri, memiliki akses yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi serta motivasi untuk mewujudkan cita-cita dan harapan; memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; melakukan upaya-upaya dengan pendekatan yang baik dan benar; dan mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala*. Kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bangli meliputi berbagai unsur berikut ini.

- a. Ketersediaan Udara Bersih
- b. Ketersediaan Air Bersih
- c. Kedaulatan Pangan
- d. Ketercukupan Sandang dan Papan
- e. Pendidikan
- f. Kesehatan dan Jaminan Sosial
- g. SDM Bangli yang Unggul: Jati diri, Integritas, dan Kompetensi
- h. Ketenagakerjaan
- i. Transformasi Perekonomian Bangli: Ekonomi *Kerthi* Bali
- j. Pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat
- k. Infrastruktur dan Transportasi Berkualitas

2. Pembangunan Alam Bangli

Alam diciptakan oleh Hyang Maha Kuasa sebagai tempat dan sumber kehidupan makhluk; Manusia, hewan, dan juga tumbuhan-tumbuhan. Manusia adalah Alam itu sendiri, Manusia harus harmonis dengan Alam, Alam ibarat orang tua, hidup harus menghormati Alam. Karena Alam selalu memberi kehidupan Manusia, tetapi Alam tidak pernah menuntut apa pun kepada Manusia. Oleh karena itu, Manusia wajib hukumnya menjaga Alam dengan berbagai upaya secara *Niskala-Sakala*. Pelestarian Alam Bangli secara *Niskala-Sakala* dilakukan dengan berbagai upaya:

- a. Menjaga kesucian dan kemuliaan Alam Bangli secara *Niskala* dengan terus melaksanakan secara aktif berbagai Upakara dan Upacara berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal, melalui *Rahina Tumpek* sebagai pelaksanaan *Sad Kerthi*.
- b. Menjaga semua kawasan dan tempat suci di seluruh wilayah Bangli, yang diwariskan oleh Leluhur/Tetua, Lelangit, dan Guru-guru Suci Bali.
- c. Menjaga kelestarian dan keutuhan Upakara dan Upacara berpedoman pada *Catur Bandana Yadnya*, 4 (empat) Pilar Pelaksanaan Upacara, yaitu: *Tantra* (kekuatan

geometrik Alam semesta); *Yantra* (energi simbol Alam semesta); *Mudra* (tarian kosmik Alam semesta); dan *Mantra* (*sabdha* Alam semesta).

- d. Secara terus-menerus menanamkan kesadaran masyarakat secara individu dan kolektif untuk memperkuat komitmen dalam menjaga Alam secara *Niskala*, sehingga *taksu/aura* Alam Bangli tetap kuat. Bahkan harus dijaga agar *taksu/aura* Bangli semakin kuat dalam menghadapi derasnya pengaruh dinamika perkembangan secara lokal, nasional, dan Global.
- e. Menjaga keutuhan dan fungsi ekosistem Bangli, seperti ekosistem gunung, pegunungan, daratan, danau, laut, dan pesisir dari berbagai bencana Alam dan dampak negatif pembangunan.
- f. Pemanfaatan Alam Bangli beserta isinya secara bijak dan terhormat untuk membangun guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, tanpa merusak dan mengeksploitasi Alam secara berlebihan.
- g. Luas Lahan Pertanian di Bangli harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian dengan berbagai upaya, yakni: mengendalikan alih fungsi lahan melalui penerapan dan pengawasan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Tata Ruang; mengembangkan sistem pertanian organik yang efisien dan produktif; dan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian yang produktif.

h. Pengendalian Tata Ruang

Bangli merupakan wilayah dengan luasan yang relatif kecil yang memiliki Alam, Manusia, dan Kebudayaan yang kaya, unik, dan unggul. Dinamika pembangunan Bali sangat dipengaruhi oleh masifnya perkembangan pariwisata serta perkembangan lokal, nasional, dan global, yang berpotensi menggerus Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, sehingga diperlukan pengaturan secara ketat.

- Tata ruang Bangli harus mengakomodasi kebutuhan mengenai berbagai aspek dan dinamika pembangunan sesuai karakteristik dan potensi Kabupaten Bangli, secara harmonis, efektif, efisien, terkendali, dan berkelanjutan.
- Peraturan tentang ketinggian bangunan perlu dievaluasi menyesuaikan dinamika kebutuhan, agar pemanfaatan lahan menjadi lebih efisien
- Pemerintah Kabupaten Bangli dan Pemerintah Provinsi Bali harus mampu menegakkan dan melaksanakan ketentuan pemanfaatan ruang dengan tertib dan disiplin, sesuai kewenangan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan wilayah; Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
- Pemangku kepentingan dan Masyarakat berkewajiban melaksanakan ketentuan pemanfaatan ruang dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.
- Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang di masing-masing kecamatan, sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan investasi.

3. Pembangunan kebudayaan di Bangli

Kabupaten Bangli merupakan salah satu pusat kebudayaan di Bali yang terkenal dengan kekayaan tradisi dan sejarahnya. Salah satu aspek penting yang menonjol di Kabupaten Bangli adalah keberadaan desa-desa Bali Kuno atau Tua, yang merupakan cerminan dari warisan budaya Bali yang autentik dan lestari. Kehadiran desa-desa Bali Kuno menjadikan Kabupaten Bangli sebagai pusat pelestarian budaya dan tradisi Bali yang otentik. Desa-desa ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari sejarah panjang masyarakat Bali, tetapi juga menjadi tempat di mana nilai-nilai dan filosofi hidup orang

Bali tetap dipertahankan dan diajarkan kepada generasi muda. Bangli, dengan segala kekayaan budayanya, berperan penting dalam menjaga identitas Bali dan menawarkan pengalaman yang mendalam bagi siapa saja yang ingin merasakan nuansa kehidupan Bali yang sesungguhnya.

Kebudayaan Bali bersifat tahan, lentur, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Terlebih lagi dengan diterapkannya Visi Pembangunan “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**”, yang menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan, sehingga semakin memperkuat eksistensi Kebudayaan Bali, meliputi adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali. Guna mewujudkan masyarakat Bangli yang **berkepribadian dalam Kebudayaan**, maka harus dilakukan berbagai upaya yang serius, konsisten, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali di Kabupaten Bangli. Kebijakan penguatan dan pemajuan Kebudayaan ini meliputi berbagai unsur diantaranya:

- a. Pemuliaan Desa Adat
- b. Pemuliaan Subak
- c. Pemuliaan Manuskrip Kearifan Lokal
- d. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali di Bangli (*Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci*)
- e. Penguatan dan Pemajuan Tradisi, Seni-Budaya, dan Kearifan Lokal Bali
- f. Pelindungan Hukum Karya Cipta Seni-Budaya Bali dengan Kekayaan Intelektual (KI)

Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan Krama Bangli yang berkebudayaan tinggi. Sebagaimana halnya manusia pada umumnya, Krama Bangli memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat mendasar/wajib, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : *untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bangli kedepan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkup 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bangli yaitu :

- **Dimensi pertama**, bisa menjaga keseimbangan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, *Genuine Bali*.
- **Dimensi kedua**, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- **Dimensi ketiga**, merupakan manajemen risiko atau *risk management*, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan tata kehidupan Krama Bangli harus ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan Bangli dalam berbagai sektor/bidang secara komprehensif atau mengarusutamakan budaya/tata kelola dalam berbagai aspek pembangunan Bangli serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bangli harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bangli.

Dalam segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan arah kebijakan pembangunan sumber daya Bangli terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya bagi Krama Bangli.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bangli ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara **Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah dan Terintegrasi** dalam satu kesatuan wilayah Bangli yang berpihak dan taat asas pada Budaya Bangli yaitu dengan menerapkan konsep **Pola Pembangunan Semesta Berencana** guna mewujudkan kehidupan Krama Bangli yang maju dan berdaya saing serta mewujudkan Gumi/wilayah Bangli yang sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bangli di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bangli dalam dimensi waktu menurut konsep **Tri Semaya: Atita** (masa lalu), **Nagata** (Masa Kini), dan **Wartamana** (Masa Datang), yaitu kondisi Bangli di masa lalu, kondisi Bangli di masa kini dan kondisi Bangli di masa datang. Bangli di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kerajaan Bangli, sebagai masa romantika; Bangli di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bangli, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa dinamika; dan Bangli di masa datang merupakan suatu kondisi baru (Sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bangli di masa lalu, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bangli di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Visi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 telah dirancang secara selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini merupakan amanat dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang menekankan pentingnya konsistensi dan kesinambungan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Pertama, penyelarasan dengan Visi RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2045 diperlukan agar arah pembangunan jangka menengah tidak keluar dari kerangka besar pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD adalah jembatan antara perencanaan strategis jangka panjang (RPJPD) dengan perencanaan tahunan (RKPD), sehingga visi RPJMD harus memuat capaian-capaian lima tahunan yang relevan dan mendukung visi jangka panjang. Tanpa integrasi ini, pembangunan daerah akan kehilangan arah dan kesinambungan antar periode pemerintahan akan terganggu.

Kedua, keselarasan dengan Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 penting karena Kabupaten Bangli merupakan bagian integral dari Provinsi Bali. Penyelarasan ini akan memastikan adanya sinergi lintas wilayah dan sektor, serta optimalisasi dukungan kebijakan dan program dari Pemerintah Provinsi. Selain itu, isu-isu strategis seperti pelestarian budaya Bali, penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, dan pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan kolaborasi erat antara kabupaten/kota dan provinsi.

Ketiga, integrasi dengan Visi RPJMN Tahun 2025–2029 dibutuhkan agar pembangunan di Kabupaten Bangli dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran nasional. Pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional yang mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Dengan menyelaraskan visi RPJMD dengan visi RPJMN, Kabupaten Bangli dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat dalam bentuk program nasional, pendanaan, serta kemitraan strategis lintas sektor.

Dengan demikian, penyelarasan dan integrasi visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli dengan visi pembangunan daerah dan nasional bukan hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Bangli secara menyeluruh.

Penyelarasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap dokumen perencanaan lainnya tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut.

Tabel 3.1.

Keselarasan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Perencanaan	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045	RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
Visi Pembangunan	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	<i>Nangun Sat Kerthi Loka</i> Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru	Bangli yang Maju, Berjati Diri, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>	<i>Nangun Sat Kerthi Loka</i> Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Bangli “Bangli Jengah”: Pesaje Ngayah
Makna Visi Pembangunan	Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara	Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala – Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam	Kabupaten Bangli yang modern, inovatif, dan adaptif dalam kerangka pembangunan sirkular ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan beserta isinya, untuk mewujudkan Bangli yang selaras dengan alam, berkembang maju bersama dengan perekonomian dunia, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai suci Tri Hita Karana. Tantangan yang dihadapi	Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bangli beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan <i>krama</i> Bangli yang sejahtera dan bahagia, <i>sekala niskala</i> menuju kehidupan <i>krama</i> dan <i>gumi</i> Bangli sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara

Dokumen Perencanaan	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045	RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
	negara maju di tahun 2045.	Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Membangun Kehidupan Krama Bali yang Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban Berlandaskan Nilai – Nilai Luhur Kearifan Bali	oleh Kabupaten Bangli di masa depan cukup besar mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan informasi, pelestarian alam dan lingkungan, ketahanan pangan, resiliensi terhadap bencana, hingga pengembangan kepariwisataan berkelanjutan. Keseluruhan tantangan pembangunan ini harus dapat terangkul dan terjawab dalam Visi pembangunan jangka panjang. Oleh karenanya, harus terdapat unsur-unsur yang dapat memadukan pembangunan pada sisi sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi secara sinergis. Maju, Berjati Diri, Sejahtera, dan Berkelanjutan merupakan unsur-unsur yang dapat memenuhi tantangan tersebut. Visi ini juga menjadi cerminan dukungan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata Kelola guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam konteks lokal di wilayah Kabupaten Bangli.	terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

Sumber : Pemetaan Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap dokumen perencanaan lainnya.

1. Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 terhadap Visi RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2045.

Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029: “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Bangli: Bangli Jengah, *Pesaje Ngayah*” merupakan pengejawantahan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang ditransformasikan dalam konteks pembangunan daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Visi RPJPD Kabupaten Bangli Tahun 2025–2045 berbunyi: “Bangli yang Maju, Berjati Diri, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan *Tri Hita Karana*”, yang merupakan visi jangka panjang daerah untuk mewujudkan keseimbangan antara kemajuan fisik, identitas kultural, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.

Berikut merupakan uraian keselarasan Visi RPJMD-SB kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap Visi RPJPD Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045.

- a. Keselarasan Nilai Filosofis dan Landasan Spiritualitas Lokal
 - Kedua visi sama-sama berakar pada nilai-nilai luhur budaya Bali: *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali dan *Tri Hita Karana*.
 - *Sat Kerthi* menekankan pada pemuliaan enam sumber kehidupan, sementara *Tri Hita Karana* menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
 - Hal ini menunjukkan kesinambungan orientasi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tapi juga pada harmoni dan spiritualitas.
- b. Konsistensi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - Visi RPJMD menekankan pembangunan dalam kerangka Bali Era Baru yang adaptif terhadap tantangan zaman namun tetap berakar pada nilai lokal.
 - Ini sejalan dengan visi RPJPD yang menjadikan keberlanjutan sebagai salah satu pilar utamanya, menjamin keseimbangan pembangunan antargenerasi.
- c. Penekanan pada Identitas dan Jati Diri Daerah
 - Frasa Bangli Jengah: *Pesaje Ngayah* dalam visi RPJMD mencerminkan semangat membangun daerah dengan rasa bangga dan semangat pengabdian tulus (*ngayah*) kepada masyarakat dan leluhur.
 - Hal ini mendukung narasi Bangli yang Berjati Diri dalam RPJPD yang menekankan pentingnya pelestarian tradisi, adat, dan budaya sebagai identitas daerah.
- d. Sinkronisasi Tujuan Maju dan Sejahtera
 - RPJMD 2025–2029 menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi birokrasi, peningkatan SDM, dan pelayanan publik yang merata.
 - Semua ini adalah pijakan untuk mewujudkan Bangli yang Maju dan Sejahtera sebagaimana termaktub dalam RPJPD 2025–2045.
- e. Integrasi Pembangunan Semesta Berencana dengan Arah Jangka Panjang
 - Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam visi RPJMD merupakan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi lintas sektor.
 - Pendekatan ini akan menjadi fondasi bagi tahapan-tahapan pembangunan jangka menengah yang mendukung capaian target-target besar dalam RPJPD.

Dengan demikian, Visi RPJMD 2025–2029 bukanlah visi yang berdiri sendiri, melainkan satu tahapan strategis yang mendukung arah besar pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangli 2025–2045. Ia mengusung semangat keberlanjutan, identitas, dan kesejahteraan, serta memadukan kekuatan budaya lokal dengan orientasi pembangunan modern yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 terhadap Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029

Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029, yaitu: “*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Bangli: Bangli Jengah, *Pesaje Ngayah*” merupakan penjabaran dari visi pembangunan Provinsi Bali, yaitu: “*Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”

Keselarasan ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

- a. Filosofi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal

Kedua visi mengedepankan nilai-nilai luhur budaya Bali, seperti *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yang menekankan pada pemuliaan enam sumber kehidupan, dan semangat *ngayah* yang tercermin dalam frasa *Pesaje Ngayah*. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun daerah dengan berlandaskan pada kearifan lokal.

b. Pola Pembangunan Semesta Berencana

Pola ini menekankan pada pembangunan yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kabupaten Bangli mengadopsi pola ini dalam RPJMD-nya, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan selaras dengan arah kebijakan Provinsi Bali.

c. Program Prioritas yang Sejalan

Kabupaten Bangli menyelaraskan program prioritasnya dengan enam bidang prioritas Provinsi Bali, yaitu:

- Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal
- Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Transformasi perekonomian dengan Ekonomi *Kerthi* Bali
- Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, serta Transportasi
- Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
- Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali

Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Bangli dalam mendukung visi dan misi pembangunan Provinsi Bali.

d. Komitmen Bersama dalam Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Bangli bersama dengan kabupaten/kota se-Bali telah menandatangani komitmen penyelarasan program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Ini menunjukkan sinergi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan Bali yang harmonis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 tidak hanya selaras secara filosofis dengan Visi RPJMD Provinsi Bali, tetapi juga terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah dan provinsi dapat tercapai secara bersama-sama.

3. Keselarasan Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 terhadap Visi RPJMN Tahun 2025–2029

Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029, yaitu: “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Bangli: Bangli *Jengah, Pesaje Ngayah*” merupakan manifestasi lokal dari semangat pembangunan nasional yang tertuang dalam Visi RPJMN 2025–2029: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Keselaran ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

RPJMN 2025–2029 menekankan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas. Sejalan dengan itu, RPJMD Bangli berfokus pada pengembangan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, adil, dan berkualitas bagi seluruh Krama Bangli.

b. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Pangan

RPJMN mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. RPJMD Bangli mendukung hal ini dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan melalui kemandirian pangan dan pengembangan pusat ekonomi kerakyatan.

c. Pengembangan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

RPJMN menargetkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. RPJMD Bangli sejalan dengan ini melalui peningkatan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi untuk mendukung akses dan mutu pelayanan publik.

d. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

RPJMN menekankan pada penguatan identitas nasional dan pelestarian budaya. RPJMD Bangli mendukung ini dengan memajukan adat, tradisi, seni, dan budaya melalui upaya pelestarian dan pembinaan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Agama Hindu.

e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

RPJMN mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. RPJMD Bangli mendukung ini dengan mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah berbasis TIK yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025–2029 tidak hanya selaras dengan RPJMN 2025–2029 dalam hal tujuan dan prioritas pembangunan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 melalui pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 juga telah selaras dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru tahun 2025-2125 (Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023). Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun menekankan arah pembangunan jangka panjang yang mengintegrasikan keutuhan Bali secara *niskala-sakala*, serta membangun keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan yang terbingkai dalam nilai-nilai *Sad Kerthi*.

Visi Kabupaten Bangli sejalan dengan haluan pembangunan tersebut dalam beberapa aspek kunci berikut:

a. Keselarasan Filosofis dan Ideologis

- Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah inti dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan.
- Nilai-nilai Sad Kerthi (Atma Kerthi, Danu Kerthi, Segara Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi) menjadi landasan nilai dalam visi RPJMD Bangli.
- Prinsip pembangunan sebagai yadnya (pengorbanan suci untuk kemaslahatan umum) terinternalisasi dalam spirit “pesaJE NGAyah” yang diusung Kabupaten Bangli.

b. Keselarasan Terhadap Pilar-Pilar Haluan Bali Masa Depan

Visi Bangli selaras dengan 6 bidang prioritas Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, yaitu:

- Pelindungan dan Pemuliaan Alam Bali → Terwujud dalam komitmen Bangli menjaga kawasan hulu (*Danu Kerthi* dan *Wana Kerthi*).
- Penguatan dan Pemajuan *Krama* Bali → Terakomodasi dalam semangat *jengah* dan *ngayah* untuk memperkuat SDM dan partisipasi masyarakat Bangli.

- Pelestarian Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya Bali → Visi ini menekankan penguatan identitas budaya lokal sebagai landasan pembangunan.
- Pembangunan Ekonomi *Kerthi* Bali → Tercermin dalam upaya diversifikasi ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal Bangli.
- Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas → Mendukung penguatan konektivitas wilayah tengah dan timur Bali sebagai bagian dari keadilan pembangunan.
- Tata Kelola Bali Era Baru → Implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana melalui RPJMD merupakan bentuk konkret dari tata kelola Bali Era Baru yang terencana, terintegrasi, dan berbasis nilai-nilai luhur.

3. Keselarasan Wilayah Strategis

Bangli merupakan bagian dari wilayah strategis sebagai penyangga ekologis dan budaya Bali, khususnya sebagai wilayah hulu (*catchment area*) dan zona konservasi spiritual (Geopark Batur). Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 mendukung peran strategis ini dalam konteks pembangunan Bali secara menyeluruh dan jangka panjang.

Dengan demikian, visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 bukan hanya selaras, tetapi merupakan bagian integral dan operasional dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Melalui semangat Bangli *Jengah: PesaJE NGayaH*, Kabupaten Bangli berkomitmen menjadi pelaksana utama pembangunan Bali Era Baru yang adil, harmonis, dan berlandaskan kearifan lokal Bali.

3.2. MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029, diperlukan langkah-langkah strategis yang konkret dan terarah. Langkah-langkah tersebut dirumuskan dalam bentuk misi pembangunan, yang menjadi penjabaran operasional visi dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Misi pembangunan jangka menengah merupakan arah strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Setiap misi mencerminkan prioritas pembangunan daerah, yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi unggulan, tantangan pembangunan, serta aspirasi masyarakat Kabupaten Bangli.

Sebagai kabupaten yang memiliki keunggulan di sektor pertanian, kehutanan, pariwisata berbasis alam dan budaya, serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, pembangunan Kabupaten Bangli harus diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ini secara berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, misi yang dirumuskan dalam RPJMD ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, penyusunan misi pembangunan Kabupaten Bangli 2025-2029 juga memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Bali, serta RPJMD Provinsi Bali. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Bangli memiliki arah yang terpadu dan sinergis dengan pembangunan di tingkat yang lebih luas, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Misi pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan adanya misi yang jelas dan terukur, diharapkan pembangunan Kabupaten Bangli dalam lima tahun ke depan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan VISI tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi pembangunan sesuai filosofi *Sarining Padma Bhuana* yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bangli sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, yaitu:

- Misi.1.** Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
- Misi.2.** Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau
- Misi.3.** Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri
- Misi.4.** Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
- Misi.5.** Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif
- Misi.6.** Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana
- Misi.7.** Mewujudkan *Good Governance*
- Misi.8.** Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum
- Misi.9.** Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, sinergis, dan berkelanjutan, penyelarasan antara misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 dengan misi dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 menjadi suatu keharusan. Hal ini dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus tersusun secara sistematis dan terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Secara substantif, misi pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 merupakan pengejawantahan dari visi daerah: *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Bangli: BANGLI JENGAH – pesaJE NGAyaH yang selaras dengan visi pembangunan Provinsi Bali, yaitu mewujudkan keharmonisan alam, manusia, dan budaya Bali berdasarkan nilai-nilai *Sad Kerthi*. Oleh karena itu, misi daerah tidak boleh disusun secara terpisah atau bertentangan, melainkan harus mendukung pencapaian arah pembangunan provinsi sebagai bagian dari sistem pembangunan yang lebih luas.

Penyelarasan misi juga menjadi dasar bagi:

- Efisiensi dan konsolidasi program antar tingkatan pemerintahan,
- Penguatan indikator kinerja pembangunan yang sejalan,
- Kemudahan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, serta
- Akses yang lebih optimal terhadap dukungan program provinsi dan nasional.

Dengan demikian, penyelarasan misi RPJMD Kabupaten Bangli terhadap misi Provinsi Bali bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, inklusif, dan berakar pada jati diri Bali dalam kerangka Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Keselaran misi antar dokumen ini ditunjukkan dengan kesesuaian misi per misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 (9 misi) dengan misi per misi dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (22 misi). Kesesuaian misi per misi ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2.

Keselaran Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
	Misi 1. Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara <i>Niskala-Sakala</i> berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> , yaitu: <i>Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi</i> .	Misi 5. Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif
	Misi 2. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan Krama Bali yang meliputi <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan</i> .	Misi 5. Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif
	Misi 3. Memperkuat dan memajukan Kebudayaan Bali melalui penguatan, pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni-budaya, kearifan luhur lokal Bali, dan pelestarian pelaku Kebudayaan Bali, serta membentuk keadaban kehidupan Krama Bali.	Misi 5. Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif
	Misi 4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.	Misi 2 Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau
	Misi 5. Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul (SDM Bali Unggul) yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali.	Misi 1 Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
	Misi 6. Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.	Misi 1 Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
	Misi 7. Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	Misi 1 Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.

No	Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
	Misi 8. Mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk <i>Widyalyaya</i> dan <i>Pasraman</i> di Desa Adat.	Misi 1 Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
	Misi 9. Menjadikan generasi muda/milenial dan gen-z sebagai garda depan membangun peradaban masa depan Bali	Misi 1 Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
	Misi 10. Memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional	Misi 1 Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
	Misi 11. Meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan Krama Bali	Misi 4. Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
	Misi 12. Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan <i>Krama</i> Bali.	Misi 3 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri
	Misi 13. Mempercepat penyelenggaraan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi <i>Kerthi</i> Bali.	Misi 3 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri
	Misi 14. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi, karakteristik, serta keunggulan Kota/Kabupaten se-Bali guna mewujudkan <i>Krama</i> Bali sejahtera, bahagia, adil, dan makmur.	Misi 3 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri
	Misi 15. Meningkatkan ragam, kualitas, daya saing, dan kebanggaan terhadap produk industri lokal Bali, serta produk UMKM lokal Bali dan koperasi.	Misi 3 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri
	Misi 16. Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital dan mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi digital.	Misi 9. Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi
	Misi 17. Menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.	Misi 5. Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif
	Misi 18. Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi secara terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan	Misi 9. Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi
	Misi 19. Mewujudkan Alam Bali yang hijau, bersih, dan indah.	Misi 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana
	Misi 20. Mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih	Misi 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana
	Misi 21. Memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh Negara dan	Misi 8. Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum

No	Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
	Masyarakat dengan sistem keamanan terpadu.	
	Misi 22. Memantapkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, pasti, dan murah.	Misi 7. Mewujudkan <i>Good Governance</i>

Sumber: Hasil Penyelarasan Misi dalam Dokumen RPJMD SB Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap dokumen RPJMD SB Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Seluruh misi dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tersebut tergabung ke dalam prioritas-prioritas pembangunan. Terdapat 5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli untuk 5 tahun ke depan. Adapun prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- Prioritas 1.** Melindungi dan Mengembangkan Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya Lokal
- Prioritas 2.** Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 3.** Memperkuat Ekonomi berbasis potensi lokal
- Prioritas 4.** Pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan peningkatan sistem mitigasi Bencana
- Prioritas 5.** Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis

Adapun klasifikasi misi berdasarkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Keselarasan Misi dan Bidang Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029	Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
Prioritas 1 Melindungi dan Mengembangkan Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya Lokal	• Misi 5 Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal, dan ekonomi Kreatif
Prioritas 2 Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan ketenagakerjaan	• Misi 1 Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
	• Misi 2 Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau
	• Misi 4 Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
Prioritas 3 Memperkuat Ekonomi berbasis potensi lokal	• Misi 3 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri
	• Misi 5 Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal, dan ekonomi Kreatif
Prioritas 4 Pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan peningkatan sistem mitigasi Bencana	• Misi 9 Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi
	• Misi 6 Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029	Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
Prioritas 5 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis	• Misi 7 Mewujudkan <i>Good Governance</i>
	• Misi 8 Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum

Sumber : Penyelarasan Prioritas dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029

Prioritas pembangunan ini tentu juga harus selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali maupun prioritas pembangunan nasional. Berikut adalah alasan utama mengapa keselarasan ini penting:

1. Kepatuhan terhadap Kerangka Hukum dan Perencanaan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman pada rencana pembangunan nasional. Hal ini memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan bekerja dalam satu arah strategis yang terkoordinasi.

2. Mewujudkan Sinergi dan Efisiensi Pembangunan

Dengan menyelaraskan prioritas pembangunan, Kabupaten Bangli dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, menghindari duplikasi program, dan memastikan bahwa inisiatif lokal mendukung tujuan provinsi dan nasional. Ini juga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan teknis dari pemerintah provinsi dan pusat.

3. Kontribusi terhadap Visi Indonesia Emas 2045

Visi nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” menekankan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menyelaraskan prioritasnya, Kabupaten Bangli dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan nasional ini, terutama dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian budaya.

4. Memperkuat Identitas dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan. Dengan menyelaraskan prioritasnya, Kabupaten Bangli dapat memastikan bahwa pembangunan daerah tetap mencerminkan identitas budaya lokal sambil mendukung tujuan provinsi.

5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan

Keselarasan dalam perencanaan pembangunan memungkinkan evaluasi yang lebih terstruktur dan transparan, memudahkan pengawasan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan demikian, penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Bangli dengan prioritas provinsi dan nasional bukan hanya sebuah keharusan administratif, tetapi juga strategi untuk memastikan pembangunan yang harmonis, efektif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 3.4** berikut.

Tabel 3.4.

Keselaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
Prioritas 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas 5 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis
Prioritas 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Prioritas 3 Memperkuat Ekonomi berbasis potensi lokal
	Prioritas 4 Pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan peningkatan sistem mitigasi Bencana
Prioritas 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Prioritas 3 Memperkuat Ekonomi berbasis potensi lokal Prioritas 4 Pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan peningkatan sistem mitigasi Bencana
Prioritas 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.	Prioritas 2 Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
Prioritas 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Prioritas 3 Memperkuat Ekonomi berbasis potensi lokal
Prioritas 6. Membangun dari desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Prioritas 2 Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
	Prioritas 3 Memperkuat Ekonomi berbasis potensi lokal
Prioritas 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Prioritas 5 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis
Prioritas 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Prioritas 1 Melindungi dan Mengembangkan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
	Prioritas 4 Pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan peningkatan sistem mitigasi Bencana

Sumber : Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 3.5.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029
Bidang Prioritas 1 Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.	Prioritas 1 Melindungi dan Mengembangkan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
Bidang Prioritas 2 Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Prioritas 2 Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
Bidang Prioritas 3 Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Prioritas 3 Memperkuat Ekonomi berbasis potensi lokal
Bidang Prioritas 4 Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi	Prioritas 4 Pemerataan infrastruktur, pelestarian lingkungan dan peningkatan sistem mitigasi Bencana
Bidang Prioritas 5 Lingkungan, Kehutanan, dan Energi.	
Bidang Prioritas 6 Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.	Prioritas 5 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis
Bidang Prioritas 7 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	

Sumber : Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

3.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah, tujuan dan sasaran pembangunan disusun untuk memberikan arah yang lebih operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangli tahun 2025-2029. Tujuan pembangunan menggambarkan hasil utama yang ingin dicapai dalam lima tahun, sedangkan sasaran pembangunan merupakan target yang lebih spesifik dan terukur, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli tahun 2025-2029 ini mengacu pada berbagai aspek strategis, termasuk:

1. Keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.
2. Pencapaian target pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangli, sebagaimana diatur dalam RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045.
3. Identifikasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan daerah, guna menentukan kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan.
4. Pemanfaatan potensi unggulan daerah, terutama di sektor pertanian, pariwisata berbasis alam dan budaya, ekonomi kreatif, serta pelestarian lingkungan.
5. Keterpaduan dengan prioritas pembangunan daerah, agar seluruh program dan kebijakan yang disusun dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, RPJMD ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Bangli dalam lima tahun ke depan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, subbab ini akan menguraikan secara rinci tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029, sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli untuk periode Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Tabel 3.6** berikut ini.

Tabel 3.6.

Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Misi 1 : Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.	Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangli Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,40	74,11	74,81	75,52	76,22	77,10	
			Tingkat Kemiskinan	4,43	3,98 - 4,23	4,02	3,82	3,61	3,20-3,45	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sosial
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,97	93,34	93,71	94,08	94,45	94,92	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Kabupaten Layak Anak	550 (PRATAMA)	580 (PRATAMA)	610 (MADYA)	650 (MADYA)	680 (MADYA)	710 (NINDYA)	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sasaran 1: Meningkatnya Akses Pendidikan, Peran Pemuda dalam Olahraga, dan Literasi Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,68	7,946	8,21	8,48	8,74	9,01	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
			Harapan lama sekolah	12,59	12,634	12,68	12,72	12,77	12,81	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pendidikan
			Peningkatan Prestasi Olah Raga	45	52	60	64	70	72	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemuda dan Olahraga
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	61,65	61,71	61,77	61,83	61,89	61,95	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perpustakaan
		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,60	74,92	75,23	75,54	75,85	76,16	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kesehatan
		Sasaran 3: Meningkatnya	Indeks Pembangunan	66.3	67.4	68.4	69.4	70.3	71.2	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan
Misi 2 : Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau										

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Misi 4: Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu dan inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender		Kualitas Keluarga	Keluarga (IBangga)							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase PMKS yang tertangani	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Sosial
		Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Transmigrasi
		Sasaran 6: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.233	0.234	0.225	0.217	0.209	0.201	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,3	64,35	64,4	64,45	64,5	64,55	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 3: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri	Tujuan 2: Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan budaya daerah		Pertumbuhan Ekonomi	5,50	4,90-5,50	6,38	6,94	7,49	7,50-8,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perencanaan
			Gini Rasio	0.301	0,290	0,285	0,280	0,275	0,270	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perencanaan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,73	0,72	0,70	0,68	0,60	0,58	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	32,97	33,69	34,42	35,16	35,93	36,71	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
			Persentase pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	16,05	32,55	49,27	66,11	83,05	100	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan
		Sasaran 7: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77,19	77,25	77,5	77,95	77,95	77,95	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pangan
		Sasaran 8: Meningkatnya daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	29,56	30,48	31,40	32,32	33,24	34,16	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Tenaga Kerja
			Meningkatnya koperasi yang berkualitas	59.64	71.01	73.11	75.21	77.31	79.41	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Rasio Kewirausahaan	3.67	3.73	3.79	3.85	3.91	3.96	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	10.20	10.29	10.38	10.47	10.56	10.65	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perdagangan
			Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	8.48	8.66	8.83	9.01	9.18	9.36	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Perindustrian
		Sasaran 10: Meningkatnya layanan investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
		Sasaran 11: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12,00	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pariwisata
Misi 5: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya										

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Lokal dan ekonomi Kreatif		Sasaran 12: Meningkatnya pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal	Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	16,05	32,55	49,27	66,11	83,05	100	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Kebudayaan
Misi 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana	Tujuan 3 : Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	72,83	73,01	73,18	73,35	73,52	73,52	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	116	114,2	112,4	110,6	108,8	107	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			Indeks Infrastruktur Kabupaten	76,57	80,87	81,43	82,01	82,53	83,03	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
		Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peningkatan Indeks Kualitas Air	71,85	72,05	72,25	72,45	72,65	72,65	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			Peningkatan Indeks Kualitas Udara	81,19	81,39	81,59	81,79	81,99	81,99	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,07	59,14	59,21	59,28	59,35	59,35	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
		Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di Masyarakat	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Sasaran 15: Meningkatnya akses	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76,57	80,87	81,43	82,01	82,53	83,03	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan
Misi 9 : Mempercepat Pembangunan dan										

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi		masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian layak, serta layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.								Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang
Misi 7 : Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis		Indeks Reformasi Birokrasi	75.05	75.5	75.95	76.5	76.95	77.5	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pengawasan
			Indeks Daya Saing Daerah	3,34	3,53	3,63	3,73	3,83	3,93	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Penelitian dan Pengembangan
		Sasaran 16: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,42	85,45	85,47	85,49	85,52	85,54	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Unsur Sekretariat Daerah/ Semua PD
			NILAI AKIP	62,20	63,25	64,30	65,35	66,40	67,50	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Unsur Sekretariat Daerah/ Semua PD
			Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	3,4611	3,4611	3,4611	3,4611	4,1771	4,1771	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Unsur Sekretariat Daerah/ Semua PD

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Misi 8 : Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum		Sasaran 17: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Daerah	6.65	6.67	6,70	6,75	6,80	6,85	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum

Sumber: Pemetaan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli beserta Indikatornya

3.4. STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Strategi pembangunan jangka menengah merupakan rangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangli dalam periode lima tahun ke depan. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah, mengatasi tantangan pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan analisis isu-isu strategis, kondisi sosial-ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Strategi ini mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, inklusivitas, daya saing, dan keberlanjutan.

Adapun strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli dapat dilihat dalam **Tabel 3.7** berikut ini.

Tabel 3.7.
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangli

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangli Unggul dan Berdaya Saing	Sasaran 1: Meningkatnya Akses Pendidikan, Peran Pemuda dalam Olahraga, dan Literasi Masyarakat	Pemetaan kebutuhan infrastruktur dan tenaga pendidik di seluruh wilayah	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesetaraan	Integrasi teknologi pembelajaran digital di semua jenjang (smart learning environment).	Evaluasi dan penguatan sekolah penggerak dan guru penggerak	Lahirnya model pendidikan khas Bangli berbasis budaya, teknologi, dan lingkungan.
		Peningkatan akreditasi dan standar layanan pendidikan dasar dan kesetaraan di kabupten Bangli.	Implementasi program Penguatan Kompetensi Guru (Pedagogik, Teknologi Digital, Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal).	Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penguatan kurikulum lokal dan inovatif	penguatan fungsi pengawasan internal (Pengawas Sekolah),	Evaluasi dan konsolidasi implementasi standar pelayanan minimal (SPM) urusan pendidikan dan urusan keolahragaan.
		Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana sekolah dasar dan kesetaraan.	Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya, agama, bahasa Bali, adat, dan tradisi Bangli.	Implementasi platform pembelajaran daring yang terintegrasi di seluruh jenjang pendidikan.	Implementasi sistem meritokrasi dalam pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan	Penguatan sistem manajemen mutu pendidikan berbasis data dan pengawasan masyarakat.
		Penguatan Pondasi kepemudaan melalui Pengembangan Infrastruktur olah Raga yang berkualitas	Mendorong pengembangan <i>Pasraman</i> maupun sekolah berbasis keagamaan Inklusif sebagai penguatan pendidikan spiritual dan karakter.	Penguatan kompetensi literasi digital bagi guru dan siswa.	Pemantapan implementasi budaya mutu di seluruh satuan pendidikan dasar:	Pelaksanaan penguatan program pendidikan karakter dan budaya yang terintegrasi di seluruh jenjang.
		Inventarisasi potensi atlet muda Bangli untuk pembinaan berjenjang	Meningkatkan pembinaan olahraga dan kegiatan kepemudaan untuk semakin memperkuat karakter siswa di Kabupaten Bangli.	Percepatan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan yang berkelanjutan	budaya literasi dan numerasi,	Finalisasi <i>road map</i> pendidikan Bangli 2045 menuju generasi muda yang cerdas, kompetitif, dan berbudi pekerti luhur.
		Penyusunan Peta Literasi Masyarakat Kabupaten Bangli guna memetakan tingkat literasi per kecamatan/desa/banjar.	Percepatan pemenuhan SPM Pendidikan dasar dan kesetaraan	Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan relawan sosial	budaya inovasi pembelajaran,	Pelibatan generasi muda dalam gerakan literasi berupa duta literasi, maupun pegiat literasi muda.
		Gerakan Literasi Desa berbasis kolaborasi sekolah–desa adat /desa/banjar.	Pengembangan Infrastruktur olah Raga yang berkualitas	Implementasi program Literasi Keluarga dengan pelibatan orang tua dalam program literasi anak dan remaja.	budaya sekolah ramah anak, aman, dan inklusif.	Finalisasi roadmap literasi Bangli 2045 yang menempatkan literasi sebagai bagian dari identitas dan kekuatan budaya Bangli.
		Penguatan karakter dan budaya literasi masyarakat	Pembentukan inkubator pemuda kreatif dan start-up muda Bangli.	Integrasi program literasi ke dalam Pendidikan Non-Formal (PNF): PKBM, SKB, Pasraman Inklusif.	Penguatan kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan pendidikan:	Penyusunan penghargaan/insentif desa literasi, sekolah literasi, komunitas literasi berprestasi.
		Penguatan peran perpustakaan sekolah sebagai pusat pembelajaran masyarakat.	Penguatan budaya literasi di SD dan SMP melalui program wajib membaca harian, lomba literasi sekolah, pojok baca kelas.	Integrasi literasi budaya dan kearifan lokal dalam pembelajaran dan kegiatan komunitas (cerita rakyat, aksara Bali, sastra lisan).	penguatan kerja sama sekolah–desa adat–dunia usaha/dunia kerja (DU/DI) untuk pembelajaran kontekstual,	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			Peningkatan literasi informasi dan literasi digital bagi guru, siswa, dan komunitas (kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas digital).		penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal untuk pengembangan kompetensi guru dan penguatan program literasi.	
					Penguatan pelibatan masyarakat dalam pengembangan ekosistem pendidikan:	
					peningkatan peran desa adat dalam mendorong partisipasi pendidikan,	
					penguatan forum masyarakat peduli pendidikan tingkat desa/banjar.	
					Penguatan Posisi strategis keolahragaan di Kabupaten Bangli.	
					Penguatan jejaring kemitraan literasi: pemerintah, desa adat, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha.	
					Pengembangan festival literasi budaya, literasi aksara Bali, literasi spiritual.	
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Optimalisasi Layanan Kesehatan melalui optimalisasi Puskesmas, Pustu, Posyandu, layanan kesehatan bergerak	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kader Kesehatan	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Melalui Akreditasi dan Standarisasi Fasilitas kesehatan	Penguatan jejaring pelayanan kesehatan primer yaitu melalui integrasi layanan UKP dan UKM di seluruh desa.	Penguatan Sistem Kesehatan Terintegrasi dan Berbasis Data
		Peningkatan Program Promotif dan Preventif Berbasis Keluarga	Pengintegrasian PHBS di Semua Sektor Masyarakat (Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum)	Penguatan Layanan Kesehatan Esensial untuk Ibu Hamil, Bayi Baru Lahir, Lansia dan Penyakit Tidak Menular	Penguatan sistem rujukan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.	Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mengatasi Determinan Sosial Kesehatan
		Perbaikan dan Penguatan Sistem Imunisasi dan Pengendalian Penyakit	Pengembangan Program Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal	Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Layanan Farmasi di Fasilitas kesehatan	Pelaksanaan evaluasi periodik akreditasi fasilitas kesehatan untuk menjamin keberlanjutan mutu pelayanan termasuk evaluasi tenaga kesehatan.	Pengembangan pelayanan kesehatan inovatif berupa <i>telemedicine</i> , layanan bergerak di desa-desa terpencil.
		Peningkatan Infrastruktur dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar	Peningkatan Sistem Manajemen Logistik Kesehatan di Fasilitas Pelayanan	Transformasi Digital dalam Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Berbasis Teknologi	Sistem Kesehatan Berbasis Lingkungan: Program "Kesehatan Hijau" untuk	Penguatan budaya hidup sehat melalui integrasi PHBS, literasi kesehatan masyarakat, penguatan ketahanan pangan sehat.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
					Mengurangi Penyakit Lingkungan	
		Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Peningkatan Layanan Kesehatan Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Kabupaten	Kampanye Kesehatan Masyarakat dengan Pendekatan Partisipatif dan Interaktif	Penguatan posisi strategis Infrastruktur dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar	Penyempurnaan Sistem Pembiayaan Kesehatan
				Penguatan Infrastruktur dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar		Penguatan Kemitraan dengan Lembaga Kesehatan
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Keluarga	Penyusunan profil kependudukan dan profil keluarga Kabupaten Bangli sebagai dasar intervensi pengendalian penduduk.	Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu berupa pelatihan keterampilan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, penguatan akses permodalan (LPD, koperasi desa).	Integrasi Penguatan Ketahanan Keluarga yang mencakup aspek sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan ketahanan budaya.	Penguatan sistem data keluarga berbasis desa/banjar yaitu pemutakhiran DTKS keluarga, integrasi dengan program KS.	Konsolidasi capaian Pengendalian Penduduk, KB, dan Keluarga Sejahtera yaitu evaluasi periodik, replikasi praktik baik.
		Penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KB dan Kesehatan Reproduksi di mana prioritasnya adalah di desa dengan TFR (Total Fertility Rate) dan <i>unmet need</i> KB tinggi.	Penguatan peran PKK, kader Posyandu, dan kelompok perempuan dalam pemberdayaan keluarga.	penguatan ketahanan pangan keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pangan lokal.	Implementasi model desa/banjar ramah keluarga dengan <i>piloting</i> di beberapa desa adat.	Penguatan peran desa adat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan keluarga.
		Peningkatan cakupan pelayanan KB yang berkualitas dan menjangkau daerah terpencil.	Pelaksanaan Pendidikan Keluarga Berbasis Nilai Budaya Bali melalui penguatan nilai luhur dalam pola asuh anak dan keharmonisan keluarga.	Penguatan literasi keuangan keluarga melalui pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga, perencanaan keuangan keluarga.	Penguatan inovasi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi berupa <i>mobile clinic</i> KB, pelayanan KB terpadu di desa adat.	Penguatan ekosistem kebijakan ramah keluarga melalui regulasi daerah, peraturan desa adat, insentif desa ramah keluarga.
		Penguatan peran keluarga dalam pembangunan karakter anak melalui forum <i>parenting</i> .	Pelaksanaan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia.	Peningkatan cakupan pelayanan KB berkualitas yang ramah perempuan, berbasis desa/banjar.	Pelibatan pemuda desa dalam program ketahanan keluarga dan penguatan peran remaja dalam edukasi kesehatan reproduksi.	Penyiapan generasi muda berdaya, berakarakter, dan sehat sebagai wujud keberhasilan pembangunan keluarga berkelanjutan
		Pembentukan Forum Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.	Penguatan pemantauan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk berupa integrasi dengan sistem informasi kependudukan	Penguatan pelibatan laki-laki dalam pembangunan keluarga berupa pembentukan forum ayah hebat, ayah peduli keluarga.		
	Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat miskin	Pemutakhiran DTKS dan penguatan integrasi data kesejahteraan sosial.	Penguatan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan bagi kelompok miskin.	penguatan model pemberdayaan komunitas, pengembangan wirausaha sosial.	Integrasi program pemberdayaan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi).	konsolidasi ekosistem pemberdayaan masyarakat miskin → <i>from protection to empowerment</i> .
		Pemetaan dan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia terlanjar, anak terlanjar, dan kelompok rentan.	Penguatan perlindungan sosial adaptif, bantuan sosial berbasis kebutuhan khusus.	Perluasan cakupan program jaminan sosial bagi pekerja informal miskin.	Penguatan skema bantuan sosial produktif.	Penguatan sistem perlindungan sosial yang berbasis siklus kehidupan.
		Fasilitasi kelompok usaha bersama (KUBE), pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin.	Penguatan layanan berbasis komunitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.	Penguatan program rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat.	Penguatan kolaborasi dengan komunitas dalam rehabilitasi sosial.	Penguatan rehabilitasi sosial berbasis desa/kelurahan ramah disabilitas dan kelompok rentan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat miskin di kawasan rawan bencana.	Peningkatan ketangguhan masyarakat miskin melalui pelatihan pengurangan risiko bencana.	Penguatan ketangguhan ekonomi pasca bencana bagi kelompok miskin.	Penguatan model penghidupan berkelanjutan di kawasan rawan bencana.	Penguatan sistem pemulihan ekonomi masyarakat miskin pascabencana.
		Revitalisasi TMP sebagai wahana edukasi nilai-nilai kepahlawanan bagi masyarakat.	Penguatan peran TMP sebagai pusat kegiatan sosial dan kebangsaan.	Penyelenggaraan <i>event</i> dan kegiatan sosial kemasyarakatan di TMP.	Penguatan jejaring kemitraan pengelolaan TMP.	TMP sebagai pusat edukasi kebangsaan dan pemberdayaan sosial.
	Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran	Melaksanakan sosialisasi informasi program transmigrasi berbasis desa dan komunitas.	Meningkatkan kualitas materi promosi dan testimoni keberhasilan transmigrasi.	Memperkuat peran tokoh masyarakat dan alumni transmigrasi sebagai duta informasi transmigrasi.	Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk penguatan motivasi dan kesiapan calon transmigran.	Membangun jejaring komunitas transmigran dan memperluas diseminasi kisah sukses transmigrasi.
	Sasaran 6: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di tingkat kabupaten dan desa.	Meningkatkan kapasitas SDM, perangkat daerah, dan masyarakat dalam penerapan prinsip kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.	Mengembangkan sistem data gender dan anak yang terintegrasi dan berbasis pemanfaatan untuk perencanaan responsif gender dan anak.	Memperluas layanan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat serta memperkuat jaringan layanan rujukan.	Mendorong pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam seluruh kebijakan, program pembangunan daerah, dan penguatan budaya ramah perempuan dan anak.
Tujuan 2 : Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan budaya daerah	Sasaran 7: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah	Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pertanian Kabupaten Bangli.	Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pertanian Kabupaten Bangli.	Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pertanian Kabupaten Bangli.	Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pertanian Kabupaten Bangli.	Implementasi Rencana Induk Pengembangan Pertanian Kabupaten Bangli.
		Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian: irigasi, jalan usaha tani, embung, alat dan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui optimalisasi pekarangan pangan lestari	Pemantauan pemanfaatan dan evaluasi implementasi LP2B Kabupaten Bangli	Pemantauan pemanfaatan dan evaluasi implementasi LP2B Kabupaten Bangli	Pemantauan pemanfaatan dan evaluasi implementasi LP2B Kabupaten Bangli

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		mesin pertanian (alsintan), infrastruktur pengendalian bencana pertanian.	dan pengembangan pangan lokal berbasis budaya.			
		Penguatan sistem pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yaitu pengendalian OPT, mitigasi kekeringan, bencana iklim.	Peningkatan penerapan teknologi produksi pertanian yaitu berupa pupuk organik, benih unggul, dan <i>smart farming</i> skala UMKM.	Penguatan kelembagaan petani dan koperasi tani yaitu melalui kelembagaan ekonomi petani berbasis desa adat.	Penguatan digitalisasi pertanian berupa aplikasi pemasaran online, e-commerce produk pertanian Bangli.	Konsolidasi klaster pertanian unggulan Bangli melalui peningkatan skala ekonomi petani.
		Penguatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui percepatan eliminasi penyakit hewan menular strategis.	Penguatan pengelolaan perikanan budidaya melalui sistem budidaya ramah lingkungan, penguatan kelembagaan pembudidaya ikan.	Pengembangan model agribisnis dan agroindustri berbasis desa.	Penguatan sistem peringatan dini bencana pertanian berbasis teknologi informasi.	Penguatan ekosistem inovasi pertanian berupa kerja sama dengan perguruan tinggi, inkubator bisnis pertanian.
		Pemantauan pemanfaatan dan evaluasi implementasi LP2B Kabupaten Bangli	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yaitu berupa diversifikasi produk olahan ikan, penguatan akses pasar.	Pengembangan <i>branding</i> produk pertanian lokal melalui sertifikasi organik, Indikasi Geografis (IG), dan sertifikasi mutu.	Integrasi sistem informasi keamanan pangan yaitu penguatan <i>traceability</i> produk pangan Bangli.	Penguatan sistem jaminan mutu dan sertifikasi produk melalui peningkatan daya saing di pasar nasional dan global.
			Penguatan pengawasan keamanan pangan melalui penguatan kapasitas pelaku usaha pangan lokal, pelatihan keamanan pangan komunitas.	Penguatan rantai pasok dan akses pasar yaitu dengan cara kerja sama dengan BUMD, kemitraan dengan pelaku pariwisata dan UMKM.	Penguatan penyuluhan pertanian berbasis digital → e-learning bagi petani dan penyuluh.	Penguatan resiliensi sistem pangan lokal guna menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar global
				penguatan akses pembiayaan pertanian melalui sinergi dengan perbankan, LPD, dana desa.	Peningkatan kemitraan agribisnis melalui penguatan jejaring pasar nasional dan ekspor.	
	Sasaran 8: Meningkatnya daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM	Percepatan legalisasi koperasi, penataan badan hukum.	Peningkatan kompetensi pengelola dan anggota koperasi.	Penguatan <i>branding</i> , sertifikasi mutu, dan kemasan produk.	Penguatan kemitraan UMKM–koperasi–BUMD–swasta.	100% koperasi aktif berstatus legal dan sehat.
		Percepatan dan simplifikasi perizinan koperasi.	Penguatan manajemen, tata kelola, dan perlindungan koperasi.	Digitalisasi sistem pelayanan koperasi dan simpan pinjam.	Fasilitasi koperasi masuk rantai pasok regional/nasional.	Penguatan sistem <i>early warning system</i> pengawasan koperasi.
		Pemetaan koperasi aktif dan sehat.	Penguatan kapasitas manajemen, inovasi produk, dan akses pemasaran UMKM.	Pelatihan literasi digital, <i>green skills</i> , dan <i>soft skills</i> .	Pelatihan wirausaha baru dan inovasi kewirausahaan.	Konsolidasi UMKM berorientasi ekspor dan pariwisata berkelanjutan.
		Pemutakhiran profil pasar kerja daerah dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja.	Penguatan pelatihan vokasi berbasis klaster ekonomi unggulan Bangli.	Pengembangan <i>job matching</i> berbasis digital.	Penguatan jejaring kerja sama hubungan industrial lintas sektor.	Penguatan <i>lifelong learning system</i> bagi tenaga kerja.
		Pelatihan dasar berbasis kebutuhan pasar lokal.	Fasilitasi penempatan tenaga kerja lokal, kerja sama antar daerah.	Penguatan fasilitasi perjanjian kerja bersama (PKB) dan perlindungan pekerja.	Pengembangan kerja sama penempatan kerja antar daerah dan luar negeri.	Kelembagaan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
		Pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan UMKM desa/kecamatan.	Penguatan dialog tripartit, pelatihan pengelolaan hubungan industrial di UMKM.			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal	Percepatan proses perizinan usaha berbasis OSS, simplifikasi pendaftaran UMK.	Penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan Bangli (kerajinan, olahan pangan, herbal, pakaian adat, furniture, agroindustri).	Optimalisasi pengisian SIINas untuk data industri Bangli.	Fasilitasi keikutsertaan UMKM/IKM dalam pameran regional/nasional/internasional .	Evaluasi dan penguatan klaster industri Bangli berbasis potensi lokal.
		Penataan izin industri lokal, pendataan industri potensial berbasis desa/banjar.	Penguatan kampanye "Bangga Buatan Bangli", fasilitasi UMKM dan IKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.	Pengembangan <i>platform e-commerce</i> lokal (<i>marketplace</i> kabupaten), penguatan logistik dan rantai pasok produk lokal.	Percepatan sertifikasi produk, pelatihan bagi pelaku usaha.	Konsolidasi <i>branding</i> produk unggulan Bangli untuk pasar global.
		Perbaikan dan pengembangan pasar tradisional, pasar desa, dan pasar lelang komoditas.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha tentang SNI, sertifikasi halal, label produk.	Penguatan kemitraan UMKM/IKM dengan pelaku pariwisata (hotel, restoran, villa, spa).	Penguatan sinergi pemasaran produk lokal di pasar pariwisata dan desa wisata.	Penguatan digitalisasi distribusi dan pemasaran produk Bangli.
		Penguatan monitoring harga dan distribusi barang kebutuhan pokok (bapokting).	Pelatihan ekspor, fasilitasi produk Bangli untuk pasar ekspor (kerajinan, makanan olahan).	Digitalisasi pemantauan harga bapokting, penguatan cadangan pangan daerah.	Integrasi SIINas dengan sistem informasi pemasaran daerah.	Penguatan peran LPKSM (lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat).
	Sasaran 10: Meningkatnya layanan investasi	Penguatan regulasi daerah yang ramah investasi, simplifikasi prosedur perizinan.	Penguatan kapasitas SDM pelayanan investasi, pelatihan pelayanan prima.	Penguatan pelayanan investasi berbasis digital (end-to-end OSS, e-Tracking).	Penguatan insentif investasi berbasis potensi lokal dan dampak ekonomi.	Penguatan kebijakan investasi hijau dan berkelanjutan.
		Pengembangan dashboard data investasi daerah, integrasi data OSS dengan kabupaten.	Penyusunan rencana pengembangan kawasan investasi tematik (pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, energi baru terbarukan).	Fasilitasi penguatan kemitraan investasi lokal (koperasi, UMKM, bumdes dengan investor).	Penguatan <i>one stop service</i> untuk investasi prioritas.	Penguatan pelayanan investasi berbasis budaya pelayanan yang prima.
		Pelayanan OSS RBA di Mal Pelayanan Publik (MPP) atau di Dinas PMPTSP.	Penguatan pengawasan investasi berbasis risiko.	Pengembangan e-catalog investasi daerah, penguatan promosi digital.	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan investasi.	Penguatan koordinasi pengawasan investasi lintas OPD.
		Pemetaan pelaksanaan investasi eksisting, identifikasi permasalahan.	Penyelenggaraan forum investasi daerah, penguatan kemitraan dengan pelaku usaha dan diaspora Bangli.	Penguatan sistem <i>early warning system</i> investasi bermasalah.	Promosi investasi berbasis kawasan (desa wisata, agropolitan, kawasan industri kecil menengah).	Pemanfaatan data untuk pengembangan strategi investasi jangka panjang.
		Penyusunan paket informasi investasi berbasis potensi unggulan Bangli.	Integrasi sistem data investasi dengan perencanaan pembangunan daerah.	Penguatan analisis big data untuk mendukung kebijakan investasi.	Pengembangan <i>dashboard</i> daya saing investasi bangli.	
	Sasaran 11: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Penyusunan <i>masterplan pengembangan destinasi</i> pariwisata unggulan; revitalisasi infrastruktur dasar destinasi; penataan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan destinasi.	Pengembangan atraksi wisata baru berbasis budaya & alam; fasilitasi <i>community-based tourism</i> (desa wisata).	Integrasi paket wisata tematik dengan produk ekonomi kreatif lokal; pengembangan event pariwisata berkelas regional.	Penguatan pengelolaan destinasi berbasis <i>smart tourism</i> ; peningkatan standar layanan wisata berbasis CHSE (<i>Clean, Health, Safety, Environment</i>).	Konsolidasi & sertifikasi destinasi unggulan Bangli untuk pasar global; penguatan positioning Bangli sebagai destinasi pariwisata budaya & alam berkelanjutan.
		Penyusunan <i>strategi branding dan positioning</i> pariwisata Bangli; pengembangan media promosi offline & digital berbasis potensi lokal.	Peluncuran kampanye digital terintegrasi "Discover Bangli"; penguatan partisipasi Bangli dalam pameran & event nasional.	Penguatan kerja sama B2B (Business to Business) dengan pelaku travel nasional & regional; integrasi platform	Pemasaran digital berbasis data (<i>big data tourism marketing</i>); peningkatan kerja	Pemasaran <i>niche market</i> (pariwisata spiritual, wellness, petualangan, ekonomi kreatif).

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
				pemasaran pariwisata & ekonomi kreatif.	sama dengan OTA (<i>Online Travel Agent</i>).	
		Pemetaan potensi ekonomi kreatif kabupaten; identifikasi potensi HKI pada produk ekonomi kreatif lokal.	Fasilitasi proses pendaftaran HKI produk kreatif; pengembangan produk kreatif berbasis budaya.	Pembentukan <i>creative hub</i> atau <i>creative space</i> untuk kolaborasi pelaku ekonomi kreatif.	Penguatan jejaring pasar produk ekonomi kreatif, baik domestik maupun ekspor.	Penguatan ekosistem inovasi ekonomi kreatif berbasis kolaborasi multi pihak (akademisi, pelaku industri, pemerintah, komunitas).
		Pelatihan dasar SDM pariwisata (<i>hospitality, guiding, customer experience</i>); penguatan komunitas ekonomi kreatif.	Pelatihan lanjutan di bidang <i>digital marketing, product development, storytelling</i> wisata & kreatif.	Pelatihan <i>entrepreneurship</i> kreatif; penguatan <i>leadership</i> pelaku industri kreatif.	Program <i>train the trainer</i> bagi SDM lokal agar dapat melatih pelaku usaha lainnya secara mandiri.	Peningkatan kompetensi SDM untuk menghadapi tren global → sustainability, digitalisasi, dan <i>personalized experience</i> .
	Sasaran 12: Meningkatnya pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal	Inventarisasi dan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan di seluruh desa adat; penyusunan <i>road map</i> pemajuan budaya Bangli.	Pemberdayaan desa adat sebagai pelaku utama pemajuan budaya; penguatan komunitas pelestari budaya.	Integrasi pemajuan budaya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; penguatan produk budaya lokal.	Promosi budaya Bangli di tingkat nasional dan internasional; penguatan diplomasi budaya.	Konsolidasi ekosistem pemajuan budaya Bangli; penguatan regulasi daerah terkait pelestarian budaya.
		Pemetaan & revitalisasi seni tradisional yang mulai langka; penguatan sanggar seni.	Pelatihan pelaku seni muda; regenerasi pelaku seni langka; festival kesenian tradisional tingkat kabupaten.	Pengembangan paket pertunjukan seni tradisional untuk mendukung desa wisata.	Partisipasi seni tradisional Bangli dalam <i>event</i> budaya tingkat nasional/internasional.	Penjaminan keberlanjutan pengembangan kesenian tradisional melalui kolaborasi lintas generasi.
		Dokumentasi sejarah lokal; penguatan pengajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah.	Penerbitan buku sejarah lokal Bangli; pelibatan generasi muda dalam program pelestarian sejarah.	Penguatan museum daerah dan rumah sejarah sebagai pusat edukasi sejarah.	Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan peneliti untuk pengayaan pengetahuan sejarah Bangli.	Penguatan pengarusutamaan sejarah lokal dalam kurikulum sekolah dan program publik.
		Pemutakhiran data cagar budaya; identifikasi cagar budaya yang memerlukan intervensi prioritas.	Pelaksanaan kegiatan konservasi fisik dan non-fisik pada cagar budaya prioritas.	Digitalisasi data cagar budaya; penguatan fungsi edukasi cagar budaya.	Pengembangan cagar budaya sebagai destinasi edukasi dan pariwisata berbasis budaya.	Penetapan standar pengelolaan berkelanjutan cagar budaya di Bangli.
	Tujuan 3 : Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan	Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Penyusunan baseline data kualitas udara, air, dan tanah; pemetaan sumber pencemar.	Implementasi pengendalian sumber pencemar prioritas.	Penerapan teknologi pengendalian pencemaran air dan udara.	Monitoring capaian RPPLH.
						Evaluasi dan perencanaan siklus baru RPPLH.
		Inventarisasi pelaku usaha penghasil limbah B3; penyusunan rencana pengendalian limbah B3.	Penguatan pengawasan pengelolaan B3 oleh pelaku usaha.	Penguatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3.	Penguatan kolaborasi pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.	Konsolidasi pengendalian lintas sektor.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Pemetaan kawasan penting KEHATI; penyusunan rencana pengelolaan.	Implementasi rencana pengelolaan kawasan KEHATI; peningkatan partisipasi masyarakat.	Pengembangan ekowisata berbasis KEHATI.	Penerapan sistem pelaporan limbah B3 berbasis <i>online</i> .	Penguatan pengelolaan limbah B3 berbasis <i>circular economy</i> .
		Penataan data perizinan lingkungan; penguatan pengawasan berbasis risiko.	Peningkatan efektivitas pengawasan izin PPLH; pelibatan pengawasan partisipatif.	Optimalisasi sistem informasi perizinan dan pengawasan lingkungan.	Kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan KEHATI.	Konsolidasi jejaring pengelolaan KEHATI yang berkelanjutan.
		Penyusunan kriteria penghargaan lingkungan bagi masyarakat.	Pemberian penghargaan kepada masyarakat/komunitas pro-lingkungan.	Penguatan jejaring komunitas penerima penghargaan lingkungan.	Optimalisasi pengawasan terpadu dan penguatan sanksi administratif.	Penerapan sistem audit lingkungan periodik.
		Penguatan sistem pengaduan lingkungan yang transparan dan mudah diakses.	Penguatan pengurangan sampah dari sumber; peningkatan TPS 3R.	Penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penguatan ekonomi sirkular.	Penguatan peran pelaku dunia usaha dalam penghargaan lingkungan.	Konsolidasi program penghargaan berkelanjutan.
		Peningkatan kapasitas layanan pengelolaan sampah; penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di desa.	Penyempurnaan sistem pengaduan; penguatan respons pengaduan.	Peningkatan kualitas layanan pengaduan; transparansi penanganan kasus.	Penguatan TPA terpadu berwawasan lingkungan; pengurangan residu sampah.	Penerapan Kabupaten Bangli sebagai kabupaten menuju <i>zero waste</i> .
					Optimalisasi pengawasan berbasis pengaduan masyarakat.	Pelibatan masyarakat sebagai pengawas lingkungan aktif.
	Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bangli.	Peningkatan kapasitas BPBD dan perangkat daerah terkait dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.	Integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan.	Penguatan manajemen logistik bencana berbasis kabupaten dan kecamatan.	Evaluasi Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Kontinjensi.
		Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana untuk jenis bencana prioritas (gempa, erupsi, banjir, longsor, kekeringan).	Pelatihan dan simulasi kebencanaan di desa/kelurahan rawan bencana.	Penguatan peran desa adat dan komunitas dalam mitigasi bencana.	Penguatan sistem pemulihan dini (<i>early recovery</i>) pasca bencana.	Penguatan budaya sadar bencana melalui pendidikan kebencanaan di sekolah dan masyarakat.
		Penguatan sistem peringatan dini (EWS) di kawasan rawan bencana.	Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bangli.	Pengembangan desa tangguh bencana di wilayah prioritas.	Pemantapan mekanisme pendanaan kontinjensi untuk bencana.	Pemantapan desa tangguh bencana sebagai model pembelajaran.
		Penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana.	Penyusunan rencana evakuasi berbasis masyarakat.	Penyediaan infrastruktur pendukung PRB, seperti jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara (TES).	Pengembangan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, lembaga sosial, dan perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana.	Penguatan monitoring, evaluasi, dan pembelajaran PRB secara berkelanjutan.
						Penguatan peran Forum PRB Kabupaten sebagai forum multi pihak dalam pengurangan risiko bencana.
	Sasaran 15: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian layak, serta layanan	Penyusunan master plan pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan permukiman.	Peningkatan kapasitas dan cakupan layanan sistem penyediaan air minum.	Peningkatan kualitas layanan air minum dengan target mendekati universal access.	Integrasi pengelolaan infrastruktur dasar dalam sistem tata kelola perkotaan dan permukiman.	Konsolidasi sistem layanan air minum, air limbah, persampahan yang berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.	Penyusunan baseline data kondisi layanan air minum, air limbah, persampahan, jalan, PSU, dan permukiman kumuh.	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan ramah lingkungan.	Peningkatan cakupan layanan air limbah dan persampahan untuk mewujudkan pengurangan dampak lingkungan.	Pemantapan penyediaan perumahan layak dan terjangkau berbasis kolaborasi dengan sektor swasta.	Konsolidasi akses perumahan layak → penyempurnaan kebijakan subsidi, fasilitasi, dan kemitraan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
		Penyusunan rencana pengurangan kawasan kumuh secara terintegrasi.	Peningkatan cakupan layanan persampahan regional.	Peningkatan kapasitas dan kualitas PSU di kawasan permukiman.	Pemantapan pengurangan kawasan kumuh menuju zero slum area.	Pemantapan PSU yang berkualitas dan terintegrasi di seluruh kawasan permukiman.
		Penyusunan kebijakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya berbasis green building.	Penanganan kawasan permukiman kumuh secara terintegrasi (fisik, sosial, ekonomi).	Pengembangan kawasan perumahan baru berbasis tata ruang yang berkelanjutan dan inklusif.	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem air limbah, air minum, dan persampahan secara mandiri dan berkelanjutan.	Penguatan ketahanan permukiman menghadapi bencana, perubahan iklim, dan dinamika sosial.
		Penyusunan rencana penguatan kapasitas jasa konstruksi dan penataan ruang.	Peningkatan kualitas jaringan jalan kabupaten/kota dan jalan lingkungan.	Pemantapan penanganan kawasan kumuh dengan target penurunan luasan kawasan kumuh secara signifikan.	Penyempurnaan tata ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.	Konsolidasi peran jasa konstruksi lokal yang berkualitas dan kompetitif.
			Penataan bangunan gedung dan lingkungan yang mendukung kualitas hidup.	Penguatan sistem sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi jasa konstruksi dan pengembang perumahan.		
			Penguatan kapasitas SDM dan pelaku jasa konstruksi.	Penguatan sinergi pembangunan infrastruktur antar wilayah (kawasan perbatasan, kawasan prioritas).		
			Penataan ruang yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan perubahan iklim.			
		Penyusunan rencana induk transportasi daerah yang mencakup darat dan pelayaran.	Peningkatan kualitas infrastruktur lalu lintas (rambu, marka, traffic light, fasilitas pejalan kaki, fasilitas difabel).	Pengembangan layanan angkutan umum berbasis aplikasi; penguatan sistem integrasi moda transportasi.	Perluasan jaringan layanan angkutan umum hingga ke wilayah perdesaan.	Konsolidasi ekosistem layanan transportasi darat dan pelayaran yang berorientasi pada pelayanan publik.
		Penguatan regulasi, SOP, dan standar layanan transportasi.	Peningkatan aksesibilitas layanan angkutan umum di wilayah strategis dan daerah terpencil.	Penguatan manajemen lalu lintas berbasis teknologi informasi (smart transportation).	Penguatan konektivitas antar kecamatan dan antar kabupaten/kota.	Pemantapan layanan transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan (pengurangan emisi, green transport).
		Pemetaan kebutuhan pengembangan layanan LLAJ dan pelayaran yang berbasis kebutuhan masyarakat.	Peningkatan fasilitas pelabuhan rakyat	Optimalisasi layanan pelayaran berbasis kebutuhan masyarakat (penumpang dan logistik).	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengembangan layanan pelayaran yang	Penguatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Sasaran 16: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik	Penyusunan roadmap pengembangan angkutan umum massal yang terjangkau dan ramah lingkungan.	Pelaksanaan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.	Peningkatan kualitas SDM pelayaran rakyat dan operator pelabuhan.	mendukung perdagangan antar pulau/daerah.	pengembangan sistem transportasi daerah.
		Pemutakhiran data pendaftaran penduduk; percepatan perekaman dan penerbitan KTP-el, KIA, dan dokumen dasar penduduk.	Pelayanan jemput bola untuk daerah sulit dijangkau; layanan inklusif bagi kelompok rentan (disabilitas, lansia, masyarakat adat).	Integrasi data penduduk dengan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial.	Penguatan pengawasan dan pengendalian standar keselamatan pelayaran.	Pemantapan indikator kualitas layanan transportasi dan penguatan sistem pengawasan publik.
		Percepatan kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian; penyederhanaan proses layanan.	Inovasi layanan pencatatan sipil berbasis desa/banjar.	Layanan pencatatan sipil terintegrasi dengan sistem layanan desa/banjar.	Peningkatan layanan pencatatan sipil berbasis elektronik.	Penjaminan kualitas layanan prima pencatatan sipil untuk seluruh masyarakat.
		Penguatan infrastruktur <i>data base</i> administrasi dan kependudukan dan konektivitas antar layanan.	Penguatan keamanan dan akurasi data kependudukan; pengembangan <i>dashboard</i> monitoring layanan.	Penguatan interoperabilitas data antar perangkat daerah dan instansi vertikal.	Penguatan layanan satu data kependudukan; penguatan sistem pelaporan digital.	Optimalisasi pemanfaatan data administrasi dan kependudukan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.
		Penyusunan <i>base line</i> data profil kependudukan kabupaten.	Penyusunan analisis profil kependudukan untuk mendukung perencanaan daerah.	Pemanfaatan profil kependudukan untuk pengambilan kebijakan berbasis data.	Integrasi profil kependudukan dalam <i>dashboard</i> pembangunan daerah.	Konsolidasi pemanfaatan profil kependudukan sebagai instrumen utama perencanaan berbasis data.
		<i>Update</i> dan penyesuaian data desa; penataan batas desa; penyusunan dokumen profil desa.	Penguatan integrasi perencanaan pembangunan desa dan pembangunan desa adat.	Penguatan integrasi perencanaan pembangunan desa dan pembangunan desa adat.	Finalisasi penataan dan konsolidasi sistem data desa untuk mendukung perencanaan daerah.	Konsolidasi tata kelola desa dan desa adat yang harmonis dan partisipatif.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Penyusunan potensi kerja sama antar desa dan antardaerah.	Implementasi kerja sama antar desa di bidang ekonomi, pelayanan dasar, dan pengelolaan sumber daya.	Implementasi kerja sama antar desa di bidang ekonomi, pelayanan dasar, dan pengelolaan sumber daya.	Penguatan kerja sama desa dalam pengembangan kawasan perdesaan.	Penguatan jejaring kerja sama desa sebagai kekuatan ekonomi dan sosial lokal.
		Penguatan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.	Implementasi <i>e-government</i> di tingkat desa; penguatan layanan publik berbasis digital.	Implementasi <i>e-government</i> di tingkat desa; penguatan layanan publik berbasis digital.	Penguatan pengawasan partisipatif dan akuntabilitas pemerintahan desa.	Penguatan sistem layanan publik desa yang terintegrasi dengan layanan daerah.
		Pendataan dan penguatan kelembagaan desa adat dan lembaga kemasyarakatan; penguatan kapasitas pengurus.	Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan usaha desa.	Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan usaha desa.	Penguatan kolaborasi antara desa dinas, desa adat, dan lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan desa mandiri.	Konsolidasi peran lembaga kemasyarakatan dan desa adat dalam membangun ketahanan sosial dan budaya desa.
		Penyusunan strategi komunikasi publik terpadu; penguatan kanal-kanal komunikasi resmi Pemkab Bangli.	Peningkatan kualitas konten dan jangkauan komunikasi publik; penguatan kapasitas SDM pengelola informasi.	Integrasi komunikasi publik lintas OPD; penguatan manajemen krisis komunikasi.	Penguatan pengelolaan media sosial resmi pemerintah; peningkatan transparansi informasi publik.	Konsolidasi strategi komunikasi publik yang berkelanjutan dan responsif.
		Pemetaan dan integrasi awal aplikasi layanan publik; penguatan infrastruktur TIK dasar.	Pengembangan aplikasi layanan publik terintegrasi (portal layanan publik Bangli); penguatan interoperabilitas antar aplikasi.	Penyempurnaan integrasi layanan publik berbasis digital; penguatan ekosistem <i>e-government</i> .	Penguatan keamanan aplikasi dan jaringan; penguatan sistem disaster recovery dan business continuity.	Pemantapan layanan publik terintegrasi berbasis digital sebagai wajah layanan pemerintahan Kabupaten Bangli.
		Penyusunan roadmap penguatan statistik sektoral; penguatan forum satu data daerah.	Implementasi sistem statistik sektoral berbasis dashboard; pelatihan pengelolaan statistik sektoral bagi OPD.	Optimalisasi pemanfaatan data statistik sektoral dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.	Penguatan integrasi data sektoral dengan sistem satu data nasional.	Konsolidasi ekosistem statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan digunakan aktif dalam kebijakan publik.
		Penyusunan kebijakan pengamanan informasi daerah; audit awal keamanan sistem informasi.	Penguatan pengamanan data dan komunikasi internal pemerintah; implementasi sistem pengamanan informasi berbasis enkripsi.	Penguatan budaya keamanan informasi di seluruh OPD; penguatan kapasitas SDM persandian.	Penguatan sistem pemantauan keamanan informasi secara real-time; penguatan kolaborasi dengan lembaga keamanan siber nasional.	Penerapan standar keamanan informasi berkelas nasional; pemantapan sistem pengamanan informasi berkelanjutan.
		Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan arsip dinamis dan statis; pemetaan kondisi arsip OPD.	Pelatihan SDM pengelola arsip di seluruh OPD; penataan dan klasifikasi arsip sesuai standar kearsipan.	Pengembangan sistem pengelolaan arsip elektronik (<i>e-arsip</i>) terintegrasi.	Penguatan kelembagaan kearsipan di tingkat kabupaten; penguatan monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip OPD.	Konsolidasi pengelolaan arsip elektronik sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
		Inventarisasi dan identifikasi arsip statis dan arsip vital daerah; penyusunan rencana perlindungan arsip.	Implementasi perlindungan fisik dan digitalisasi arsip vital dan arsip statis prioritas.	Percepatan digitalisasi arsip vital dan arsip statis; penguatan sistem backup dan keamanan data arsip.	Penyempurnaan sistem pengamanan arsip digital dan fisik; penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga kearsipan nasional.	Penguatan program pelestarian arsip daerah sebagai warisan budaya dan memori kolektif.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Penyusunan prosedur standar perizinan penggunaan arsip oleh pihak internal dan eksternal.	Implementasi sistem perizinan penggunaan arsip berbasis prosedur standar dan transparan.	Penerapan layanan perizinan penggunaan arsip berbasis digital; peningkatan transparansi layanan arsip.	Pemanfaatan arsip untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.	Penguatan budaya keterbukaan dan akuntabilitas melalui pemanfaatan arsip yang transparan dan terkelola.
		Penyusunan dan penyempurnaan regulasi, SOP, serta sistem pengendalian internal pemerintahan; penguatan budaya kerja ASN yang berintegritas dan melayani.	Penguatan kapasitas ASN di bidang manajemen pemerintahan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik; penerapan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi.	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terintegrasi; penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan open data dan sistem pengawasan digital.	Penguatan kolaborasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan (provinsi-kabupaten-desa); penguatan peran partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.	Konsolidasi budaya kerja berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas; pemantapan sistem manajemen pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing.
		Penguatan koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan prioritas daerah; penguatan perencanaan berbasis data dan <i>evidence-based policy</i> .	Optimalisasi proses perencanaan dan pengendalian program pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan forum koordinasi pembangunan daerah.	Integrasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah berbasis digital; peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan.	Penguatan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.	Konsolidasi ekosistem pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif; penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi rakyat.
		Penyempurnaan regulasi internal DPRD (tatib, kode etik, peraturan tata kerja alat kelengkapan DPRD).	Penguatan kapasitas anggota DPRD dan staf pendukung melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan studi banding.	Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja DPRD (SIKD) berbasis digital.	Penguatan forum konsultasi dan koordinasi DPRD dengan Pemda, lembaga vertikal, dan pemangku kepentingan daerah.	Pemantapan kelembagaan DPRD yang modern, transparan, dan responsif.
		Penguatan sistem administrasi, dokumentasi, dan pengelolaan informasi legislatif.	Penyempurnaan proses legislasi yaitu berupa penguatan perencanaan legislasi daerah (Prolegda) dan kajian akademik.	Penguatan keterbukaan informasi publik terkait kinerja DPRD.	Penguatan peran DPRD dalam pengawasan pelaksanaan program-program strategis daerah.	Penguatan peran DPRD dalam penguatan <i>governance</i> daerah (good governance, clean government).
		Penguatan kapasitas sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan rapat-rapat DPRD.	Peningkatan kualitas proses pengawasan melalui penguatan metode dan instrumen pengawasan kinerja Pemda.	Peningkatan efektivitas pengelolaan aspirasi masyarakat (reses dan hearing).	Penguatan peran DPRD dalam mendorong partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.	Optimalisasi dukungan sekretariat DPRD sebagai pusat layanan penunjang kinerja DPRD yang profesional.
			Penguatan peran DPRD dalam penganggaran yang responsif terhadap prioritas pembangunan daerah.	Penguatan sistem dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah.		Konsolidasi praktik terbaik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
		Penyusunan dokumen perencanaan berkualitas (RPJMD, RKPD); penguatan <i>satu data pembangunan daerah</i> ; penguatan metodologi perencanaan berbasis <i>evidence-based policy</i> .	Peningkatan kapasitas SDM perencana di seluruh OPD; penguatan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan; optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan.	Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan berbasis digital (e-planning, e-money); penguatan pengukuran kinerja berbasis <i>outcome</i> .	Penguatan analisis dan penyesuaian perencanaan untuk merespons dinamika pembangunan global, nasional, dan lokal; penguatan mekanisme <i>feedback</i> dari	Konsolidasi proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja, berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
					evaluasi ke proses perencanaan.	
		Penguatan forum koordinasi perencanaan (musrenbang, forum perangkat daerah, forum konsultasi publik); penguatan sinergi perencanaan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.	Penyempurnaan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi perencanaan sektoral dan spasial; penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.	Peningkatan kualitas integrasi perencanaan sektoral dengan perencanaan tematik, kewilayahan, dan spasial; penguatan perencanaan kolaboratif dengan desa/masyarakat.	Penguatan model perencanaan inovatif dan partisipatif; penguatan kemitraan strategis untuk mendukung perencanaan daerah.	Konsolidasi kelembagaan koordinasi perencanaan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan; penguatan <i>learning organization</i> dalam perencanaan pembangunan.
		Penyempurnaan regulasi dan SOP pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan terbaru; penguatan pengendalian internal.	Pelatihan dan penguatan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah; implementasi sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi (e-budgeting, e-finance).	Penguatan pelaporan keuangan daerah berbasis akrual; penguatan transparansi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.	Penguatan efisiensi belanja daerah melalui penguatan analisis belanja; penguatan manajemen kas daerah.	Konsolidasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja dan <i>outcome</i> ; penguatan pengelolaan keuangan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.
		Penyusunan/update database BMD; penertiban administrasi BMD; penyempurnaan kebijakan pengelolaan BMD.	Pelatihan pengelolaan BMD; penguatan sistem informasi pengelolaan BMD.	Implementasi sistem inventarisasi BMD berbasis teknologi informasi; penguatan transparansi pengelolaan BMD.	Optimalisasi pemanfaatan BMD untuk mendukung pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah.	Konsolidasi pengelolaan BMD berbasis nilai manfaat dan akuntabilitas publik.
		Penyusunan strategi optimalisasi PAD; pemutakhiran basis data wajib pajak dan retribusi.	Peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah; penguatan sistem pelayanan dan pembayaran pajak daerah berbasis digital.	Pengembangan inovasi sumber-sumber PAD baru; penguatan transparansi pemungutan dan penggunaan PAD.	Penguatan kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga (perbankan, fintech); penguatan pengawasan kepatuhan pajak daerah.	Konsolidasi sistem pengelolaan pendapatan daerah yang berkelanjutan, adil, dan inovatif.
		Penyempurnaan regulasi dan kebijakan kepegawaian berbasis merit system; penyusunan peta jabatan dan peta kompetensi ASN.	Penguatan sistem perencanaan karir ASN berbasis kompetensi; penguatan pengelolaan kinerja ASN.	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis digital yang terintegrasi; penguatan sistem penilaian kinerja berbasis <i>outcome</i> .	Implementasi sistem manajemen talenta ASN; penguatan mekanisme rotasi, mutasi, dan promosi berbasis kompetensi.	Konsolidasi sistem manajemen ASN yang berorientasi kinerja, berbasis merit, dan adaptif terhadap perubahan.
		Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN; pelaksanaan pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS dan pelatihan manajerial dasar bagi ASN.	Pelaksanaan pelatihan teknis berbasis kebutuhan jabatan; pelatihan manajerial tingkat pertama dan tingkat menengah; penguatan kompetensi sosial kultural ASN.	Pelaksanaan program pengembangan kepemimpinan ASN; penguatan budaya kerja kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik.	Pelaksanaan program <i>advanced leadership</i> dan <i>executive development</i> ; penguatan coaching dan mentoring bagi ASN.	Konsolidasi ekosistem pengembangan SDM ASN berkelanjutan; penguatan budaya kerja yang inovatif, responsif, dan berdaya saing global.
		Penyusunan <i>roadmap</i> riset dan pengembangan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.	Peningkatan kapasitas SDM perencana, peneliti, dan pengembang inovasi.	Pemanfaatan hasil riset sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan pembuatan kebijakan publik.	Penguatan kolaborasi <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas) dalam pengembangan inovasi daerah.	Konsolidasi sistem perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN Mendukung Peningkatan POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN, DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Identifikasi potensi riset dan inovasi lokal yang dapat mendukung pembangunan.	Pelaksanaan penelitian prioritas sesuai <i>roadmap</i> pembangunan daerah.	Penguatan mekanisme diseminasi hasil penelitian kepada OPD, dunia usaha, dan masyarakat.	Peningkatan fasilitasi inkubasi inovasi daerah dan pengembangan produk inovatif.	Penguatan keberlanjutan pendanaan riset dan inovasi daerah.
		Penguatan kelembagaan litbang daerah dan penguatan SDM peneliti daerah.	Penguatan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan komunitas inovasi.	Penyusunan model-model inovasi yang dapat direplikasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Penguatan penghargaan dan insentif bagi inovator daerah.	Pemantapan ekosistem riset dan inovasi daerah yang adaptif, responsif terhadap dinamika global, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
		Penyusunan <i>road map</i> pengawasan terpadu; penguatan perencanaan pengawasan tahunan.	Penguatan pengawasan berbasis risiko di seluruh tingkatan pemerintahan.	Pengembangan dashboard pengawasan terpadu.	Penguatan budaya pengawasan sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan.	Konsolidasi sistem pengawasan berbasis digital dan kolaboratif.
		Penyusunan pedoman teknis pengawasan; pelatihan SDM pengawasan.	Penguatan pengawasan keuangan, kinerja, dan kepatuhan.	Penguatan kolaborasi pengawasan lintas sektor (Inspektorat, OPD, kecamatan, desa).	Pemantapan mekanisme umpan balik pengawasan untuk perbaikan kinerja OPD dan pemerintahan desa.	Pemantapan pengawasan partisipatif masyarakat.
		Penguatan sistem pelaporan dan pengendalian internal.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan pemerintahan desa.	Penguatan pengawasan di kawasan transmigrasi berbasis komunitas.	Penguatan sinergi pengawasan antar pemerintah kabupaten dan provinsi.	Pemantapan pengawasan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.
		Penyempurnaan SOP pelayanan publik berbasis pengawasan.				Optimalisasi pengawasan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
		Pelibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.				
		Penguatan koordinasi pengawasan ketertiban umum.				
		Penguatan sistem pelaporan urusan pemerintahan umum.				
		Penyusunan standar pengawasan pemerintahan desa.				
		Penyusunan sistem pengawasan pelaksanaan program transmigrasi.				
		Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.	Peningkatan kapasitas Satpol PP dan aparaturnya terkait melalui pelatihan teknis dan peningkatan profesionalisme.	Penguatan forum-forum komunikasi masyarakat (FKDM, FKPM, FKUB) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.	Penguatan sistem <i>early warning system</i> dan respons cepat terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.	Konsolidasi ekosistem ketenteraman dan ketertiban umum yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis budaya lokal.
	Sasaran 17: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM					

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI				
		TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI EKONOMI BANGLI BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MENDUKUNG PENINGKATAN POTENSI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DAN EKONOMI DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU.	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL DALAM BANGLI ERA BARU	PENGUATAN PONDASI TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR YANG OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAERAH DALAM BANGLI ERA BARU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
		Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan aparat keamanan (Satpol PP, Polri, TNI).	Penguatan peran desa adat dan lembaga masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.	Pelaksanaan kampanye dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya tertib masyarakat.	Peningkatan kapasitas deteksi dini dan penanganan dini potensi konflik sosial.	Pemantapan peran Satpol PP, lembaga adat, dan masyarakat sebagai garda terdepan ketenteraman dan ketertiban umum.
		Identifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam ketertiban umum.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum (<i>command center</i> , sistem CCTV, patroli rutin).	Peningkatan kerja sama dengan lembaga adat dalam penanganan pelanggaran ketertiban dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.	Penguatan mekanisme resolusi konflik berbasis kolaborasi multi pihak.	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, pelaporan, dan penanganan gangguan ketertiban umum.
						Peningkatan indeks rasa aman dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan.
		Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi Pancasila dan karakter kebangsaan di berbagai kelompok masyarakat.	Penguatan jejaring penggerak pendidikan Pancasila dan karakter kebangsaan.	Integrasi pendidikan Pancasila dalam berbagai sektor pembangunan.	Penguatan peran masyarakat dalam memasyarakatkan Pancasila.	Konsolidasi jejaring penggerak Pancasila dan karakter kebangsaan.
		Pelaksanaan pendidikan politik yang inklusif dan berbasis etika untuk pemilih pemula, perempuan, pemuda.	Pelibatan aktif partai politik dan lembaga pendidikan dalam penguatan budaya politik yang sehat.	Penguatan peran media massa dan media sosial dalam penguatan budaya politik beretika.	Peningkatan peran aktif masyarakat sipil dalam pengawasan proses demokrasi.	Pemantapan sistem pendidikan politik yang berkesinambungan.
		Pemutakhiran database Ormas; penguatan kapasitas pengurus Ormas dalam penguatan wawasan kebangsaan.	Peningkatan kapasitas Ormas dalam berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.	Peningkatan sinergi Ormas dengan pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	Penguatan kolaborasi Ormas dalam penguatan wawasan kebangsaan dan pembangunan daerah.	Konsolidasi peran Ormas sebagai mitra pembangunan daerah.
		Penyusunan strategi penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya berbasis potensi lokal.	Penguatan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam memperkuat ketahanan masyarakat.	Penguatan ketahanan masyarakat menghadapi tantangan globalisasi.	Peningkatan daya saing sosial dan budaya lokal.	Pemantapan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.
		Penyusunan sistem <i>early warning system</i> ; penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat.	Penguatan koordinasi lintas OPD dan stakeholder dalam deteksi dini dan penanganan konflik sosial.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kewaspadaan nasional.	Optimalisasi sinergi pusat-daerah dalam kewaspadaan nasional.	Konsolidasi sistem kewaspadaan nasional dan pemeliharaan harmoni sosial.

Sumber: Pemetaan Strategi Pembangunan Kabupaten Bangli

3.5. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangli disusun sebagai pedoman dalam mengimplementasikan strategi pembangunan jangka menengah guna mencapai visi dan misi daerah. Kebijakan ini menjadi dasar dalam perumusan program prioritas serta langkah-langkah operasional dalam berbagai sektor pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan harus memperhatikan kondisi daerah, potensi unggulan, tantangan pembangunan, serta sinergi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangli disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan serta perencanaan program dan kegiatan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada sub bab ini, akan diuraikan berbagai kebijakan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bangli dalam lima tahun ke depan, yang mencakup penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan ini juga akan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan global dan nasional, sehingga Kabupaten Bangli dapat terus berkembang sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangli dapat dilihat pada **Tabel 3.8** berikut.

Tabel 3.8.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangli

MISI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
Misi 1: Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.	Memastikan keterjangkauan sekolah di daerah yang kekurangan akses pendidikan.	
	Memastikan setiap sekolah memiliki akses internet cepat .	
	Mengembangkan skema subsidi dan beasiswa untuk memastikan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.	
	Memastikan rekrutmen guru berbasis meritokrasi dan kebutuhan daerah.	
	Memastikan setiap guru memiliki jaminan sosial, kesehatan, dan fasilitas pendukung kesejahteraan.	
	Pengembangan Pojok Literasi di ruang-ruang publik	
	Peningkatan Digitalisasi, Perlindungan, dan Penyebarluasan Secara Elektronik Koleksi Literasi Daerah dan nasional	
Misi 2: Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau	Mendorong pembangunan fasilitas kesehatan di daerah yang belum memiliki akses kesehatan yang memadai.	
	Meningkatkan fasilitas kesehatan dengan peralatan medis modern guna meningkatkan kualitas layanan.	
	Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN dan memperluas subsidi kesehatan bagi masyarakat miskin.	
	Memastikan adanya aplikasi kesehatan berbasis teknologi untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat.	
	Memastikan imunisasi dasar lengkap dan layanan kesehatan ibu-anak di seluruh daerah.	
	Memastikan proses rekrutmen tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan spesialisasi yang diperlukan.	
	Memastikan adanya fasilitas pendidikan kesehatan guna meningkatkan jumlah tenaga medis.	
	Mendorong forum komunikasi dan edukasi keluarga dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya.	
Misi 3: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri	Meningkatkan produksi tanaman pangan alternatif selain beras	
	Memastikan integrasi pertanian dengan peternakan dan perikanan guna meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi petani.	
	Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.	
	Memastikan adanya kemitraan antara petani, koperasi, dan sektor swasta dalam pemasaran produk diversifikasi pertanian.	
	Memastikan tersedianya alat dan mesin pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi produksi.	
	Meningkatkan akses internet dan konektivitas digital di wilayah pertanian.	
	Memastikan kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan lembaga riset dalam pengembangan teknologi pertanian.	
	Meningkatkan edukasi petani dalam manajemen usaha tani dan literasi keuangan.	
	Meningkatkan kapasitas kelompok tani dan koperasi pertanian dalam pemasaran dan rantai pasok.	

MISI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
	Meningkatkan akses petani terhadap kredit usaha tani, asuransi pertanian dan pembiayaan berbasis komunitas.	
	Meningkatkan penguatan subak dan sistem irigasi tradisional guna mendukung ketahanan pangan berbasis lokal.	
	Menetapkan rencana tata ruang yang akomodatif terhadap perlindungan lahan-lahan pertanian	
	Mengurangi beban pengeluaran lahan pertanian seperti insentif pajak	
	Mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan industri dan UMKM.	
	Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, industri, dan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja baru.	
	Mengembangkan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola koperasi guna meningkatkan profesionalisme.	
	Mendorong koperasi untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan layanan kepada anggota.	
	Memastikan UMKM memiliki standarisasi produk dan sertifikasi guna meningkatkan kepercayaan pasar.	
	Mendorong adopsi teknologi produksi modern guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.	
	Meningkatkan pendanaan dan subsidi bagi UMKM yang ingin menembus pasar ekspor.	
	Meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif.	
	Memastikan pengembangan desa kreatif dan klaster ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.	
	Mendorong modernisasi industri kreatif tradisional dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi.	
	Memastikan adanya standarisasi dan sertifikasi produk lokal sesuai regulasi nasional dan internasional.	
	Mengembangkan gudang logistik dan fasilitas distribusi guna mempercepat perdagangan produk lokal.	
	Meningkatkan kapasitas promosi digital untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor.	
	Memastikan adanya insentif bagi investasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.	
Misi 4: Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu yang inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Memastikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja informal.	
	Mengembangkan sistem data sosial yang terintegrasi dengan layanan nasional.	
	Memfasilitasi Pelaksanaan Transmigrasi	
	Memperkuat Informasi dan Edukasi tentang Program Transmigrasi	
	Memperkuat Kemitraan dan Kolaborasi Lintas Pihak	
	Mendorong representasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan daerah.	
	Memastikan adanya bantuan hukum dan advokasi bagi kelompok rentan.	
	Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung akses setara terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan.	
Misi 5: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif	Memastikan peningkatan kualitas jalan dan aksesibilitas menuju destinasi wisata.	
	Mendorong penggunaan teknologi hijau dalam pengelolaan kawasan wisata.	
	Mengembangkan ekowisata yang mengutamakan konservasi lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal.	

MISI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
	Mendorong standarisasi pengelolaan wisata agar tetap lestari dan berkelanjutan.	
	Meningkatkan strategi branding wisata Bangli melalui media sosial dan media global.	
	Memastikan adanya digitalisasi dalam layanan wisata guna meningkatkan kenyamanan pengunjung.	
	Mengembangkan paket wisata terpadu melalui kemitraan dengan pelaku industri wisata.	
	Memastikan penyelenggaraan event dan festival wisata yang menarik wisatawan.	
	Memastikan adanya pelatihan hospitality dan customer service berbasis budaya Bali.	
	Mengembangkan program pelatihan manajemen usaha bagi pelaku wisata.	
	Memastikan pengembangan desa kreatif dan klaster ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.	
	Mendorong modernisasi industri kreatif tradisional dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi.	
	Menyelenggarakan pelatihan bisnis kreatif dan digitalisasi bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.	
	Meningkatkan pemanfaatan e-commerce dan platform digital dalam pemasaran produk kreatif.	
	Memastikan dukungan ekspor bagi pelaku ekonomi kreatif lokal.	
	Mengembangkan pedoman tata kelola desa adat dalam sektor pariwisata berbasis kearifan lokal	
	Mendorong kerja sama antara desa adat dan pelaku industri pariwisata dalam memasarkan wisata berbasis budaya.	
	Memastikan adanya harmonisasi antara peraturan desa adat dengan kebijakan daerah dalam menjaga keberlanjutan adat dan budaya.	
	Mengoptimalkan pengelolaan aset budaya desa adat agar tetap terjaga dari alih fungsi yang tidak sesuai dengan nilai adat.	
	Mengembangkan arsip digital tentang tradisi, bahasa, dan seni budaya khas Bangli.	
	Memastikan adanya pencatatan dan dokumentasi terhadap prosesi adat dan keagamaan yang masih hidup di desa adat.	
	Mendorong pembuatan konten digital berbasis budaya guna memperkenalkan adat kepada generasi muda.	
Misi 6: Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana	Memastikan adanya kebijakan pengurangan emisi dan limbah	
	Memastikan adanya infrastruktur pengolahan limbah domestik dan industri yang memenuhi standar lingkungan.	
	Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan daur ulang sampah.	
	Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.	
	Meningkatkan penghijauan di kawasan perkotaan dan Pariwisata.	
	Memastikan adanya pengawasan terhadap limbah domestik dan non domestik di sungai, mata air, dan danau.	
	Mengembangkan awig-awig dalam pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.	
	Menjaga kelestarian Biodiversitas dan Geodiversitas di Kawasan Batur UNESCO Global Geopark	
	Memastikan pembangunan infrastruktur publik yang tahan terhadap gempa, banjir, dan longsor.	
	Mengembangkan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir.	
	Mengembangkan sistem deteksi dini berbasis teknologi untuk berbagai jenis bencana.	
	Mengembangkan program edukasi bencana di sekolah dan komunitas	

MISI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
Misi 7: Mewujudkan Good Governance	Meningkatkan Pencegahan Bencana Berbasis Pengelolaan Tata Ruang	
	Memastikan penggunaan sistem digital dalam layanan administrasi kependudukan.	
	Mendorong integrasi layanan kependudukan dengan sektor lain untuk meningkatkan efisiensi.	
	Memastikan adanya layanan jemput bola bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.	
	Mengembangkan layanan kependudukan berbasis “One Stop Service” guna mempercepat proses administrasi.	
	Mengembangkan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda dan kelompok perempuan di desa.	
	Mengembangkan produk unggulan desa guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal.	
	Mengembangkan pasar desa sebagai pusat ekonomi berbasis lokal.	
	Mengembangkan pelayanan publik berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.	
	Meningkatkan integrasi data dan sistem antar instansi pemerintahan.	
	Mengoptimalkan sistem arsip elektronik yang terintegrasi dengan instansi terkait.	
	Memastikan adanya sistem pengawasan internal yang transparan dan berbasis teknologi.	
	Mengembangkan sistem anggaran berbasis kinerja guna memastikan efektivitas program pembangunan.	
	Menyediakan Rencana Kerja secara Transparan pada masing-masing Alat Kelengkapan DPRD	
	Memastikan integrasi antar dokumen perencanaan	
	Memastikan perencanaan anggaran daerah (APBD) berbasis kinerja dengan indikator capaian yang jelas dan terukur.	
	Memastikan pelatihan dan pendidikan ASN berbasis kompetensi dilakukan secara berkala.	
Misi 8: Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum	Meningkatkan peran Satpol PP, pecalang, dan desa adat dalam menjaga ketertiban umum.	
	Mengembangkan program edukasi hukum bagi masyarakat guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.	
	Mendorong peran tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi dalam menyosialisasikan pentingnya demokrasi yang inklusif.	
	Meningkatkan peran musyawarah desa dalam menyerap dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal.	
Misi 9: Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi	Memastikan pengembangan kawasan permukiman selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).	
	Memastikan pemeliharaan jalan secara rutin untuk meningkatkan kualitas transportasi.	
	Mengembangkan jalan alternatif dan kantong-kantong parkir untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan.	
	Mengembangkan sistem drainase ramah lingkungan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir perkotaan.	

MISI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
	Memastikan tersedianya akses air bersih yang merata di semua kawasan permukiman.	
	Mendorong pengelolaan air terpadu guna menjaga kualitas air tanah dan mengurangi eksploitasi sumber daya air.	
	Mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga berbasis komunitas untuk mengurangi pencemaran lingkungan.	
	Meningkatkan Kawasan Hunian Layak Huni	
	Meningkatkan aksesibilitas transportasi di daerah pedesaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.	
	Memastikan tersedianya jalur transportasi yang menghubungkan kawasan strategis di Bangli.	
	Memastikan tersedianya layanan transportasi publik yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat.	

Sumber: Pemetaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangli

3.6. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program prioritas daerah merupakan rangkaian kebijakan strategis yang difokuskan pada sektor-sektor utama guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bangli secara efektif dan berkelanjutan. Program ini disusun berdasarkan visi, misi, strategi, serta arah kebijakan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, tantangan pembangunan, serta potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bangli.

Program prioritas daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, program yang dirancang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Dalam sub bab ini, akan diuraikan berbagai program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan Kabupaten Bangli dalam lima tahun ke depan. Program ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli dapat dilihat pada **Tabel 3.9** berikut.

Tabel 3.9.
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Visi: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BANGLI “BANGLI JENGAH”: pesaJE NGAYAH					
Misi 1 : Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.	Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangli Unggul dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
				Tingkat Kemiskinan	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
				Indeks Kabupaten Layak Anak	
		Sasaran 1: Meningkatnya Akses Pendidikan, Peran Pemuda dalam Olahraga, dan Literasi Masyarakat		Rata-rata Lama Sekolah	
				Harapan lama sekolah	
				Peningkatan Prestasi Olah Raga	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Sekolah	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
			Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Daya Saing kepemudaan dan wirausaha muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Perolehan Medali (Tingkat Perolehan Medali)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno yang Dilestarikan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
				Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
Misi 2 : Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
			meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)			
			Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		
		Misi 4 : Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu dan inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender		Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat miskin		Persentase PMKS yang tertangani	
					Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang berperan aktif dalam Penyelenggara kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti				Program Rehabilitasi Sosial		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase KK Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana			Program Penanganan Bencana			
Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kemandirian masvarakat transmigran				Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Trasmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Program Pembangunan Kawasan Trasmigrasi
		Sasaran 6: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif di tingkat Desa	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase tersedianya data gender pada perangkat daerah	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase lembaga PHA yang berperan aktif dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapat pendampingan komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak
Misi 3 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri	Tujuan 2 : Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan budaya daerah			Pertumbuhan Ekonomi	
				Gini Rasio	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
				PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	
		Sasaran 7: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah		Persentase pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Infrastruktur Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Penyuluhan Pertanian
		Sasaran 8: Meningkatnya daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	
				Meningkatnya koperasi yang berkualitas	
				Rasio Kewirausahaan	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan perbankan	Program Pengembangan UMKM
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase penyusunan dokumen rencana tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase kepersertaan Jaminan sosial ketenaga kerjaan pada badan usaha	Program Hubungan Industrial
		Sasaran 9: Meningkatnya nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal		Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	
				Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Terbinanya IKM Sektor Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Dipantau	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Sasaran 10: Meningkatnya layanan investasi		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang tepat waktu dan benar	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Misi 5 : Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif		Sasaran 11:Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Cakupan Promosi Pariwisata yang dilakukan	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Sasaran 12: Meningkatkan pelestarian budaya, seni, adat dan tradisi lokal		Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Misi 6 : Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan	Tujuan 3 : Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	
				Indeks Risiko Bencana (IRB)	
				Indeks Infrastruktur Kabupaten	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana		Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan		Peningkatan Indeks Kualitas Air	
				Peningkatan Indeks Kualitas Udara	
				Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
				Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Misi 9 : Mempercepat Pembangunan dan		Sasaran 15: Meningkatnya akses masyarakat terhadap		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi		infrastruktur berkualitas, hunian layak, serta layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.	dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi terampil	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman
			Perbaikan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi Danau	Persentase Kelengkapan Penyebrangan Sungai dan danau yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Pengelolaan Pelayaran
	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola			Indeks Reformasi Birokrasi	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Misi 7 : Mewujudkan Good Governance	Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Sasaran 16: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik			
				Indeks Daya Saing Daerah	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
				NILAI AKIP	
				Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
				Meningkatkannya Kualitas Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				Meningkatkan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Meningkatnya kualitas penataan Desa	Program Penataan Desa
				Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
				Layanan Pemerintah (SPLP), Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (IKAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Program Pengelolaan Arsip
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Program Perizinan Penggunaan Arsip
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Perda dan Ranperda Tahun berkenaan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia, bidang Infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya Kuailtas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan dan realisasi belanja daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
			meningkatkan stabilitas keamanan lokal	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa	cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Indeks Harmoni Daerah	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Misi 8 : Memperkokoh Kehidupan		Sasaran 17: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Demokrasi dan Budaya Hukum		berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Sumber : Hasil Pemetaan Program Prioritas Daerah

Tabel 3.10.
Target Kinerja dan Pagu Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2026-2030

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
Visi: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BANGLI “BANGLI JENGAH”: pesaJE NGaYaH														
Misi 1 : Memastikan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.	Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangli Unggul dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,11		74,81		75,52		76,22		77,10	
				Tingkat Kemiskinan	3,98- 4,23		4,02		3,82		3,61		3,20-3,45	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,34		93,71		94,08		94,45		94,92	
				Indeks Kabupaten Layak Anak	580 (PRATAMA)		610 (MADYA)		650 (MADYA)		680 (MADYA)		710 (NINDYA)	
			Rata-rata Lama Sekolah	7,946		8,21		8,48		8,74		9,01		
			Harapan lama sekolah	12,634		12,68		12,72		12,77		12,81		
			Peningkatan Prestasi Olah Raga	52.00		60.00		64.00		70.00		72.00		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	61,71		61,77		61,83		61,89		61,95		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dassar (APS)	88,00	75.807.252.833,00	88,00	82.185.750.000,00	88,00	84.804.300.000,00	89,00	86.384.700.000,00	89,00	88.023.250.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	97,00	21.887.000,00	97,00	24.076.000,00	97,00	26.483.000,00	97,00	29.131.000,00	97,00	32.045.000,00	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	100,00	325.270.000,00	100,00	357.797.000,00	100,00	393.577.000,00	100,00	432.935.000,00	100,00	476.228.800,00	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100,00	15.000.000,00	100,00	16.500.000,00	100,00	18.150.000,00	100,00	19.965.000,00	100,00	21.962.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	58,00	20.200.000,00	58,00	22.220.000,00	58,00	24.442.800,00	58,00	26.887.000,00	59,00	29.576.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Daya Saing kepemudaan dan wirausaha muda	100,00	276.417.700,00	100,00	208.893.000,00	100,00	213.893.000,00	100,00	218.893.000,00	100,00	223.893.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Perolehan Medali (Tingkat Perolehan Medali)	15,00	64.046.697.500,00	17,00	50.071.262.000,00	19,00	40.000.000.000,00	21,00	40.000.000.000,00	23,00	45.000.000.000,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kepramukaan	100,00	151.000.000,00	100,00	158.550.000,00	100,00	174.405.000,00	100,00	209.633.000,00	100,00	230.597.000,00	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan	20,00	16.670.000,00	20,00	132.017.000,00	20,00	138.618.000,00	20,00	145.550.000,00	20,00	152.830.000,00	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Naskah Kuno yang Dilestarikan	0,22	10.885.000,00	0,22	8.008.000,00	0,22	8.410.000,00	0,22	8.830.000,00	0,22	9.275.000,00
Misi 2 : Memantapkan pelayanan kesehatan yang unggul, adil, merata, dan terjangkau		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,92		75,23		75,54		75,85		76,16	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting	7,7	70.732.861.964,00	7,4	98.502.569.000,00	7,1	103.340.771.000,00	6,8	111.012.190.000,00	6,5	127.597.624.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	92,00	820.695.500,00	95,00	1.142.541.000,00	98,00	1.091.795.000,00	100,00	1.200.974.000,00	100,00	1.321.071.000,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	97,00	458.790.000,00	100,00	555.136.000,00	100,00	610.650.000,00	100,00	671.715.000,00	100,00	738.886.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	96,00	285.089.600,00	98,00	360.012.000,00	100,00	396.014.000,00	100,00	435.615.000,00	100,00	479.176.000,00
		Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,4		68,4		69,4		70,3		71,2	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,10	707.968.000,00	2,10	779.379.000,00	2,10	818.348.000,00	2,10	859.266.000,00	2,10	972.229.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	65,97	2.212.216.000,00	67,29	2.445.085.000,00	68,64	2.567.339.000,00	70,01	2.695.706.000,00	71,41	2.830.491.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)	30,00	1.390.920.000,00	45,00	1.450.784.000,00	60,00	1.700.000.000,00	75,00	1.700.000.000,00	100,00	1.700.000.000,00
		Misi 4 : Memperkuat Sistem kesejahteraan Sosial Terpadu dan inklusif, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat miskin		Persentase PMKS yang tertangani	40,40		40,50		40,60		40,70		40,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang berperan aktif dalam Penyelenggara kesejahteraan Sosial	60,00	78.800.000,00	75,00	514.200.000,00	85,00	725.580.000,00	100,00	838.200.000,00	100,00	952.000.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	100,00	201.420.000,00	100,00	576.000.000,00	100,00	693.000.000,00	100,00	812.000.000,00	100,00	938.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Persentase KK Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100,00	55.220.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	800.000.000,00	100,00	900.000.000,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1,00	49.870.000,00	1,00	282.600.000,00	1,00	331.650.000,00	1,00	372.100.000,00	1,00	418.550.000,00
		Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kemandirian masyarakat transmigran		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	1,00	5.000.000,00	1,00	26.385.000,00	1,00	27.705.000,00	1,00	29.100.000,00	1,00	30.555.000,00
		Sasaran 6: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,234		0,225		0,217		0,209		0,201	
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,35		64,40		64,45		64,50		64,55	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	100,00	35.510.000,00	100,00	369.100.000,00	100,00	417.520.000,00	100,00	497.082.000,00	100,00	593.836.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	34.021.500,00	100,00	275.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	400.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif di tingkat Desa	11,00	-	25,00	286.000.000,00	50,00	400.000.000,00	75,00	457.200.000,00	100,00	514.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase tersedianya data gender pada perangkat daerah	0,70	51.010.000,00	0,80	250.000.000,00	0,90	300.000.000,00	1,00	350.000.000,00	1,00	400.000.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga PHA yang berperan aktif dalam Pemenuhan HakAnak (PHA)	100,00	40.008.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	550.000.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapat pendampingan komprehensif	100,00	71.826.500,00	100,00	650.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	800.000.000,00
Misi 3 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri	Tujuan 2 : Mewujudkan ekonomi Bangli yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan budaya daerah			Pertumbuhan Ekonomi	4,90-5,50		6,38		6,94		7,49		7,50-8,00	
				Gini Rasio	0,290		0,285		0,280		0,275		0,270	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,72		0,70		0,68		0,60		0,58	
				PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	33,69		34,42		35,16		35,93		36,71	
				Persentase pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	32,55		49,27		66,11		83,05		100,00	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
		Sasaran 7: Meningkatnya Daya Saing Pertanian Lokal untuk ketahanan pangan daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77,25		77,50		77,95		77,95		77,95	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Cadangan Pangan	2,70%	250.000.000,00	2,70%	255.000.000,00	2,70%	300.000.000,00	2,70%	330.000.000,00	2,70%	360.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	93.2	17.940.000,00	93.3	267.835.000,00	93.5	294.670.000,00	93.67	324.140.000,00	94	356.280.000,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase jumlah cadangan pangan	100,00	41.760.000,00	100,00	545.129.000,00	100,00	599.642.000,00	100,00	665.960.000,00	100,00	725.567.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	72,00	12.820.000,00	72,50	55.000.000,00	73,00	60.000.000,00	73,50	65.000.000,00	74,00	70.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	603.252 Ton	1.650.000,00	603.37 Ton	52.500.000,00	603.49 Ton	55.125.000,00	603.61 Ton	57.880.000,00	603.73 Ton	60.774.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.309,01 Ton	583.360.200,00	4.321,18 Ton	700.000.000,00	4.333,37 Ton	800.000.000,00	4.346,71 Ton	900.000.000,00	4.347,82 Ton	1.000.000.000,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53.72	281.794.800,00	53.97	462.748.000,00	53.72	555.298.000,00	53.97	666.357.000,00	54.72	799.630.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	22%	965.341.000,00	22,50%	1.633.218.000,00	23%	1.764.878.000,00	23,50%	1.970.122.000,00	24%	2.179.129.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	400 Ha	551.200.000,00	400 Ha	1.210.000.000,00	400 Ha	1.210.000.000,00	400 Ha	1.210.000.000,00	400 Ha	1.210.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100,00	297.460.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	1.146.078.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100,00	7.337.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	80.000.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	20,00	28.013.500,00	20,00	140.000.000,00	20,00	165.000.000,00	20,00	175.000.000,00	20,00	190.000.000,00
		Sasaran 8: Meningkatnya daya saing tenaga kerja, serta kualitas koperasi dan UMKM		Tingkat Produktivitas tenaga kerja	30,48		31,40		32,32		33,24		34,16	
				Meningkatnya koperasi yang berkualitas	71,01		73,11		75,21		77,31		79,41	
				Rasio Kewirausahaan	3,73		3,79		3,85		3,91		3,96	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penyusunan dokumen rencana tenaga kerja	100,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80,1	58.917.500,00	82,01	917.355.000,00	83,59	890.658.000,00	84,91	922.361.000,00	86,04	579.347.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	98,94	52.856.000,00	99,07	76.800.000,00	99,18	87.500.000,00	99,26	98.000.000,00	99,32	120.000.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kepersertaan Jaminan sosial ketenaga kerjaan pada badan usaha	71,67	26.580.000,00	72,49	110.000.000,00	73,30	125.000.000,00	74,11	140.000.000,00	77,29	155.000.000,00
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	0,73	12.435.000,00	0,87	13.678.000,00	0,89	15.046.000,00	0,94	16.550.000,00	1,03	18.206.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8,23	2.910.000,00	10,29	87.862.000,00	12,35	96.648.000,00	14,40	106.313.000,00	16,46	116.944.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	9,01	321.936.000,00	9,90	354.129.000,00	10,99	389.542.000,00	12,35	428.496.000,00	14,08	471.346.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	80,59	195.195.000,00	80,81	319.770.000,00	81,03	351.747.000,00	81,25	386.921.000,00	81,46	425.550.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	5,35	246.687.500,00	5,57	670.000.000,00	5,79	707.500.000,00	6,00	750.000.000,00	6,21	789.500.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan perbankan	26,73	247.124.000,00	27,41	387.500.000,00	28,08	405.000.000,00	28,76	424.500.000,00	29,43	450.000.000,00
		Sasaran 9: Meningkatkan nilai tambah perdagangan dan daya saing industri lokal		Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	10,29		10,38		10,47		10,56		10,65	
				Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	8,66		8,83		9,01		9,18		9,36	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	20,00	2.081.221.100,00	20,00	2.750.000.000,00	0,20	2.750.000.000,00	0,20	2.750.000.000,00	0,20	2.750.000.000,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100,00	7.756.000,00	100,00	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	2,00	30.000.000,00	3,00	40.000.000,00	0,03	40.000.000,00	0,03	50.000.000,00	0,03	30.000.000,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen	57,00	50.638.600,00	63,00	110.000.000,00	0,69	110.000.000,00	0,75	110.000.000,00	0,81	110.000.000,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100,00	56.800.000,00	100,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Terbinanya IKM Sektor Industri	39,00	3.816.120.000,00	42,00	4.850.000.000,00	45,00	4.850.000.000,00	48,00	4.850.000.000,00	51,00	13.850.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Dipantau	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	14,00	250.000.000,00	16,00	250.000.000,00	17,00	250.000.000,00	19,00	250.000.000,00	20,00	250.000.000,00
				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/Kota	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
		Sasaran 10: Meningkatkan layanan investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi	100,00	3.300.000,00	100,00	210.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	180.000.000,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2,00	113.100.000,00	2,00	450.000.000,00	2,00	250.000.000,00	2,00	500.000.000,00	2,00	300.000.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100,00	61.660.000,00	100,00	311.010.000,00	100,00	329.811.000,00	100,00	348.801.000,00	100,00	367.991.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100,00	151.879.400,00	100,00	697.879.000,00	100,00	767.667.000,00	100,00	844.434.000,00	100,00	928.877.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100,00	4.965.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	80.000.000,00	100,00	85.000.000,00
Misi 5 : Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan, Pelestarian Budaya Lokal dan ekonomi Kreatif		Sasaran 11: Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12,15		12,30		12,45		12,60		12,75	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	0,77	25.428.908.850,00	0,78	26.000.000.000,00	0,79	26.000.000.000,00	0,80	26.000.000.000,00	0,81	24.000.000.000,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Cakupan Promosi Pariwisata yang dilakukan	0,78	80.035.000,00	0,79	555.000.000,00	0,80	555.000.000,00	0,81	555.000.000,00	0,82	555.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	5,00	50.000.000,00	5,00	55.000.000,00	5,00	60.000.000,00	5,00	65.000.000,00	5,00	70.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Peningkatan SDM Pariwisata	0,33	423.000.000,00	0,78	423.000.000,00	0,78	423.000.000,00	0,89	423.000.000,00	1,00	423.000.000,00
		Sasaran 12: Meningkatkan pelestarian budaya,		Persentase Pelestarian dan Pengembangan	32,55		49,27		66,11		83,05		100,00	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
		seni, adat dan tradisi lokal		budaya, seni, adat dan tradisi lokal										
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	32,55	13.247.880.000,00	49,27	5.596.000.000,00	66,11	5.756.000.000,00	83,05	5.932.000.000,00	100,00	1.125.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	2,93	5.508.235.000,00	3,20	3.720.000.000,00	3,46	4.080.000.000,00	3,73	4.300.000.000,00	4,00	4.500.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	94,49	117.250.000,00	0,96	300.000.000,00	0,97	330.000.000,00	0,99	360.000.000,00	1,00	396.000.000,00
Misi 6 : Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana	Tujuan 3 : Mewujudkan wilayah Bangli yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan	Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	73,01		73,18		73,35		73,52		73,52	
				Indeks Risiko Bencana (IRB)	114,20		112,40		110,60		108,80		107,00	
				Indeks Infrastruktur Kabupaten	80,87		81,43		82,01		82,53		83,03	
				Peningkatan Indeks Kualitas Air	72,05		72,25		72,45		72,65		72,65	
				Peningkatan Indeks Kualitas Udara	81,39		81,59		81,79		81,99		81,99	
				Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,14		59,21		59,28		59,35		59,35	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	73,01	422.572.500,00	73,18	454.398.000,00	73,35	499.837.000,00	73,52	549.830.000,00	73,52	604.803.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	20,00	174.679.500,00	22,00	507.089.000,00	24,00	657.798.000,00	26,00	823.578.000,00	28,00	1.005.936.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terdata	90,35	1.357.500,00	92,35	6.555.000,00	94,35	7.210.000,00	96,35	7.931.000,00	98,35	8.724.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	100,00	63.740.000,00	100,00	65.244.000,00	100,00	71.768.000,00	100,00	78.945.000,00	100,00	86.839.000,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00	10.001.500,00	100,00	14.498.000,00	100,00	15.948.000,00	100,00	17.542.000,00	100,00	19.296.000,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100,00	700.000,00	100,00	2.923.000,00	100,00	3.215.000,00	100,00	3.536.000,00	100,00	3.890.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Capaian Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota	69,02	1.650.173.698,00	70,02	1.800.000.000,00	71,02	2.000.000.000,00	72,02	2.500.000.000,00	73,02	3.000.000.000,00
		Sasaran 14: Menguatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana		Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di Masyarakat	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100,00	182.950.000,00	100,00	836.000.000,00	100,00	963.000.000,00	100,00	838.500.000,00	100,00	923.600.000,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100,00	193.380.000,00	100,00	594.638.000,00	100,00	754.046.000,00	100,00	929.454.000,00	100,00	1.112.398.000,00
		Sasaran 15: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, hunian layak, serta layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	80,87		81,43		82,01		82,53		83,03	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	35,90%	4.498.507.000,00	36,36%	4.000.000.000,00	36,99%	4.000.000.000,00	37,51	4.000.000.000,00	38,07%	4.000.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	0,96	2.355.400.000,00	0,97	2.500.000.000,00	98,08 %	2.500.000.000,00	0,99	2.500.000.000,00	1,00	2.712.500.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	96,39%	950.001.000,00	96,42%	985.000.000,00	96,43%	1.023.500.000,00	96,44%	1.065.850.000,00	96,45%	1.112.435.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	0,97	1.506.000.000,00	0,98	1.506.000.000,00	0,98	1.506.000.000,00	0,98	1.506.000.000,00	0,98	1.506.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	24,11 %	1.000.000.000,00	26,11 %	1.000.000.000,00	28,11 %	1.000.000.000,00	30,11 %	1.000.000.000,00	32,11 %	1.000.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik dan layak	31,64 %	20.033.000.000,00	33,64 %	2.500.000.000,00	35,64 %	1.500.000.000,00	37,64 %	2.500.000.000,00	39,64 %	1.500.000.000,00
Misi 9 : Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Terintegrasi														

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS												
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	24,11 %	1.000.000.000,00	26,11 %	1.000.000.000,00	28,11 %	1.000.000.000,00	30,11 %	1.000.000.000,00	32,11 %	1.000.000.000,00			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	79,00	24.224.058.053,00	80,00	23.000.000.000,00	81,00	21.000.000.000,00	82,00	24.000.000.000,00	83,00	26.000.000.000,00			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi terampil	20,00	48.290.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	99,65	533.000.000,00	99,66	750.000.000,00	99,67	1.000.000.000,00	99,68	1.000.000.000,00	99,69	1.000.000.000,00			
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	420.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	385.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00			
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase LuasKawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	83,43	5.958.000.000,00	80,95	5.000.000.000,00	78,35	5.000.000.000,00	75,61	5.000.000.000,00	72,73	5.000.000.000,00			
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100,00	525.000.000,00	100,00	700.000.000,00	100,00	385.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00			
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00	1.655.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	0,20	2.547.583.500,00	0,20	4.152.140.000,00	0,20	4.160.140.000,00	0,20	4.168.140.000,00	0,20	4.156.140.000,00			
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kelengkapan Penyebrangan Sungai dan danau yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	0,18	40.360.000,00	0,19	53.000.000,00	0,20	56.000.000,00	0,21	59.000.000,00	0,22	62.000.000,00			
			Misi 7 : Mewujudkan Good Governance	Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Sasaran 16: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	75,5		75,95		76,5		76,95		77,5	
							Indeks Daya Saing Daerah	3,53		3,63		3,73		3,83		3,93	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,45					85,47		85,49		85,52		85,54				
	NILAI AKIP	63,25					64,30		65,35		66,40		67,50				
	Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	3,4611					3,4611		3,4611		4,1771		4,1771				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	96,00				248.205.000,00	96,05	680.000.000,00	96,07	680.000.000,00	96,09	680.000.000,00	96,11	680.000.000,00			
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90,00				59.460.000,00	90,05	480.000.000,00	90,07	480.000.000,00	90,09	480.000.000,00	90,11	480.000.000,00			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Meningkatnya data kependudukan yang akurat	93,00	183.780.000,00	93,05	430.000.000,00	93,07	430.000.000,00	93,09	430.000.000,00	93,11	430.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase kualitas Penyusunan Profil Kependudukan	100,00	17.500.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	2,01	700.000,00	2,15	10.021.000,00	2,15	11.024.000,00	2,15	12.127.000,00	2,15	13.340.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	100,00	15.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	35.000.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4,41	1.917.736.500,00	4,55	2.208.300.000,00	4,55	2.349.205.000,00	4,55	2.516.667.000,00	4,55	2.710.167.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	15,54	857.786.100,00	15,96	875.000.000,00	15,96	900.000.000,00	16,24	900.000.000,00	32,08	1.300.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	85,41	1.530.980.000,00	86,41	2.114.167.000,00	87,41	2.325.000.000,00	88,41	2.558.000.000,00	89,41	2.813.800.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	35.960.000,00	3,00	1.000.000.000,00	3,00	1.000.000.000,00	3,00	1.000.000.000,00	3,00	1.000.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,40	5.100.000,00	2,40	5.610.000,00	2,45	17.787.000,00	2,45	19.565.000,00	2,50	21.522.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indek Keamanan Informasi (IKAMI)	307,00	38.600.000,00	310,00	107.439.000,00	312,00	118.183.000,00	315,00	130.001.000,00	318,00	142.701.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	1,00	92.939.500,00	1,00	92.232.000,00	1,00	96.845.000,00	1,00	101.688.000,00	1,00	106.775.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1,00	1.310.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan	1,00	24.920.600.500,00	1,00	26.691.900.000,00	1,00	28.176.495.000,00	1,00	30.735.310.000,00	1,00	30.000.000.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,00	310.440.000,00	1,00	987.982.000,00	1,00	1.037.382.000,00	1,00	1.089.251.000,00	1,00	1.143.713.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Penetapan Perda dan Ranperda Tahun berkenaan	tepat waktu (100)	531.430.000,00	tepat waktu (100)	7.156.411.000,00	tepat waktu (100)	7.872.053.000,00	tepat waktu (100)	8.659.258.000,00	tepat waktu (100)	9.525.184.000,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100,00	512.360.000,00	100,00	679.000.000,00	100,00	746.900.000,00	100,00	971.590.000,00	100,00	971.590.000,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD	100,00	85.615.000,00	100,00	444.825.000,00	100,00	641.251.200,00	100,00	380.527.900,00	100,00	265.947.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyerapan dan realisasi belanja daerah	95,00	161.928.034.100,00	95,00	196.782.356.000,00	95,00	207.428.920.000,00	95,00	218.713.558.000,00	95,00	230.678.743.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	93,00	242.470.000,00	93,00	549.470.000,00	98,00	604.417.000,00	98,00	664.853.000,00	98,00	731.339.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	33,00	820.976.000,00	50,00	3.387.164.000,00	67,00	3.818.380.000,00	83,00	4.080.219.000,00	90,00	4.575.942.000,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	96,00	193.340.000,00	97,00	632.042.000,00	98,00	695.246.000,00	99,00	764.771.100,00	100,00	841.248.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	0,20	116.000.000,00	0,20	720.110.000,00	0,20	792.122.000,00	0,20	871.334.000,00	0,20	958.467.000,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100,00	307.770.000,00	100,00	861.980.000,00	100,00	868.120.000,00	100,00	869.950.000,00	100,00	871.730.000,00
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100,00	134.510.000,00	100,00	405.000.000,00	100,00	407.000.000,00	100,00	408.000.000,00	100,00	410.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	1,00	573.592.000,00	1,00	1.586.911.000,00	1,00	1.892.968.000,00	1,00	1.987.618.000,00	1,00	2.087.002.000,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,05	288.920.000,00	3,10	815.773.000,00	3,12	856.560.000,00	3,15	899.389.000,00	3,20	944.362.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,00	104.890.000,00	1,00	219.708.000,00	1,00	241.692.000,00	1,00	265.822.000,00	1,00	292.456.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,00	2.828.731.000,00	1,00	4.594.680.000,00	1,00	5.054.157.000,00	1,00	5.559.564.000,00	1,00	6.115.501.000,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	1,00	80.588.000,00	1,00	240.020.000,00	1,00	264.050.000,00	1,00	290.434.000,00	1,00	319.474.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1,00	157.421.500,00	1,00	700.984.000,00	1,00	771.110.000,00	1,00	848.201.000,00	1,00	933.017.000,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	TARGET PROGRAM PRIORITAS									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)
Misi 8 : Memperkokoh Kehidupan Demokrasi dan Budaya Hukum			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,00	65.658.500,00	1,00	178.818.000,00	1,00	196.719.000,00	1,00	216.403.000,00	1,00	238.020.000,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100,00	771.426.221.570,00	100,00	790.175.917.000,00	100,00	819.594.633.000,00	100,00	850.242.842.000,00	100,00	908.858.614.200,00
		Sasaran 17: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Indeks Harmoni Daerah		6,67		6,70		6,75		6,80		6,85
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100,00	1.108.178.000,00	100,00	1.891.290.000,00	100,00	2.080.419.000,00	100,00	2.288.460.000,00	100,00	2.517.306.000,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1,00	950.500.000,00	1,00	990.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.050.000.000,00	1,00	1.100.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	1,00	914.514.932,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	16.315.300.000,00	1,00	20.510.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	1,00	13.450.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	35.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	1,00	125.000.000,00	1,00	140.000.000,00	1,00	145.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	155.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	1,00	117.960.000,00	1,00	220.000.000,00	1,00	230.000.000,00	1,00	240.000.000,00	1,00	245.000.000,00

BAB 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif dan terarah membutuhkan perencanaan program yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Bab ini menguraikan program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2026-2030, yang disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut, program perangkat daerah dalam RPJMD merupakan bagian dari pendekatan teknokratis yang bertujuan untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan pembangunan melalui perencanaan yang berbasis pada analisis kondisi daerah, tantangan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Kabupaten Bangli.

Program perangkat daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 untuk tahun implementasi 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana diatur dalam RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029.
- Penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) untuk memastikan sinergi antar-perangkat daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan.
- Penguatan peran perangkat daerah dalam mendukung target pembangunan daerah, dengan menetapkan indikator kinerja program yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.
- Pemberdayaan potensi unggulan Kabupaten Bangli, terutama di sektor pertanian, pariwisata berbasis alam dan budaya, ekonomi kreatif, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur dasar, guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata.

Bab ini akan menjelaskan secara sistematis program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta strategi implementasi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya program yang dirancang secara strategis, diharapkan pembangunan Kabupaten Bangli dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dalam bab ini akan diuraikan program-program perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing OPD, serta keterkaitannya dengan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun program perangkat daerah Kabupaten Bangli dalam mendukung perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah periode 2025-2029 untuk tahun implementasi 2026-2030 dapat dilihat pada **Tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1.
Rencana Program Perangkat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2030

KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
								TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA									388.023.949.033,00		383.422.124.000		386.470.035.800		397.418.409.000		434.543.444.800		1.989.877.962.633
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					323.549.833.833		332.983.419.000		346.081.737.800		356.989.883.000		389.088.954.800		1.748.693.828.433	
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	247.360.224.000	100	250.377.076.000	100	260.814.785.000	100	270.096.265.000	100	300.505.893.000	500	1.329.154.243.000	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Partisipasi Anak Sekolah	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	88	75.807.252.833,00	88	82.185.750.000	88	84.804.300.000	89	86.384.700.000	89	88.023.250.000	442	417.205.252.833	
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	97	21.887.000	97	24.076.000	97	26.483.000	97	29.131.000	97	32.045.000	97	133.622.000	
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	100	325.270.000,00	100	357.797.000	100	393.577.000	100	432.935.000	100	476.228.800	100	1.985.807.800	
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	19.965.000	100	21.962.000	100	91.577.000	
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	58	20.200.000	58	22.220.000	58	24.442.800	58	26.887.000	59	29.576.000	59	123.325.800	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			%		64.474.115.200		50.438.705.000		40.388.298.000		40.428.526.000		45.454.490.000		241.184.134.200	
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Daya Saing kepemudaan dan wirausaha muda	%	100	276.417.700,00	100	208.893.000	100	213.893.000	100	218.893.000	100	223.893.000	100	1.141.989.700	
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Perolehan Medali (Tingkat Perolehan Medali)	%	15	64.046.697.500	17	50.071.262.000	19	40.000.000.000	21	40.000.000.000	23	45.000.000.000	23	239.117.959.500	
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kepramukaan	%	100	151.000.000	100	158.550.000	100	174.405.000	100	209.633.000	100	230.597.000	100	924.185.000	
DINAS KESEHATAN									121.222.378.564		149.425.596.000		154.468.155.000		162.114.971.000		179.526.466.000		766.757.566.564
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	69.150.490.500	100	69.256.378.000	100	70.282.015.000	100	71.110.217.000	100	72.821.239.000	100	352.620.339.500
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prevalensi Stunting	%	7,7	50.657.312.964	7,4	78.261.529.000	7,1	82.087.681.000	6,8	88.696.450.000	6,5	104.166.094.000	6,5	403.869.066.964
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	92	670.695.500	95	992.541.000	98	1.091.795.000	100	1.200.974.000	100	1.321.071.000	100	5.277.076.500
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	%	97	458.790.000	100	555.136.000	100	610.650.000	100	671.715.000	100	738.886.000	100	3.035.177.000
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	96	285.089.600	98	360.012.000	100	396.014.000	100	435.615.000	100	479.176.000	100	1.955.906.600
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								170.397.609.000		179.572.269.000		189.557.483.000		201.191.123.000		213.634.978.000		954.353.462.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	150.172.060.000	100	159.181.229.000	100	168.304.393.000	100	178.875.383.000	100	190.203.448.000	100	846.736.513.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	20.075.549.000	100	20.241.040.000	100	21.253.090.000	100	22.315.740.000	100	23.431.530.000	100	107.316.949.000
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	92	150.000.000	95	150.000.000							95	300.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								77.890.323.003		58.106.000.000		55.376.000.000		61.306.000.000		62.368.500.000		315.046.823.003
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			%		69.332.323.003		50.556.000.000		48.106.000.000		53.606.000.000		55.668.500.000		277.268.823.003
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100%	14.134.067.950	100,00%	14.200.000.000	100,00%	14.500.000.000	100,00%	16.000.000.000	100,00%	16.850.000.000	100,00%	75.684.067.950
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	35,90%	4.498.507.000	36,36%	4.000.000.000	36,99%	4.000.000.000	37,51%	4.000.000.000	38,07%	4.000.000.000	38,07%	20.498.507.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				masyarakat terhadap irigasi														
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses layanan masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	95,63%	2.355.400.000	96,92%	2.500.000.000	98,08 %	2.500.000.000	99,11%	2.500.000.000	100%	2.712.500.000	100%	12.567.900.000
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	96,39%	950.001.000,00	96,42%	985.000.000,00	96,43%	1.023.500.000,00	96,44%	1.065.850.000,00	96,45%	1.112.435.000,00	96,45%	5.136.786.000,00
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	97,49%	1.506.000.000	97,54%	1.506.000.000	97,59%	1.506.000.000	97,65%	1.506.000.000	97,70%	1.506.000.000	97,70%	7.530.000.000
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	24,11 %	1.000.000.000	26,11 %	1.000.000.000	28,11 %	1.000.000.000	30,11 %	1.000.000.000	32,11 %	1.000.000.000	32,11 %	5.000.000.000
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik dan layak	%	31,64 %	20.033.000.000	33,64 %	2.500.000.000	35,64 %	1.500.000.000	37,64 %	2.500.000.000	39,64 %	1.500.000.000	39,64 %	28.033.000.000
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	24,11 %	1.000.000.000	26,11 %	1.000.000.000	28,11 %	1.000.000.000	30,11 %	1.000.000.000	32,11 %	1.000.000.000	32,11 %	5.000.000.000
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	%	79	24.224.058.053	80	23.000.000.000	81	21.000.000.000	82	24.000.000.000	83	26.000.000.000	83	112.224.058.053
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi terampil	%	20	48.290.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	448.290.000
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	99,65	533.000.000	99,66	750.000.000	99,67	1.000.000.000	99,68	1.000.000.000	99,69	1.000.000.000	99,69	4.283.000.000
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.558.000.000		7.550.000.000		7.270.000.000		7.700.000.000		6.700.000.000		37.778.000.000
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	420.000.000	100	350.000.000	100	385.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.855.000.000
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Persentase LuasKawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	83,43	5.958.000.000	80,95	5.000.000.000	78,35	5.000.000.000	75,61	5.000.000.000	72,73	5.000.000.000	72,73	25.958.000.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perbaikan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%	100	525.000.000	100	700.000.000	100	385.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	2.310.000.000
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatkan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	1.655.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	100	7.655.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								11.992.168.000		13.285.258.000		13.480.783.000		13.875.160.000		14.217.306.000		66.850.675.000
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	10.883.990.000	100	11.393.968.000	100	11.400.364.000	100	11.586.700.000	100	11.700.000.000	100	56.965.022.000
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	1.108.178.000	100	1.891.290.000	100	2.080.419.000	100	2.288.460.000	100	2.517.306.000	100	9.885.653.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN								8.040.296.700		9.130.638.000		9.517.046.000		9.667.954.000		10.035.998.000		46.391.932.700
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	7.663.966.700	100	7.700.000.000	100	7.800.000.000	100	7.900.000.000	100	8.000.000.000	100	39.063.966.700
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	182.950.000	100	836.000.000	100	963.000.000	100	838.500.000	100	923.600.000	100	3.744.050.000
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	193.380.000	100	594.638.000	100	754.046.000	100	929.454.000	100	1.112.398.000	100	3.583.916.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDU NGAN ANAK								6.079.110.000		9.702.900.000		10.717.750.000		11.526.582.000		12.466.386.000		50.492.728.000
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			%		5.846.734.000		7.472.800.000		8.150.230.000		8.622.300.000		9.208.550.000		39.300.614.000
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	1,00	5.461.424.000	1,00	5.500.000.000	1,00	5.700.000.000	1,00	5.800.000.000	1,00	6.000.000.000	100,00	28.461.424.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang berperan aktif dalam Penyelenggara kesejahteraan Sosial	%	60	78.800.000	75	514.200.000	85	725.580.000	100	838.200.000	100	952.000.000	100,00	3.108.780.000
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	%	100	201.420.000	100	576.000.000	100	693.000.000	100	812.000.000	100	938.000.000	100,00	3.220.420.000
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase KK Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	55.220.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100,00	3.055.220.000
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100%	49.870.000	100%	282.600.000	100%	331.650.000	100%	372.100.000	100%	418.550.000	100,00	1.454.770.000
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			%		232.376.000		2.230.100.000		2.567.520.000		2.904.282.000		3.257.836.000		11.192.114.000
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	%	100	35.510.000	100	369.100.000	100	417.520.000	100	497.082.000	100	593.836.000	100	1.913.048.000
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	34.021.500	100	275.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.359.021.500
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif di tingkat Desa	%	11	-	25	286.000.000	50	400.000.000	75	457.200.000	100	514.000.000	100,00	1.657.200.000
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase tersedianya data gender pada perangkat daerah	%	70%	51.010.000	80%	250.000.000	90%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100	1.351.010.000
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase lembaga PHA yang berperan aktif dalam Pemenuhan HakAnak (PHA)	%	100	40.008.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	1.940.008.000
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapat pendampingan komprehensif	%	100	71.826.500	100	650.000.000	100	700.000.000	100	750.000.000	100	800.000.000	100	2.971.826.500

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								33.286.999.498		34.246.903.000		35.971.592.000		37.348.759.000		39.113.625.000		179.967.878.498
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			%		33.286.999.498		34.246.903.000		35.971.592.000		37.348.759.000		39.113.625.000		179.967.878.498
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administarsi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	30.763.774.800	100	31.196.196.000	100	32.515.816.000	100	33.167.397.000	100	34.184.137.000	100	161.827.320.800
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	73,01	422.572.500	73,18	454.398.000	73,35	499.837.000	73,52	549.830.000	73,52	604.803.000	73,52	2.531.440.500
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	%	20,00	174.679.500	22	507.089.000	24	657.798.000	26	823.578.000	28	1.005.936.000	28	3.169.080.500
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terdata	%	90,35	1.357.500	92,35	6.555.000	94,35	7.210.000	96,35	7.931.000	98,35	8.724.000	98,35	31.777.500
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	100	63.740.000	100	65.244.000	100	71.768.000	100	78.945.000	100	86.839.000	100	366.536.000
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pernangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	10.001.500	100	14.498.000	100	15.948.000	100	17.542.000	100	19.296.000	100	77.285.500
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	700.000	100	2.923.000	100	3.215.000	100	3.536.000	100	3.890.000	100	14.264.000
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Capaian Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota	%	69.02	1.650.173.698	70,02	1.800.000.000	71,02	2.000.000.000	72,02	2.500.000.000	73,02	3.000.000.000	73,02	10.950.173.698
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								6.114.247.000		7.320.500.000		7.567.500.000		7.720.500.000		7.967.500.000		36.690.247.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			%		6.114.247.000		7.320.500.000		7.567.500.000		7.720.500.000		7.967.500.000		36.690.247.000
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	5.605.302.000	100	5.700.500.000	100	5.947.500.000	100	6.100.500.000	100	6.347.500.000	100	29.701.302.000
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	96	248.205.000	96,05	680.000.000	96,07	680.000.000	96,09	680.000.000	96,11	680.000.000	96,11	2.968.205.000
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatkan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	90	59.460.000	90,05	480.000.000	90,07	480.000.000	90,09	480.000.000	90,11	480.000.000	90,11	1.979.460.000
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Meningkatnya data kependudukan yang akurat	%	93	183.780.000	93,05	430.000.000	93,07	430.000.000	93,09	430.000.000	93,11	430.000.000	93,11	1.903.780.000
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatkannya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase kualitas Penyusunan Profil Kependudukan	%	100	17.500.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	137.500.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								13.095.762.600		13.939.269.000		14.570.916.000		15.213.766.000		16.261.227.000		73.080.940.600
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			%		8.784.658.600		9.264.021.000		9.485.229.000		9.958.794.000		10.758.507.000		48.251.209.600
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	5.993.436.000	100	6.150.700.000	100	6.200.000.000	100	6.500.000.000	100	6.700.000.000	100	31.544.136.000
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	2,01	700.000	2,15	10.021.000	2,15	11.024.000	2,15	12.127.000	2,15	13.340.000	100	47.212.000
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	125.000.000
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	4,41	1.917.736.500	4,55	2.208.300.000	4,55	2.349.205.000	4,55	2.516.667.000	4,55	2.710.167.000	100	11.702.075.500
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	15,54	857.786.100	15,96	875.000.000	15,96	900.000.000	16,24	900.000.000	32,08	1.300.000.000	100	4.832.786.100
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			%		4.311.104.000		4.675.248.000		5.085.687.000		5.254.972.000		5.502.720.000		24.829.731.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	%	2,1	707.968.000	2,1	779.379.000	2,1	818.348.000	2,1	859.266.000	2,1	972.229.000	2,1	4.137.190.000
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	65,97	2.212.216.000	67,29	2.445.085.000	68,64	2.567.339.000	70,01	2.695.706.000	71,41	2.830.491.000	100	12.750.837.000
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)	%	30	1.390.920.000	45	1.450.784.000	60	1.700.000.000	75	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	7.941.704.000
DINAS PERHUBUNGAN								8.934.147.450		10.671.460.000		10.716.140.000		10.727.140.000		10.718.140.000		51.767.027.450
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			%		8.934.147.450		10.671.460.000		10.716.140.000		10.727.140.000		10.718.140.000		51.767.027.450
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	20,46%	6.346.203.950	20,48%	6.466.320.000	19,69%	6.500.000.000	19,69%	6.500.000.000	19,69%	6.500.000.000	19,69%	32.312.523.950
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya keselamatan pengguna jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	19,97%	2.547.583.500	19,97%	4.152.140.000	20,01%	4.160.140.000	20,05%	4.168.140.000	19,99%	4.156.140.000	19,99%	19.184.143.500
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya keselamatan Penyebrangan sungai dan danau	Persentase Kelengkapan Penyebrangan Sungai dan danau yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	18,15%	40.360.000	18,86%	53.000.000	19,93%	56.000.000	21,00%	59.000.000	22,06%	62.000.000	22,06%	270.360.000
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN								6.527.130.000		8.401.366.000		8.832.130.000		9.275.746.000		9.743.213.000		42.779.585.000
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			%		6.483.430.000		8.288.317.000		8.696.160.000		9.126.180.000		9.578.990.000		42.173.077.000
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	4.916.490.000	100	5.174.150.000	100	5.371.160.000	100	5.568.180.000	100	5.765.190.000	100	26.795.170.000
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	85,41	1.530.980.000	86,41	2.114.167.000	87,41	2.325.000.000	88,41	2.558.000.000	89,41	2.813.800.000	89,41	11.341.947.000
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,0	35.960.000	3,00	1.000.000.000	3,00	1.000.000.000	3,00	1.000.000.000	3,00	1.000.000.000	3,00	4.035.960.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			%		5.100.000		5.610.000		17.787.000		19.565.000		21.522.000		69.584.000
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,40	5.100.000	2,40	5.610.000	2,45	17.787.000	2,45	19.565.000	2,50	21.522.000	2,50	69.584.000
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			%		38.600.000		107.439.000		118.183.000		130.001.000		142.701.000		536.924.000
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indek Keamanan Informasi (IKAMI)	Poin	307	38.600.000	310	107.439.000	312	118.183.000	315	130.001.000	318	142.701.000	318	536.924.000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA								7.044.049.900		8.837.694.000		9.337.441.000		9.818.841.000		10.860.632.200		45.898.658.100
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			%		238.353.500		1.104.155.000		1.103.158.000		1.160.361.000		854.347.000		4.460.374.500
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase penyusunan dokumen rencana tenaga kerja	%	100	100.000.000	0	0	0	-	0	0	0	-	100	100.000.000
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	80,1	58.917.500	82,01	917.355.000	83,59	890.658.000	84,91	922.361.000	86,04	579.347.000	86,04	3.368.638.500
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	98,94	52.856.000	99,07	76.800.000	99,18	87.500.000	99,26	98.000.000	99,32	120.000.000	99,32	435.156.000
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase kepersertaan Jaminan sosial ketenaga kerjaan pada badan usaha	%	71,67	26.580.000	72,49	110.000.000	73,3	125.000.000	74,11	140.000.000	77,29	155.000.000	77,29	556.580.000
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			%		6.805.696.400		7.733.539.000		8.234.283.000		8.658.480.000		10.006.285.200		41.438.283.600
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	5.779.408.900	100	5.900.600.000	100	6.268.800.000	100	6.545.700.000	100	7.734.739.200	100	32.229.248.100
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	0,73	12.435.000	0,87	13.678.000	0,89	15.046.000	0,94	16.550.000	1,03	18.206.000	1,03	75.915.000
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	8,23	2.910.000	10,29	87.862.000	12,35	96.648.000	14,4	106.313.000	16,46	116.944.000	16,46	410.677.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	9,01	321.936.000	9,9	354.129.000	10,99	389.542.000	12,35	428.496.000	14,08	471.346.000	14,08	1.965.449.000
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	80,59	195.195.000	80,81	319.770.000	81,03	351.747.000	81,25	386.921.000	81,46	425.550.000	81,46	1.679.183.000
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	5,35	246.687.500	5,57	670.000.000	5,79	707.500.000	6,00	750.000.000	6,21	789.500.000	6,21	3.163.687.500
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalni Kemitraan perbankan	%	26,73	247.124.000	27,41	387.500.000	28,08	405.000.000	28,76	424.500.000	29,43	450.000.000	29,43	1.914.124.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								6.911.669.400		8.318.889.000		8.462.478.000		9.033.235.000		10.156.070.000		42.882.341.400
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			%		6.911.669.400		8.318.889.000		8.462.478.000		9.033.235.000		10.156.070.000		42.882.341.400
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	6.576.765.000	100	6.600.000.000	100	6.900.000.000	100	7.100.000.000	100	8.294.202.000	100	35.470.967.000
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	%	100	3.300.000	100	210.000.000	100,00	140.000.000	100	160.000.000	100	180.000.000	100	693.300.000
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	2,00	113.100.000	2,00	450.000.000	2,00	250.000.000	2,00	500.000.000	2,00	300.000.000	12	1.613.100.000
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	61.660.000	100	311.010.000	100	329.811.000	100	348.801.000	100	367.991.000	100	1.419.273.000
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	151.879.400	100	697.879.000	100	767.667.000	100	844.434.000	100	928.877.000	100	3.390.736.400
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	4.965.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	294.965.000
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								54.195.629.550		46.049.000.000		46.704.000.000		47.235.000.000		40.769.000.000		234.952.629.550
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			%		19.073.365.000		9.816.000.000		10.366.000.000		10.792.000.000		6.221.000.000		56.268.365.000
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	32,55	13.247.880.000	49,27	5.596.000.000	66,11	5.756.000.000	83,05	5.932.000.000	100	1.125.000.000	100	31.656.880.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	2,93	5.508.235.000	3,2	3.720.000.000	3,46	4.080.000.000	3,73	4.300.000.000	4,00	4.500.000.000	4,00	22.108.235.000
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	94,49	117.250.000	95,87%	300.000.000	97,25%	330.000.000	98,62%	360.000.000	100,00%	396.000.000	100,00%	1.503.250.000
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			%		35.122.264.550		36.233.000.000		36.338.000.000		36.443.000.000		34.548.000.000		178.684.264.550
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	9.140.320.700	100	9.200.000.000	100	9.300.000.000	100	9.400.000.000	100	9.500.000.000	100%	46.540.320.700
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Prosentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	%	77%	25.428.908.850	78%	26.000.000.000	79%	26.000.000.000	80%	26.000.000.000	81%	24.000.000.000	81%	127.428.908.850
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Cakupan Promosi Pariwisata yang dilakukan	%	78%	80.035.000	79%	555.000.000	80%	555.000.000	81%	555.000.000	82%	555.000.000	82%	2.300.035.000
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	25 %	300.000.000
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Prosentase Peningkatan SDM Pariwisata	%	33,33%	423.000.000	78%	423.000.000	77,78%	423.000.000	88,80%	423.000.000	100%	423.000.000	100%	2.115.000.000
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN								30.269.066.750		33.071.530.000		33.771.613.000		34.699.259.000		35.978.817.000		167.790.285.750
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			%		322.520.000		1.122.964.000		1.254.312.000		1.385.100.000		1.511.847.000		5.596.743.000
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Infrastruktur Cadangan Pangan	%	2,70%	250.000.000	2,70%	255.000.000	2,70%	300.000.000	2,70%	330.000.000	2,70%	360.000.000	2,70%	1.495.000.000
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor nilai	93.2	17.940.000	93	267.835.000	93.5	294.670.000	93.67	324.140.000	94	356.280.000	94	1.260.865.000
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan	Persentase jumlah cadangan pangan	%	100	41.760.000	100,00	545.129.000	100,00	599.642.000	100,00	665.960.000	100,00	725.567.000	100,00	2.578.058.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				kerawanan pangan														
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	72	12.820.000	72,5	55.000.000	73	60.000.000	73,5	65.000.000	74	70.000.000	74	262.820.000
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			%		866.805.000		1.215.248.000		1.410.423.000		1.624.237.000		1.860.404.000		6.977.117.000
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	603.252	1.650.000	603.37	52.500.000	603.49	55.125.000	603.61	57.880.000	603.73	60.774.000	603.73	227.929.000
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.309,01	583.360.200	4.321,18	700.000.000	4.333,37	800.000.000	4.346,71	900.000.000	4.347,82	1.000.000.000	4.347,82	3.983.360.200
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/th	53.72	281.794.800	53.97	462.748.000	53.72	555.298.000	53.97	666.357.000	54.72	799.630.000	54.72	2.765.827.800
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			%		29.079.741.750		30.733.318.000		31.106.878.000		31.689.922.000		32.606.566.000		155.216.425.750
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	27.230.390.250	100	27.300.100.000	100	27.407.000.000	100	27.664.800.000	100	27.801.359.000	100	137.403.649.250
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	22%	965.341.000	22,50%	1.633.218.000	23%	1.764.878.000	23,50%	1.970.122.000	24%	2.179.129.000	24%	8.512.688.000
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	400 Ha	551.200.000	400 Ha	1.210.000.000	400 Ha	1.210.000.000	400 Ha	1.210.000.000	400 Ha	1.210.000.000	400 Ha	5.391.200.000
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100,00	297.460.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	1.146.078.000	100	2.943.538.000
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	100	7.337.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	267.337.000
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelompok Tani yang ditangkitkan kapasitasnya	%	20,00	28.013.500	20,00	140.000.000	20,00	165.000.000	20,00	175.000.000	20,00	190.000.000	100	698.013.500
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								12.274.384.000		14.130.000.000		14.280.000.000		14.390.000.000		23.570.000.000		78.644.384.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			%		7.958.264.000		8.780.000.000		8.930.000.000		9.040.000.000		9.220.000.000		43.928.264.000
3	31	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100,00	5.701.848.300	100,00	5.750.000.000	100,00	5.900.000.000	100,00	6.000.000.000	100,00	6.200.000.000	100,00	29.551.848.300
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.000.000
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	20	2.081.221.100	20	2.750.000.000	20%	2.750.000.000	20%	2.750.000.000	20%	2.750.000.000	100,00%	13.081.221.100
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	7.756.000	100	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	287.756.000
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	%	2	30.000.000	3	40.000.000	2,61%	40.000.000	2,84%	50.000.000	2,97%	30.000.000	2,97%	190.000.000
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen	%	57	50.638.600	63	110.000.000	68,86%	110.000.000	74,86%	110.000.000	81,06%	110.000.000	81,06%	490.638.600
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	100	56.800.000	100	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	176.800.000
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			%		4.316.120.000		5.350.000.000		5.350.000.000		5.350.000.000		14.350.000.000		34.716.120.000
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Terbinanya IKM Sektor Industri	%	39,00	3.816.120.000	42,00	4.850.000.000	45,00	4.850.000.000	48,00	4.850.000.000	51,00	13.850.000.000	51,00	32.216.120.000
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Dipantau	%	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	1.250.000.000
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	14,00	250.000.000	16,00	250.000.000	17,00	250.000.000	19,00	250.000.000	20,00	250.000.000	20,00	1.250.000.000
SEKRETARIAT DAERAH								76.981.399.320		79.694.524.000		81.591.455.000		85.346.329.000		86.449.148.000		410.062.855.320
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			%		27.555.000		140.025.000		147.028.000		154.380.000		162.105.000		631.093.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan	%	20	16.670.000	20	132.017.000	20	138.618.000	20	145.550.000	20	152.830.000	100	585.685.000
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	0,22	10.885.000	0,22	8.008.000	0,22	8.410.000	0,22	8.830.000	0,22	9.275.000	1,10	45.408.000
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			%		95.249.500		98.232.000		102.845.000		107.688.000		112.775.000		516.789.500
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	100%	92.939.500	100%	92.232.000	100%	96.845.000	100%	101.688.000	100%	106.775.000	100%	490.479.500
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100%	1.310.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	21.310.000
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	5.000.000
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			%		5.000.000		26.385.000		27.705.000		29.100.000		30.555.000		118.745.000
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Trasmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	100%	5.000.000	100%	26.385.000	100%	27.705.000	100%	29.100.000	100%	30.555.000	100%	118.745.000
4	1		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH			%		76.853.594.820		79.429.882.000		81.313.877.000		85.055.161.000		86.143.713.000		408.796.227.820
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	%	100%	51.622.554.320	100%	51.750.000.000	100%	52.100.000.000	100%	53.230.600.000	100%	55.000.000.000	100%	263.703.154.320
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Penataan Administrasi Pemerintahan	%	100%	24.920.600.500	100%	26.691.900.000	100%	28.176.495.000	100%	30.735.310.000	100%	30.000.000.000	100%	140.524.305.500
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	%	100%	310.440.000	100%	987.982.000	100%	1.037.382.000	100%	1.089.251.000	100%	1.143.713.000	100%	4.568.768.000
SEKRETARIAT DEWAN								41.461.754.000		49.406.711.000		52.372.053.000		55.159.258.000		59.025.184.000		257.424.960.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DEWAN															
4	2		SEKRETARIAT DPRD															
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	%	100	40.930.324.000	100	42.250.300.000	100	44.500.000.000	100	46.500.000.000	100	49.500.000.000	100	223.680.624.000
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Perda dan Ranperda Tahun berkenaan	%	tepat waktu (100)	531.430.000	tepat waktu (100)	7.156.411.000	tepat waktu (100)	7.872.053.000	tepat waktu (100)	8.659.258.000	tepat waktu (100)	9.525.184.000	tepat waktu (100)	33.744.336.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								5.705.295.000		6.423.825.000		6.788.151.200		6.952.117.900		7.087.537.000		32.956.926.100
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	1		PERENCANAAN															
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	5.107.320.000	100	5.300.000.000	100	5.400.000.000	100	5.600.000.000	100	5.850.000.000	100	27.257.320.000
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	512.360.000	100	679.000.000	100	746.900.000	100	971.590.000	100	971.590.000	100	3.881.440.000
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia, bidang Infrastruktur dan kewilayan , bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA PD	%	100	85.615.000	100	444.825.000	100	641.251.200	100	380.527.900	100	265.947.000	100	1.818.166.100
BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH								182.460.733.300		220.218.990.000		231.951.717.000		243.958.630.000		258.986.024.000		1.137.576.094.300
5	2		KEUANGAN															
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	19.469.253.200	100	19.500.000.000	100	20.100.000.000	100	20.500.000.000	100	23.000.000.000	100	102.569.253.200
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kuailtas Pengelolaan	Persentase penyerapan dan realisasi belanja daerah	%	95	161.928.034.100	95	196.782.356.000	95	207.428.920.000	95	218.713.558.000	95	230.678.743.000	95	1.015.531.611.100

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				Keuangan Daerah														
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola asset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	93	242.470.000	93	549.470.000	98	604.417.000	98	664.853.000	98	731.339.000	98	2.792.549.000
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	33	820.976.000	50	3.387.164.000	67	3.818.380.000	83	4.080.219.000	90	4.575.942.000	90	16.682.681.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								5.967.623.000		7.076.952.000		7.594.668.000		7.994.205.100		8.383.615.000		37.017.063.100
5	3		KEPEGAWAIAN					5.851.623.000		6.356.842.000		6.802.546.000		7.122.871.100		7.425.148.000		33.559.030.100
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	5.658.283.000	100	5.724.800.000	100	6.107.300.000	100	6.358.100.000	100	6.583.900.000	100	30.432.383.000
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	96	193.340.000	97	632.042.000	98	695.246.000	99	764.771.100	100	841.248.000	100	3.126.647.100
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					116.000.000		720.110.000		792.122.000		871.334.000		958.467.000		3.458.033.000
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	20%	116.000.000	20%	720.110.000	20%	792.122.000	20%	871.334.000	20%	958.467.000	100%	3.458.033.000
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH								1.604.912.000		2.516.980.000		2.575.120.000		2.677.950.000		2.781.730.000		12.156.692.000
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100	1.162.632.000	100	1.250.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	6.612.632.000
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	100	307.770.000	100	861.980.000	100	868.120.000	100	869.950.000	100	871.730.000	100	3.779.550.000
5	5	3	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	100	134.510.000	100	405.000.000	100	407.000.000	100	408.000.000	100	410.000.000	100	1.764.510.000
INSPEKTORAT DAERAH								12.204.578.000		14.002.684.000		14.849.528.000		15.487.007.000		15.831.364.000		72.375.161.000
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
6	1		INSPEKTORAT DAERAH															
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100%	11.342.066.000	100%	11.600.000.000	100%	12.100.000.000	100%	12.600.000.000	100%	12.800.000.000	100%	60.442.066.000
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	100%	573.592.000	100%	1.586.911.000	100%	1.892.968.000	100%	1.987.618.000	100%	2.087.002.000	100%	8.128.091.000
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	score (Level)	3,05	288.920.000	3,10	815.773.000	3,12	856.560.000	3,15	899.389.000	3,20	944.362.000	3,20	3.805.004.000
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1		KECAMATAN BANGLI					10.276.779.500		10.799.253.000		11.234.178.000		11.847.596.000		12.392.355.000		56.550.161.500
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100%	7.769.142.000	100%	7.950.000.000	100%	8.100.000.000	100%	8.400.000.000	100%	8.600.000.000	100	40.819.142.000
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	1.150.000	100%	5.904.000	100%	6.494.000	100%	7.144.000	100%	7.858.000	100	28.550.000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	meningkatnya kapasitas masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100%	2.473.576.000	100%	2.716.026.000	100%	2.987.629.000	100%	3.286.392.000	100%	3.615.031.000	100	15.078.654.000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	meningkatnya penangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	2.100.000	100%	7.095.000	100%	7.804.000	100%	8.584.000	100%	9.443.000	100	35.026.000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	meningkatnya stabilitas keamanan lokal	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	29.311.500	100%	114.269.000	100%	125.696.000	100%	138.266.000	100%	152.092.000	100	559.634.500
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan desa	cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	1.500.000	100%	5.959.000	100%	6.555.000	100%	7.210.000	100%	7.931.000	100	29.155.000
7	1		KECAMATAN KINTAMANI					4.138.568.500		5.656.252.000		5.914.169.000		6.235.585.000		6.569.145.000		28.513.719.500
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100 %	3.904.877.000	100 %	4.552.500.000	100 %	4.700.000.000	100 %	4.900.000.000	100 %	5.100.000.000	100%	23.157.377.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Cakupan pelayanan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100 %	88.540.000	100 %	123.300.000	100 %	135.672.000	100 %	149.239.000	100 %	164.163.000	100%	660.914.000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	meningkatnya kapasitas masyarakat desa dan kelurahan	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100 %	21.155.000	100 %	734.568.000	100 %	808.025.000	100 %	888.827.000	100 %	977.710.000	100%	3.430.285.000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	meningkatnya penangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	%	100 %	18.888.000	100 %	85.286.000	100 %	93.815.000	100 %	103.196.000	100 %	113.516.000	100%	414.701.000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	meningkatnya stabilitas keamanan lokal	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100 %	68.050.000	100 %	74.856.000	100 %	82.341.000	100 %	90.575.000	100 %	99.633.000	100%	415.455.000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan desa	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100 %	37.058.500	100 %	85.742.000	100 %	94.316.000	100 %	103.748.000	100 %	114.123.000	100%	434.987.500
7	1		KECAMATAN SUSUT					3.448.622.000		6.216.965.000		6.827.721.000		7.510.443.000		8.061.578.000		32.065.329.000
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100%	3.423.662.000	100%	4.800.400.000	100%	5.269.500.000	100%	5.796.400.000	100%	6.176.130.000	100%	25.466.092.000
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	5.200.000	100%	33.024.000	100%	36.326.000	100%	39.959.000	100%	43.955.000	100%	158.464.000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	meningkatnya kapasitas masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100%	9.000.000	100%	786.566.000	100%	865.223.000	100%	951.745.000	100%	1.046.920.000	100%	3.659.454.000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	meningkatnya penangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	4.600.000	100%	87.119.000	100%	95.831.000	100%	105.414.000	100%	115.955.000	100%	408.919.000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	meningkatnya stabilitas keamanan lokal	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	5.060.000	100%	451.339.000	100%	496.473.000	100%	546.120.000	100%	600.732.000	100%	2.099.724.000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan desa	cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	1.100.000	100%	58.517.000	100%	64.368.000	100%	70.805.000	100%	77.886.000	100%	272.676.000
7	1		KECAMATAN TEMBUKU					4.646.885.000		4.815.340.000		5.187.160.000		5.435.800.000		6.052.397.000		26.137.582.000
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100%	4.175.885.000	100%	4.250.700.000	100%	4.566.000.000	100%	4.752.600.000	100%	5.300.877.000	100%	23.046.062.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				Pemerintahan Daerah														
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100%	10.000.000	100%	57.480.000	100%	63.200.000	100%	69.480.000	100%	76.480.000	100%	276.640.000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100%	325.000.000	100%	357.520.000	100%	393.280.000	100%	432.600.000	100%	475.840.000	100%	1.984.240.000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	55.000.000	100%	60.520.000	100%	66.600.000	100%	73.240.000	100%	80.560.000	100%	335.920.000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	meningkatkan stabilitas keamanan lokal	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100%	55.000.000	100%	60.520.000	100%	66.600.000	100%	73.240.000	100%	80.560.000	100%	335.920.000
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan desa	cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100%	26.000.000	100%	28.600.000	100%	31.480.000	100%	34.640.000	100%	38.080.000	100%	158.800.000
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.101.484.932		6.570.000.000		21.955.300.000		26.270.000.000		6.875.000.000		67.771.784.932
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	%	100%	3.980.060.000	100%	4.200.000.000	100%	4.240.000.000	100%	4.290.000.000	100%	4.340.000.000	100	21.050.060.000
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	950.500.000	100%	990.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.100.000.000	100	5.090.500.000
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100%	914.514.932	100%	1.000.000.000	100%	16.315.300.000	100%	20.510.000.000	100%	1.000.000.000	100	39.739.814.932
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100%	13.450.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100	123.450.000

KODE			BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI AKHIR PERIODE	
							TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan eekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100%	125.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100	715.000.000
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100%	117.960.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	245.000.000	100	1.052.960.000
TOTAL								1.317.297.555.000		1.401.029.872.000		1.458.642.283.000		1.527.437.366.000		1.610.426.380.000		7.314.833.456.000

Sumber: Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bangli Tahun 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan aspek penting dalam siklus pembangunan daerah. Bab ini menguraikan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target pembangunan Kabupaten Bangli dalam periode 2025-2029.

Setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian strategis pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. IKU merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil melaksanakan program dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Selain IKU, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dievaluasi melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang mencakup ukuran kinerja spesifik dalam berbagai sektor pembangunan. IKD digunakan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah.

Penyusunan IKU dan IKD dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 mempertimbangkan beberapa prinsip utama:

- Keterukuran dan Akuntabilitas – Setiap indikator harus memiliki target yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
- Keselarasan dengan RPJPD dan RPJMN – IKU dan IKD harus mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – Pengukuran kinerja harus mencerminkan peningkatan kualitas layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
- Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan – Indikator yang ditetapkan akan digunakan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi RPJMD setiap tahun, sebagaimana diatur dalam mekanisme pengawasan pembangunan daerah.

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terstruktur, pemerintah Kabupaten Bangli dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bab ini akan menguraikan secara rinci indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target kinerja dalam periode lima tahun ke depan.

Pada **Tabel 4.2** berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, **Tabel 4.3** menggambarkan target Indikator Kinerja Daerah (IKD), **Tabel 4.4** Target Indikator Utama Pembangunan dan **Tabel 4.5** Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 4.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangli Tahun 2025-2030.

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,54	5,50	4,90-5,50	6,38	6,94	7,49	7,50-8,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,51	73,40	74,11	74,81	75,52	76,22	77,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	0,74	0,73	0,72	0,70	0,68	0,60	0,58
4	Gini Rasio	%	0.302	0.301	0.290	0.285	0.280	0.275	0.270
5	Tingkat Kemiskinan	%	5,06	4,43	3,98-4,23	4,02	3,82	3,61	3,20-3,45
6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	77,19	77,19	77,25	77,5	77,95	77,95	77,95
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,6	92.97	93.34	93.71	94.08	94.45	94.92
8	Indeks Kabupaten Layak Anak	PREDIKAT	PRATAMA	550 (PRATAMA)	580 (PRATAMA)	610 (MADYA)	650 (MADYA)	680 (MADYA)	710 (NINDYA)
9	Persentase pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	%	10,1	16,05	32,55	49,27	66,11	83,05	100
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	68,03	72,83	73,01	73,18	73,35	73,52	73,52
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	%	117,37	116	114,2	112,4	110,6	108,8	107
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,85	75.05	75.5	75.95	76.5	76.95	77.5
13	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,33	3,34	3,53	3,63	3,73	3,83	3,93
14	Indeks Infrastruktur Kabupaten	%	75,58	76,57	80,87	81,43	82,01	82,53	83,03
15	Indeks Harmoni Daerah	Indeks	6.50	6,65	6,67	6,70	6,75	6,80	6,85

Sumber : Hasil Pemetaan IKU Kabupaten Bangli

Tabel 4.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,54	5,50	4,90-5,50	6,38	6,94	7,49	7,50-8,00	
2	Gini Rasio	%	0.302	0.301	0.290	0.285	0.280	0.275	0.270	
3	Tingkat Kemiskinan	%	5,06	4,43	3,98-4,23	4,02	3,82	3,61	3,20-3,45	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	0,74	0,73	0,72	0,70	0,68	0,60	0,58	
5	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	32,27	32,97	33,69	34,42	35,16	35,93	36,71	
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,51	73,40	74,11	74,81	75,52	76,22	77,10	
7	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4.50	4,57	4.60	4,64	4,67	4,71	4,72	
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	%	74,23	74,60	74,92	75,23	75,54	75,85	76,16	
9	Harapan lama sekolah	%	12,53	12,59	12,634	12,68	12,72	12,77	12,81	
10	Rata-rata lama sekolah	%	7,58	7,68	7,946	8,21	8,48	8,74	9,01	
11	Angka Partisipasi Sekolah	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
12	Angka Kelulusan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
13	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	%	2.10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
14	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	69,9	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	71,41	
15	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	%	28,5	28,5	26,5	24,5	23,5	21,5	18,5	
16	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	9,82	10.20	10.29	10.38	10.47	10.56	10.65	
17	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	8,34	8.48	8.66	8.83	9.01	9.18	9.36	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18	Kontribusi PDRB Kab. Bangli terhadap Provinsi	%	N/A	2.88	2.94	2.99	3.05	3.10	3.16	
19	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
II	ASPEK DAYA SAING									
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	12,43	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	31,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	13,45	12.00	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	
4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,23	27,31	27,5	27,72	28	28,1	28,2	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
A.	URUSAN PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	99,44 %	99,45 %	99,46 %	99,47 %	99,48 %	99,49 %	99,50 %	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	99,02 %	99,22 %	99,23 %	99,24 %	99,25 %	99,26 %	99,27 %	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Kabupaten Bangli yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
	Literasi	%	72.535	77.13	79.73	81.35	83.95	85.04	87.64	
	Numerasi	%	65,68	68,68	71,68	74,68	77,86	80,68	83,68	
B.	URUSAN KESEHATAN									
1	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio	135,82	100,00	98,50	97,00	95,50	94,00	93,51	
15	Cakupan penemuan kasus TBC (Treatment Coverage)	%	34,4	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	
16	Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment Success Rate)	%	84,17	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,00	
17	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	8.30	8,00	7,70	7,40	7,10	6,80	6,50	
18	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	98,66	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
19	Indeks Pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM)	%	0,57	0,6	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	
20	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	12,9	12,62	11,63	10,87	10,46	9,96	9,96	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	2956	2703	2703	2703	2703	2703	2703	
22	Jumlah kematian ibu	Orang	4	4	4	3	3	3	3	
23	Jumlah kematian balita	Orang	37	42	42	40	40	37	37	
24	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	N/A	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	
25	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97,9	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
26	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	87,42	87,64	87,86	88,08	88,3	88,52	88,74	
27	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	N/A	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
28	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	77	1,40	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
29	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	97,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
30	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	12,8	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
31	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
32	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Indeks	85,73	85,74	85,74	85,75	85,75	85,76	85,76	
33	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	20,4	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
34	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
35	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	64	64,00	64,00	64,00	70,00	70,00	70,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
36	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	N/A	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
37	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	87,1	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00	
38	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
39	Rasio Tenaga Medis (Dokter Umum) terhadap populasi	Rasio	0,68	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
40	Rasio Tenaga Kesehatan (Perawat) terhadap populasi	Rasio	3,55	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
41	Rasio Tenaga Kesehatan (Bidan) terhadap populasi	Rasio	1,37	1	1	1	1	1	1	
42	Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	%	83,33	83,33	75	75	75	75	75	
43	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
44	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	%	70	70,00	75,00	75,00	75,00	80,00	80,00	
45	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	
46	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	%	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	
47	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	90,00	95,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
48	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH									
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1 : 1.312	1 : 1.300	1 : 1.250	1 : 1.200	1 : 1.150	1 : 1.100	1:1.050	
2	Indeks Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	%	83,5	83,67	83,7	83,8	83,9	84	84,1	
C.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	20,41 %	31,96 %	35,90 %	36,36 %	36,99 %	37,51 %	38,07 %	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	90,15 %	94,21 %	95,63 %	96,92 %	98,08 %	99,11 %	100,00 %	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,44 %	97,44 %	97,49 %	97,75 %	98,02 %	98,28 %	98,54 %	
5	Rasio kepatuhan PBG kab/ kota		100	100	100	100	100	100	100	
6	Ketaatan terhadap RTRW	%	99,63 %	99,64	99,65	99,66	99,67	99,68	99,69	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	77,91	78	79	80	81	82	83	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	97,1	75,28	79,82	85,23	86,98	88,36	98,94	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks infrastruktur kabupaten	%	75,58%	76,57%	80,87%	81,43%	82,01%	82,53%	83,03%	
11	Persentase penduduk berakses air minum	%	94,21	94,21%	95,63%	96,92%	98,08%	99,11%	100,00%	
12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	%	82,27	76,57	80,87	81,43	82,01	82,53	83,03	
13	Persentase area kawasan kumuh	%	2,60	0,02750	0,02748	0,02746	0,02744	0,02743	0,02740	
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	97,26	97,55	97,84	98,13	98,42	98,71	99	
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	%	90,15	88,00	88,6	89,20	89,80	90,40	91,00	
D.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	97,13	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	96,3	85,80	83,43	80,95	78,35	75,61	72,73	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	77,34	17,02	18,06	19,29	20,75	22,54	24,78	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Rasio rumah layak huni	%	18,32	17,02	18,06	19,29	20,75	22,54	24,78	
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunia Layak, Terjangkau, dan berkelanjutan (%)	%	47,23	52,82	58,43	65,9	73,78	80,86	88,34	
E.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit		15	15	15	15	15	15	
8	Indeks Risiko Bencana	%	117,37	116	114,2	112,4	110,6	108,8	107	
9	Persentase Cakupan Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana di Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
F.	URUSAN SOSIAL									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase PMKS yang tertangani	%	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	
G.	URUSAN TENAGA KERJA									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	70,09	77,72	80,1	82,01	83,59	84,91	86,04	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta Per Tahun	28,50	29,56	30,48	31,40	32,32	33,24	34,16	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	83,42	83,98	84,54	85,1	85,66	86,22	86,78	
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	98,52	98,77	98,94	99,07	99,18	99,26	99,32	
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	75,37	70,86	71,67	72,49	73,3	74,11	77,29	
7	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	0,64	2,6	3,00	3,41	3,81	4,21	4,65	
8	Persentase pekerja berpendidikan menengah dan tinggi (%)	%	58,01	61,8	62,46	63,12	63,78	64,44	65,35	
9	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	76,49	95,00	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25	
10	Persentase Pekerja Informal	%	63,76	62,56	61,36	60,16	58,96	57,75	56,56	
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	6,38	8,69	13,04	19,56	23,91	32,6	39,13	
H.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	90,91	91	94	97	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio	11,7	11,2	10,7	10,2	9,7	9,2	9	
4	Partisipasi perempuan dalam jabatan strategis di pemerintahan	%	19,5	19,7	20	20,1	20,5	21,1	21,5	
5	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	rasio	2,8	2,78	2,75	2,73	2,7	2,68	2,65	
6	Indeks kabupaten layak anak	PREDIKAT	PRATAMA	550 (PRATAMA)	580 (PRATAMA)	610 (MADYA)	650 (MADYA)	680 (MADYA)	710 (NINDYA)	
7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,241	0,233	0,234	0,225	0,217	0,209	0,201	
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,6	92,97	93,34	93,71	94,08	94,45	94,92	
9	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,24	64,3	64,35	64,4	64,45	64,5	64,55	
I.	URUSAN PANGAN									
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	95,04	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	77,19	77,19	77,25	77,5	77,95	77,95	77,95	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Score	93,01	93,10	93,2	93,3	93,5	93,67	94	
J.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	68,03	72,83	73,01	73,18	73,35	73,52	73,52	
2	Capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	%	96,37	70	69,02	70,02	71,02	72,02	73,02	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan/persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	56,67	71,85	72,05	72,25	72,45	72,65	72,65	
5	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,7	81,19	81,39	81,59	81,79	81,99	81,99	
6	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	41,91	59,07	59,14	59,21	59,28	59,35	59,35	
7	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	%	74,22	74,19	73,90	73,42	72,43	70,44	69,45	
K.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota	%	97,98	99,4	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	41,7	43,5	44,5	46	47,5	48,5	50	
3	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	98,18	99,5	100	100	100	100	100	
4	persentase Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	78,37	90	93	93,05	93,07	93,09	93,11	
5	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%	95,34	87,97	88,03	89	90	90,5	91	
6	Persentase meningkatnya Kepemilikan Akta Cerai	%	50,95	55	59	63	67	71	75	
7	Persentase Meningkatnya Kepemilikan Akta Nikah	%	58,47	61	64	67	70	73	76	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100	100	
L.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase desa mandiri	%	58,82	70,59	75	79,41	83,82	88,24	92,65	
2	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	20,45	21	22	23	24	25	26	
3	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
M.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0-100)	65,2	66,3	67,4	68,4	69,4	70,3	71,2	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,9	64,68	65,97	67,29	68,64	70,01	71,41	
3	Prosentase pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)	%	99,21	15	30	45	60	75	100	
4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	83,2	84	85	86	87	88	90	
5	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	33,3	40,2	44,3	46,7	48	48,9	49,3	
6	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58	57,4	58,9	60	61	62	63	
N.	URUSAN PERHUBUNGAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	%	88,19	88.21	88.23	88.25	88.27	88.29	88.30	
2	V/C Rasio dijalan Kabupaten	%	0.228	0.232	0.237	0.241	0.246	0.250	0.255	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Rasio Konektivitas	Rasio	999 / 148000	999 / 149000	999 / 150000	999 / 151000	999 / 152000	999 / 153000	999 / 154000	
O	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	79	80	81	82	83	84	85	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kebijakan internal terkait manajemen data,Arsitektur SPBE dan pembangunan aplikasi layanan OPD, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal	Tingkat Kematangan	2,71	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,5	
5	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85,75	85,75	85,75	86,50	87,25	88,00	88,75	
6	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	50,60	48.00	50,60	53.20	55.80	58.40	61.00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
P.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	57.83	59.64	71.01	73.11	75.21	77.31	79.41	
2	Persentase Koperasi Aktif	%	68.31	75.39	75.63	75.86	76.08	76.3	76.50	
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	90,11	90,14	90,18	90,22	90,26	90,3	90,35	
4	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	%	5,97	6,17	6,4	6,4	6,64	6,88	7,12	
5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	31,13%	26.05%	26,73%	27,41%	28,08%	28,76%	29,43%	
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,02	98,25	98,26	98,28	98,31	98,36	98,42	
7	Jumlah umkm	Orang	44486	44586	44716	44866	45036	45236	45466	
8	Rasio Kewirausahaan	%	3.65	3.67	3.73	3.79	3.85	3.91	3.96	
Q.	URUSAN PENANAMAN MODAL									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/Kota	%	80,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2	Realiasi Investasi Daerah	Rp.	605.154.19 7.441,00	403.936.836 .947	444.330.520 .641	488.763. 572.705	537.639. 929.976	591.403.922. 974	650.544.315. 271	
3	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Investor	4218	4.302,00	4.388,00	4.476,00	4.566,00	4.657,00	4.750,00	
4	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp.	1.249.943.7 25.672	710.696.871 .878	781.766.559 .066	859.943. 214.972	945.937. 536.469	1.040.531.29 0.116	1.144.584.41 9.128	
5	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	3,06	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
6	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp.	392.021.39 3.459	395.941.607 .393	399.901.023 .467	403.900. 033.702	407.939. 034.039	412.018.424. 379	416.138.608. 623	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi, Perizinan dan Non-Perizinan	Indeks	87,29	86,87	87,14	87,71	88,28	88,85	88,87	
R.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	89,54 %	90,00 %	90,75 %	91,00 %	91,50 %	92,00 %	93,00 %	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	90,05 %	90,75 %	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50 %	93,00 %	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	53	45	52	60	64	70	72	
S.	URUSAN STATISTIK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks pembangunan statistik (IPS)	Indeks	2,16	2,60	2,63	2,70	2,80	3,00	3,20	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,71	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,50	
T.	URUSAN PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	305	305	307	310	312	315	318	
U.	URUSAN KEBUDAYAAN									
1	Tingkat pelestarian cagar budaya	%	91,74	93,11	94,49	95,87	97,25	98,62	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Pelestarian dan Pengembangan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	%	10,1	16,05	32,55	49,27	66,11	83,05	100	
3	Persentase pengelolaan budaya, seni, adat dan tradisi lokal	%	10,1	16,05	32,55	49,27	66,11	83,05	100	
V.	URUSAN PERPUSTAKAAN									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	74,31	74,53	74,75	74,97	75,19	75,41	75,63	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	61,59	61,65	61,71	61,77	61,83	61,89	61,95	
W.	URUSAN KEARSIPAN									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	76,24	76,83	77,50	78,21	79,00	79,88	80,87	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintah daerah	%	60,95	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	70,00	
	URUSAN PILIHAN									
A.	URUSAN PARIWISATA									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	16,2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	1,21	3,70	3,60	3,50	1,60	1,60	3,20	
3	Tingkat Hunian Akomodasi di Kabupaten/Kota	%	21,46	21,59	22,02	22,46	22,91	23,34	23,8	
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	Orang	437,961	550.000	570.000	590.000	600.000	610.000	630.000	
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan domestik	Orang	1.181.637	1.375.000	1.425.000	1.475.00 0	1.500.00 0	1.525.000	1.575.000	
6	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah	%		2,5	3,75	5,00	6,25	7,5	8,75	
B.	URUSAN PERTANIAN									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6.113	6,419	6.740	7,077	7,431	7,803	8,193	
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	4,09	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3	4,35	
D.	URUSAN PERDAGANGAN									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	80 %	80,60%	81,25%	81,80%	82,40%	82,85%	83.330%	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	67,63%	68.13%	68.63%	69.13%	69.63%	70.13%	70.63%	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	92,54 %	92.56%	92.58%	92.60%	92.62%	92.65%	92.66%	
4	Ekspor Bersih Perdagangan	%	150 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
E.	URUSAN PERINDUSTRIAN									
1	Tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	24,26 %	24,40 %	24,60 %	24,80 %	25,00 %	25,20 %	25,40 %	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%		4,00 %	8,00 %	12,00 %	16,00 %	20,00 %	24,00 %	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Nomor Izin Berusaha (NIB) Industri Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
F.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	4.912,15	4.912,14	4.924,43	4.936,74	4.949,08	4.950,32	4.951,56	
A.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	URUSAN SEKRETARIAT DEWAN									
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Dok	6	6	6	6	6	6	6	
B.										
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
1	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase transmigrasi yang terfasilitasi pemerintah daerah berdasarkan kuota	%		100	100	100	100	100	100	
3	NILAI AKIP	nilai	61,28	62.20	63,25	64.30	65,35	66.40	67.50	
4	Nilai LPPD	nilai	3.4611	3,4611	3,4611	3,4611	3,4611	4,1771	4,1771	
5	Nilai SPM Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kerja sama daerah yang ditinjau lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	98.90	98.90	98.90	98.90	99.00	99.00	99.00	
8	Indek Tata Kelola Pengadaan	Nilai	86,99	87.5	88	88.3	88.7	89	90	
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,85	75,05	75,5	75,95	76,5	76,95	77,5	
10	Indeks Pelayanan Publik	Nilai		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai		74,69	75,39	76,09	76,79	77,49	78,19	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85,40	85,42	85,45	85,47	85,49	85,52	85,54	
A.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	83,94	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
B.	URUSAN KEUANGAN									
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,58	16,08	15,58	15,08	14,58	14,08	13,58	
2	Rasio PAD	%	16,75	17,55	18,35	19,15	19,95	20,75	21,55	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	72,87	70,03	67,18	64,34	61,49	58,65	55,80	
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	9,06	8,56	8,06	7,56	7,06	6,56	6,06	
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	16,67	15,28	13,88	12,49	11,09	9,70	8,30	
6	Assets Management	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
7	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	0,98	0,93	0,88	0,83	0,78	0,73	0,68	
8	Rasio Penerimaan Daerah terhadap APBD	%		1,96	2,06	2,16	2,27	2,37	2,47	
C.	URUSAN KEPEGAWAIAN									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	53,88%	55,11%	56,34%	57,57%	58,80%	60,03%	61,26%	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	15,25%	16,50%	17,75%	19,00%	20,25%	21,50%	22,75%	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	50,10%	51,35%	52,60%	53,85%	55,10%	56,35%	57,60%	
4	Indeks Profesionalisme ASN	score	75,35 (Sedang)	76,33	77,31	78,29	79,27	80,25	81,23	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
D.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	60,03	69,38	70,01	71, 12	72,5	73,1	75	
E.	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Indeks Inovasi Daerah	%	63,33	64,33	65,34	66,35	67,36	68,37	69,38	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,33	3,34	3,53	3,63	3,73	3,83	3,93	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	67,97	68,97	69,24	70,25	71,26	72,27	73,28	
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan IID	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
F.	URUSAN PENGAWASAN									
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	score (Level)	3,221 (Level 3)	3,270 (Level 3)	3,300 (Level 3)	3,320 (Level 3)	3,350 (Level 3)	3,380 (Level 3)	3,400 (Level 3)	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	score (Level)	3,03 (Level 3)	3,04 (Level 3)	3,05 (Level 3)	3,10 (Level 3)	3,12 (Level 3)	3,15 (Level 3)	3,20 (Level 3)	
3	Tingkat pengendalian intern pemerintah	%	96,46	95,00	96,00	96,00	97,00	97,00	97,00	
4	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD/MCP)	%	95,78	90,00	92,00	93,00	93,00	94,00	94,00	
5	Indeks Integritas Daerah	%	79,00	82,92	82,93	82,94	82,95	82,96	82,97	
A.	UNSUR KEWILAYAHAN									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	KECAMATAN									
1.	Survey Kepuasan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Bangli	%	87,06	87,24	87,50	87,70	88,00	88,20	88,50	
2.	Survey Kepuasan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Kintamani	%		87,24	87,50	87,70	88,00	88,20	88,50	
3.	Survey Kepuasan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Susut	%		87,24	87,50	87,70	88,00	88,20	88,50	
4.	Survey Kepuasan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Tembuku	%	82,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
A.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Presentase fasilitasi penanganan kerawanan /konflik sosial	%	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase pemilih pemula yang terdidik politik	%	50 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	
3	Prosentase penanganan konflik ormas	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Prosentase penurunan kasus narkoba	%	0,06 %	10,00 %	11,10 %	12,50 %	14,20 %	16,60 %	20,00 %	
5	Indeks Kewaspadaan Daerah	%	72,41	72,43	72,50	72,57	72,70	72,77	72,8	
6	Indeks Harmoni Daerah	Indeks	6.50	6,65	6,67	6,70	6,75	6,80	6,85	

Tabel 4.4.

Penetapan Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pendidikan Dasar	%	99,16	99,25	99,35	99,45	99,55	99,75	100	
2	Pendidikan kesetaraan	%	0,84	0,75	0,65	0,55	0,45	0,25	0	
3	Pendidikan Anak usia Dini	%	99,44	99,45	99,46	99,47	99,48	99,49	99,5	
4	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	97,44	97,49	97,54	97,59	97,65	97,7	97,75	
17	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
23	Pelayanan Penyelamatan dan	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	evakuasi Korban Kebakaran									
24	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
26	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
27	Rehabilitas Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB 5

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD disusun sebagai bentuk pengejawantahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangli.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan seluruh proses pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta merupakan pengejawantahan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah terpilih dalam menyelenggarakan pembangunan daerah secara sistematis, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

RPJMD ini mengusung visi pembangunan:

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Bangli: BANGLI JENGAH – pesaJE NGAYaH”

yang menekankan pentingnya keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan seluruh Krama Bangli.

Secara substansi, RPJMD ini merumuskan:

- Penjabaran program dan kegiatan prioritas perangkat daerah sesuai urusan dan kewenangan,
- Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah sebagai alat ukur capaian pembangunan,
- Strategi dan arah kebijakan dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah.

Untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, pelaksanaan dokumen ini harus berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta menjamin integrasi dan sinergi antar dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra Perangkat Daerah, RKPD tahunan, RPJPD, dan dokumen sektoral lainnya.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan secara berkala melalui mekanisme:

- Evaluasi tahunan (melalui Laporan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah),
- Evaluasi tengah periode pada tahun ketiga pelaksanaan, dan
- Evaluasi akhir periode sebagai dasar penyusunan RPJPD maupun RPJMD selanjutnya.

Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, serta memanfaatkan sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik dan satu data pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan kebijakan perbaikan, realokasi program/kegiatan, dan strategi akselerasi pencapaian sasaran.

Dengan komitmen politik yang kuat, sinergi antar perangkat daerah, serta dukungan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan RPJMD ini dapat mewujudkan transformasi pembangunan Kabupaten Bangli menuju daerah yang mandiri, berdaya saing, dan harmonis dalam kerangka Bali Era Baru.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Bangli dalam periode 2025-2029 dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta memastikan kelestarian adat, budaya, dan lingkungan yang menjadi ciri khas Bangli. Kesuksesan implementasi RPJMD ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak, sehingga pembangunan dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Bangli.


BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA